



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

TAHUN

2024

   ditjenperkeretaapian

 @perkeretaapian

 djka.kemenhub.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi. Laporan Kinerja disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta implementasi Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan evaluasi dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mewujudkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Selain itu, diharapkan perencanaan kinerja yang telah disusun mendapatkan *feedback* guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembinaan administrasi dan dukungan manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM
NIP 196507031991032001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagai simpul perumusan kebijakan perkeretaapian serta pelayanan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Mengacu Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), telah dilakukan evaluasi pencapaian target dan diperoleh capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian rata-rata sebesar 101,22% dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Yang Telah Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
2	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian	%	108,89	108,89	100,00
3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian	%	70,00	76,62	109,46
4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	74,00	74,07	100,09
5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,00	105,36	105,36

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
6	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	83,00	82,95	99,94
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3	3	100,00
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,00	92,57	92,57
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	89,00	93,02	104,52
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,71	100,27

Pada Tahun 2024, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp189.805.041.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp171.332.931.103,00 atau sebesar 90,27%. Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan pendukung dengan realisasi fisik/output dengan progres 100% (sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu) sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024, juga diperoleh efisiensi sesuai perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 7,01%, untuk itu Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi tingkat efisiensi anggaran belanja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR LAMPIRAN	12
BAB 1 PENDAHULUAN.....	13
1.1 LATAR BELAKANG	13
1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	14
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	15
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA.....	15
1.5 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	17
1.5.1 POTENSI DAN ISU STRATEGIS	17
1.5.2 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	19
1.6 SISTEMATIKA LAPORAN.....	21
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024.....	23
2.1.1 TUJUAN	23
2.1.2 SASARAN	23
2.1.3 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	25
2.1.4 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	33
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	33
2.2.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	36
2.2.2 ALOKASI ANGGARAN	37
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	39
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	43
3.2.1 TERMANFAATKANNYA KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERKERETAAPIAN	43
3.2.2 TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	53
3.2.3 TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL.....	63
3.2.4 SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL.....	70

3.2.5	DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	80
3.2.6	TERWUJUDNYA <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN <i>CLEAN GOVERNMENT</i> DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	86
3.3	ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA	134
3.4	CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA	138
3.5	REALISASI ANGGARAN	140
BAB 4	PENUTUP	145
4.1	TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA.....	145
4.2	KESIMPULAN	152
4.3	REKOMENDASI.....	154
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja.....	16
Tabel 1-2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	16
Tabel 1-3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 2-1	Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ...	25
Tabel 2-2	Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023.....	27
Tabel 2-3	Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	28
Tabel 2-4	Perubahan/Revisi Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	34
Tabel 2-5	Target Kinerja Tahun 2024	36
Tabel 2-6	Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2024.....	37
Tabel 3-1	Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	40
Tabel 3-2	Rekomendasi Kebijakan terkait Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti Periode 2020-2024	44
Tabel 3-3	Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2024	45
Tabel 3-4	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 untuk Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	46
Tabel 3-5	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024....	48
Tabel 3-6	Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perkeretaapian yang telah Ditetapkan Tahun 2020 s.d 2024	53
Tabel 3-7	Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024.....	57
Tabel 3-8	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian.....	58

Tabel 3-9	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	59
Tabel 3-10	Rancangan Peraturan/Legislati Bidang Perkeretaapian yang masih Berproses.....	60
Tabel 3-11	Legislasi/Peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Terbit Pada Tahun 2024.....	61
Tabel 3-12	Jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Keahlian/ Kompetensi Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024	64
Tabel 3-13	Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian Tahun 2024.....	65
Tabel 3-14	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian.....	66
Tabel 3-15	Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	67
Tabel 3-16	Kegiatan TIK Tahun 2024	71
Tabel 3-17	Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2024.....	73
Tabel 3-18	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian	74
Tabel 3-19	Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020-2024...	75
Tabel 3-20	Inventarisasi Sistem TIK/Aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2024	78
Tabel 3-21	Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	82
Tabel 3-22	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 untuk Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	83
Tabel 3-23	Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024..	84
Tabel 3-24	Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	88
Tabel 3-25	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 untuk Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	90
Tabel 3-26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	91

Tabel 3-27	Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024	88
Tabel 3-28	Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024	95
Tabel 3-29	Tingkat Maturitas SPIP	98
Tabel 3-30	Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024	99
Tabel 3-31	Hasil Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024.....	100
Tabel 3-32	Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	100
Tabel 3-33	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 untuk Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	101
Tabel 3-34	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	102
Tabel 3-35	Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 ...	107
Tabel 3-36	Capaian Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024.....	109
Tabel 3-37	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 untuk Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak	110
Tabel 3-38	Target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	111
Tabel 3-39	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024	114
Tabel 3-40	Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	117
Tabel 3-41	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 untuk Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	118
Tabel 3-42	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	119
Tabel 3-43	Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Aplikasi SMART Antar Unit Eselon I Tahun 2024	123
Tabel 3-44	Realisasi Anggaran Unit Kerja/Kementerian/Lembaga Lainnya Tahun 2024	125
Tabel 3-45	Realisasi Anggaran Per-Unit Eselon I Tahun 2024	126
Tabel 3-46	Uraian Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Triwulan IV Tahun 2024	129
Tabel 3-47	Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	130

Tabel 3-48	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	131
Tabel 3-49	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	132
Tabel 3-50	Analisis Efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	135
Tabel 3-51	Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	136
Tabel 3-52	Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja	141
Tabel 3-53	Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Output/Kegiatan.....	141
Tabel 3-54	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	143
Tabel 4-1	Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pelaporan Kinerja Sebelumnya.....	145
Tabel 4-2	Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian .	15
Gambar 1-2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/Kepangkatan dan Pendidikan	17
Gambar 3-1	Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2024	46
Gambar 3-2	Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d 2024	47
Gambar 3-3	Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	48
Gambar 3-4	Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024.....	57
Gambar 3-5	Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024	58
Gambar 3-6	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	59
Gambar 3-7	Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2024	65
Gambar 3-8	Perbandingan Realisasi dan Target Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2020 s.d 2024	66
Gambar 3-9	Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	67
Gambar 3-10	Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2024.....	73
Gambar 3-11	Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024	74
Gambar 3-12	Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024..	75
Gambar 3-13	Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	82

Gambar 3-14	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 untuk Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	83
Gambar 3-15	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	84
Gambar 3-16	Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	88
Gambar 3-17	Perbandingan Realisasi dan Target Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024.....	90
Gambar 3-18	Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	91
Gambar 3-19	Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	101
Gambar 3-20	Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024	102
Gambar 3-21	Perbandingan Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	103
Gambar 3-22	Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNPB Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	109
Gambar 3-23	Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 s.d 2024.....	110
Gambar 3-24	Perbandingan Target dan Realisasi PNPB Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	112
Gambar 3-25	Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	117
Gambar 3-26	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 untuk Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	118
Gambar 3-27	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	119
Gambar 3-28	Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	130
Gambar 3-29	Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024.....	131
Gambar 3-30	Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	132

Gambar 3-31	Unit Kerja Peringkat II Terbaik sesuai hasil SAKIP Tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	138
Gambar 3-32	Penyerahan Piagam Penghargaan berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024.....	138
Gambar 3-33	Penghargaan Unit Kerja Dengan Capaian Kinerja Terbaik Triwulan III Tahun 2024 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.....	139
Gambar 3-34	Realisasi Anggaran Tahun 2024 Per Jenis Belanja	142
Gambar 3-35	Realisasi Anggaran Tahun 2024 Per Output Kegiatan	142

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Rencana Kinerja Tahunan 2024
Lampiran II.	Perjanjian Kinerja (Revisi Terakhir) Tahun 2024
Lampiran III.	Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun 2024
Lampiran IV.	Monitoring Rencana Aksi
Lampiran V.	Data Dukung Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja
Lampiran VI.	Dokumentasi dan Laporan Pembahasan Laporan Kinerja

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih (*Clean Governance*) dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Direktorat Jenderal Perkeretaapian diberikan tanggung jawab untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan transportasi perkeretaapian kepada masyarakat guna memenuhi aspek konektivitas, keselamatan dan pelayanan yang memadai dengan dilengkapi oleh aspek pertanggungjawaban (*accountability*) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh Pemberi Mandat (atasan langsung) atas kinerja yang ditargetkan, serta memberikan informasi kinerja secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja yang disusun secara periodik sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang memuat gambaran pencapaian kinerja secara transparan dan dikaitkan dengan upaya – upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan dalam kerangka pemenuhan tujuan dan sasaran unit kerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 selanjutnya dijadikan sebagai tolak ukur evaluasi kinerja guna pencapaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mandat yang diberikan.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian; dan
4. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan struktur organisasi yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum serta Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum serta dibantu dengan kelompok fungsional tertentu.



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 adalah sebanyak 114 orang, dengan uraian sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

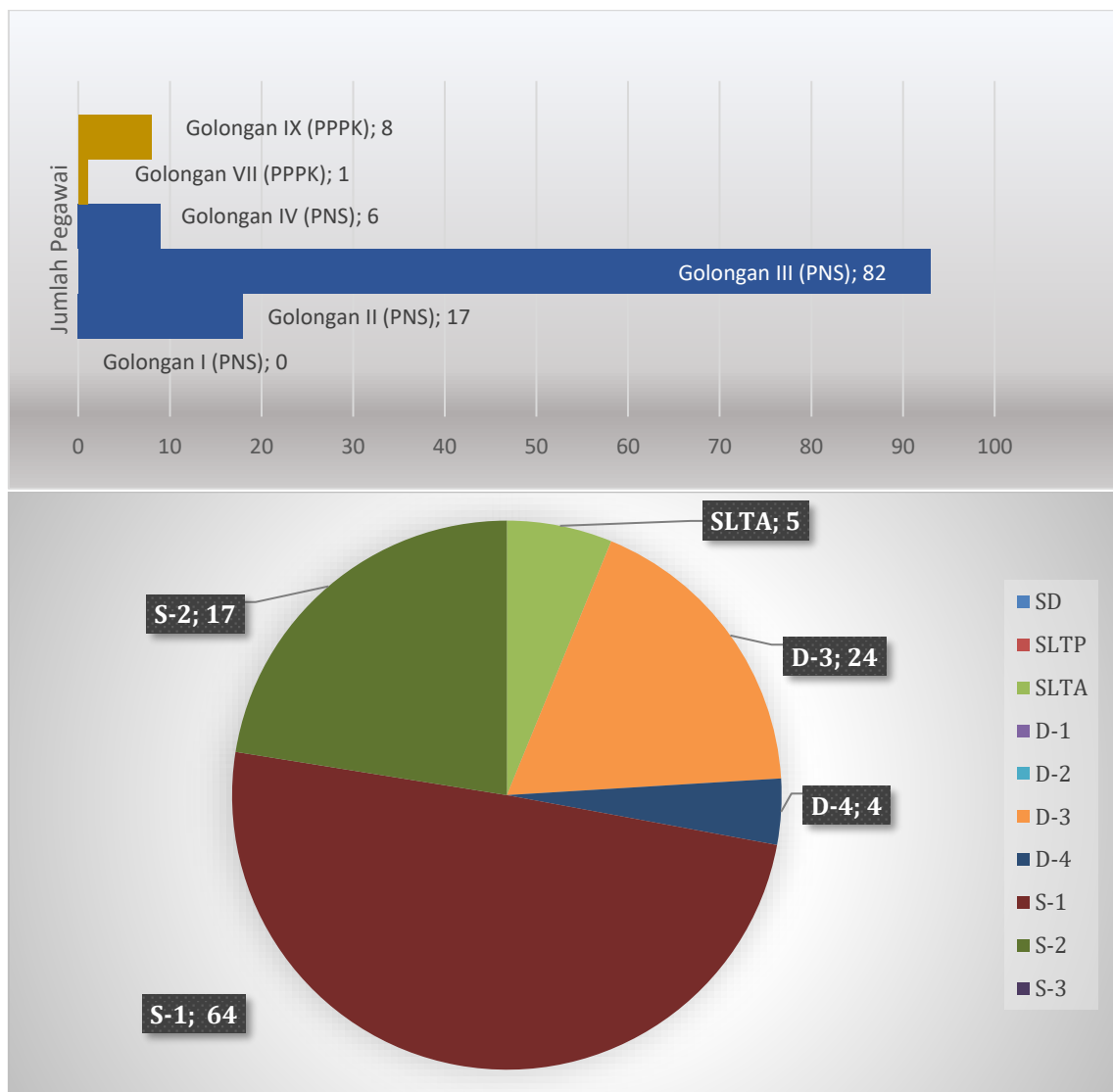
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Bagian Perencanaan	26
2	Bagian Keuangan	30
3	Bagian Hukum	23
4	Bagian Kepegawaian dan Umum	35
Jumlah		114

Tabel 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

No	Golongan / Kepangkatan	Jumlah Pegawai
1	PNS Golongan I	0
2	PNS Golongan II	17
3	PNS Golongan III	82
4	PNS Golongan IV	6
5	PPPK Golongan VIII	1
6	PPPK Golongan IX	8
Jumlah		114

Tabel 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	0
2	SLTP	0
3	SLTA	5
4	D-1	0
5	D-2	0
6	D-3	24
7	D-4	4
8	S-1	64
9	S-2	17
10	S-3	0
Jumlah		114



Gambar 1-2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/Kepangkatan dan Pendidikan

1.5 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1.5.1 POTENSI DAN ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perbaikan organisasi di masa mendatang. Pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:

1. **Aspek perencanaan**, yaitu integrasi rencana strategis, penganggaran/program dan pengukuran kinerja dalam sistem perencanaan transportasi perkeretaapian dengan mempertimbangkan *outcome* dan *impact* kegiatan serta *cascading* indikator kinerja yang selaras pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. **Aspek organisasi, tata laksana dan sumber daya manusia**, yaitu penataan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi pengembangan Badan Pelayanan Umum (BLU) dan perkuatan fungsi Balai (Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan serta Balai Pengelola Kereta Api). Selain itu, juga sedang dilaksanakan penyesuaian organisasi mengacu Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Isu kebutuhan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga menjadi sangat penting untuk menjalankan fungsi sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian. Optimalisasi Pegawai dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) serta pemenuhan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) bidang perkeretaapian (penguji, inspektur, asesor, lainnya) juga menjadi salah satu upaya yang perlu dioptimalkan.
3. **Aspek keuangan** yaitu peningkatan monitoring dan evaluasi untuk percepatan pelaksanaan anggaran termasuk pertanggungjawaban anggaran yang transparan dan akuntabel. Kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir terhadap APBN guna menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 perlu diterapkan dengan lebih baik dan hati-hati agar tidak mengganggu pencapaian kinerja unit kerja serta dukungan terhadap agenda prioritas nasional (Asta Cita). Selain itu, aspek penerimaan negara melalui PNBP juga sangat perlu menjadi hal prioritas dimana pada beberapa tahun terakhir tidak memenuhi target kinerja.

4. **Aspek Barang Milik Negara**, yaitu inventaris dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dibutuhkan dengan tata kelola yang baik sebagai bentuk akuntabilitas serta upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. **Aspek perundang-undangan dan legalitas hukum**, yaitu percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan diantaranya terkait peningkatan kinerja keselamatan dan pelayanan perkeretaapian, peninjauan Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan pemenuhan NSPK diantaranya mendukung penggunaan teknologi baru serta kemudahan investasi dan perizinan di bidang perkeretaapian.
6. **Aspek Pengendalian Intern**, yaitu peningkatan penerapan manajemen risiko berdasarkan KM 69 Tahun 2023 serta Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, sangat diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran unit kerja dan dukungan terhadap agenda prioritas nasional.
7. **Aspek transformasi digital dan pengelolaan pelayanan penunjang** yaitu tuntutan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) termasuk penggunaan AI/IoT secara maksimal dalam mendukung peningkatan layanan pemerintah yang efektif dan efisien diantaranya layanan perizinan serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian sebagai regulator yang didukung pengelolaan data dan informasi yang handal.

1.5.2 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Keberhasilan kinerja unit kerja sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis baik secara internal maupun eksternal. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang perlu menjadi perhatian oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian antara lain:

1. Keterbatasan pendanaan pembangunan perkeretaapian melalui APBN sehingga diperlukan sumber pendanaan alternatif diantaranya melalui investasi swasta serta mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
2. Keterbatasan SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara kuantitas dan kualitas yang memenuhi standar kompetensi teknis sebagai regulator perkeretaapian termasuk untuk Unit Pelaksana Teknis/Balai dan Satuan Pelayanan dalam pelaksanaan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan perkeretaapian;
3. Regulasi bidang perkeretaapian memerlukan penyempurnaan termasuk peninjauan Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta penyiapan NSPK terkait penerapan teknologi perkeretaapian yang baru serta dukungan kemudahan investasi sektor transportasi perkeretaapian;
4. Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan aset untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk yang bersumber dari pengoperasian prasarana milik negara (*Track Access Charge/TAC*);
5. Belum optimalnya pengendalian intern dan pengelolaan risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam kegiatan pembangunan perkeretaapian termasuk kebutuhan peningkatan integritas pegawai serta pencapaian Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
6. Kebutuhan pengembangan kelembagaan dalam penyelenggaraan perkeretaapian diantaranya pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana (BUPP) perkeretaapian milik negara guna meningkatkan layanan perkeretaapian serta implementasi multioperator
7. Gangguan keamanan siber untuk layanan regulator perkeretaapian berbasis teknologi informasi masih marak terjadi, termasuk kendala pengelolaan data bidang perkeretaapian yang belum valid/*update* dan terintegrasi.

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja. Capaian kinerja (*performance results*) diperbandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) termasuk membandingkan dengan tahun sebelumnya serta target pada dokumen Rencana Strategis. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya kegiatan yang mendukung kinerja (*performance gap*) guna perbaikan terhadap kinerja serta pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta memperhatikan rekomendasi dari Kementerian PANRB dan APIP terkait pelaporan kinerja. Adapun sistematika Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dan gambaran singkat mengenai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi.

2. BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Memuat ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja Tahun 2024.

3. BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat pengukuran dan analisis capaian kinerja unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk realisasi anggaran. Setiap sasaran dan indikator kinerja unit kerja dilakukan analisis capaian kinerja

dengan perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2024, perbandingan target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta target pada jangka menengah (Renstra), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta upaya peningkatan kinerja termasuk *benchmark* kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, capaian keberhasilan lainnya serta informasi pelaksanaan anggaran Tahun 2024.

4. BAB 4 PENUTUP

Memuat tindak lanjut rekomendasi pada laporan kinerja sebelumnya (termasuk upaya perubahan budaya kinerja) serta ringkasan mencakup kesimpulan umum atas pencapaian kinerja dan rekomendasi yang perlu dilakukan unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada periode berikutnya untuk peningkatan kinerja.

5. LAMPIRAN

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), komitmen rekomendasi peningkatan kinerja, monitoring rencana aksi, uraian data dukung capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan serta dokumentasi dan laporan pembahasan kinerja di internal unit kerja.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

2.1.1 TUJUAN

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan berdasarkan Visi dan Misi Presiden periode 2020-2024 serta melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai Misi sebagai berikut:

1. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif;
2. Mewujudkan birokrasi yang *Good Governance* dan *Clean Government*;
3. Mewujudkan SDM regulator yang kompeten dan profesional;
4. Merumuskan regulasi perkeretaapian yang responsif dan berkelanjutan;

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, ditetapkan tujuan yang lebih terarah yaitu:

1. Penyediaan rekomendasi kebijakan yang mendukung konektivitas;
2. Pengelolaan birokrasi yang *agile*, efektif, dan efisien;
3. Peningkatan kualitas SDM perkeretaapian yang berkelanjutan;
4. Perumusan regulasi yang adaptif dengan perkembangan.

2.1.2 SASARAN

Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020 - 2024 termasuk *cascading*

sasaran program, ditetapkan sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

1. Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian;
2. Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
3. Tersedianya SDM perkeretaapian yang berkompeten dan profesional;
4. Sistem informasi dan teknologi yang andal;
5. Dukungan publik terhadap penyelenggaraan perkeretaapian;
6. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditempuh strategi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan mendukung pengembangan konektivitas perkeretaapian melalui pelaksanaan kegiatan survey/studi kebijakan/masterplan/pedoman teknis pembinaan dan peningkatan perkeretaapian;
2. Melaksanakan penyusunan legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM perkeretaapian yang berkompeten dan profesional yang memiliki sertifikat keahlian tertentu;
4. Melaksanakan pengembangan/pengelolaan sistem informasi berbasis IT dalam rangka mendukung fungsi regulator bidang perkeretaapian;
5. Melaksanakan publikasi penyelenggaraan perkeretaapian dalam rangka membangun dan mempertahankan sebuah reputasi citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat;
6. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, RKT, RKA, Perjanjian Kinerja) serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan (LKIP);

7. Melaksanakan monitoring pelaksanaan anggaran termasuk anggaran dengan optimalisasi dan efisiensi penyerapan anggaran;
8. Melaksanakan monitoring perolehan PNBP bidang perkeretaapian;
9. Melaksanakan implementasi pengendalian intern termasuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
10. Melaksanakan kegiatan layanan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perkeretaapian, layanan internal dan layanan perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

2.1.3 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2-1 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja				
				2020	2022	2022	2023	2024
Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	a.	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan perkeretaapian	Dokumen	-	4	5	5	6
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	b.	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	20	40	60	80	100
Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	c.	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	%	25	35	45	55	65
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	d.	Persentase pemenuhan rencana induk TIK bidang perkeretaapian	%	35	50	65	80	100

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja				
				2020	2022	2022	2023	2024
Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e.	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100
Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	f.	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	85	86	87	88	90
	g.	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level	3	3	3	3	4
	h.	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	727 Milyar	841 Milyar	925 Milyar	1.018 Milyar	1.120 Milyar
	i.	Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	91	93	95	97	97
	j.	Persentase pemenuhan fasilitas dan layanan perkantoran	%	100	100	100	100	100

Pada Tahun 2023, telah dilaksanakan reviu terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tindak lanjut rekomendasi Kementerian PANRB dengan tetap mengacu *cascading* sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Reviu terhadap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Mengacu pada hal tersebut, diperoleh indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

**Tabel 2-2 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Berdasarkan KP-DJKA 10 Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan
Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	a.	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	b.	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%
Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	c.	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	%
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	d.	Persentase pemenuhan rencana induk TIK bidang perkeretaapian	%
Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e.	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	%
Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	f.	Indeks RB Ditjen Perkeretaapian	Indeks
	g.	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai
	h.	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level
	i.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian	%
	j.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%
	k.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai

Indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut:

Tabel 2-3 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Merupakan parameter untuk mengukur pemanfaatan/tindak lanjut dari penyusunan rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang ditindaklanjuti/dilegalkan Tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun pada periode Rencana Strategis 2020-2024. $\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sudah Ditindaklanjuti/Dilegalkan Pada Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Disusun pada Periode Renstra 2020-2024}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program konektivitas	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase pencapaian target legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan legislasi berupa rancangan dan peraturan perundangan di bidang perkeretaapian dalam periode Rencana Strategis 2020-2024	Jumlah capaian legislasi periode Tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah target legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	Merupakan parameter untuk mengukur kondisi SDM/ASN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian mendukung fungsi regulator penyelenggaraan	Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	perkeretaapian	$\frac{\text{Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu}}{\text{Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu}} \times 100\%$	tersedia		
Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan Sistem Informasi dan Teknologi yang ada di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Rencana Induk	Jumlah ketersediaan sistem TIK dalam rangka mendukung fungsi regulator bidang perkeretaapian dibandingkan dengan jumlah rencana sistem TIK mengacu pada Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian. $\frac{\text{Jumlah Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Rencana Sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK Kemenhub Bidang Perkeretaapian}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase Pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur pemenuhan informasi publik kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan perkeretaapian	Jumlah pemberitaan bidang perkeretaapian pada media cetak, elektronik, online dan media sosial yang mempublikasikan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian dalam bentuk siaran pers dan konten media sosial pada tahun berjalan dibandingkan target pelaksanaan publikasi periode setahun (365 media sosial, 50 siaran pers/liputan).	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
		$\text{Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Publikasi Ditjen Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Publikasi Ditjen Perkeretaapian Periode Setahun}} \times 100\%$			
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP (Nilai skala 1-100)	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal Kemenhub serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Setditjen mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Merupakan Nilai Tingkat/Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP/BPKP (Level 1-5)	Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal Kemenhub serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Setditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
				mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	
Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian (Rupiah) sesuai target tahunan	Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan rumusan tertentu dan nilainya diperoleh pada <i>Dashboard Aplikasi SMART</i> Unit Kerja (skala 0-100%)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian Output Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard Aplikasi SMART</i> Unit Eselon I. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik; • 80% - 90%: Kategori Baik; • 60% - 80%: Kategori Cukup; • 50% - 60%: Kategori Kurang; • Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala <i>likert</i> 1-5) diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

2.1.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan program yaitu Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran unit kerja serta melaksanakan strategi dengan tolak ukur indikator kinerja kegiatan. Secara rinci uraian program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

1. Program Infrastruktur Konektivitas:
 - a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian;
 - b. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.
2. Program Dukungan Manajemen:
 - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian;
 - b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian;
 - c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian;
 - d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian;
 - e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Setiap instansi pemerintah senantiasa memantau dan mengendalikan pencapaian sasaran dan kinerja unit kerja pada perencanaan kinerja melalui evaluasi dan pelaporan capaian realisasi kinerja secara berkala serta menilai keberhasilan unit kerja. Pada Tahun 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan dua kali revisi Perjanjian Kinerja (perencanaan kinerja) dikarenakan perubahan kebijakan, strategi dan alokasi anggaran Tahun 2024. Berikut uraian perubahan/revisi target kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Tabel 2-4 Perubahan/Revisi Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Realisasi					Target Renstra	Target PK 2024	Target Revisi I PK 2024	Target Revisi II PK 2024	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024					
IKK1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas yang telah Ditindaklanjuti	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	• Target tidak berubah. • Pada Tahun 2024 terdiri dari 3 kegiatan pendukung yang dilaksanakan (2 Kajian Rekomendasi Kebijakan dan 1 Kajian Kemanfaatan) dimana 2 diantaranya ditargetkan penetapan pada akhir Tahun 2024 sehingga rekomendasi kebijakan secara kumulatif Tahun 2020-2024 sebanyak 12 rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti melalui Kepdirjen Perkeretaapian. Untuk kajian Rencana Strategis masih menunggu penetapan RPJMN dan Renstra Kemenhub terlebih dahulu pada Tahun 2025.
IKK2 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian)	%	31,11	48,89	62,22	97,78	108,89	100,00	100,00	106,00	108,89	• Target berubah (bertambah). • Target ditambahkan menyesuaikan capaian IKK dengan jumlah kumulatif legislasi Tahun 2020-2024 sebanyak 49 peraturan (108,89%) sedangkan target kumulatif yang tertera pada Renstra sebanyak 45 peraturan (100%).
IKK3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian	%	29,19	55,05	39,64	55,79	76,62	65,00	65,00	65,00	70,00	• Target berubah (bertambah). • Target ditambahkan menyesuaikan capaian IKK dengan jumlah SDM Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat keahlian teknis/manajerial (termasuk fungsional tertentu) dan juga mempertimbangkan perubahan jmlah pegawai.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Realisasi					Target Renstra	Target PK 2024	Target Revisi I PK 2024	Target Revisi II PK 2024	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024					
IKK4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	37,04	37,04	59,26	70,37	74,07	100,00	77,00	74,00	74,00	• Target berubah (penyesuaian dikarenakan kebijakan AA/blokir/penghematan anggaran). • Mengacu <i>Roadmap</i> Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dengan penambahan 1 sistem TIK pada Tahun 2024.
IKK5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	104,95	108,93	127,10	100,64	105,36	100,00	100,00	100,00	100,00	• Target tidak berubah. • Kegiatan pendukung mencakup Pameran, Penerbitan <i>News Letter</i>, Publikasi Program Perkeretaapian melalui Media Sosial dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik.
IKK6 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	81,92	82,15	80,42	82,70	82,95	90,00	83,00	83,00	83,00	• Target tidak berubah. • Target mempertimbangkan realisasi periode sebelumnya.
IKK7 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level	3	3	3	3	3	4	3	3	3	• Target tidak berubah. • Penilaian berdasarkan penjaminan kualitas oleh APIP dan evaluasi oleh BPKP di tingkat Kementerian Perhubungan.
IKK8 Persentase Realisasi PNBPN Bidang Perkeretaapian	%	-	54,18	31,52	63,79	92,57	-	100,00	100,00	100,00	• Target tidak berubah. • Target PNBPN Ditjen Perkeretaapian sesuai DIPA Tahun 2024 sebesar Rp1,26 triliun.
IKK9 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	-	98,03	98,54	88,81	93,02	97,00	89,00	89,00	89,00	• Target tidak berubah. • Target kinerja mempertimbangkan realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021.
IKK10 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran	Nilai	-	-	-	3,69	3,71	-	3,70	3,70	3,70	• Target tidak berubah. • Hasil survey kepuasan kepada pegawai yang memperoleh layanan internal terkait kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga/umum.

2.2.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 (revisi terakhir), ditetapkan target kinerja Tahun 2024 per periode triwulan sebagai berikut:

Tabel 2-5 Target Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
SP1 Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan perkeretaapian	IK 1 Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas	%	100,00	85,00	85,00	85,00	100,00
SP 2 Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian	IK 2 Persentase pencapaian target legislasi (jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	108,89	102	106	106	108,89
SP 3 Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK 3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/ keahlian tertentu	%	70,00	56,00	56,00	70,00	70,00
SP 4 Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	IK 4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	74,00	70,00	70,00	70,00	74,00
SP 5 Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	IK 5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100,00	25,00	61,00	83,00	100,00
SP 6 Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	IK 6 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83,00	-	-	83,00	83,00
	IK 7 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3	-	-	-	3
	IK 8 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak	%	100,00	23,00	25,00	89,00	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
	(PNBP) Bidang Perkeretaapian						
	IK 9 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	89,00	53,14	57,22	71,00	89,00
	IK 10 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

2.2.2 ALOKASI ANGGARAN

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (revisi terakhir), alokasi anggaran unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar Rp189.805.041.000,00. Adapun rincian anggaran per indikator kinerja termasuk uraian perubahan pada Perjanjian Kinerja awal dan revisi sebagai berikut:

Tabel 2-6 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja		Anggaran berdasarkan PK Awal (Rp)	Anggaran berdasarkan PK Revisi I (Rp)	Anggaran berdasarkan PK Revisi II (Rp)
Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas	a.	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	7.166.891.000	7.166.891.000	7.166.891.000
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	b.	Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian	6.255.254.000	6.255.254.000	6.255.254.000
Tersedianya SDM perkeretaapian yang	c.	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian	11.117.036.000	11.458.202.000	12.553.979.000

Sasaran	Indikator Kinerja		Anggaran berdasarkan PK Awal (Rp)	Anggaran berdasarkan PK Revisi I (Rp)	Anggaran berdasarkan PK Revisi II (Rp)
Kompeten dan profesional		yang memiliki sertifikat kompetensi/ keahlian tertentu			
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	d.	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.923.109.000	3.527.636.000	3.527.636.000
Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e.	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	11.503.441.000	11.503.441.000	11.503.441.000
Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	f.	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	16.552.633.000	16.353.633.000	12.693.539.000
	g.	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	4.481.979.000	5.204.452.000	6.035.406.000
	h.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	6.270.812.000	6.070.812.000	6.330.812.000
	i.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	7.959.221.000	8.397.221.000	7.984.221.000
	j.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	115.474.665.000	114.767.499.000	115.753.862.000
Jumlah			190.705.041.000	190.705.041.000	189.805.041.000

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menginventarisir, menganalisis dan menggunakan informasi dalam menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi/organisasi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan serta pencapaian sasaran guna mempermudah interpretasi pencapaian kinerja.

Hasil pengukuran kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja selanjutnya disebut pencapaian kinerja. Pencapaian kinerja selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan tujuan dan sasaran dalam kerangka pemenuhan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja setiap uraian sasaran ditunjukkan melalui pencapaian setiap indikator kinerja pada sasaran tersebut yang berorientasi *outcome*.

Pengukuran terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu dengan pencapaian hasil/*output* suatu kegiatan dalam kurun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Pengukuran terhadap pencapaian kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan antara variabel *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Variabel *input* dan *output* tersebut dapat berupa anggaran, sumber daya manusia maupun kegiatan itu sendiri.

Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui capaian kinerja

antara rencana dan realisasi suatu *output* dan *outcome* kegiatan digunakan formula sebagai berikut:

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left[\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Adapun metode pengukuran/perhitungan indikator kinerja kegiatan unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3-1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang ditindaklanjuti/dilegalkan tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun pada periode Rencana Strategis 2020-2024. $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sudah Ditindaklanjuti/Dilegalkan Pada Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Disusun pada Periode Renstra 2020-2024}} \times 100\%$
2	Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	Jumlah capaian legislasi periode tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah target legislasi bidang perkeretaapian tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
			$\frac{\text{Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}}} \times 100\%$
3	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	%	Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian. $\frac{\text{Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu}}{\frac{\text{Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu}}{\text{Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian}}} \times 100\%$
4	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	Jumlah ketersediaan sistem TIK dalam rangka mendukung fungsi regulator bidang perkeretaapian dibandingkan dengan jumlah rencana sistem TIK mengacu pada Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian. $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Rencana Sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK Kemenhub Bidang Perkeretaapian}}} \times 100\%$
5	Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	Jumlah pemberitaan bidang perkeretaapian pada media cetak, elektronik, online dan media sosial yang mempublikasikan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian dalam bentuk siaran pers dan konten media sosial pada tahun berjalan dibandingkan target pelaksanaan publikasi periode setahun (365 media sosial, 50 siaran pers/liputan). $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Publikasi Ditjen Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Publikasi Ditjen Perkeretaapian Periode Setahun}}} \times 100\%$
6	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian.

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
7	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan evaluasi penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP.
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian	%	Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
9	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian Output Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Eselon I. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik; • >80% - 90%: Kategori Baik; • >60% - 80%: Kategori Cukup; • 50% - 60%: Kategori Kurang; • Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang.
10	Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala 1-5) yang diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan ketatausahaan, SDM dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja termasuk analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi/upaya peningkatan kinerja yang perlu dilakukan;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis unit kerja;
4. *Benchmarking* kinerja dengan tingkat nasional/internasional pada beberapa indikator kinerja;
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM);
6. Capaian lainnya.

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran dituangkan melalui program/kegiatan yang saling berkaitan dan bersinergi membentuk *output* dan *outcome* dalam mencapai suatu sasaran tertentu. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan 6 (enam) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berikut pengukuran kinerja untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja kegiatan:

3.2.1 TERMANFAATKANNYA KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERKERETAAPIAN

Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian Yang Telah Ditindaklanjuti

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100% dengan pemenuhan sebanyak 14 peraturan/legislasi pada Tahun 2020-2024. Realisasi sampai dengan Tahun 2024, telah dilaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian sebanyak 14 dokumen yang telah ditindaklanjuti melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3-2 Rekomendasi Kebijakan terkait Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti Periode 2020-2024

No	Nama Dokumen	Tahun Pelaksanaan	Penetapan
1	Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024	2020	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor PR.005/SK.89/DJKA/2020 tanggal 18 Desember 2020
2.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau	2021	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor HK.209/3/24/DJKA/2021 tanggal 27 Desember 2021
3.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian mendukung Kereta Api Bandara Internasional Soekarno-Hatta	2021	
4.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Bandara Internasional Kualanamu	2021	
5.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pengoperasian Kereta Api Perintis Lintas Kertapati-Indralaya	2021	
6.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian kereta api Bandara Internasional Minangkabau	2022	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP.DJKA 60 Tahun 2022 Tanggal 31 Oktober 2022
7.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian mendukung kereta api Bandara Internasional Soekarno Hatta	2022	
8.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Bandara Internasional Kualanamu	2022	
9.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pengoperasian Kereta Api Perintis Lintas Kertapati-Indralaya	2022	
10.	Kajian Dukungan Pengembangan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang	2023	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 185 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023
11.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Kereta Api Bandara Internasional Adi Sumarmo	2023	
12.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Kereta Api Bandara Internasional Yogyakarta	2023	
13.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur Kereta Api Yogyakarta-Solo-Palur	2024	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 234 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024
14.	Rekomendasi Lokasi Kantor Balai Pengujian Perkeretaapian	2024	

Pada Tahun 2020-2023, rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian telah disusun dan ditetapkan sebanyak 12 rekomendasi, sedangkan pada Tahun 2024 sebanyak 2 rekomendasi telah selesai disusun tepat waktu serta telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Oleh karena itu, realisasi rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti dari Tahun 2020-2024 sebanyak 14 rekomendasi kebijakan dengan capaian sebesar 100,00%. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

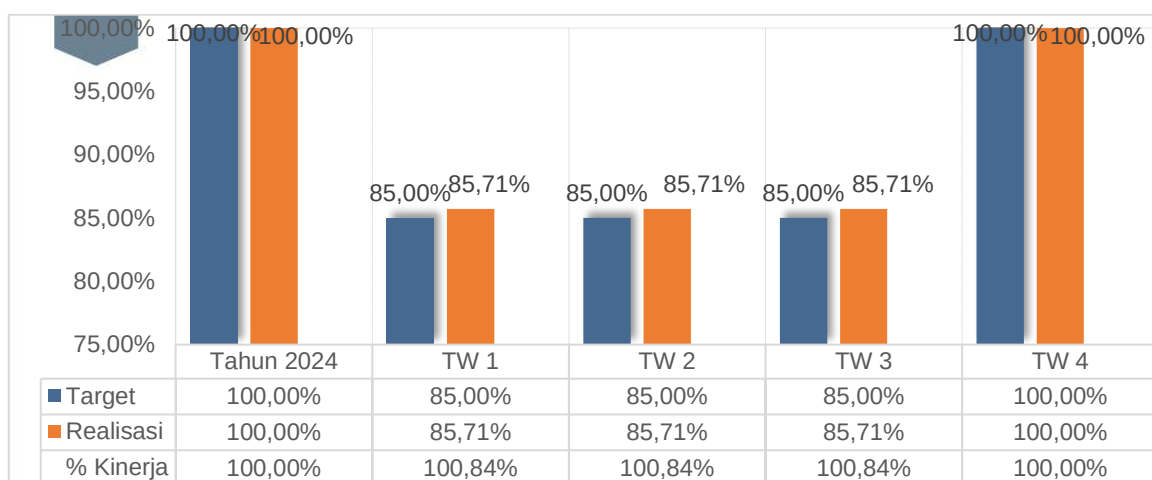
$$\frac{\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti}}{14} = \frac{14}{14} \times 100\% = 100,00\%$$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti pada Tahun 2024 sebesar 100,00% dan target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 100,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00%. Secara keseluruhan *trend* pencapaian kinerja indikator setiap triwulan dapat memenuhi kriteria *on the right track* yaitu mencapai kinerja 100,00%. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-3 Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100,00	85,00	85,00	85,00	100,00	85,71	85,71	85,71	100,00	100,84	100,84	100,84	100,00	100,00



Gambar 3-1 Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2024

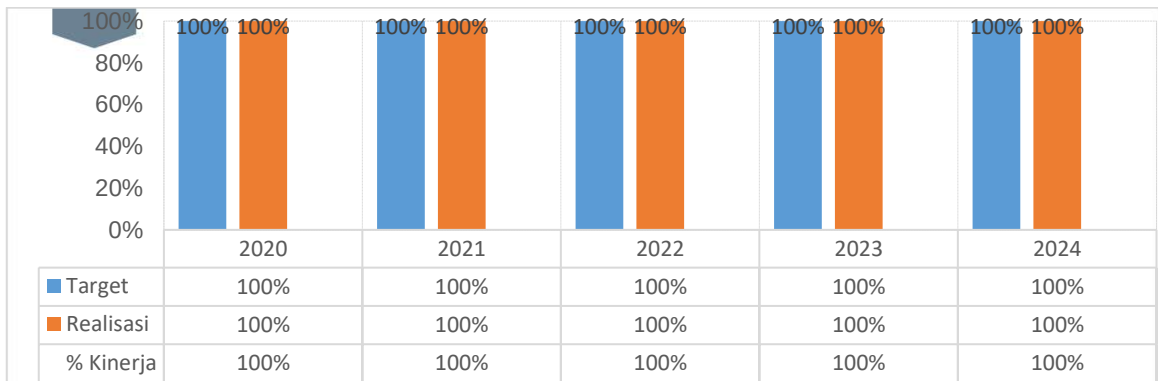
B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang disusun pada Tahun 2020 s.d 2024 telah seluruhnya ditindaklanjuti untuk dimanfaatkan oleh unit kerja terkait dengan pengesahan/penetapan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian baik berupa rencana strategis, studi kelayaan, evaluasi kemanfaatan dan kajian kebijakan lainnya. Secara keseluruhan *trend* pencapaian kinerja indikator ini setiap tahun dapat mencapai 100,00%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja beberapa tahun terakhir dari Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-4 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 (Kinerja 100,00%)	100,00 (Kinerja 100,00%)	100,00 (Kinerja 100,00%)	100,00 (Kinerja 100,00%)	100,00 (Kinerja 100,00%)



**Gambar 3-2 Perbandingan Realisasi dan Target
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas
Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d 2024**

C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024, target indikator kinerja kegiatan masih berupa *output* (jumlah rekomendasi kebijakan) dan dilakukan penyesuaian indikator kinerja untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PANRB terkait Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar IKK yang masih bersifat *output*/kerja diubah menjadi IKK yang bersifat *outcome*/kinerja dengan tetap mengacu *cascading* sasaran program/kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

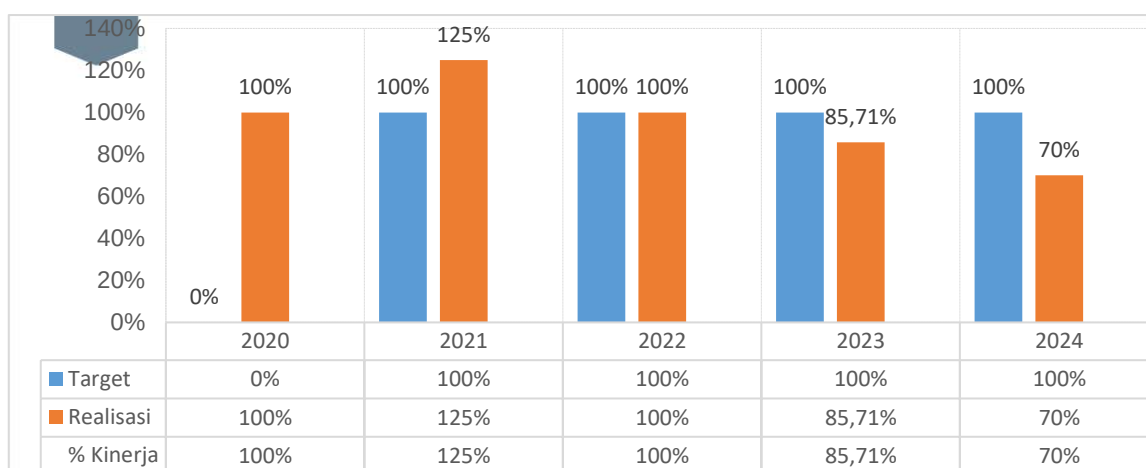
Pada Tahun 2024, realisasi rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi kebijakan atau kumulatif dari Tahun 2020-2024 sebanyak 14 rekomendasi kebijakan dengan pengesahan/penetapan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Apabila dibandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yaitu sebanyak 6 rekomendasi kebijakan pada Tahun 2024 atau kumulatif dari Tahun 2020-2024 sebanyak 20 rekomendasi kebijakan, maka diperoleh kinerja pada Tahun 2024 sebesar 70% (perhitungan kumulatif).

Target Rencana Strategis tidak tercapai diantaranya karena keterbatasan anggaran serta kebijakan *automatic adjustment*/penghematan yang menyebabkan beberapa kegiatan pendukung yang sudah

diprogramkan/dianggarkan tidak dapat dilaksanakan. Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis (konversi dalam bentuk persentase) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-5 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	Target (%)	- (tidak ada target Renstra)	100,00 (target Renstra 4 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 4)	100,00 (target Renstra 5 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 9)	100,00 (target Renstra 5 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 14)	100,00 (target Renstra 6 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 20)
	Realisasi (%)	100,00 (realisasi 1 rekomendasi kebijakan)	125,00 (realisasi Tahun 2021 sebanyak 4 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 2020-2021 sebanyak 5 rekomendasi kebijakan)	100,00 (realisasi Tahun 2022 sebanyak 4 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 2020-2022 sebanyak 9 rekomendasi kebijakan)	85,71 (realisasi Tahun 2023 sebanyak 3 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 2020-2023 sebanyak 12 rekomendasi kebijakan)	70,00 (realisasi Tahun 2024 sebanyak 2 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 2020-2023 sebanyak 14 rekomendasi kebijakan)
	Capaian Kinerja (%)	100,00	125,00	100,00	85,71	70,00



Gambar 3-3 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Tahun 2024, telah diprogramkan beberapa kegiatan pendukung untuk penyusunan rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yaitu:

1. Kajian *Benchmarking* Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian.
2. Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian dan Rencana Pembangunan Perkeretaapian.
3. Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogyakarta - Solo - Palur.
4. Studi Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029.
5. Kajian Rekomendasi Lokasi Kantor Balai Pengujian Perkeretaapian.

Namun pada awal Tahun 2024 terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* (AA)/penghematan dari Kementerian Keuangan dan diusulkan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KU.002/1/9/DJKA/2024 tanggal 25 Januari 2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Penelaahan *Automatic Adjustment* Belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA. 2024. Kebijakan tersebut berdampak pada pembatalan pelaksanaan 2 kegiatan pendukung rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yaitu Kajian *Benchmarking* Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian dan Studi Penyusunan RPM tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian dan Rencana Pembangunan Perkeretaapian.

Untuk itu, kegiatan pendukung yang dapat dilaksanakan pada Tahun 2024 hanya 3 kegiatan yaitu Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogyakarta - Solo – Palur, Studi Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dan Kajian Rekomendasi Lokasi Kantor

Balai Pengujian Perkeretaapian. Khusus untuk kegiatan studi/kajian Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029, penetapan/pengesahannya direncanakan pada Tahun 2025 menunggu penetapan RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 yang dilakukan secara berjenjang.

Selain itu, dalam pencapaian target kinerja telah dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan studi/kajian pendukung setiap tahunnya dan ditindaklanjuti dengan proses penetapan/pengesahan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri tersebut mengamanahkan bahwa dokumen perencanaan (diantaranya studi kelayakan, evaluasi manfaat, lainnya) perlu pengesahan/penetapan oleh Pejabat yang berwenang untuk proses selanjutnya.

Dalam pelaksanaan studi/kajian pendukung tersebut, telah dilakukan pendampingan dan pemantauan pada setiap tahapan mulai dari persiapan/pendahuluan, pengumpulan dan analisa data hingga tahap penyusunan rekomendasi kebijakan, diantaranya meliputi:

1. Penyiapan dokumen pengadaan barang dan jasa;
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Biro LPPBMN sampai dengan kontrak kegiatan;
3. Penetapan Tim Pengarah dan Tim Pendamping yang kompeten melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian;
4. Koordinasi awal dan *kick off meeting* oleh penanggungjawab kegiatan;
5. Survey pendahuluan termasuk pendampingan dari Tim Pendamping;
6. Asistensi/pengarahan dan pembahasan Laporan Pendahuluan;
7. Koordinasi dan pendampingan pelaksanaan pengumpulan data/survey, baik survei primer dan survei sekunder dalam rangka penyusunan Laporan Antara;
8. Asistensi/pengarahan dan pembahasan Laporan Antara;

9. Asistensi/pengarahan dalam rangka persiapan pembahasan konsep Laporan Akhir;
10. Pembahasan/FGD Laporan Akhir yang melibatkan instansi/*stakeholder* baik Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga sektor lain serta Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian terkait;
11. Koordinasi dan pengusulan untuk penetapan/pengesahan hasil studi/kajian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Proses pendampingan dan pemantauan dilaksanakan agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akurat/valid dan tepat sasaran serta terealisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian. Pendampingan dan pemantauan juga dilakukan melalui pembahasan/FGD dan konsultasi dengan Tim Pengarah dan Tim Pendamping yang kompeten serta melibatkan instansi/*stakeholder* baik Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait serta Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian guna sinergisitas dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Hasil pengesahan/penetapan selanjutnya dijadikan acuan dalam rangka pemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan kepada pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf b) serta jenis informasi yang ditetapkan oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan, kajian/studi yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 merupakan jenis informasi publik yang dikecualikan. Namun demikian, guna melakukan optimalisasi hasil pembangunan serta peningkatan pelayanan operasional kereta api, diperlukan penyampaian rangkuman/*summary* hasil kajian kepada *stakeholder* terkait untuk dijadikan acuan/referensi dan ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*)

antara lain pelaksanaan pembahasan studi/kajian pendukung dengan mengikutsertakan *stakeholder* di luar Direktorat Jenderal Perkeretaapian (BUPP/BUPS/Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga lain) serta penyampaian hasil rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* terkait.

E. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian hasil kajian/studi kepada *stakeholder* terkait untuk menjadi acuan/referensi dan ditindaklanjuti.
2. Dokumentasi/arsip secara digital seluruh hasil studi/kajian agar mudah diakses unit kerja internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Direktorat teknis, Balai terkait) guna mempermudah akses dan meningkatkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Persiapan pelaksanaan kegiatan studi/kajian pendukung Tahun 2025 khususnya penyiapan dokumen untuk tahapan pengadaan barang dan jasa dan koordinasi dengan Biro LPPBMN.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja dan optimalisasi hasil kajian/studi mendukung konektivitas perkeretaapian, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

Penyesuaian rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu pada hasil kegiatan pendukung (studi/kajian) yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 serta perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

- a. Antisipasi studi/kajian pendukung yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

- b. Pemanfaatan rencana aksi pada rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan Tahun 2024 guna dijadikan masukan dan pertimbangan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 pada Direktorat teknis dan Balai terkait.

3.2.2 TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), persentase pencapaian legislasi berupa rancangan dan peraturan perundangan bidang perkeretaapian ditargetkan sebesar 108,89% dengan kumulatif pemenuhan sebanyak 49 peraturan/legislasi dari target Renstra sebanyak 45 peraturan/legislasi untuk periode Tahun 2020-2024.

Sampai dengan Tahun 2024, diperoleh realisasi persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian kumulatif sebanyak 49 peraturan/legislasi dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3-6 Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perkeretaapian yang Telah Ditetapkan Tahun 2020 s.d 2024

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
1.	PM 18 Tahun 2020	Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	9 April 2020
2.	PM 21 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik	23 April 2020
3.	PM 22 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis	23 April 2020
4.	PM 25 Tahun 2020	Pengendalian Transportasi Selama Masa mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	23 April 2020
5.	KP.651 Tahun 2020	Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 1790 Tahun 2019 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Pada Grafik Perjalanan Kereta Api 2019	9 Mei 2020

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
6.	PM 41 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	8 Juni 2020
7.	PM 60 Tahun 2020	Pengawasan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi Informasi	18 Agustus 2020
8.	Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 2020	Cipta Kerja (perubahan pasal dan ketentuan di dalam UU 23 Tahun 2007)	5 Oktober 2020
9.	KM 347 Tahun 2020	Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian	28 Desember 2020
10.	KM 348 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik	29 Desember 2020
11.	KM 349 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis	29 Desember 2020
12.	PP 33 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian	2 Februari 2021
13.	PP 5 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2 Februari 2021
14.	PM 12 Tahun 2021	Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	1 Mei 2021
15.	PM 20 Tahun 2021	Perubahan Atas PM. 31 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum	4 Juni 2021
16.	PM 21 Tahun 2021	Perubahan Atas PM. 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	4 Juni 2021
17.	PM 22 Tahun 2021	Perubahan Atas PM. 66 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	4 Juni 2021
18.	PM 38 Tahun 2021	Pengadaan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	7 Juni 2021
19.	Peraturan Presiden Republik Indonesia No 73 Tahun 2021	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	10 Agustus 2021
20.	PM 80 Tahun 2021	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2018 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	30 September 2021
21.	PM 1 Tahun 2022	Perubahan Kedua PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan	11 Januari 2022

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
		Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
22.	PM 7 Tahun 2022	Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi	20 April 2022
23.	PM 16 Tahun 2022	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian	22 Agustus 2022
24.	PM 21 Tahun 2022	Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	16 September 2022
25.	PM 36 Tahun 2022	Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian	2 Desember 2022
26.	PM 18 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
27.	PM 19 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan dan Pengendali Perjalanan Kereta Api	9 Juni 2023
28.	PM 20 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
29.	PM 21 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
30.	PM 22 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
31.	PM 23 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
32.	PM 24 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlindungan Kereta Api	9 Juni 2023
33.	PM 25 Tahun 2023	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	15 Juni 2023
34.	PM 26 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
35.	PM 27 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
36.	PM 28 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
37.	PM 29 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
38.	PM 30 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian	27 Juni 2023

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
39.	PM 31 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
40.	PM 32 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
41.	PM 49 Tahun 2023	Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri	6 November 2023
42.	PM 59 Tahun 2023	Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	29 Desember 2023
43.	Perpres 33 Tahun 2024	Perubahan Ketiga Perpres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	22 Februari 2024
44.	PM 8 Tahun 2024	Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	11 Juni 2024
45.	PM 14 Tahun 2024	Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	25 Juni 2024
46.	PM 16 Tahun 2024	Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	23 Juli 2024
47.	PM 27 Tahun 2024	Persyaratan Kualifikasi dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	27 September 2024
48.	PM 31 Tahun 2024	Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian	29 November 2024
49.	PM 32 Tahun 2024	Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi	9 Desember 2024

Realisasi penyelesaian peraturan/legislasi bidang perkeretaapian pada Tahun 2020-2024 terdiri dari pencapaian Tahun 2020 sebanyak 11 peraturan/legislasi, Tahun 2021 sebanyak 9 peraturan/legislasi, Tahun 2022 sebanyak 5 peraturan/legislasi, Tahun 2023 sebanyak 16 peraturan/legislasi dan Tahun 2024 sebanyak 8 peraturan/legislasi yang ditetapkan sehingga kumulatif yang dicapai sebanyak 49 peraturan/legislasi yang sudah terbit atau ditetapkan. Dengan jumlah realisasi tersebut dibandingkan dengan target Renstra sebanyak 45 peraturan/legislasi untuk

periode Tahun 2020-2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 108,89%.
Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

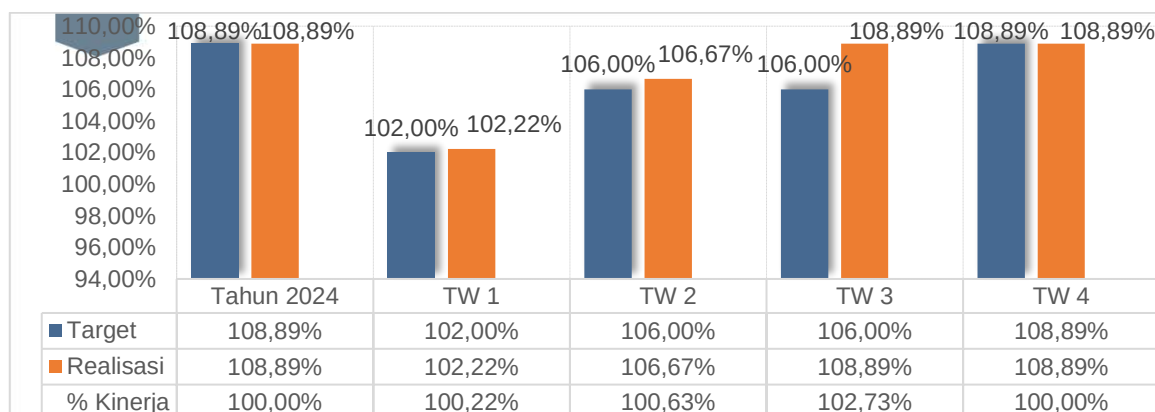
$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian}}{45} = \frac{49}{45} \times 100\% = 108,89\%$$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase pencapaian legislasi bidang perkeretaapian pada Tahun 2024 sebesar 108,89%, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 108,89%, maka diperoleh capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 100,00%. Secara keseluruhan *trend* pencapaian kinerja indikator ini setiap triwulan dapat memenuhi kriteria *on the right track* yaitu mencapai kinerja 100,00%. Realisasi kumulatif sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-7 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan)	%	108,89	102,00	106,00	106,00	108,89	102,22	106,67	108,89	108,89	100,22	100,63	102,73	100,00	100,00



Gambar 3-4 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024

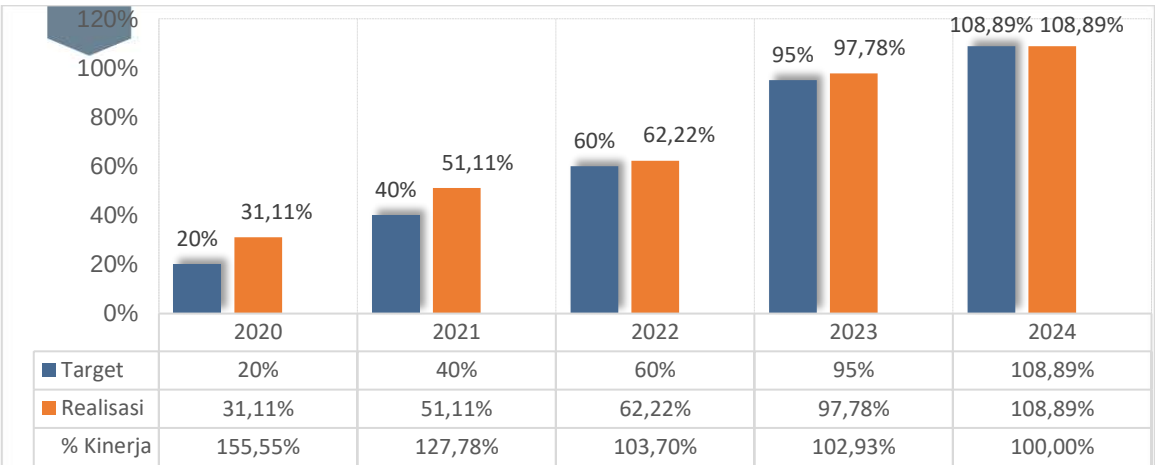
B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Pencapaian target kinerja pada periode Tahun 2020-2024 rata-rata telah melampaui target (kinerja>100%) setiap tahunnya yang mayoritas berupa perubahan/revisi Peraturan Presiden maupun Peraturan/Keputusan Menteri. Secara keseluruhan *trend* pencapaian kinerja indikator ini setiap tahun dapat mencapai 100,00%, bahkan di Tahun 2020-2021 terjadi anomali capaian dengan capaian lebih dari 110% namun telah dilakukan peningkatan target kinerja pada Tahun 2022-2024 agar memenuhi kriteria *on the right track*.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-8 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan)	%	20,00	40,00	60,00	95,00	108,89	31,11 (Tahun 2020 sebanyak 14 peraturan/legislasi, kinerja 155,55%)	51,11 (Kumulatif 2020-2021 sebanyak 23 peraturan/legislasi, kinerja 127,78%)	62,22 (Kumulatif 2020-2022 sebanyak 28 peraturan/legislasi, kinerja 103,70%)	97,78 (Kumulatif 2020-2023 sebanyak 44 peraturan/legislasi, kinerja 102,93%)	108,89 (Kumulatif 2020-2024 sebanyak 49 peraturan/legislasi, kinerja 100%)



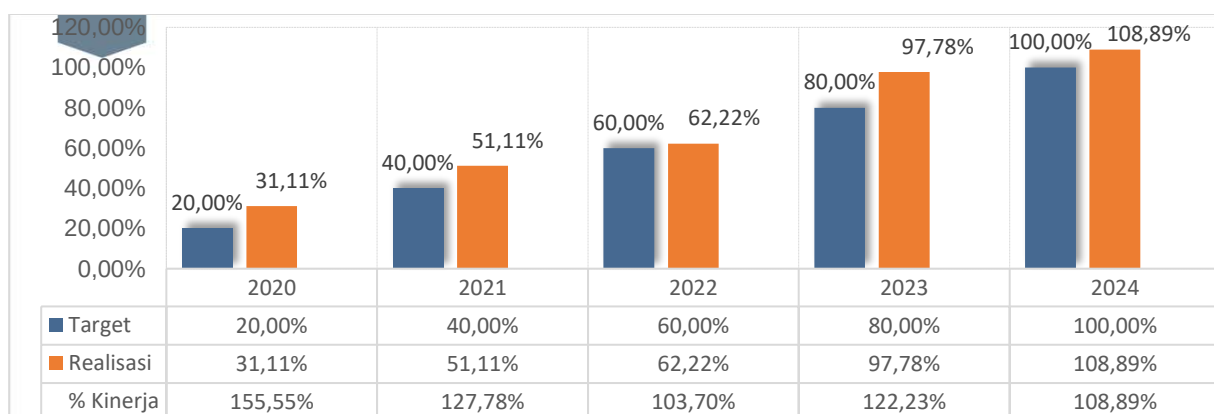
Gambar 3-5 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 108,89% (kumulatif 49 peraturan/legislasi), sedangkan target Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis sebesar 100,00% (45 peraturan/legislasi) sehingga pencapaian kinerja sebesar 108,89%. Secara keseluruhan kinerja dengan perbandingan target pada dokumen Renstra pada Tahun 2020-2024, setiap tahun dapat melampaui target yang ditetapkan (kinerja >100%). Adapun uraian perbandingan capaian kinerja dengan target Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-9 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian	Target (%)	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	Realisasi (%)	31,11	51,11	62,22	97,78	108,89
	Capaian Kinerja (%)	155,55	127,78	103,70	122,23	108,89



Gambar 3-6 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Penyusunan peraturan perundangan bidang perkeretaapian (baru, revisi) dilaksanakan untuk memenuhi amanah Undang-Undang dan Peraturan

Pemerintah serta dalam upaya solusi atas permasalahan dan peningkatan kinerja pembangunan perkeretaapian. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan legislasi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berkoordinasi dan memfasilitasi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam kegiatan penyusunan dan/atau revisi terhadap peraturan/legislasi sesuai kebutuhan.

Penyusunan dilaksanakan secara berjenjang melalui pembahasan secara intensif dengan seluruh pihak terkait (Biro Hukum, Direktorat Teknis, Kemenkumham, Sekretariat Negara, operator, dan lainnya), termasuk dalam pelaksanaan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya. Capaian pada Tahun 2024 didorong dengan selesainya penetapan ketentuan terkait persyaratan, kualifikasi, dan sertifikasi asesor sumber daya manusia perkeretaapian serta pelaksanaan implementasi jabatan fungsional perkeretaapian dengan penerbitan pedoman penyusunan formasi (penguji, asisten penguji, auditor, inpektur).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 7 dan 8), pada Tahun 2024 dilakukan reviu/evaluasi kembali terhadap capaian legislasi dimana ditemukan terdapat 3 (tiga) Peraturan yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundangan yakni Peraturan Direktur Jenderal. Untuk itu, dilakukan evaluasi untuk *update* data capaian legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2020-2024.

Dilaporkan pula progres sampai dengan akhir Tahun 2024, terdapat beberapa rancangan peraturan/legislasi yang masih berproses dan telah dilakukan pembahasan ang diantaranya:

Tabel 3-10 Rancangan Peraturan/Legislati Bidang Perkeretaapian yang Masih Berproses

No	Judul Regulasi	Posisi Saat Ini	PIC
1.	Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase	Masih perlu dilakukan perbaikan substansi oleh Direktorat LLAKA terkait penetapan trase perkeretaapian khusus sesuai arahan Menteri Perhubungan.	Direktorat LLAKA

No	Judul Regulasi	Posisi Saat Ini	PIC
		Rencana pembahasan lanjutan pada 16 Januari 2025	
2.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api	Rencana pembahasan lanjutan antara Setditjen dengan Direktorat LLAKA	Direktorat LLAKA
3.	Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan	Substansi Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 akan diformulasikan ulang oleh Direktorat Keselamatan sebelum dilakukan proses lanjut.	Direktorat Keselamatan
4.	Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif	Rencana pembahasan lanjutan antara Setditjen dengan Direktorat Sarana	Direktorat Sarana

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pada tahapan pembahasan rancangan peraturan perundangan/legislasi sampai dengan harmonisasi dan penetapan legislasi yang mengikutsertakan Direktorat teknis terkait, Badan Kebijakan Transportasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, termasuk *stakeholder* diluar Kementerian Perhubungan seperti Kementerian Koordinator terkait, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, Kementerian BUMN serta BUPP/BUPS/operator perkeretaapian.

E. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) secara nasional maupun di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap capaian kinerja, diperoleh data bahwa pada Tahun 2024 telah terbit sebanyak 34 legislasi berupa Peraturan Menteri Perhubungan di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-11 Legislasi/Peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Terbit Pada Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Jumlah Peraturan
1.	Sekretariat Jenderal	4 Peraturan Menteri Perhubungan
2.	Inspektorat Jenderal	-
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	5 Peraturan Menteri Perhubungan

No	Unit Eselon I	Jumlah Peraturan
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	7 Peraturan Menteri Perhubungan
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	11 Peraturan Menteri Perhubungan
6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	6 Peraturan Menteri Perhubungan
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
8.	Badan Kebijakan Transportasi	-
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	1 Peraturan Menteri Perhubungan

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan unit kerja terbanyak yang melakukan penerbitan legislasi/peraturan dibandingkan unit kerja eselon I lainnya dengan jumlah sebanyak 11 Peraturan, sedangkan untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian berada di peringkat 3 dengan jumlah legislasi/peraturan yang diterbitkan sebanyak 6 Peraturan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian cukup baik pada Tahun 2024. Selain itu, terdapat 3 unit Eselon 1 yang belum berperan dalam penetapan legislasi di tingkat Kementerian Perhubungan pada periode Tahun 2024.

F. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, diperlukan:

1. Percepatan pembahasan dan penyelesaian peraturan/legislasi dengan dukungan kajian akademis yang memadai serta koordinasi intensif dengan Direktorat teknis, khususnya terkait isu strategis/mendesak seperti peninjauan Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, regulasi tentang kereta api cepat, trem otonom, pembentukan BUPP, dan regulasi angkutan barang dengan skema ROLA.
2. Bekerjasama dan koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga lainnya termasuk Badan Kebijakan Transportasi dan akademisi/tenaga ahli hukum untuk membantu percepatan penyelesaian peraturan perundangan bidang perkeretaapian sesuai amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

Penyesuaian kerangka regulasi pada rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu perkembangan isu/kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan.

2. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

Penyiapan anggaran untuk mendukung penyelesaian legislasi/peraturan pada Tahun 2025 termasuk usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 guna mendukung kebutuhan kerangka regulasi pada rancangan Rencana Strategis 2025-2029.

3.2.3 TERSEDIA NYA SDM PERKERETA APIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL

Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), ditargetkan persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian teknis termasuk fungsional tertentu sebesar 70% dari jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada Tahun 2024, jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 1.578 pegawai yang terdiri dari 1.415 PNS dan 163 PPPK. Selanjutnya, diidentifikasi jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian teknis termasuk fungsional tertentu sebanyak 1.209 pegawai. Adapun rincian jenis kompetensi/keahlian teknis dan fungsional tertentu sebagai berikut:

1. ***Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)*** yang meliputi jabatan fungsional tertentu bidang kepegawaian/perencanaan/arsiparis/analisis kebijakan/ lainnya termasuk pegawai hasil penyetaraan dan ASN Tahun 2020-2024 dengan pengangkatan jabatan fungsional tertentu. Selain itu juga

terdapat jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian (inspektur/penguji/auditor/lainnya).

2. **Keahlian/Kompetensi Teknis** yang meliputi assesor, PPNS, PPKA, Ahli K3, Ahli Teknologi Perkeretaapian (GoA 3, Kereta Cepat, kompetensi lainnya).
3. **Keahlian/kompetensi manajerial tertentu** diantaranya berupa kompetensi manajemen risiko yang dilaksanakan beberapa tingkat (*Officer, Analyst, Professional*), ahli KPBU, PPK Tipe C dan kompetensi lainnya.

Tabel 3-12 Jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Keahlian/ Kompetensi Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Setditjen Perkeretaapian	100
2	Direktorat LLAKA	78
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	143
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	99
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	111
6	BTP Medan	76
7	BTP Padang	43
8	BTP Palembang	62
9	BTP Jakarta	80
10	BTP Bandung	66
11	BTP Semarang	67
12	BTP Surabaya	67
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	57
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	74
15	BPKAR Sumatera Selatan	44
16	BPKA Sulawesi Selatan	42
Total		1.209

Berdasarkan uraian jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian teknis dan fungsional/keahlian tertentu sebanyak 1.209 pegawai dengan jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian keseluruhan sebanyak 1.578 pegawai, maka diperoleh realisasi persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian sebesar 76,62%. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

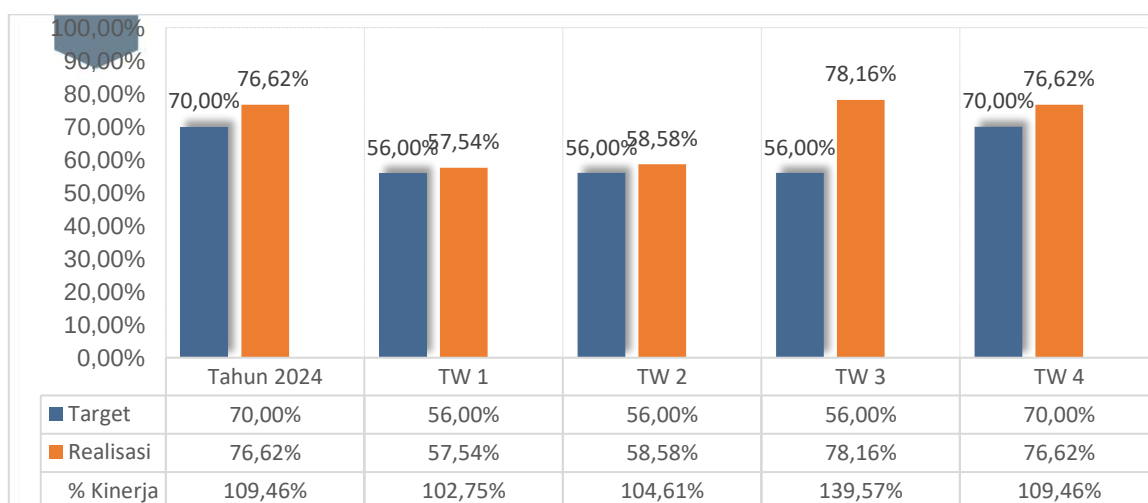
$$\frac{\text{Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian}}{1.578} = \frac{1.209}{1.578} \times 100\% = 76,62\%$$

A. Perbandingan Target Triwulan & Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan target persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian pada Tahun 2024 sebesar 70,00% dan realisasi sebesar 76,62%, maka diperoleh capaian kinerja tahun 2024 sebesar 109,46%. Terdapat penyesuaian target kinerja dengan peningkatan target pada Triwulan IV (revisi target PK) untuk dapat memenuhi kriteria *on the right track*. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-13 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	%	70,00	56,00	56,00	56,00	70,00	57,54	58,58	78,16	76,62	102,75	104,61	139,57	109,46	109,46



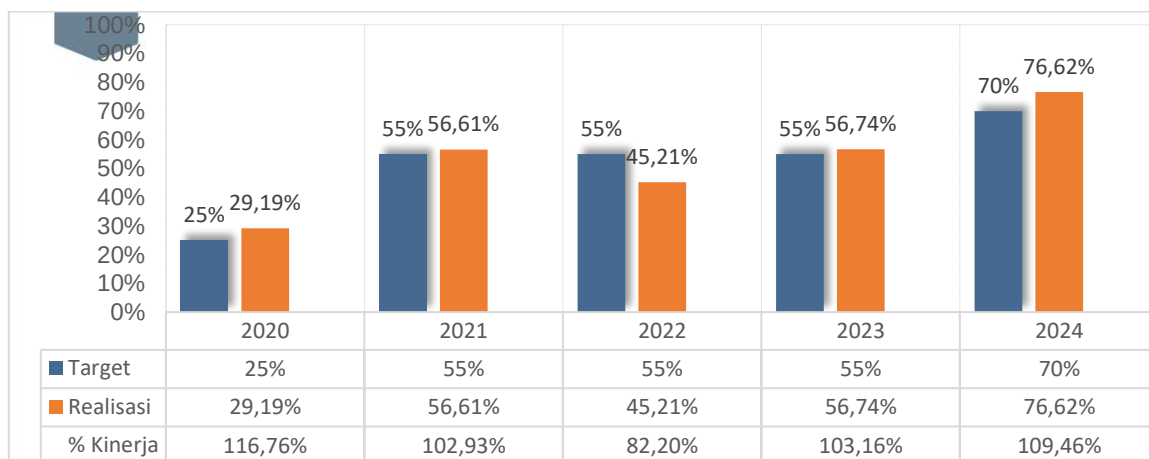
Gambar 3-7 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja dengan target kinerja beberapa tahun terakhir untuk indikator persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian diidentifikasi mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2020 diperoleh sebesar 29,19% dan pada Tahun 2024 mencapai 76,62% serta pencapaian terhadap target keseluruhan di atas 100%. Salah satu faktor pendorong peningkatan persentase tersebut diantaranya dukungan pelaksanaan program pendidikan/pelatihan yang masif dilaksanakan sepanjang Tahun 2024 serta pengangkatan jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian (inspektur/penguji/ auditor/lainnya). Uraian realisasi kinerja dengan target kinerja beberapa tahun terakhir diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-14 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	%	25,00	55,00	55,00	55,00	70,00	29,19 (Kinerja 116,76%)	56,61 (Kinerja 102,9%)	45,21 (Kinerja 82,20%)	56,74 (Kinerja 103,1%)	76,62 (Kinerja 109,4%)



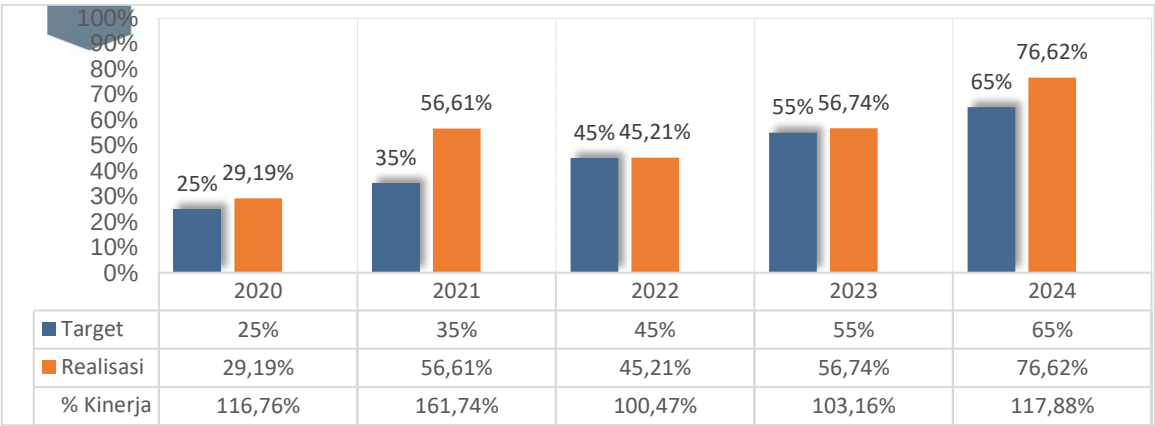
Gambar 3-8 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian Tahun 2020 s.d 2024

C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian Tahun 2024 sebesar 76,62% dari jumlah seluruh ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sedangkan target Tahun 2024 berdasarkan dokumen Renstra sebesar 65% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 117,88%. Secara keseluruhan target kinerja pada Rencana Strategis dapat terpenuhi untuk periode Tahun 2020-2024.

Tabel 3-15 Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	Target (%)	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00
	Realisasi (%)	29,19	56,61	45,21	56,74	76,62
	Capaian Kinerja (%)	116,76	161,74	100,47	103,16	117,88



Gambar 3-9 Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah pelaksanaan program dan mengikutsertakan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pendidikan dan pelatihan secara masif sepanjang Tahun 2024 baik

bidang teknis perkeretaapian maupun bidang manajerial/umum guna mendukung pelaksanaan tugas regulator perkeretaapian. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan tersebut didorong dengan komitmen pimpinan untuk penguatan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku regulator perkeretaapian yang perlu didukung oleh SDM yang kompeten.

Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan juga didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai guna peningkatan SDM tidak hanya dari sisi kuantitas namun juga kualitas yang diukur dengan kemampuan/kompetensi yang dimiliki. Beberapa pelaksanaan program peningkatan kompetensi SDM/pendidikan dan pelatihan/*workshop* yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 antara lain:

1. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
2. Animasi Media Pembelajaran dan Entrepreneur;
3. *Assesment* proyeksi jabatan pengawas dan administrator;
4. Pengadaan Barang dan Jasa Level 1;
5. *Cloud Computing Service*;
6. *Digital Marketing*;
7. Diklat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
8. *Effective Coaching and Mentoring*;
9. *Global Leadership Program*;
10. Jaringan Komputer dan *Junior Web Developer/Coding*;
11. Manajemen Proyek;
12. Penatausahaan BMN;
13. Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
14. Kompetensi PPK Tipe C;
15. Kompetensi manajemen risiko (*QRMO, QRMA, QRMP*);
16. *Sustainable dan Entrepreneurial Leadership Program*.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sangat

membutuhkan dukungan dari lembaga khusus/tersertifikasi termasuk dukungan dari BPSDMP dan Setjen Kementerian Perhubungan (Biro SDM/Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi) serta Kementerian/Lembaga sebagai pembina jabatan fungsional tertentu.

E. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya dengan terus melaksanakan pendidikan dan pelatihan termasuk bimbingan teknis/*workshop* secara berkala baik bidang manajerial/umum dan teknis perkeretaapian kepada ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai kebutuhan kompetensi dan ketersediaan anggaran. Hal lain juga diperlukan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka pemetaan kebutuhan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode mendatang guna mendukung pelaksanaan tugas sebagai regulator secara optimal, efektif dan efisien.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan serta aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja periode berikutnya, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

Penyiapan kerangka kebutuhan SDM perkeretaapian termasuk SDM regulator perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis yang akan ditetapkan pada Tahun 2025.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Antisipasi kegiatan pendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM yang terdampak kebijakan blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan pembiayaan PNB/BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta berperan aktif menyertakan perwakilan pegawai sesuai bidang tugas

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDMP dan Setjen Kementerian Perhubungan (Biro SDM/Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi).

3.2.4 SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL

Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), target persentase pemenuhan Rencana Induk TIK bidang perkeretaapian ditetapkan sebesar 74,00% atau pemenuhan sebanyak 20 sistem TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari rencana 27 sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 222 Tahun 2020) mencakup bidang tugas lalu lintas dan angkutan kereta api, prasarana, sarana, keselamatan dan dukungan manajemen/sekretariat.

Pada Tahun 2024, realisasi pemenuhan Rencana Induk TIK secara kumulatif dari Tahun 2020 s.d Tahun 2024 terdapat 20 sistem TIK yang telah terbangun sesuai bidang tugas termasuk 1 sistem TIK yang baru terbangun pada Tahun 2024 yaitu *database* perlintasan sebidang. Secara rinci 20 sistem TIK yang telah terbangun adalah sebagai berikut:

1. ***Bidang LLAKA*** sebanyak 6 sistem TIK meliputi aplikasi perijinan *online*, aplikasi *streaming* CCTV stasiun, aplikasi posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru, aplikasi motis (angkutan motor gratis), aplikasi *open track* lalu lintas kereta api, data *warehouse* angkutan kereta api.
2. ***Bidang prasarana perkeretaapian*** sebanyak 4 sistem TIK meliputi aplikasi perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA dengan bangunan lain, aplikasi sertifikasi prasarana perkeretaapian, pemetaan program pengelolaan dan pengembangan informasi kelaikan fasilitas operasi, MOP5 (master data jalur KA, jembatan kereta api).

3. **Bidang sarana perkeretaapian** sebanyak 2 sistem TIK yaitu aplikasi sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian dan aplikasi penetapan identitas sarana perkeretaapian.
4. **Bidang keselamatan perkeretaapian** sebanyak 2 sistem TIK yaitu: aplikasi sertifikasi SDM perkeretaapian dan *database* perlintasan sebidang.
5. **Bidang dukungan manajemen/sekretariat** sebanyak 6 sistem TIK yaitu: *Website*, Portal Aplikasi, *database* studi/kajian/perencanaan teknis perkeretaapian, aplikasi *database* Barang Milik Negara (BMN), *Enterprise Service Bus* (ESB) dan aplikasi layanan BLU Balai Pengujian Perkeretaapian.

Pada Tahun 2024, telah dianggarkan beberapa kegiatan TIK oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mendukung pencapaian kinerja indikator pemenuhan Rencana Induk TIK bidang perkeretaapian dimana beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terdampak kebijakan AA/realokasi kegiatan prioritas lainnya. Adapun uraian kegiatan TIK Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3-16 Kegiatan TIK Tahun 2024

Unit Kerja	Nama Kegiatan	Keterangan/Progres
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian <i>Online</i>	Selesai
	<i>Bandwidth</i> dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api	Selesai
	Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang	Selesai
	Manajemen Studio <i>Geodatabase</i> Lanjutan	Terdampak Blokir/AA
Direktorat Sarana Perkeretaapian	Pembaruan Aplikasi ANSYS dalam rangka Pelaksanaan Rancang Bangun Sarana Perkeretaapian	Terdampak Blokir/AA
	Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	Selesai
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Penyusunan <i>Database</i> Perlintasan Secara Digital	Selesai (berprogres UAT dan VA)
	Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Realokasi Anggaran ke Kegiatan Prioritas

Unit Kerja	Nama Kegiatan	Keterangan/Progres
		Lainnya
	Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian	Terdampak Blokir/AA
Setditjen Perkeretaapian	Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Selesai
	Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Selesai
	Reviu Roadmap TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Selesai

Berdasarkan realisasi kumulatif sistem TIK Tahun 2020-2024 sebanyak 20 sistem TIK dari rencana 27 sistem TIK berdasarkan rencana induk TIK bidang perkeretaapian, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 74,07%. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut

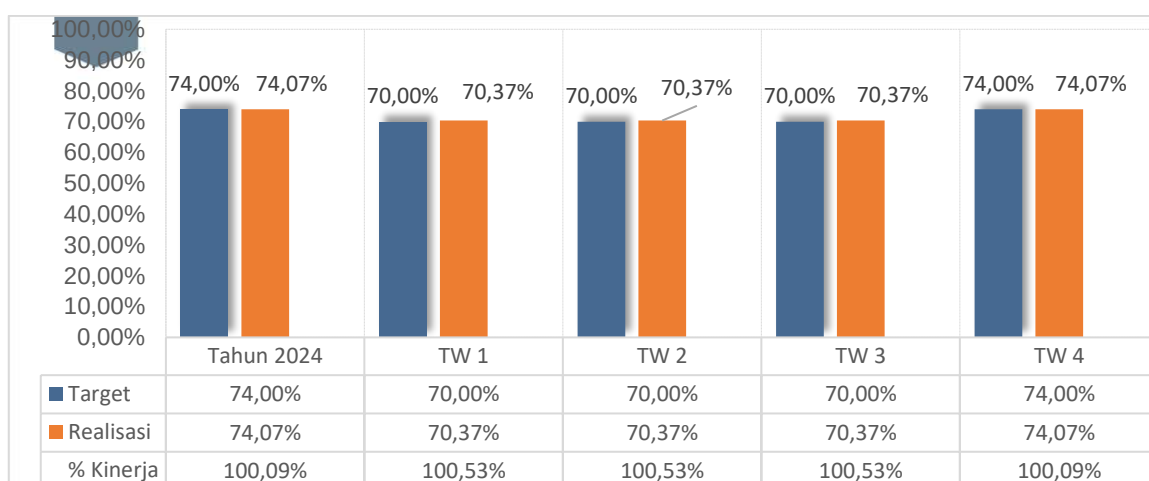
$$\text{Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian} = \frac{20}{27} \times 100\% = 74,07\%$$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan realisasi persentase pemenuhan rencana induk TIK bidang perkeretaapian sebesar 74,07%, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 74,00% maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,09%. Secara keseluruhan *trend* pencapaian kinerja indikator setiap triwulan dapat memenuhi kriteria *on the right track* yaitu mencapai kinerja 100,00%. Rincian target dan realisasi kinerja per triwulan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-17 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan Rencana induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang perkeretaapian	%	74,00	70,00	70,00	70,00	74,00	70,37	70,37	70,37	74,07	100,53	100,53	100,53	100,09	100,09



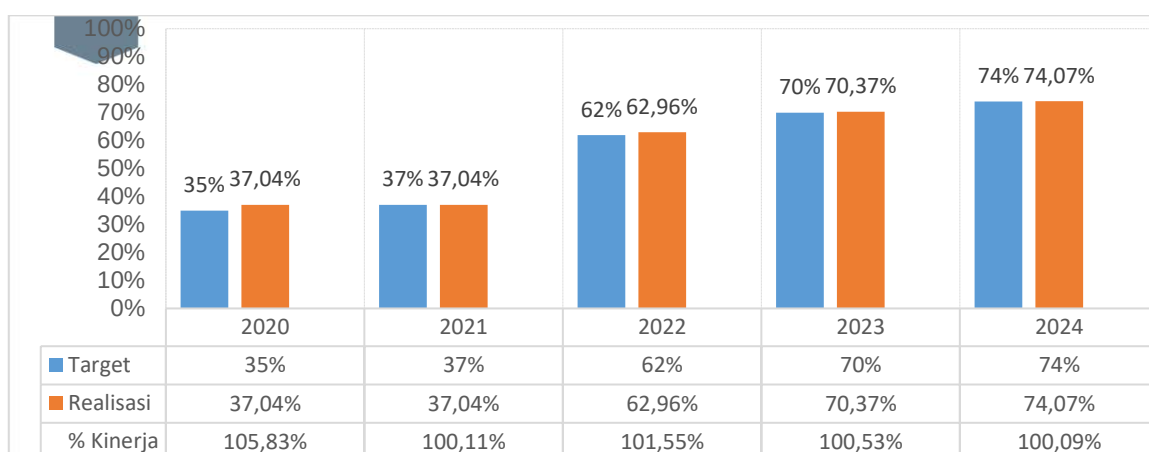
Gambar 3-10 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Secara keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir, target yang ditetapkan telah terpenuhi (kinerja > 100%) dan terdapat peningkatan setiap tahun. Realisasi kegiatan TIK setiap tahunnya mengalami peningkatan guna mendukung pelayanan sehingga lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Perbandingan realisasi kinerja dengan target beberapa tahun terakhir sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3-18 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian	%	35,00	37,00	62,00	70,00	74,00	37,04 (Kinerja 105,83%)	37,04 (Kinerja 100,11%)	62,96 (Kinerja 101,55%)	70,37 (Kinerja 100,53%)	74,07 (Kinerja 100,09%)



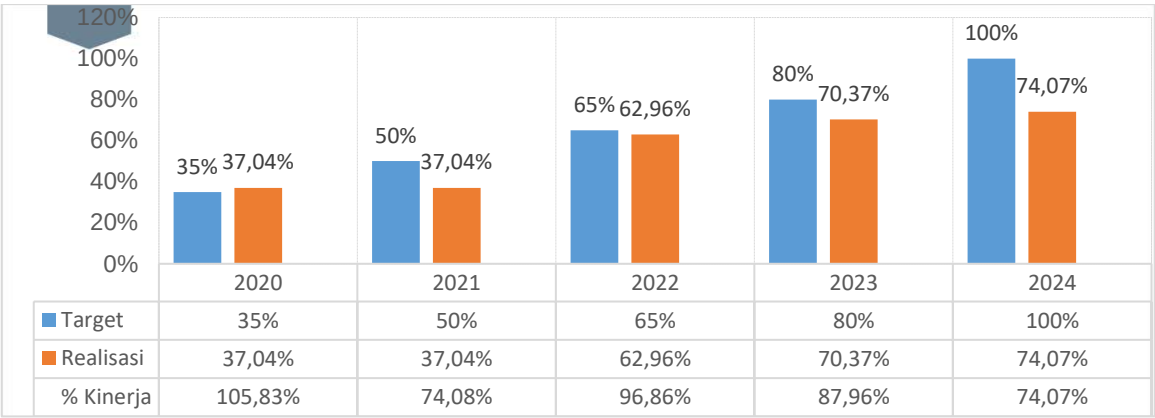
Gambar 3-11 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi persentase pemenuhan rencana induk TIK bidang perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 74,07% dan target Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 74,07%. Target kinerja Tahun 2021 s.d 2024 tidak dapat dipenuhi diantaranya karena adanya kebijakan penghematan anggaran/*automatic adjusment* termasuk kebijakan realokasi ke kegiatan prioritas lainnya pada Tahun 2021-2024, sehingga beberapa kegiatan TIK yang telah dianggarkan menjadi tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 3-19 Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian	Target (%)	35,00	50,00	65,00	80,00	100,00
	Realisasi (%)	37,04	37,04	62,96	70,37	74,07
	Capaian Kinerja (%)	105,83	74,08	96,86	87,96	74,07



Gambar 3-12 Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Tahun 2024 diantaranya:

1. Pembentukan Tim Pengelola *Website* Tahun 2024 serta pelaksanaan koordinasi dan pembahasan pengembangan *Website* Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 dalam rangka memastikan pengelolaan konten yang konsisten, mendukung penyampaian informasi yang akurat, transparansi pelayanan, dan peningkatan interaksi dengan masyarakat.
2. Rapat koordinasi kegiatan TIK Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mencakup beberapa topik pembahasan:

- a. Koordinasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait pemanfaatan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian.
 - b. Pembahasan progres kegiatan TIK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 - c. Koordinasi pemanfaatan dan monitoring progres kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pemenuhan data dukung capaian SPBE dan TIK Kementerian Perhubungan Tahun 2014-2024.
 - d. Pembahasan data dukung dan mekanisme pelaksanaan *clearance* usulan kegiatan TIK Tahun 2025 serta dukungan program strategis pengelolaan TIK dan SPBE Kementerian Perhubungan.
3. Rapat koordinasi dengan Pusdatin Perhubungan terkait SPBE Kementerian Perhubungan, meliputi:
 - a. Rapat Koordinasi TIK termasuk pembahasan penyederhanaan sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. *Focus Group Discussion* terkait Visi Digital Sektor Transportasi Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 dan Penyusunan Program Transportasi Digital Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.
 4. Pengelolaan domain dan penggunaan server di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 5. Pendampingan pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) dan *Vulnerability Assessment* (VA) untuk aplikasi/sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 6. Penyiapan arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan untuk sub sektor perkeretaapian.
 7. Pelaksanaan Reviu Tingkat I untuk usulan kegiatan TIK Tahun 2025 (Direktorat Sarana, Direktorat LLAKA, Direktorat Keselamatan dan Setditjen Perkeretaapian) dan proses lanjut usulan Reviu Tingkat II oleh Pusdatin serta koordinasi usulan *clearance* kepada Tim SPBE Nasional.

Keberhasilan pencapaian target kinerja juga didukung dengan ketersediaan anggaran kegiatan TIK dan kelengkapan data dukung dalam pelaksanaan Reviu Tingkat II oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan dan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional yang merupakan tahapan evaluasi sebelum kegiatan dapat dilaksanakan (persyaratan pembukaan blokir anggaran). Selain itu juga dilaksanakan monitoring rutin setiap triwulan berdasarkan Kepmenhub Nomor KM 69 Tahun 2020 melalui rapat koordinasi dan laporan kemajuan pekerjaan dengan mengikutsertakan Pusdatin Kementerian Perhubungan.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain proses usulan kegiatan TIK yang melibatkan *stakeholder* yaitu pada tahapan reviu oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan dan tahapan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional. Dalam pengelolaan TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga turut mendukung kinerja indeks SPBE Kementerian Perhubungan yang dilakukan penilaian oleh Kementerian PANRB. Selain itu, dalam kaitan dengan pengelolaan data, Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga berperan aktif dalam penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh BPS.

E. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) secara nasional maupun di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap pemenuhan Rencana Induk TIK, diperoleh data bahwa pada Tahun 2024 terdapat 388 sistem TIK/aplikasi sebagaimana hasil inventarisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang disusun oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan. Dari jumlah 388 sistem TIK/aplikasi tersebut, 20 diantaranya merupakan sistem TIK/aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau 5,15% dari jumlah keseluruhan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun uraian

sistem TIK/aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 3-20 Inventarisasi Sistem TIK/Aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Jumlah Sistem TIK/Aplikasi
1.	Sekretariat Jenderal	115 Sistem TIK/Aplikasi
2.	Inspektorat Jenderal	12 Sistem TIK/Aplikasi
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	44 Sistem TIK/Aplikasi
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	95 Sistem TIK/Aplikasi
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	28 Sistem TIK/Aplikasi
6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	20 Sistem TIK/Aplikasi
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	40 Sistem TIK/Aplikasi
8.	Badan Kebijakan Transportasi	20 Sistem TIK/Aplikasi
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	14 Sistem TIK/Aplikasi

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memanfaatkan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk layanan bidang perkeretaapian seperti layanan data dan informasi publik melalui website, layanan pengujian serta sertifikasi kelaikan prasarana, sarana dan kompetensi SDM Perkeretaapian termasuk dukungan manajemen melalui Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selain itu, pada Tahun 2024 juga sedang berproses implementasi kebijakan penyederhanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI yang diturunkan dalam kebijakan SPBE Nasional termasuk upaya peningkatan indeks reformasi birokrasi sesuai komitmen dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana setiap unit kerja Eselon I ditargetkan hanya memiliki 1 aplikasi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan 1 aplikasi yaitu Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mengakomodir beberapa layanan, modul dan sub modul layanan. Sistem/aplikasi eksisting di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian selanjutnya secara

bertahap dilakukan restrukturisasi menjadi modul layanan pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

F. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya diantaranya:

1. Koordinasi, penyesuaian data dukung serta pendampingan tahapan *clearence* terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2025 sesuai kebijakan SPBE nasional dan Kementerian Perhubungan serta mengacu pada rencana penyederhanaan aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Lanjutan pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan sistem TIK/modul layanan lainnya termasuk penataan domain sebagai upaya mendukung penyederhanaan aplikasi, meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses pengguna.
3. Koordinasi dengan Direktorat teknis untuk meningkatkan layanan pengelolaan data yang terintegrasi serta persetujuan perizinan terpusat pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memudahkan pimpinan mengakses data dan layanan perizinan.
4. Sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh unit kerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk penggunaan fitur perjalanan dinas *online*.

Selain itu, diusulkan juga beberapa penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas, anggaran, serta organisasi dan penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

- a. Koordinasi dalam penyelesaian dukungan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Kementerian Perhubungan yang mencakup tata kelola, proses bisnis, layanan, aplikasi, data dan informasi,

keamanan, infrastruktur, dan audit TIK untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

- b. Penetapan reviu peta jalan (*roadmap*) TIK termasuk untuk penyiapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sesuai kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

- a. Antisipasi kegiatan pendukung pengelolaan/pengembangan TIK yang terdampak kebijakan blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia.
- b. Penyiapan usulan kegiatan TIK Tahun 2026 mengacu rancangan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan serta kebijakan penyederhanaan aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. *Penyesuaian organisasi dan penempatan jabatan/pegawai:*

Diusulkan pembentukan unit/kelompok baru yang khusus menangani tata kelola TIK serta memastikan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berjalan lancar, aman, sesuai dengan kebutuhan.

3.2.5 DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Publikasi penyelenggaraan perkeretaapian dilaksanakan dengan maksud untuk membangun dan mempertahankan sebuah reputasi/citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat. Tujuan dilakukannya publikasi bidang perkeretaapian antara lain:

1. Meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dengan membentuk opini positif.
2. Memperkenalkan program-program pembangunan/kebijakan terkait perkeretaapian kepada masyarakat luas.

3. Membangun kepercayaan publik dengan memberikan informasi terkait pembangunan di bidang perkeretaapian yang akuntabel dan transparan.
4. Menciptakan hubungan harmonis dengan publik melalui penyampaian kebijakan, program pembangunan dan hasil kerja organisasi di bidang perkeretaapian.

Persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan indikator kinerja kegiatan terkait kehumasan yang diperoleh dari pemenuhan jumlah pemberitaan bidang perkeretaapian pada media cetak, elektronik, *online* dan media sosial dengan mempublikasikan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian diantaranya pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian, peningkatan keselamatan dan pelayanan serta isu-isu strategis perkeretaapian lainnya dalam bentuk siaran pers maupun konten media sosial/elektronik.

Indikator kinerja persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditargetkan sebesar 100% pada Tahun 2024, dengan perhitungan pelaksanaan publikasi sebagai berikut:

1. 50 pelaksanaan pemberitaan pada saluran media cetak, TV, radio, *website/online* yang dihasilkan dari penyusunan siaran pers maupun liputan per tahun (bobot 50%);
2. 365 postingan konten media sosial per tahun (bobot 50%).

Pada Tahun 2024, realisasi jumlah pelaksanaan publikasi bidang perkeretaapian melalui media cetak, TV, radio, *website/online* telah terealisasi sebanyak 17 siaran pers dan postingan konten melalui media sosial (*instagram/twitter/facebook*) sebanyak 645 konten. Dengan realisasi tersebut, maka diperoleh perhitungan progres publikasi siaran pers sebesar 34,00% (bobot 50%) dan progres publikasi konten media sosial sebesar 176,71% (bobot 50%) sehingga diperoleh rata-rata atau keseluruhan realisasi persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pemenuhan} \\ \text{Publikasi Direktorat} \\ \text{Jenderal Perkeretaapian} \end{array} = \frac{17}{50} \times 50\% + \frac{645}{365} \times 50\% = 17,00\% + 88,36\% = 105,36\%$$

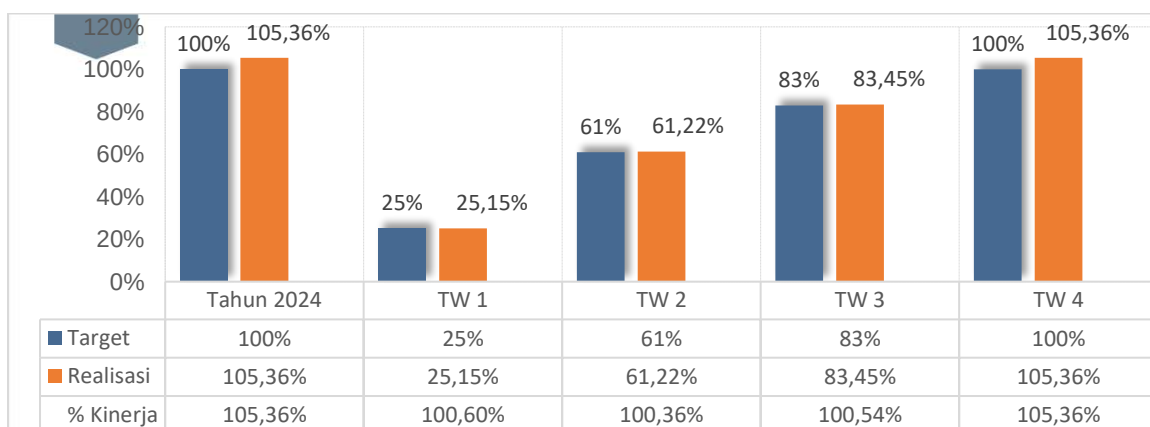
Perkeretaapian sebesar 105,36%. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 105,36% dan target Tahun 2024 sebesar 100,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 105,36%. Secara keseluruhan *trend* pencapaian kinerja indikator setiap triwulan dapat memenuhi kriteria *on the right track* yaitu mencapai kinerja 100,00%. Rincian target dan realisasi kinerja persentase pemenuhan publikasi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-21 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,00	25,00	61,00	83,00	100,00	25,15	61,22	83,45	105,36	100,60	100,36	100,54	105,36	105,36



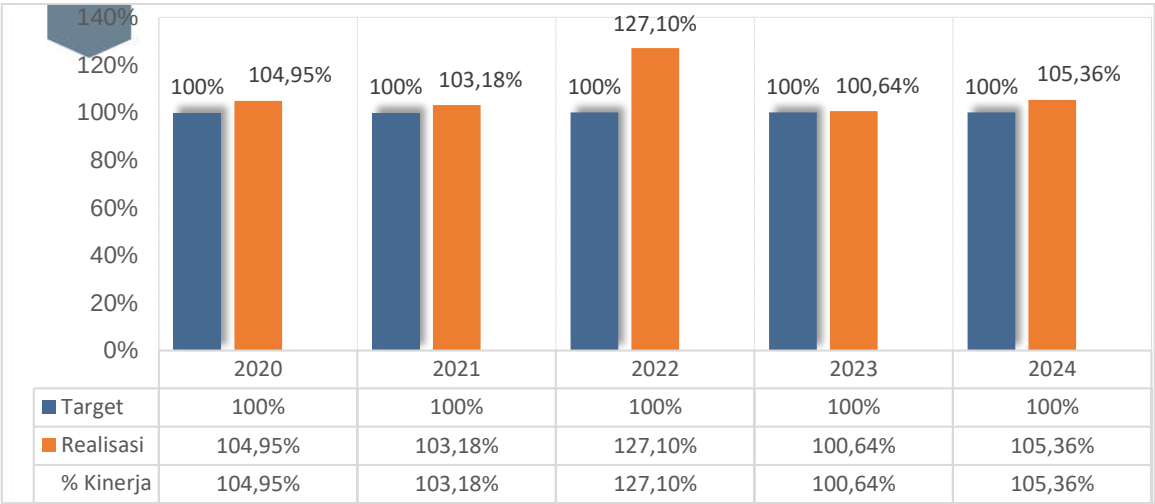
Gambar 3-13 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Secara keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir seluruh target yang ditetapkan telah terpenuhi (kinerja > 100%). Pemenuhan tersebut didukung dengan peningkatan pemanfaatan media sosial sebagai wadah komunikasi yang masif digunakan beberapa tahun terakhir. Perbandingan realisasi kinerja dengan target beberapa tahun terakhir sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3-22 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	104,95 (Kinerja 104,95%)	103,18 (Kinerja 103,18%)	127,10 (Kinerja 127,10%)	100,64 (Kinerja 100,64%)	105,36 (Kinerja 105,36%)



Gambar 3-14 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 untuk Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

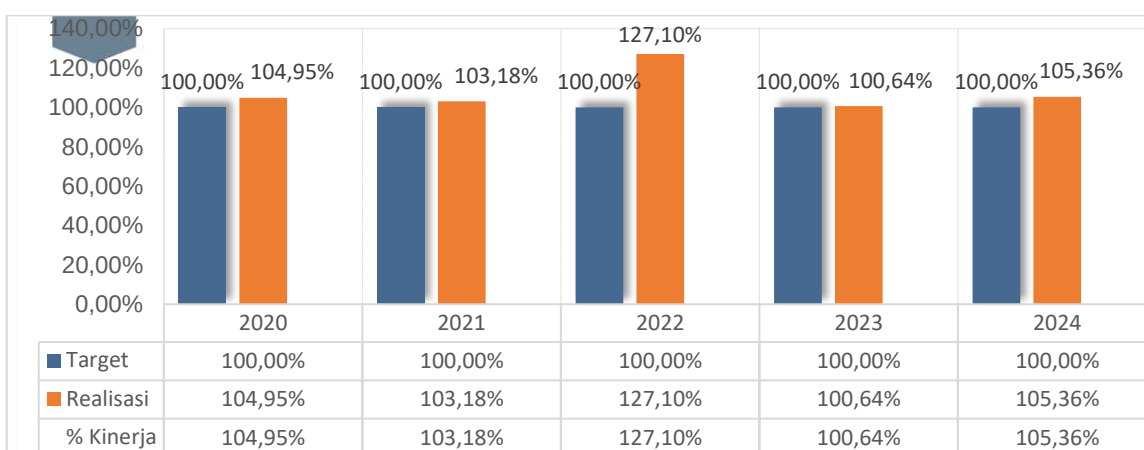
C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Dengan realisasi persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 105,36% dan target Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 sebesar 100,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 105,36%. Secara keseluruhan

target kinerja pada Rencana Strategis dapat terpenuhi untuk periode Tahun 2020-2024 (kinerja > 100%) dengan dukungan anggaran yang memadai dan keaktifan Tim Humas.

Tabel 3-23 Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	Target (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Realisasi (%)	104,95	103,18	127,10	100,64	105,36
	Capaian Kinerja (%)	104,95	103,18	127,10	100,64	105,36



Gambar 3-15 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian target persentase pemenuhan publikasi diperoleh dengan keaktifan Tim Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam melakukan pemberitaan terkait bidang perkeretaapian khususnya dengan memposting konten pada media sosial milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (*Twitter/Instagram/Facebook/Youtube*) dengan sinergi dengan Tim Humas Kementerian Perhubungan dan Tim Humas Direktorat/Balai. Tim Humas secara konsisten melakukan *update* setiap hari khususnya di media sosial dengan tema dan topik yang beragam mulai dari hal umum (*event*, hari besar), informasi peresmian prasarana/sarana perkeretaapian, kegiatan pimpinan (Menteri Perhubungan, Direktur

Jenderal Perkeretaapian, pimpinan lainnya), progres pembangunan perkeretaapian dan lainnya.

Pencapaian target kinerja juga didukung dengan anggaran yang memadai serta dilakukan monitoring media setiap hari untuk kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan *update* berkala "*Hot Issue* Perkeretaapian". Tim Humas juga telah melakukan penerbitan 2 (dua) edisi majalah perkeretaapian pada bulan Oktober (Edisi I) dan Desember (Edisi II). Pencapaian lainnya pada Tahun 2024 PPID Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Tahun 2024 dengan nilai 90.

Pemberitaan/publikasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian melalui berbagai media (cetak dan elektronik) termasuk media *online/website* dalam bentuk siaran pers maupun liputan juga dilaksanakan, walaupun belum optimal dilaksanakan dimana hanya mencapai 34% dari target Tahun 2024 dan hal ini tentu perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan pada periode berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Tim Humas baik di tingkat Kementerian Perhubungan dan Direktorat/Balai serta juga dengan BUPP/BUPS/operator perkeretaapian terkait publikasi kinerja penyelenggaraan perkeretaapian. Publikasi yang baik juga sangat dipengaruhi dengan persepsi dan respon masyarakat/publik sehingga perlu dikelola dengan baik kinerja dan sensitivitasnya guna membentuk reputasi dan kepercayaan publik yang positif.

E. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan publikasi dalam bentuk berita/data/informasi melalui siaran pers/liputan dan buku saku terkait perkeretaapian dengan menyiapkan berbagai topik antara lain terkait program unggulan Tahun 2025 dan kebijakan pengembangan perkeretaapian 5 tahun ke depan mendukung prioritas nasional.
2. Monitoring media dilaksanakan setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan *update* berkala "*Hot Issue* Perkeretaapian" serta upaya menyeimbangkan pemberitaan negatif dengan pemberitaan positif.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

Penyiapan program/strategi komunikasi Tahun 2025 termasuk sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

2. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

Antisipasi kegiatan pendukung publikasi (siaran pers, seminar, pameran dan lainnya) yang terdampak kebijakan blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia.

3. *Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai:*

Penyiapan kompetensi pegawai pranata humas untuk mendukung publikasi strategis pada Tahun 2025.

3.2.6 TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Evaluasi AKIP dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 1 Tahun 2024 yang selanjutnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Variabel-variabel dalam LKE tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. **Komponen** terdiri dari Perencanaan Kinerja (bobot 30), Pengukuran Kinerja (bobot 30), Pelaporan Kinerja (bobot 15), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25).
2. **Sub-komponen** dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
3. **Kriteria** merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), ditetapkan target Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 83,00. Pada periode Mei-Juli 2024, telah dilakukan evaluasi atas implementasi AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan penilaian dari Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Evaluasi dilaksanakan dengan menggabungkan nilai LKE Instansi (Eselon I) dan LKE Unit Utama dimana untuk LKE Unit Utama mengambil *sampling* pada unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya dan Balai Pengujian Perkeretaapian.

Hasil evaluasi implementasi AKIP dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.302/6/25/ITJEN/2023 tanggal 1 Agustus 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperoleh bahwa hasil penilaian untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 82,95 (Kategori A). Adapun detail hasil penilaian per komponen diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-24 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024

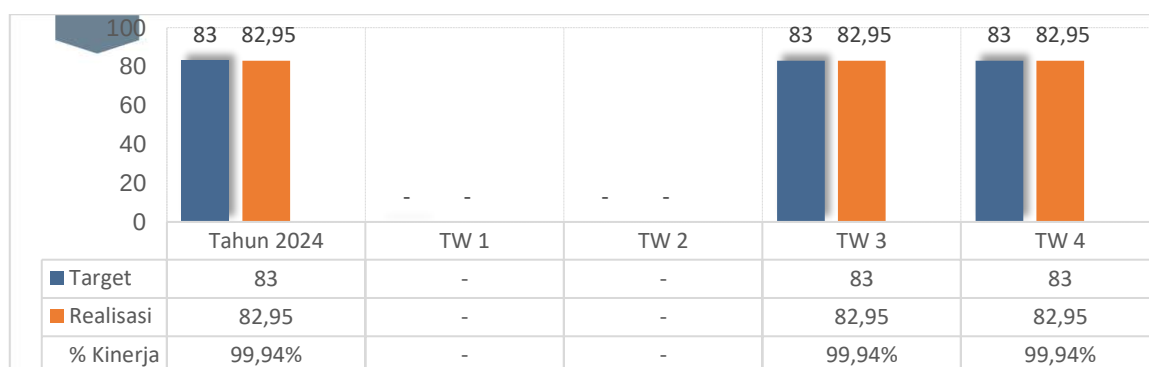
No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,61
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,83
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,00
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	82,95
Predikat			A

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 82,95, maka diperoleh capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 99,94% dari target nilai 83,00. Capaian dan target kinerja ditetapkan pada Triwulan III-IV Tahun 2024 menyesuaikan waktu penyelesaian penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2024 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-25 Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	83,00	-	-	83,00	83,00	-	-	82,95	82,95	-	-	99,94	99,94	99,94



Gambar 3-16 Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada beberapa tahun terakhir (Tahun 2020 s.d 2024) mengalami fluktuasi capaian setiap tahun dan tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut diantaranya karena adanya perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang digunakan mulai Tahun 2022 dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 serta dilanjutkan dengan penetapan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 1 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Metode penilaian dan objek penilaian juga berubah setiap tahun, semula pada Tahun 2020 hanya dilakukan evaluasi pada tingkat Eselon I, namun pada Tahun 2021-2024 juga dilakukan evaluasi pada tingkat Eselon II dan Balai sebagai *sampling* unit kerja. Pada Tahun 2021 *sampling* sebanyak 2 unit kerja (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana), Tahun 2022 *sampling* sebanyak 4 unit kerja (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, BTP Jakarta, Balai Pengujian), Tahun 2023 *sampling* sebanyak 5 unit kerja (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, BTP Surabaya, BTP Padang dan Balai Perawatan), dan Tahun 2024 *sampling* juga sebanyak 5 unit kerja (Direktorat Prasarana, Direktorat Keselamatan, BTP Semarang, BTP Surabaya, dan Balai Pengujian).

Namun apabila dibandingkan dalam hal capaian indikator kinerja kegiatan, terdapat *trend* peningkatan setiap tahun. Pada Tahun 2020 capaian kinerja sebesar 96,38%, terus meningkat sampai pada Tahun 2024 mencapai kinerja sebesar 99,94%. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja dari Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-26 Perbandingan Realisasi dan Target Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	%	85,00	85,00	83,00	83,00	83,00	81,92 (Kinerja 96,38%)	82,15 (Kinerja 96,65%)	80,42 (Kinerja 96,89%)	82,70 (Kinerja 99,64%)	82,95 (Kinerja 99,94%)



Gambar 3-17 Perbandingan Realisasi dan Target Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

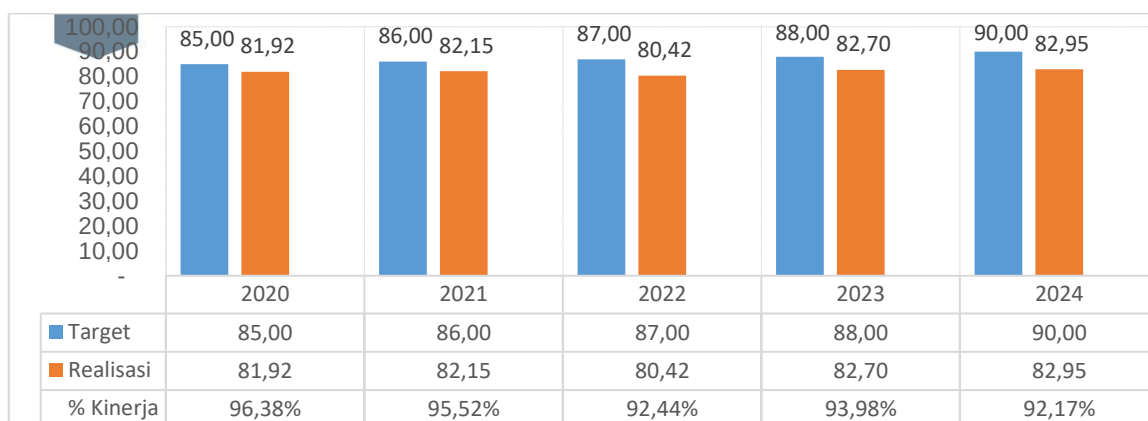
C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 82,95% (Kategori A), sedangkan target Tahun 2024 yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 90,00. Untuk itu, diperoleh capaian kinerja sebesar 92,17%. Secara keseluruhan pada Tahun 2020-2024, capaian indikator kinerja tidak dapat memenuhi target Rencana Strategis di setiap tahunnya (kinerja < 100%). Capaian kinerja berfluktuatif dimana cenderung menurun dari Tahun 2020-2022, sempat meningkat pada Tahun 2023 (kinerja 93,98%) dan kembali turun di Tahun 2024 (kinerja 92,17%). Hal tersebut disebabkan target Rencana Strategis yang cenderung meningkat setiap tahun serta adanya perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang digunakan termasuk metode evaluasi dan metode penilaian sebagaimana uraian sebelumnya.

Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-27 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Target (Nilai)	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00
	Realisasi (Nilai)	81,92	82,15	80,42	82,70	82,95
	Capaian Kinerja (%)	96,38	95,52	92,44	93,98	92,17



Gambar 3-18 Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 1 Tahun 2024 yang selanjutnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dalam mendukung pelaksanaan evaluasi implementasi AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang juga dilaksanakan bersamaan dengan pemberian *reward* (Piagam Penghargaan) kepada unit kerja dengan nilai penilaian implementasi SAKIP terbaik yang diserahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.
2. Penetapan Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.
3. Pelaporan kinerja unit Eselon I, II dan UPT/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala mencakup Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024.
4. Evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan kinerja setiap Triwulan berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan Tahun 2024 serta monitoring kepatuhan pengisian aplikasi pelaporan kinerja (e-SAKIP Reviu, e-*Performance*, SILAKI, e-*Monev* Bappenas).
5. Penetapan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP Unit Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.
6. Penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja mencakup pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan penyiapan data dukung dengan menggunakan fitur/modul SILAKI pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
7. Evaluasi AKIP tingkat Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh APIP/Inspektorat Jenderal, dimana penilaian mencakup nilai LKE Instansi (Eselon I) dan LKE Unit Utama. Untuk LKE Unit Utama mengambil *sampling* pada unit kerja Eselon II/III yaitu Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya dan Balai Pengujian Perkeretaapian. Pada evaluasi tingkat Kementerian Perhubungan tersebut, telah dilakukan beberapa pembahasan termasuk observasi/tinjauan secara langsung di Kantor BTP Kelas I Surabaya.

8. Peninjauan/penyesuaian hasil penilaian mandiri/internal terhadap evaluasi implementasi SAKIP pada 11 unit kerja *non sample* mengacu standar/kriteria yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal pada evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan 5 unit sampel. Hasil penilaian tersebut selanjutnya telah disampaikan kepada masing-masing unit kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, diperoleh nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebagaimana dituangkan pada surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.302/6/25/ITJEN/2023 tanggal 1 Agustus 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu sebesar 82,95 (Kategori A).

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa catatan penilaian terhadap komponen manajemen kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dievaluasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 23,61 dari nilai maksimal 30,00, dengan beberapa catatan yaitu:

- a. Masih terdapat beberapa kelengkapan Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan ke dalam aplikasi e-SAKIP Reviu tepat waktu (akhir bulan Februari tahun berjalan);
- b. Informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) belum tertuang di dalam dokumen LKIP;
- c. Masih terdapat beberapa target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja tidak tercapai untuk setiap IKU/IKK sesuai kriteria *on the right track* yaitu realisasi capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d 110%;

- d. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja berupa penurunan target dengan melakukan revisi dokumen PK sehingga pada akhir tahun capaian kinerja terlihat lebih baik (*on the right track*).

2. Pengukuran Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 25,83 dari nilai maksimal 30,00, terdapat beberapa catatan yang belum terpenuhi, yaitu:

- a. Masih terdapat keberadaan dokumen pengukuran kinerja sebagian unit kerja yang belum dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir;
- b. Pengukuran efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja pada sebagian unit kerja belum menggambarkan adanya efisiensi sumber daya atas capaian kinerjanya.

3. Pelaporan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 12,50 dari nilai maksimal 15, dengan beberapa catatan yaitu:

- a. Laporan Kinerja pada sebagian unit kerja telah dilakukan reviu secara berjenjang dan disampaikan tepat waktu, namun belum dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir;
- b. Laporan Kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikannya, namun belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja seperti tata cara perhitungan capaian kinerja di setiap indikator, penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja dan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 21,00 dari nilai maksimal 25,00, dengan catatan hasil evaluasi akuntabilitas

kinerja internal bahwa pada sebagian unit kerja belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja pada level Eselon I maupun unit kerja. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat sebagian kinerja yang belum tercapai maupun anomali.

E. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja terkait nilai AKIP dilakukan dengan unit kerja lain baik di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun unit lainnya. Di tingkat Kementerian Perhubungan, diperoleh bahwa nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 merupakan yang tertinggi dibandingkan unit Eselon I lainnya. Secara lengkap nilai AKIP unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3-28 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen Tahun 2024				Penilaian Kinerja	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	2024	2023
1	Sekretariat Jenderal	24,06	25,38	11,63	19,08	80,15	80,08
2	Inspektorat Jenderal	23,63	26,40	11,94	20,33	82,30	82,05
3	Ditjen Hubdat	23,10	25,50	13,20	20,88	82,69	82,66
4	Ditjen Hubla	24,45	24,12	12,38	19,88	80,82	80,79
5	Ditjen Hubud	24,15	25,44	11,94	19,25	80,79	80,22
6	Ditjen Perkeretaapian	23,61	25,83	12,50	21,00	82,95	82,70
7	BPSDMP	23,70	22,71	11,61	19,88	77,90	76,14
8	BKT	22,98	24,60	11,55	20,00	79,14	80,80
9	BPTJ	23,06	23,36	11,81	19,25	77,50	75,02

Berdasarkan Tabel di atas, juga diperoleh bahwa nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya (+0,25). Selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut penilaian terhadap komponen-komponen tersebut untuk perbaikan pada periode berikutnya.

Dibandingkan dengan instansi Pemerintah lainnya, berdasarkan data Kementerian PANRB diperoleh bahwa pada Tahun 2024 evaluasi SAKIP yang dilakukan kepada 505 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rata-rata nilai AKIP sebesar 64,23. Sedangkan hasil evaluasi kepada 36 Pemerintah Provinsi diperoleh rata-rata nilai AKIP sebesar 70,75. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian di

atas nilai rata-rata dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di tingkat Nasional.

F. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut termasuk memastikan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan diantaranya:

1. Melakukan publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja ke dalam aplikasi e-SAKIP Reviu dan website secara tepat waktu.
2. Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang selaras dengan arah strategi dan kebijakan pada dokumen naskah teknokratik Rencana Strategis Tahun 2025-2029 termasuk merencanakan target kinerja dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan melakukan analisa secara mendalam, sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat tercapai untuk setiap IKU/IKK sesuai kriteria *on the right track* (90% s.d 110%).
3. Menuangkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) pada indikator kinerja di dokumen Laporan Kinerja.
4. Mengungkapkan seluruh informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja termasuk di dalamnya tata cara perhitungan capaian kinerja di setiap indikator, penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja dan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmarking* kinerja).
5. Menyeragamkan formulasi pengukuran efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta kompetensi/penempatan pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

Penyiapan rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan termasuk proyeksi sumber daya anggaran.

2. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

- a. Monitoring Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 untuk kegiatan pendukung masing-masing indikator kinerja sesuai alokasi anggaran.
- b. Antisipasi kebijakan blokir anggaran Tahun 2025 yang dapat mempengaruhi kegiatan pendukung dan pencapaian kinerja Tahun 2025.

3. *Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai:*

Pembentukan Tim Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025 yang mencakup Tim Penyusun Dokumen SAKIP dan Tim Monitoring dan Evaluasi melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan dukungan SDM yang kompeten.

Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan serta Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan. Target tingkat maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja (revisi terakhir) adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas tingkat maturitas SPIP pada Level 3 (terdefinisi).

Berikut adalah tingkat maturitas SPIP dan karakteristiknya:

Tabel 3-29 Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat	Karakteristik SPIP
Level 0 Belum Ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern.
Level 1 Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak teridentifikasi.
Level 2 Berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
Level 3 Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
Level 4 Terkelola dan Terukur	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Telah ada evaluasi formal dan terdokumentasi.
Level 5 Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta didukung oleh pemantauan otomatis dengan menggunakan aplikasi TI.

Penilaian maturitas SPIP terintegrasi meliputi maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Penanganan Korupsi (IEPK) dan kapabilitas APIP dengan tahapan penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja, penjaminan kualitas oleh APIP, serta dilakukan evaluasi oleh BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP. Penilaian mandiri masing-masing unit kerja telah dilakukan pada Maret s.d Juni 2024 termasuk evaluasi internal oleh Tim Evaluasi tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selanjutnya penjaminan kualitas oleh APIP/Tim Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Penilaian Mandiri tingkat Kementerian Perhubungan kepada seluruh unit kerja eselon II (5 unit kerja) dan Balai (11 unit kerja) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.904/3/10/ITJEN/2024 tanggal 21 Juni

2024 perihal Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PK SPIP) Terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024, hasil penjaminan kualitas oleh APIP menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan berada pada Level 3 “terdefinisi” dari 5 tingkat maturitas SPIP.

Penilaian tersebut dilakukan terhadap 3 komponen yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian tujuan Penyelenggaraan SPIP yang menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kementerian Perhubungan sebesar “3,835” dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-30 Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	5	2,000
2.	Struktur dan Proses	2	0,905
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,930
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,835
	MRI	3	3,847
	IEPK	3	3,000

Selanjutnya hasil penilaian mandiri tersebut dilakukan evaluasi oleh BPKP. Berdasarkan surat Deputi Kepala BPKP Nomor PE.09.03/S-868/D1/03/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023/2024 yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP pada Kementerian Perhubungan, diperoleh nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian perhubungan adalah “3,382” (Level 3 terdefinisi) dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 3-31 Hasil Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP
Terintegrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024**

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	5	1,800
2.	Struktur dan Proses	2	0,712
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,870
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,382
	MRI	3	3,034
	IEPK	2	2,000

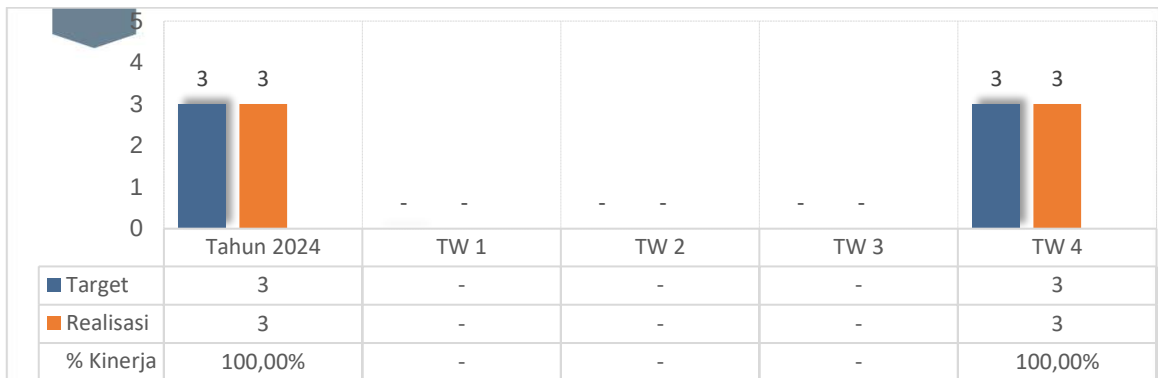
Dengan karakteristik level maturitas SPIP yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh BPKP menunjukkan Level 3 bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan.

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi tingkat maturitas SPIP yaitu Level 3 (terdefinisi) sebagaimana hasil evaluasi oleh BPKP serta dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Level 3), maka capaian kinerja yang diperoleh adalah 100,00%. Capaian dan target kinerja ditetapkan pada Triwulan IV Tahun 2024 menyesuaikan waktu penyelesaian evaluasi oleh BPKP. Rincian target dan realisasi kinerja per triwulan Tahun 2024 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

**Tabel 3-32 Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level 3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	100,00	100,00



Gambar 3-19 Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

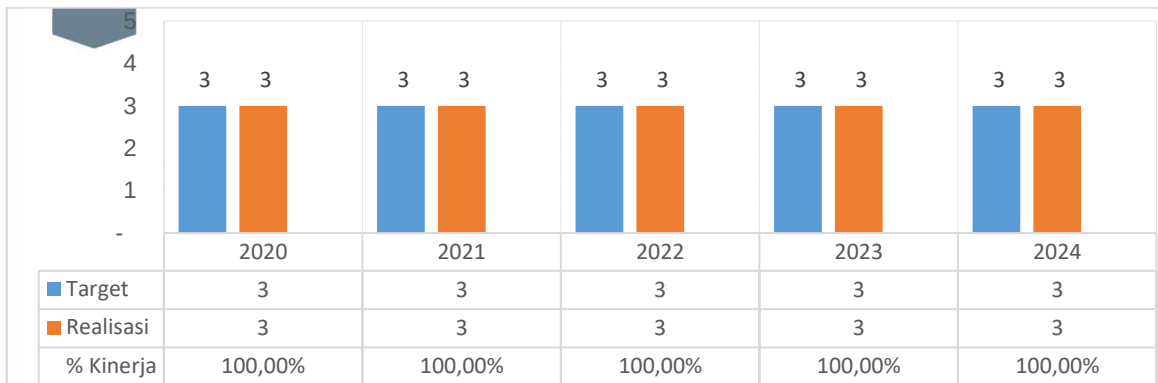
B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan target kinerja pada Tahun 2020 s.d 2024 diperoleh Level 3 sesuai dengan target sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% setiap tahun. Penilaian tersebut sesuai dengan hasil evaluasi di tingkat Kementerian Perhubungan.

Penjaminan kualitas terhadap penilaian mandiri maturitas SPIP di tingkat Kementerian Perhubungan dilakukan secara sampel pada beberapa unit kerja, namun sejak Tahun 2023 s.d 2024 penilaian mandiri telah dilaksanakan oleh seluruh unit eselon III/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja dari Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-33 Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



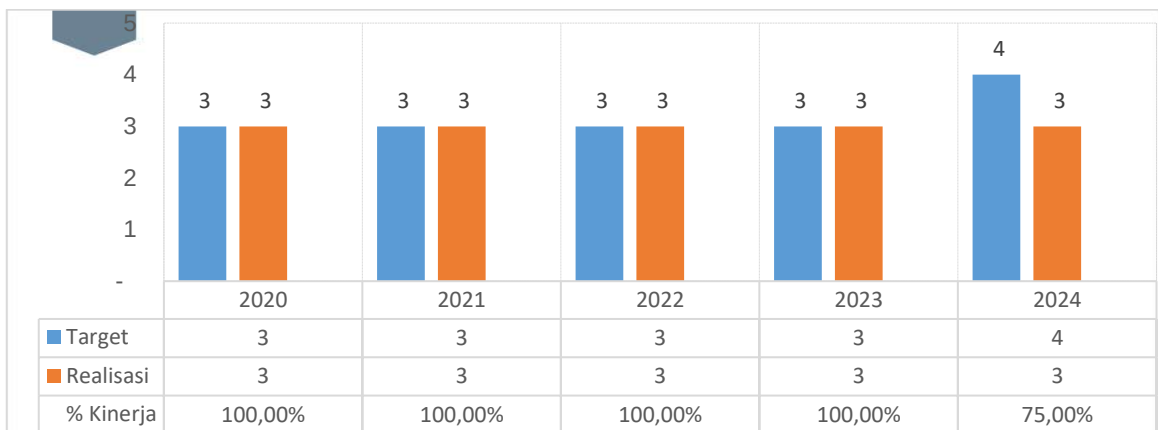
Gambar 3-20 Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi tingkat maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu Level 3 (terdefinisi), sedangkan target Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah Level 4 sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 75%. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya Level 4 sesuai target pada Rencana Strategis diantaranya pengurangan nilai (penalti) pada komponen IEPK (KK 3.4) dikarenakan adanya perluasan keterjadian kasus korupsi pada tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-34 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Target (Level)	3	3	3	3	4
	Realisasi (Level)	3	3	3	3	3
	Target (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00



Gambar 3-21 Perbandingan Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Penilaian maturitas SPIP terintegrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada penilaian dan evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Kementerian Perhubungan dengan hasil pada Level 3 (terdefinisi). Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 yang telah dilaksanakan secara umum mencakup tahapan meliputi:

1. Penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja: Maret s.d Juni 2024.
2. Penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan: Juni 2024.
3. Evaluasi oleh BPKP: Juli s.d November 2024.
4. Pemeriksaan oleh Tim Penilaian Maturitas Direktorat Jenderal Perkeretaapian: Desember 2024.

Adapun beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung penilaian mandiri tersebut antara lain:

1. Penetapan Surat Keputusan terkait Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mulai dari Tingkat Eselon I, Eselon II dan Eselon III Unit Mandiri;
2. Sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari unit kerja eselon I, II dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk pelaksanaan bimbingan teknis untuk tim penilaian mandiri guna peningkatan kompetensi;
4. Dukungan pimpinan serta koordinasi yang intensif dengan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan serta BPKP;
5. Koordinasi dan konsolidasi intensif dalam pengumpulan data dukung oleh tim penilaian mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk asistensi secara berkala dengan Inspektorat Jenderal dan BPKP;

Selain itu, juga telah dilakukan pembahasan bersama BPKP, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, masing-masing Sekretariat Direktorat/Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait evaluasi terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Pada pembahasan tersebut disampaikan bahwa terdapat pengurangan nilai (penalti) pada komponen IEPK (KK 3.4) dikarenakan adanya perluasan keterjadian kasus korupsi pada Tahun 2023 yang masih berkaitan.

Hal lain yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yang mendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP antara lain penyelenggaraan manajemen risiko yang mencakup:

1. Peningkatan kompetensi pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko.

2. Penilaian risiko oleh masing-masing pemilik risiko di setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa penetapan konteks, daftar risiko, peta risiko, rencana penanganan risiko;
3. Sosialisasi KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan kepada seluruh unit kerja serta penyusunan kamus risiko yang mengacu pada proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
4. Pemantauan dan pelaporan secara berkala (triwulan) diantaranya pemantauan rencana penanganan risiko dan keterjadian peristiwa risiko.

Dalam pencapaian kinerja tingkat maturitas SPIP, diperlukan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian terus melakukan perbaikan beberapa aspek guna mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Selain itu, pengawasan yang intensif dan tepat perlu untuk dilakukan guna menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Perbaikan dari sisi administrasi dan keuangan secara berangsur dilakukan guna menciptakan kondisi organisasi yang transparan dan akuntabel.

E. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti termasuk rekomendasi dari BPKP:

1. Meningkatkan perbaikan atas capaian sasaran program/kegiatan dan melakukan peningkatan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Tindak lanjut *Area of Improvement* (Aol) dari hasil evaluasi penyelenggaraan maturitas SPIP terintegrasi periode sebelumnya.
3. Melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, terstruktur dan sistematis didukung sumber daya anggaran yang memadai termasuk penyesuaian identifikasi risiko mengacu proses bisnis.
4. Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM, meliputi pelatihan/bimtek/sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM dalam penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko dengan efektif.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko yang efisien dan akurat.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta penempatan pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

Koordinasi dengan BPKP dan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan terkait persiapan penilaian maturitas SPIP Tahun 2025 diantaranya pembahasan kertas kerja dan metode penilaian/pengisian kertas kerja penilaian mandiri.

2. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

Penyiapan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dan sertifikasi kompetensi manajemen risiko sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu diperlukan antisipasi terhadap kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan *exercise* dan optimalisasi anggaran yang tersedia.

3. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai:

Pengoptimalan peran lini pertama (pengelola risiko) dan lini kedua (manajemen risiko) dengan komunikasi dan konsultasi berkala dalam penerapan manajemen risiko di masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian bersumber dari pendapatan fungsional sesuai PP Nomor 15 Tahun 2016 dan pendapatan non fungsional. Penyelenggaraan PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan oleh seluruh unit kerja baik Sekretariat, Direktorat maupun beberapa Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), ditargetkan pemenuhan PNBP berdasarkan DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 100% dari Rp1.261.333.553.000,00.

Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar Rp1.167.640.051.880,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3-35 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)	1.114.870.492.000	910.983.233.017	81,71%
	a. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI	9.672.420.000	1.140.225.000	11,79%
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	2.754.500.000	3.697.635.000	134,24%
	c. Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ <i>Track Access Charge</i>	1.101.061.822.000	902.208.197.017	81,94%
	d. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.381.750.000	3.937.176.000	284,94%
2	Pendapatan BLU	85.268.317.000	90.756.273.178	106,44%

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	74.076.731.000	87.194.428.542	117,71%
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	11.191.586.000	1.492.165.100	13,33%
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	966.896.536	-
	d. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	-	1.102.783.000	-
3	Pendapatan Non Fungsional	61.194.744.000	165.900.545.685	271,10%
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.429.268.556	-
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	200.000.000	-	0,00%
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	58.699.354.000	88.154.219.993	150,18%
	d. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	2.295.390.000	28.429.615.470	1238,55 %
	e. Pendapatan Jasa Lainnya	-	3.314.307.007	-
	f. Pendapatan Bunga Lainnya	-	-	-
	g. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	5.260.143.236	-
	h. Pendapatan Denda Lainnya	-	18.802.560	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	89.373.454	-
	j. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	10.525.564.918	-
	k. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	28.250.006.483	-
	l. Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
	m. Pendapatan Jasa Perbendaharaan	-	-	-
	n. Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	429.244.008	-
	Jumlah	1.261.333.553.000	1.167.640.051.880	92,57

Dengan realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 Rp1.167.640.051.880,00 dan target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.261.333.553.000,00, maka diperoleh capaian persentase realisasi PNBP sebesar 92,57%. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Realisasi Penerimaan} \\ \text{Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang} \\ \text{Perkeretaapian} \end{array} = \frac{\text{Rp1.167.640.051.880,00}}{\text{Rp1.261.333.553.000,00}} \times 100\% = 92,57\%$$

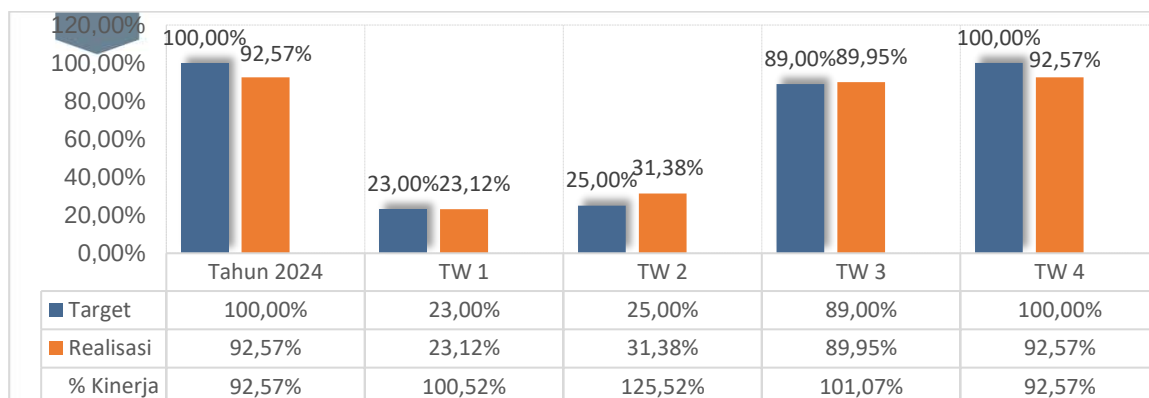
A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi PNPB sebesar 92,57% dan target Tahun 2024 sebesar 100,00% maka diperoleh capaian kinerja sebesar 92,57% dari target Tahun 2024 sebesar 100,00%. Capaian kinerja pada Triwulan I-III Tahun 2024 dapat mencapai target sesuai rencana aksi dikarenakan telah mempertimbangkan *trend* sebelumnya yang tidak tinggi pada periode tersebut serta telah dilakukan penyesuaian rencana aksi dengan revisi Perjanjian Kinerja pada Agustus dan Desember 2024. Namun pada Triwulan IV Tahun 2024 tidak dapat mencapai target terutama karena belum optimalnya PNPB dari TAC.

Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2024 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-36 Capaian Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,00	23,00	25,00	89,00	100,00	23,12	31,38	89,95	92,57	100,52	125,52	101,07	92,57	92,57



Gambar 3-22 Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNPB Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

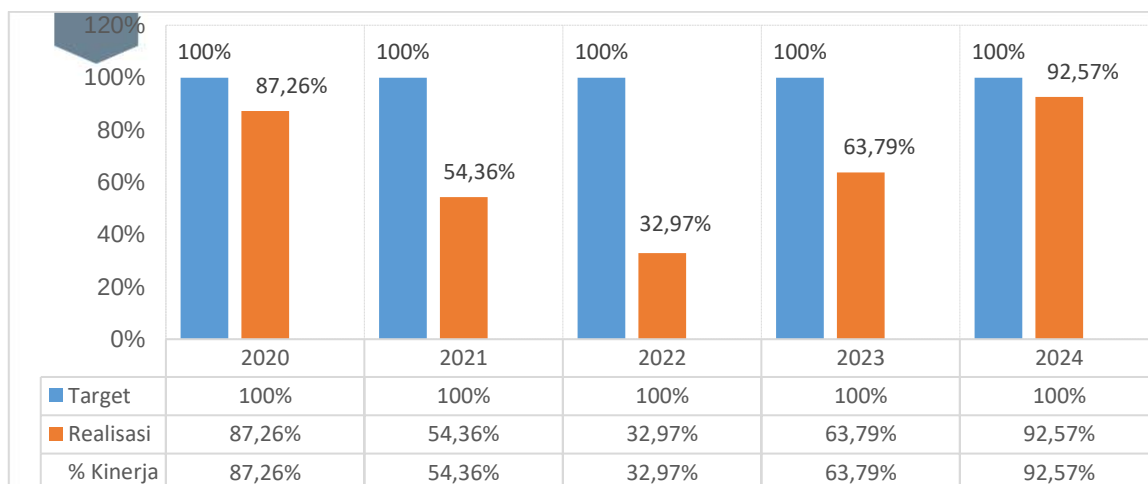
B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja beberapa tahun terakhir untuk indikator kinerja persentase realisasi PNBPN mengalami fluktuasi diantaranya penurunan realisasi di Tahun 2020 s.d 2022 yang kemudian naik kembali di Tahun 2023 dan 2024 mulai dari Rp634 Milyar pada Tahun 2020 dan terus menurun sampai Rp330 Milyar pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 realisasi PNBPN mengalami peningkatan sebesar Rp763,58 dan pada Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp1,16 Triliun walaupun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp1,26 Triliun (kinerja 92,57%). Penetapan target PNBPN kedepan perlu diperhitungkan/diproyeksikan dengan baik dan rinci dengan koordinasi intensif dengan Setjen Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja dari Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-37 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100,00 (Rp728 Milyar)	100,00 (Rp837 Milyar)	100,00 (Rp1.002 Milyar)	100,00 (Rp1.197 Milyar)	100,00 (Rp1.261 Milyar)	87,26 (Rp635 Milyar)	54,36 (Rp455 Milyar)	32,97 (Rp330 Milyar)	63,79 (Rp764 Milyar)	92,57 (Rp1.168 Milyar)



Gambar 3-23 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 s.d 2024

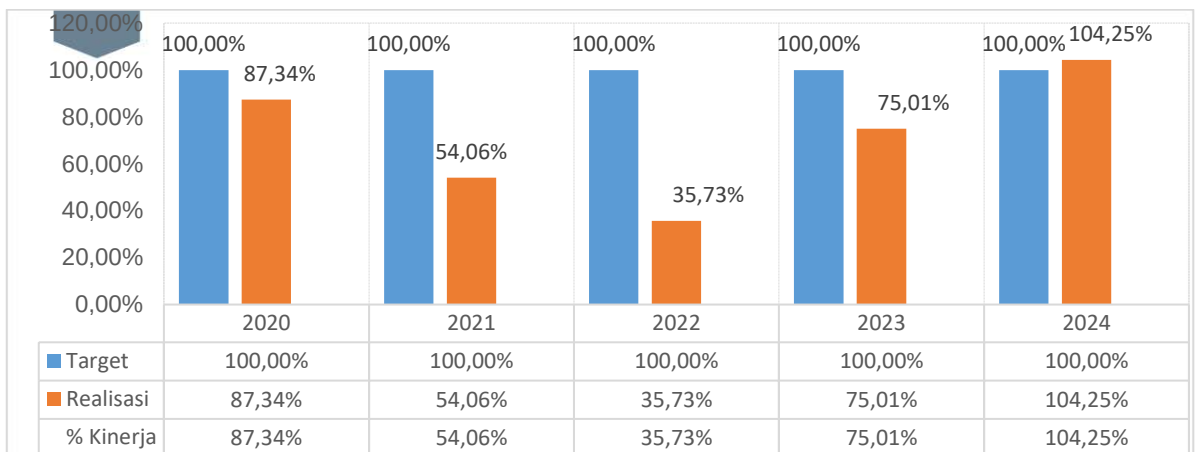
C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024 sebesar Rp1.167.640.051.880,00, sedangkan target Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar Rp1.120 Milyar, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 104,25%. Secara target pada Tahun 2020 s.d 2023 indikator kinerja ini tidak dapat memenuhi target Renstra (kinerja < 100%) dan berfluktuatif, namun pada Tahun 2024 dapat mencapai target yang ditetapkan pada Renstra dikarenakan pada Tahun 2024 memang terdapat kenaikan signifikan dibandingkan Tahun 2023 (kenaikan dari Rp763,58 Milyar menjadi Rp1.167,64 Milyar) diantaranya pencantuman penagihan TAC Tahun 2023 yang baru terbayarkan pada awal Tahun 2024.

Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis (konversi dalam bentuk persentase) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-38 Target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2020	2022	2022	2023	2024
Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target (%)	100,00 (Rp727 M)	100,00 (Rp841,61 M)	100,00 (Rp925 M)	100,00 (Rp1.018 M)	100,00 (Rp1.120 M)
	Realisasi (%)	87,34 (Rp634,96 M)	54,06 (Rp454,97 M)	35,73 (Rp330,50 M)	75,01 (Rp763,58 M)	104,25 (Rp1.167,64 M)
	Capaian Kinerja (%)	87,34	54,06	35,73	75,01	104,25



Gambar 3-24 Perbandingan Target dan Realisasi PNBP Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sampai posisi 31 Desember 2024 tidak dapat tercapai (kinerja 92,57%). Berdasarkan hasil monitoring, diperoleh bahwa terdapat 4 akun PNBP yang belum mencapai target yaitu:

1. **42151** - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi.
2. **425112** - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ *Track Access Charge*.
3. **424312** - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha.
4. **425129** - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya.

Secara mayoritas, tidak tercapainya target PNBP akibat belum terpungutnya PNBP TAC Tahun 2024 (425112). Sebelumnya pada Tahun 2022 merupakan awal transisi peneraparan formula TAC baru sesuai PMK 138 Tahun 2021 (sebelumnya sesuai PP 15 Tahun 2016 perhitungan TAC berupa $0,75 \times \text{IMO}$) dan selanjutnya pada Tahun 2024 diterbitkan PMK 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK 138 Tahun 2021 tentang Tarif Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat *volatil* dan mendesak di Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, beberapa regulasi turunan terkait Tata Kelola TAC untuk pelaksanaan TAC

Tahun 2024 masih berproses (penetapan Satuan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian dan Faktor Prioritas oleh Kementerian Keuangan).

Secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target PNBП Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Satuan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp) untuk TAC Tahun 2024 masih dalam proses persetujuan di Kementerian Keuangan.
2. Belum optimalnya PNBП atas Pengelolaan BMN yang perlu terpungut sehingga perlu inventarisasi, rekonsiliasi dan penertiban atas pembayaran aset Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana milik negara.

Pada saat ini, terkait pembayaran TAC Tahun 2024 belum dilaksanakan karena belum mendapatkan persetujuan atas besaran biaya penggunaan KA (SBPP) dan faktor prioritas (Fp) oleh Kementerian Keuangan (uraian butir 1 di atas). Setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, selanjutnya Badan Usaha akan melakukan pembayaran PNBП TAC melalui perhitungan *self assessment*. Adapun hasil perhitungan *self assessment* dari Badan Usaha tersebut akan dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian cq. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan melibatkan BPKP serta juga memperhatikan kemampuan membayar dari Badan Usaha. Ditargetkan pada Triwulan I Tahun 2025, seluruh proses pembayaran TAC Tahun 2024 (penagihan, verifikasi dan penyetoran) dapat terealisasi.

Selain capaian TAC yang tidak terpenuhi, capaian PNBП dari pendapatan penggunaan sarana dan prasarana perkeretaapian juga tidak memenuhi target yang ditetapkan diantaranya karena kurangnya sosialisasi penggunaan sarana milik negara kepada *stakeholders* serta tingginya biaya mobilisasi. Selanjutnya, terkait pendapatan dari hasil kerja sama dengan Lembaga/Badan Usaha yang belum terpenuhi dikarenakan masih adanya

sengketa/permasalahan aset Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan instansi lain sehingga berpengaruh terhadap upaya optimalisasi pemanfaatan aset guna menjadi sumber perolehan PNBP.

E. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Analisa perbandingan (*benchmark*) dilakukan dengan capaian PNBP unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada data SPAN Kementerian Keuangan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 3-39 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	4.274.132.000	3.973.629.125	92,97
2	Inspektorat Jenderal	-	350.100.264	100,00
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1.496.612.998.000	1.329.517.620.558	88,80
4	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1.261.333.553.000	1.167.640.051.880	92,57
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	5.341.168.720.000	6.134.065.585.379	114,85
6	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	1.485.343.929.000	2.474.507.052.474	166,59
7	BPSDM	1.416.400.707.000	1.767.591.081.636	124,79
8	BKT	-	1.205.291.397	100,00
9	BPTJ	10.158.650.000	19.322.151.580	190,20
Jumlah		11.015.292.689.000	12.898.172.564.293	117,09

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa perolehan kinerja PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian berada di posisi ke-8 (kinerja 92,57%) dibandingkan 8 unit kerja Eselon I lainnya. Posisi terendah diduduki oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan kinerja 88,80%, sedangkan untuk 7 unit kerja lainnya memiliki capaian realisasi PNBP yang melebihi target >100% (Setjen, Itjen, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, BPSDM, BPTJ, BKT) dari target yang ditetapkan. Berdasarkan besaran nilai PNBP, perolehan tertinggi dari unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mencapai Rp6,13 Triliun. Adapun penetapan target PNBP

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sangat tinggi bersumber dari TAC yang menjadi salah satu faktor utama rendahnya capaian PNBPN Tahun 2024.

F. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya diantaranya:

1. Monitoring intensif untuk proses penagihan TAC Tahun 2024 termasuk koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan persetujuan besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp). Setelah persetujuan besaran SBPP, selanjutnya diperlukan penyusunan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Besaran Satuan Biaya Penggunaan pada Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.
2. Percepatan penyelesaian sengketa/permasalahan aset antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Institusi terkait (Kementerian PUPR/lainnya) yang berpengaruh terhadap upaya optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan perolehan PNBPN.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

- a. Lanjutan pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan kebutuhan anggaran Tahun 2025 untuk pelaksanaan sertifikasi aset tanah/barang milik negara lainnya di 5 wilayah (Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur).
- b. Implementasi perbaikan tata kelola TAC untuk percepatan penagihan TAC;
- c. Pelaksanaan revisi Peraturan Menteri Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis PNBPN Sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) sebagaimana hasil kajian yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Antisipasi kegiatan pendukung yang terdampak kebijakan blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber pembiayaan PNB/BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai alternatif pembiayaan.

Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Perhitungan persentase kualitas pelaksanaan anggaran berupa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari capaian sasaran program, capaian *output* program, rata-rata NKA Satker, penyerapan, efisiensi dan konsistensi. Perhitungan kualitas pelaksanaan anggaran berupa NKA tersebut dikelompokkan pada kategori:

1. Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik;
2. >80% - 90%: Kategori Baik;
3. >60% - 80%: Kategori Cukup;
4. 50% - 60%: Kategori Kurang;
5. Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), ditargetkan persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2024 sebesar 89,00%. Adapun realisasi pada Tahun 2024 sebesar 93,02% dengan rincian komponen perhitungan:

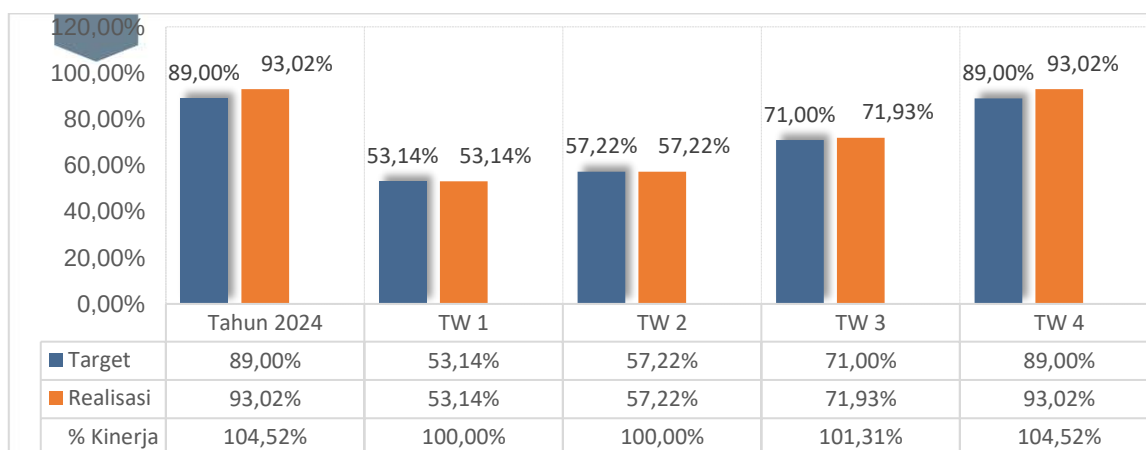
1. Capaian Sasaran Program (CSP): 101,48%;
2. Capaian *Output* Program (COP): 88,67%;
3. Konsistensi: 94,18%;
4. Nilai Efisiensi: 100% atau Efisiensi sebesar 20;
5. Rata-Rata NKA Satker: 88,28%;
6. Penyerapan: 54,37%.

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 sebesar 93,02% mengacu metode perhitungan PMK Nomor 22/PMK.02/2021. Dengan realisasi kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar 104,52% dari target Tahun 2024. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-40 Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	89,00	53,14	57,22	71,00	89,00	53,14	57,22	71,93	93,02	100,00	100,00	101,31	104,52	104,52



Gambar 3-25 Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

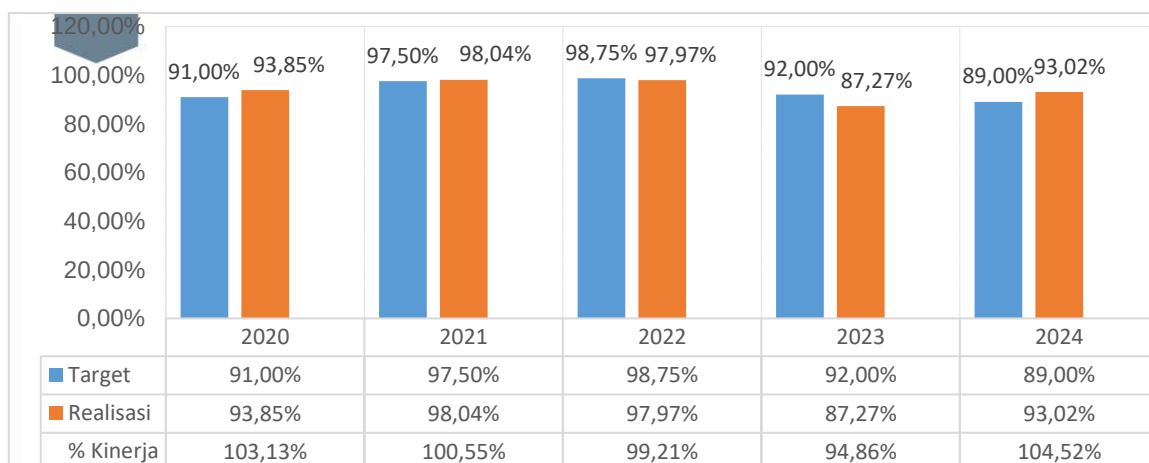
Perhitungan persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada Tahun 2020-2022 terdapat perbedaan dengan perhitungan Tahun 2023-2024. Pada Tahun 2020-2022 perhitungan kualitas pelaksanaan anggaran diperoleh dari kombinasi capaian penyerapan anggaran dan pencapaian *output*/fisik, sedangkan pada Tahun 2023-2024 perhitungan mengacu pada PMK

Nomor 22/PMK.02/2021 yang terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian *Output* Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi. Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran cenderung tidak stabil apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selain karena perubahan metode perhitungan juga karena kinerja yang fluktuatif khususnya realisasi anggaran dan capaian *output*.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja beberapa tahun terakhir (Tahun 2020-2024) untuk indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-41 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	91,00	97,50	98,75	92,00	89,00	93,85 (Kinerja 103,13%)	98,04 (Kinerja 100,55%)	97,97 (Kinerja 99,21%)	87,27 (Kinerja 94,86%)	93,02 (Kinerja 104,52%)



Gambar 3-26 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2024 untuk Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

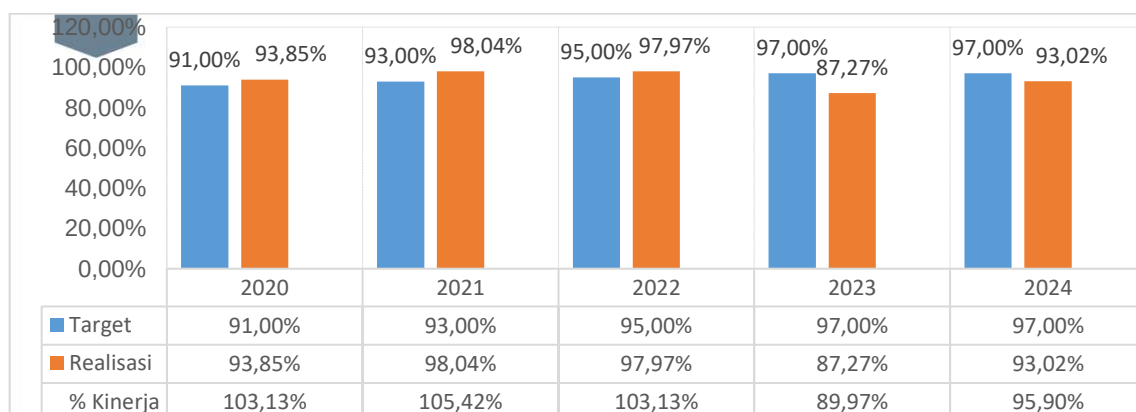
Target yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 masih mengacu pada perhitungan atas penyerapan anggaran dan pencapaian

output, sedangkan pada Tahun 2023 s.d 2024 perhitungan mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 sehingga terdapat perbedaan metode perhitungan termasuk parameter penilaian tidak hanya dari parameter serapan anggaran dan pencapaian *output* saja. Target Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 97,00% (penyerapan anggaran dan target pencapaian *output* asumsi dengan nilai yang sama). Dengan realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 93,02% dan target sesuai Rencana Strategis sebesar 97,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 95,90%.

Secara umum target kinerja pada Rencana Strategis dapat terpenuhi untuk Tahun 2020-2022 (kinerja > 100%) namun sejak Tahun 2023 s.d 2024 terdapat penurunan dan tidak tercapai karena beberapa faktor yang telah diuraikan sebelumnya. Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-42 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Target (%)	91,00	93,00	95,00	97,00	97,00
	Realisasi (%)	93,85	98,04	97,97	87,27	93,02
	Capaian Kinerja (%)	103,13	105,42	103,13	89,97	95,90



Gambar 3-27 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Induk Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 Nomor SP. DIPA-022.08-0/2024, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp9.687.720.000.000,00 dimana pada akhir Tahun 2024 mengalami perubahan menjadi Rp10.723.868.768.000,00 dengan kronologi sebagai berikut:

1. Pencantuman catatan halaman IVA DIPA/blokir dalam rangka memenuhi kewajiban *Automatic Adjustment* sebesar Rp200.768.903.000,00 pada tanggal 29 Januari 2024 **(tidak merubah pagu)**;
2. Lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA. 2023) yang dilanjutkan pada TA. 2024 untuk pekerjaan Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan lintas Prabumulih-Tarahan sebesar Rp11.334.966.387,00 pada tanggal 7 Maret 2024 **(merubah pagu)**;
3. Revisi anggaran pada tanggal 16 Maret 2024 sebesar Rp62.169.941.000,00, **(merubah pagu)**, dengan rincian:
 - a. Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA. 2023) untuk kontrak tahun jamak yang dilanjutkan pada TA. 2024 untuk pekerjaan Pembangunan Jalur KA Medan – Binjai sebesar Rp62.169.940.305,00; dan
 - b. Pergeseran anggaran belanja antar kegiatan kontrak tahun jamak dalam rangka pengembalian peminjaman pagu kegiatan sumber dana SBSN yang dilakukan TA. 2023 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp272.403.123.263,00.
4. Revisi anggaran pada tanggal 2 April 2024 sebesar Rp912.237.032.000,00, **(merubah pagu)**, dengan rincian:
 - a. Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA. 2023) untuk kontrak tahun jamak yang

- dilanjutkan pada TA. 2024 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, sebesar Rp879.237.030.366,00;
- b. Penambahan anggaran/percepatan penarikan PLN JICA IP-569 kegiatan *Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I* pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp33.000.000.000,00;
- c. Revisi informasi kinerja berupa perubahan nomenklatur Rincian *Output* (RO) yakni:
- 1) **Semula:** Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai-Jatinegara (Paket A Tahap III *Stage I*);
 - 2) **Menjadi:** Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai-Jatinegara (Paket A Tahap III).
5. Pergeseran anggaran dengan sumber dana Rupiah Murni antar Satker di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 3 Juli 2024 untuk dialihkan ke pekerjaan Beautifikasi Stasiun Klaten Tahap I pada Satker Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp18.926.250.000,00 **(tidak merubah pagu)**;
6. Revisi anggaran dengan sumber dana Rupiah Murni pada tanggal 29 Juli 2024 berupa pergeseran anggaran antar-Program dalam satu Satker untuk memenuhi kekurangan belanja barang honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Balai Pengujian Perkeretaapian sebesar Rp708.300.000,00 **(tidak merubah pagu)**;
7. Revisi anggaran dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) berupa buka blokir pada catatan halaman IV A DIPA dalam rangka relaksasi *Automatic Adjustment* pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp47.375.541.000,00 **(tidak merubah pagu)**;
8. Revisi anggaran dalam rangka pencantuman alokasi anggaran untuk pembayaran ganti rugi pengadaan tanah PSN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Semester I Tahun 2024 sebesar Rp47.312.891.209,00 **(merubah pagu)**;

9. Penambahan pagu pada tanggal 31 Oktober 2024 dari penggunaan dana PNPB atas pengelolaan BMN sebesar Rp5.220.150.000,00 **(merubah pagu);**
10. Pergeseran anggaran antar Eselon I dari Satker Kantor Pusat DJKA ke Biro Umum Setjen pada tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp.900.000.000,00 **(merubah pagu);**
11. Penambahan pagu DIPA Petikan BLU dalam Ambang Batas pada tanggal 16 November 2024 sebesar Rp3.166.313.000,00 **(merubah pagu);**
12. Revisi anggaran dalam rangka pencantuman alokasi anggaran untuk pembayaran ganti rugi pengadaan tanah PSN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Semester II Tahun 2024 sebesar Rp28.442.298.481,00 **(merubah pagu).**

Selain aspek penyerapan anggaran, penilaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran juga mempertimbangkan konsistensi, pencapaian *output* dan sasaran kegiatan/program. Dalam meningkatkan capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran telah dilakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja untuk dapat meningkatkan kinerja dengan pelaporan capaian *output* pada Aplikasi SAKTI dan perubahan/*update* berkala terhadap Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA guna meningkatkan Nilai Konsistensi. Beberapa faktor keberhasilan pencapaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perolehan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencapai target dikarenakan tingginya Capaian Sasaran Program (CSP) dan Capaian *Output* Program (CKP) yang merupakan bobot terbesar pada parameter penilaian untuk Unit Eselon I.
2. Pelaksanaan revisi anggaran, revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan pelaporan realisasi *output* pada aplikasi SAKTI rutin dilakukan secara berkala sehingga berdampak pada tingginya nilai rata-rata NKA Satker, konsistensi serta nilai efisiensi penggunaan anggaran.

3. Untuk komponen penyerapan anggaran yang masih rendah menjadi hal yang perlu menjadi perhatian dengan melakukan identifikasi kendala/hambatan guna perbaikan pada periode berikutnya.

E. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam rangka evaluasi capaian kinerja diperlukan *benchmarking* kinerja baik antar unit Eselon I maupun antar Kementerian/Lembaga guna menghasilkan analisa/rekomendasi yang baik. Untuk indikator persentase kualitas pelaksanaan anggaran, dilakukan analisa perbandingan terhadap realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di level Nasional serta antar unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada aplikasi Monev Kemenkeu/SMART. Adapun perhitungan NKA pada aplikasi Monev Kemenkeu di Tahun 2024 menggunakan acuan baru (PMK 62 Tahun 2023) sehingga secara perolehan NKA berbeda dengan perhitungan NKA mengacu PMK No. 22 Tahun 2021. Rincian perolehan NKA yang tercantum pada aplikasi Monev Kemenkeu (*cut off* 15 Januari 2024 Pukul 23.59 WIB) sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3-43 Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Antar Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2024

No	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	Sekretariat Jenderal	86,56	96,82	91,69
2	Inspektorat Jenderal	90,88	99,87	95,38
3	Ditjen Perhubungan Darat	74,34	94,80	84,57
4	Ditjen Perhubungan Laut	90,94	93,92	92,43
5	Ditjen Perhubungan Udara	75,64	94,79	85,22
6	Ditjen Perkeretaapian	94,49	83,05	88,77
7	Badan Kebijakan Transportasi	78,01	97,41	87,71
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	89,06	96,36	92,71
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	83,56	92,96	88,26

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa NKA Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan menduduki peringkat 5 dengan perolehan NKA sebesar 88,77. Secara berurutan unit kerja yang memperoleh NKA tertinggi-terendah yakni Inspektorat Jenderal (95,38), BPSDM Perhubungan (92,71), Ditjen Perhubungan Laut (92,43), Sekretariat Jenderal (91,69), Direktorat Jenderal Perkeretaapian (88,77), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (88,26), Badan Kebijakan Transportasi (87,71), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (85,22) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (84,57).

Selain itu, dilakukan juga analisa perbandingan terhadap salah satu komponen penilaian NKA yakni penyerapan anggaran baik tingkat Kementerian/Lembaga maupun antar Eselon I yang diperoleh dari aplikasi SPAN Kemenkeu dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3-44 Realisasi Anggaran Unit Kerja/Kementerian/Lembaga Lainnya
Tahun 2024**

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	KEMENTERIAN AGAMA	79,907,460,420,000	80,371,779,903,235	100.58%
2	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	607,819,406,000	606,410,005,802	99.77%
3	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	267,207,371,000	266,404,815,683	99.7%
4	BADAN GIZI NASIONAL	55,089,578,000	54,831,307,000	99.53%
5	BADAN PANGAN NASIONAL	36,566,072,001,000	36,391,671,109,966	99.52%
6	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,563,971,945,000	4,518,543,319,859	99%
7	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	53,679,480,000	53,130,944,432	98.98%
8	LEMBAGA SANDI NEGARA	894,547,584,000	884,369,631,849	98.84%
9	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	324,073,949,000	319,654,539,949	98.64%
10	BADAN KEAMANAN LAUT	1,213,977,911,000	1,196,090,335,743	98.53%
11	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	19,113,567,046,000	18,802,362,856,769	98.37%
12	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,377,179,459,000	1,353,579,654,064	98.29%
13	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	279,461,666,000	274,426,214,329	98.2%
14	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,385,824,117,000	1,358,476,484,431	98.03%
15	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	236,349,314,000	231,636,430,603	98.01%
16	KEMENTERIAN SOSIAL	80,287,971,882,000	78,659,077,001,003	97.97%
17	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	21,326,052,100,000	20,893,237,610,712	97.97%
18	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9,118,292,894,000	8,908,116,435,904	97.7%
19	KEMENTERIAN PERTAHANAN	192,081,623,721,000	187,623,735,452,642	97.68%
20	MAHKAMAH AGUNG	11,925,492,498,000	11,627,365,977,786	97.5%
21	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	3,240,574,636,000	3,159,110,990,180	97.49%
22	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,229,500,497,000	1,198,360,402,711	97.45%
23	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6,101,766,009,000	5,945,949,224,990	97.45%
24	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,208,445,000	182,132,211,150	97.29%
25	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	332,790,179,000	323,685,462,402	97.26%
26	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7,122,691,356,000	6,913,364,953,373	97.06%
27	ARSP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	283,568,272,000	275,365,875,155	97.04%
28	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	136,702,950,582,000	132,653,605,356,964	97.04%
29	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	4,950,792,976,000	4,801,341,341,450	96.98%
30	KOMISI YUDISIAL RI	170,866,562,000	165,694,233,451	96.97%
31	BADAN STANDARISASI NASIONAL	241,061,239,000	233,693,303,582	96.92%
32	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3,856,623,804,000	3,733,612,068,212	96.81%
33	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	5,205,771,827,000	5,021,069,637,329	96.45%
34	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	308,016,126,000	297,011,269,745	96.43%
35	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	450,466,107,000	433,338,930,871	96.2%
36	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1,581,064,124,000	1,519,896,084,525	96.13%
37	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	5,274,570,053,000	5,068,207,384,831	96.09%
38	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2,190,446,944,000	2,095,363,388,606	95.66%
39	KEMENTERIAN KEUANGAN	86,634,937,868,000	82,820,358,427,916	95.6%
40	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	104,655,221,945,000	99,832,738,425,001	95.39%
41	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	8,249,571,734,000	7,861,348,300,368	95.29%
42	KEMENTERIAN KESIHATAN	99,866,882,949,000	95,055,476,574,523	95.18%
43	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	134,183,314,000	127,231,403,996	94.82%
44	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	148,044,370,000	139,988,055,919	94.29%
45	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	248,841,107,000	234,516,025,848	94.24%
46	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,826,446,478,000	2,660,963,084,046	94.15%
47	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	286,736,181,000	269,413,778,899	93.96%
48	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	2,111,367,018,000	1,980,676,660,570	93.81%
49	PERPLUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	725,830,194,000	680,904,552,149	93.81%
50	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	534,813,627,000	500,661,517,003	93.61%
51	KEMENTERIAN PARIWISATA	3,538,787,014,000	3,308,727,914,973	93.5%
52	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	142,294,415,000	133,008,054,945	93.47%
53	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	5,139,600,992,000	4,802,469,210,561	93.44%
54	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,585,468,841,000	2,415,515,614,787	93.43%
55	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	174,137,302,977,000	162,657,722,833,015	93.41%
56	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1,229,295,942,000	1,147,741,378,665	93.37%
57	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,354,321,946,000	2,192,766,996,069	93.14%
58	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	924,541,351,000	858,280,338,723	92.83%
59	BADAN PUSAT STATISTIK	4,776,013,194,000	4,411,441,020,413	92.37%
60	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,047,662,960,000	965,509,367,948	92.16%
61	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	835,766,073,000	769,651,359,203	92.09%
62	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19,785,099,777,000	18,159,931,897,974	91.79%
63	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	8,503,573,468,000	7,793,851,649,045	91.65%
64	KEMENTERIAN PERTANIAN	15,614,583,024,000	14,299,446,173,319	91.58%
65	SEKRETARIAT KABINET	517,105,348,000	472,879,452,171	91.45%

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
66	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,573,228,177,000	1,435,689,618,124	91.26%
67	BADAN INTELIJEN NEGARA	33,559,340,605,000	30,509,523,292,632	90.91%
68	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	530,730,496,000	478,650,907,543	90.19%
69	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	324,921,688,000	292,322,295,043	89.97%
70	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	3,470,442,800,000	3,114,450,746,322	89.74%
71	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	244,786,416,000	219,405,467,864	89.63%
72	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	6,144,346,237,000	5,499,258,763,028	89.5%
73	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPPI)	351,048,527,000	314,187,569,836	89.5%
74	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	342,941,526,000	304,439,705,935	88.77%
75	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	2,102,360,067,000	1,863,051,348,066	88.62%
76	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1,710,523,612,000	1,500,101,756,801	87.7%
77	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1,527,287,931,000	1,337,334,385,631	87.56%
78	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	62,306,538,000	54,277,119,482	87.11%
79	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,248,311,610,000	6,275,337,103,442	86.58%
80	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	3,063,460,970,000	2,647,409,074,448	86.42%
81	KOMISI PEMILIHAN UMUM	50,123,089,600,000	43,027,547,235,862	85.84%
82	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	45,855,292,831,000	39,034,450,972,554	85.13%
83	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,910,041,619,000	4,991,298,230,173	84.45%
84	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	672,117,450,000	497,490,623,495	74.02%
85	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	18,123,415,698,000	12,882,583,445,880	71.08%
86	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	827,155,989,000	456,235,785,897	55.16%

Tabel 3-45 Realisasi Anggaran Per-Unit Eselon I Tahun 2024

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja										Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer		
1	02201 SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU REALISASI	153,147,196,000 152,500,922,290 (99.58%)	450,495,032,000 420,732,485,700 (94.73%)	58,954,280,000 57,734,429,309 (97.93%)	0	0	0	0	0	0	662,595,418,000 636,987,837,300 (96.14%)	
		SISA	646,183,710	23,742,546,240	1,219,850,691	0	0	0	0	0	0	23,608,580,640	
		PAGU REALISASI	50,227,251,000 50,188,210,976 (96.52%)	61,075,818,000 57,534,690,263 (94.22%)	3,921,753,000 3,879,369,347 (98.92%)	0	0	0	0	0	0	115,224,822,000 111,602,270,596 (96.86%)	
2	02202 INSPEKTORAT JENDERAL	SISA	39,040,024	3,541,127,737	42,383,653	0	0	0	0	0	0	3,622,551,414	
		PAGU REALISASI	665,206,211,000 661,720,939,656 (96.48%)	3,767,185,479,000 3,545,374,692,202 (93.37%)	2,287,906,931,000 2,132,252,960,190 (93.20%)	0	0	0	0	0	0	6,750,298,621,000 6,339,349,516,250 (93.91%)	
		SISA	3,485,571,142	221,810,486,798	155,654,044,810	0	0	0	0	0	0	410,950,162,750	
4	02204 DIJTJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU REALISASI	1,963,838,533,000 1,916,276,036,592 (97.58%)	5,528,147,295,000 5,169,324,293,150 (94.05%)	7,146,494,405,000 6,900,317,568,813 (96.56%)	0	0	0	0	0	0	14,638,480,234,000 14,015,917,868,545 (95.75%)	
		SISA	47,562,496,418	328,823,001,850	246,175,837,187	0	0	0	0	0	0	622,562,335,455	
		PAGU REALISASI	1,085,923,101,000 1,050,603,397,174 (96.57%)	3,267,284,059,000 3,030,344,627,300 (92.18%)	3,878,729,504,000 3,619,907,398,883 (93.35%)	0	0	0	0	0	0	8,241,936,664,000 7,709,945,523,447 (93.55%)	
5	02205 DIJTJEN PERHUBUNGAN UDARA	SISA	15,229,703,826	267,936,231,610	268,822,105,117	0	0	0	0	0	0	631,901,040,553	
		PAGU REALISASI	189,147,790,000 186,188,948,422 (96.44%)	2,880,697,629,000 2,964,880,667,684 (93.14%)	7,854,023,149,000 3,249,404,192,951 (42.45%)	0	0	0	0	0	0	10,723,868,768,000 6,890,473,669,357 (54.37%)	
		SISA	2,958,841,578	485,817,271,016	4,404,618,956,049	0	0	0	0	0	0	4,803,395,068,643	
6	02208 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	41,935,254,000 41,488,904,048 (96.53%)	147,709,606,000 130,746,630,521 (94.91%)	6,811,480,000 6,807,745,011 (99.95%)	0	0	0	0	0	0	195,457,340,000 188,043,270,980 (95.72%)	
		SISA	447,349,952	7,962,975,679	3,734,988	0	0	0	0	0	0	8,414,060,020	
		PAGU REALISASI	358,576,891,000 352,032,786,597 (96.34%)	3,071,443,402,000 2,858,287,005,505 (93.06%)	786,235,660,000 675,608,904,956 (87.96%)	0	0	0	0	0	0	4,196,255,953,000 3,884,889,357,156 (92.58%)	
8	02212 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	SISA	5,944,104,403	213,156,796,695	92,266,665,044	0	0	0	0	0	0	311,366,595,842	
		PAGU REALISASI	37,157,078,000 37,160,877,806 (96.98%)	228,583,153,000 222,481,822,129 (97.34%)	64,453,780,000 57,600,187,934 (89.38%)	0	0	0	0	0	0	330,174,011,000 317,242,487,871 (96.08%)	
		SISA	6,200,192	6,081,330,871	6,843,992,066	0	0	0	0	0	0	12,931,523,129	
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	4,525,160,215,000 4,448,840,723,755 (96.31%)	19,462,601,673,000 17,883,727,905,704 (91.89%)	21,857,530,943,000 16,701,882,343,054 (76.38%)	0	0	0	0	0	0	45,855,292,831,000 39,834,450,972,554 (85.13%)	
		SISA	78,319,491,245	1,578,873,767,295	5,185,648,599,906	0	0	0	0	0	0	6,820,841,858,446	

Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian (54,37%) masih dibawah rata-rata penyerapan anggaran baik secara nasional maupun di internal Kementerian Perhubungan. Pada internal Kementerian Perhubungan, realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih dibawah rata-rata dimana realisasi Kementerian Perhubungan sebesar 85,13%. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya secara masif dan nyata guna meningkatkan kinerja penyerapan anggaran pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan capaian *output* dan *outcome* kegiatan serta menunjukkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

F. Upaya Peningkatan Kinerja

Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan pada periode berikutnya. Beberapa upaya yang perlu dilaksanakan diantaranya:

1. Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran agar kegiatan prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dengan *output* maksimal.
2. Rapat koordinasi intensif, monitoring dan pelaporan rutin oleh seluruh unit kerja terkait realisasi anggaran dan progres/*output* kegiatan sesuai RPD/prognosa termasuk kesiapan dokumen perencanaan teknis dengan dukungan PMU/tenaga ahli.
3. Melakukan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan pelaporan realisasi *output* pada aplikasi SAKTI secara rutin dan berkala guna meningkatkan nilai rata-rata NKA Satker, konsistensi serta nilai efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

Optimalisasi penerapan manajemen risiko pada kegiatan prioritas guna mempersiapkan rencana penanganan risiko/solusi percepatan penyelesaian kegiatan prioritas.

2. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

- a. Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncheon SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 pada 11 kegiatan dengan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024.
- b. Antisipasi kegiatan prioritas yang terdampak kebijakan blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia.

3. *Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai:*

Pelatihan kepada operator aplikasi SAKTI agar dapat melakukan *input* data sesuai ketentuan dan valid.

Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan indikator kinerja terhadap layanan perkantoran termasuk pemenuhan kebutuhan pegawai dan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian. Kegiatan layanan perkantoran berupa layanan prasarana dan sarana internal terkait dukungan kegiatan perkantoran dan juga terkait pengelolaan SDM dan ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memperoleh layanan terkait SDM, ketatausahaan dan umum/kerumahtanggaan. Pelaksanaan survei dilaksanakan setiap triwulan melalui *google form* yang disebarkan diantaranya melalui Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), ditargetkan tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan nilai 3,70. Pada Triwulan IV Tahun 2024, telah dilaksanakan survei dengan pengisian kuisioner oleh 175 pegawai dari 1.578 pegawai (11,09%) dan diperoleh tingkat kepuasan pelayanan perkantoran sebesar 3,71. Secara rinci pengolahan hasil survey diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-46 Uraian Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Triwulan IV Tahun 2024

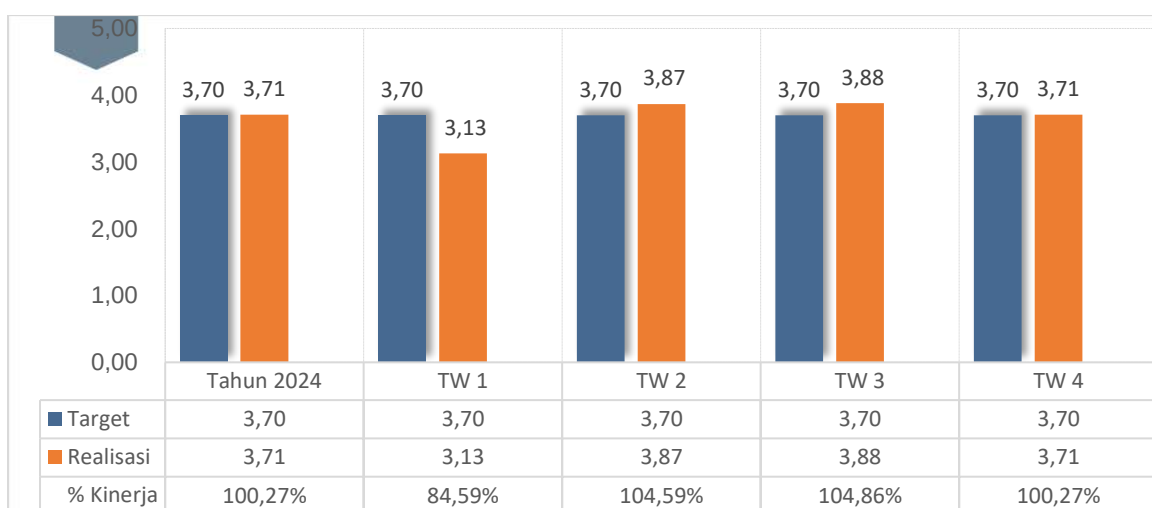
No	Uraian	Respon					Total	Top Two	Nilai
		Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik			
1	Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan SDM/Kepegawaian	0	94	241	579	311	1.225	0,92	3,62
2	Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Tata Usaha	0	66	210	608	341	1.225	0,95	3,73
3	Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/ Umum	0	78	293	873	506	1.750	0,96	3,78
Nilai									3,71

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi tingkat kepuasan pelayanan perkantoran sebesar 3,71 dan target Tahun 2024 sebesar 3,70, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,27%. Mayoritas pencapaian indikator kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track* yaitu mencapai kinerja 100,00% yaitu pada Triwulan II-III Tahun 2024. Rincian target dan realisasi tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-47 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,13	3,87	3,88	3,71	84,59	104,60	104,90	100,27	100,27



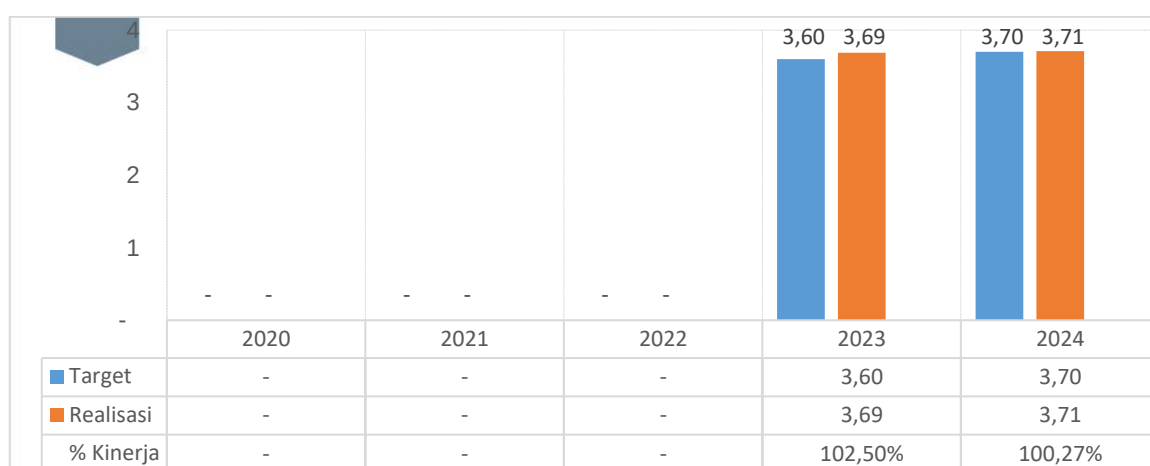
Gambar 3-28 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran merupakan indikator baru di Tahun 2023 menyesuaikan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Oleh karena itu, pada periode sebelumnya yakni Tahun 2020 s.d 2022 belum dilaksanakan pengukuran dan penilaian terhadap indikator tersebut. Adapun hasil survey dan penilaian di Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 sebesar 3,69 menjadi 3,71 di Tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja dengan target beberapa tahun terakhir sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3-48 Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	3,60	3,70	-	-	-	3,69 (Kinerja 102,50%)	3,71 (Kinerja 100,27%)



Gambar 3-29 Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

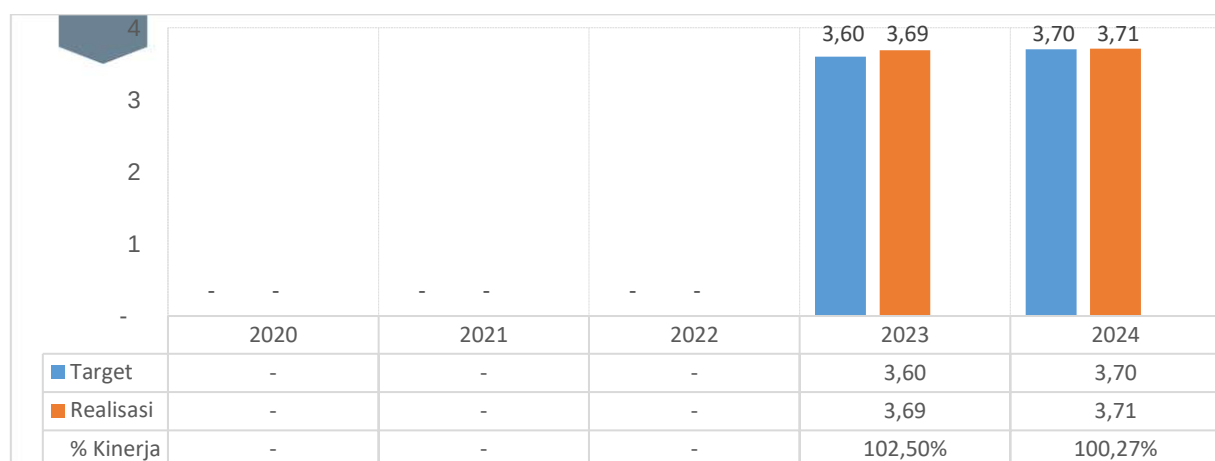
C. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran merupakan indikator baru di Tahun 2023 dan tidak tercantum pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sehingga pengukuran yang bisa dilaksanakan hanya pada Tahun 2023 s.d 2024 saja berdasarkan target yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Secara keseluruhan target kinerja pada Rencana Strategis dapat terpenuhi untuk Tahun 2023-2024 (kinerja > 100%).

Tabel 3-49 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Target (Nilai)*	-	-	-	3,60	3,70
	Realisasi (Nilai)	-	-	-	3,69	3,71
	Capaian Kinerja (%)	-	-	-	102,50	100,27

Keterangan: *) Target mengacu Perjanjian Kinerja Tahun 2023-2024



Gambar 3-30 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Terpenuhinya target tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan perkantoran diantaranya karena beberapa faktor diantaranya:

1. Penyediaan fasilitas dan layanan perkantoran yang memberikan pengaruh positif terhadap kualitas layanan internal terhadap pegawai dan pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Penyediaan fasilitas dan layanan tersebut juga didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup serta distribusi yang tepat sasaran
2. Sosialisasi disiplin pegawai dan layanan pembinaan pegawai diantaranya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan judi *online*, sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dan SE Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan

Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Sektor Transportasi serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Pelaksanaan CACT dengan bekerjasama dengan BKN untuk pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian di beberapa lokasi.
4. Penyusunan Proses Bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-219 Tahun 2024. Selain itu, sebagai tindak lanjut penetapan proses bisnis, juga telah dilakukan penyusunan SOP (saat ini dalam proses persetujuan pimpinan).
5. Pembinaan dan pelaksanaan evaluasi pengawasan internal kearsipan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6. Koordinasi dan monitoring pemanfaatan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Perkeretaapian sebagai media dukungan manajemen termasuk tata usaha dan layanan kepegawaian, salah satunya dengan pengembangan fitur Pengelolaan Perjalanan Dinas dan Persetujuan Terpusat.

E. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tingkat kepuasan pelayanan perkantoran antara lain:

1. Peningkatan layanan SDM/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana berdasarkan hasil survei masih terdapat penilaian yang kurang baik pada layanan pembinaan kepegawaian dan layanan mutasi dan jenjang karir pegawai.
2. Pengoptimalan sistem TIK untuk *database* dan *share* informasi terkait layanan kepegawaian sehingga lebih cepat dan informatif kepada seluruh pegawai (misalnya terkait pengelolaan perjalanan dinas, persetujuan terpusat, mekanisme izin belajar, izin cuti, tugas belajar, kenaikan pangkat, informasi diklat, dan lainnya).

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

Percepatan penetapan/pengesahan SOP mikro terkait layanan kepegawaian, tata usaha dan umum/kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut penyusunan Proses Bisnis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

Antisipasi kegiatan pendukung layanan yang terdampak kebijakan blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia.

3.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia lebih efektif dan efisien. Dari sisi ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan perlu didukung dengan kompetensi/keahlian yang dimiliki dalam pencapaian target/tujuan organisasi. Pada Tahun 2024, jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 114 pegawai atau sebesar 7,22% dari total pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (1.578 pegawai). Dari total pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut, 100 pegawai diantaranya telah memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (87,72% dari total pegawai Setditjen Perkeretaapian). SDM yang ahli dan kompeten di bidangnya tersebut cukup

mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dimana dibuktikan dengan 8 IKK telah mencapai target Tahun 2024 dari 10 IKK pada Tahun 2024.

Selain itu, diperlukan perhitungan efisiensi terhadap SDM untuk mengevaluasi sejauh mana SDM (*input*) yang digunakan dapat memberikan hasil (*output*) yang maksimal dan berkontribusi/berperan secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun pendekatan rumus perhitungan efisiensi SDM di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi SDM} = \left(\frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} \times \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Target Output}} \right) \times 100\%$$

Kebutuhan SDM berdasarkan Analisa Kebutuhan/Beban Kerja (ABK) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 s.d 2029 sebanyak 2.446 pegawai dimana 239 diantaranya merupakan kebutuhan pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dengan kebutuhan SDM Tahun 2025 s.d 2029 sesuai ABK sebanyak 239 pegawai dan jumlah SDM eksisting sebanyak 114 pegawai, maka diperoleh kebutuhan SDM pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 353 pegawai. Selanjutnya, diperoleh efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 47,70% dengan rincian perhitungan efisiensi SDM sebagai berikut:

Tabel 3-50 Analisis Efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Jumlah SDM Eksisting	Kebutuhan SDM 2025-2029	Rasio SDM (Eksisting dibandingkan dengan Kebutuhan sesuai ABK)	Rasio Output*	Efisiensi SDM (Rasio SDM x Rasio Output)
114	239	47,70%	100,00%	47,70%

*) Rasio Output Setdijen Perkeretaapian Tahun 2024 diperoleh dari Aplikasi Monev Kemenkeu

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan efisiensi anggaran dimana beberapa target indikator kinerja kegiatan telah tercapai sesuai target Tahun 2024 dan masih terdapat sisa anggaran dari pagu yang dialokasikan pada Tahun 2024. Rincian efisiensi sumber daya anggaran disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-51 Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan				Keterangan
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	7.166.891.000	3.794.099.300	52,94%	3.372.791.700	Pelaksanaan studi/kajian untuk rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian berupa evaluasi manfaat telah selesai 100% dan telah disahkan oleh pimpinan.
2	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	108,89	108,89	100,00	6.255.254.000	4.500.448.695	71,95%	1.754.805.305	Pelaksanaan koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang perkeretaaan dengan pihak terkait dan Direktorat Teknis di lingkungan DJKA telah memenuhi kebutuhan/tuntutan
3	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	%	70,00	76,62	109,46	12.441.979.000	11.072.316.154	88,99%	1.369.662.846	Koordinasi pelaksanaan diklat dan pembinaan ASN untuk memiliki sertifikat kompetensi dan keahlian tertentu/teknis
4	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	74,00	74,07	100,09	3.527.636.000	3.025.172.794	85,76%	502.463.206	Penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan TIK DJKA berupa reviu <i>roadmap</i> TIK, kegiatan pengelolaan <i>website</i> dan pengembangan portal aplikasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan				Keterangan
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
5	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100,00	105,36	105,36	11.503.441.000	10.357.037.574	90,03%	1.146.403.426	Pemberitaan/publikasi terkait perkeretaapian melalui media cetak, elektronik maupun sosial media
6	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83,00	82,95	99,94	13.029.939.000	9.200.855.195	70,61%	-	Target kinerja tidak tercapai, tidak ada efisiensi
7	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3	3	100,00	5.801.206.000	4.026.648.803	69,41%	1.774.557.197	Kegiatan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan SPIP (penilaian risiko) dan penilaian maturitas SPIP
8	Persentase Realisasi Penadapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,00	92,57	92,57	6.415.812.000	5.068.644.738	79,00%	-	Target kinerja tidak tercapai, tidak ada efisiensi
9.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	89,00	93,02	104,52	7.809.221.000	5.258.596.236	67,34%	2.550.624.764	Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam optimalisasi pelaksanaan anggaran sesuai target dengan efektif dan efisien
10.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,71	100,27	115.853.662.000	115.029.111.614	99,29%	824.550.386	Kepuasan atas pelayanan perkantoran yang diukur melalui survey terhadap pegawai di lingkungan Setditjen KA
Jumlah						189.805.041.000	171.332.931.103	90,27	18.472.109.897 (7,01%)	Efisiensi juga termasuk efisiensi perjalanan dinas

3.4 CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA

Pencapaian keberhasilan lainnya merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang membawahi 4 bidang yaitu Perencanaan, Keuangan, Hukum, serta SDM dan Umum. Pada Tahun 2024, terdapat capaian keberhasilan lainnya yang merupakan hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi diantaranya:

1. Pada Januari 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh Piagam Penghargaan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagai Unit Kerja Peringkat II Terbaik sesuai hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;



Gambar 3-31 Unit Kerja Peringkat II Terbaik sesuai hasil SAKIP Tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

2. Pada periode Triwulan II Tahun 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh Piagam Penghargaan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagai unit kerja peringkat I dengan kategori Capaian Kinerja Terbaik berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;



Gambar 3-32 Penyerahan Piagam Penghargaan berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024

3. Pada Agustus 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh penghargaan terkait kinerja pensertifikatan barang milik negara berupa tanah dari Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.
4. Pada Agustus 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh penghargaan *Appreciation Stakeholder* sebagai Mitra Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Kurikulum dari PTDI - Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi.
5. Pada Triwulan III Tahun 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh Piagam Penghargaan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagai unit kerja peringkat I dengan kategori capaian kinerja terbaik berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;



Gambar 3-33 Penghargaan Unit Kerja Dengan Capaian Kinerja Terbaik Triwulan III Tahun 2024 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

6. Pada Desember 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh Piagam Penghargaan sebagai Peringkat Ketiga Unit Kearsipan II dengan Kategori A "Memuaskan" dalam rangka Penilaian Kearsipan Internal di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Tahun 2024.

3.5 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Induk Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 Nomor SP. DIPA-022.08-0/2024, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp9.687.720.000.000,00 yang selanjutnya pada akhir Tahun 2024 mengalami perubahan menjadi Rp10.723.868.768.000,00. Perubahan alokasi pagu pada unit Eselon I tersebut berpengaruh terhadap pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai DIPA awal sebesar Rp190.705.041.000,00 menjadi sebesar Rp189.805.041.000,00 karena adanya pergeseran anggaran antar unit Eselon I dari Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sebesar Rp900.000.000,00 pada 31 Oktober 2024. Selain itu juga terdapat perubahan/pergeseran pada level Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) hingga level Komponen sehingga mempengaruhi perubahan alokasi anggaran per-Indikator Kinerja Kegiatan.

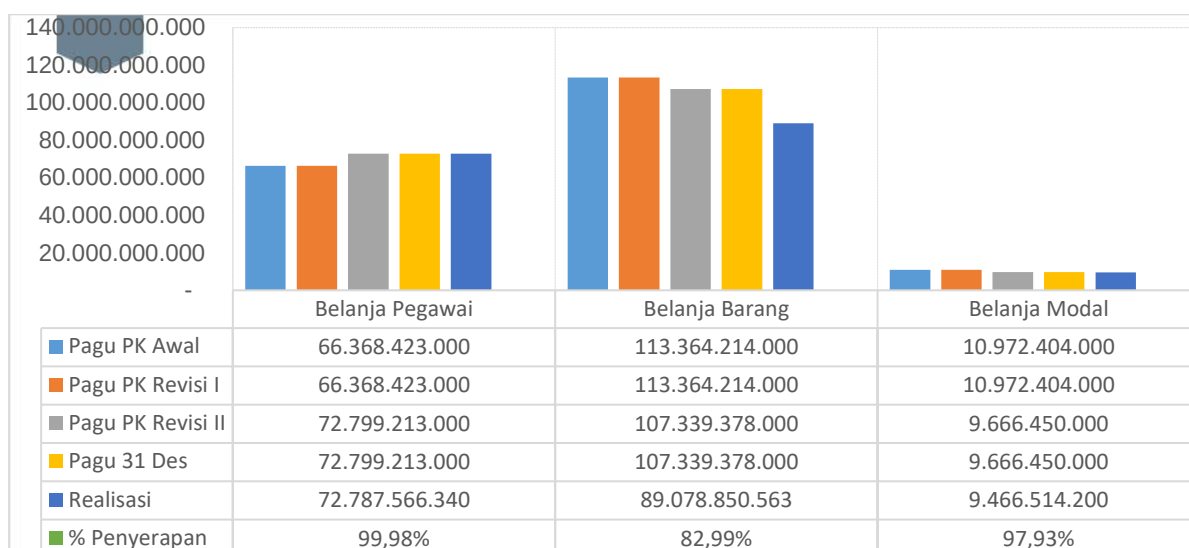
Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 sebesar Rp171.332.931.103,00 atau 90,27% dan telah melaksanakan seluruh kegiatan/*output* sesuai dengan target yang ditetapkan (realisasi fisik/*output* 100,00%). Rincian realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian per-jenis belanja dan per-*output* kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3-52 Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

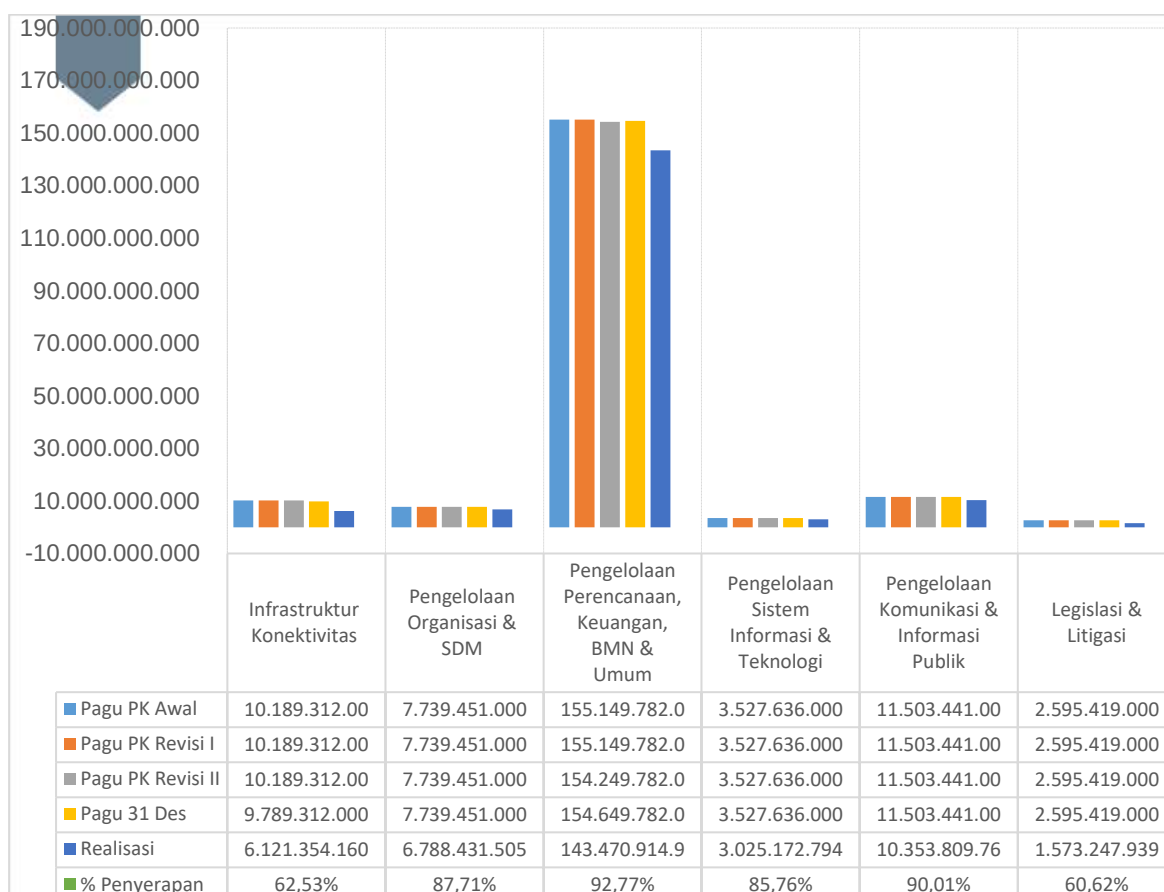
No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK Awal	Pagu Sesuai PK Revisi I	Pagu Sesuai PK Revisi II	Pagu 31 Desember 2024	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	66.368.423.000	66.368.423.000	72.799.213.000	72.799.213.000	72.787.566.340	99,98	11.646.660	0,02
2.	Belanja Barang	113.364.214.000	113.364.214.000	107.339.378.000	107.339.378.000	89.078.850.563	82,99	18.260.527.437	17,01
3.	Belanja Modal	10.972.404.000	10.972.404.000	9.666.450.000	9.666.450.000	9.466.514.200	97,93	199.935.800	2,07
Jumlah		190.705.041.000	190.705.041.000	189.805.041.000	189.805.041.000	171.332.931.103	90,27	18.472.109.897	9,73

Tabel 3-53 Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Output/Kegiatan

No.	Output Kegiatan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK Awal	Pagu Sesuai PK Revisi I	Pagu Sesuai PK Revisi II	Pagu 31 Desember 2024	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	10.189.312.000	10.189.312.000	10.189.312.000	9.789.312.000	6.121.354.160	62,53	3.667.957.840	37,47
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi KA	7.739.451.000	7.739.451.000	7.739.451.000	7.739.451.000	6.788.431.505	87,71	951.019.495	12,29
3.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	155.149.782.000	155.149.782.000	154.249.782.000	154.649.782.000	143.470.914.943	92,77	11.178.867.057	7,23
4.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi KA	3.527.636.000	3.527.636.000	3.527.636.000	3.527.636.000	3.025.172.794	85,76	502.463.206	14,24
5.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi KA	11.503.441.000	11.503.441.000	11.503.441.000	11.503.441.000	10.353.809.762	90,01	1.149.631.238	9,99
6.	Legislasi dan Litigasi Transportasi KA	2.595.419.000	2.595.419.000	2.595.419.000	2.595.419.000	1.573.247.939	60,62	1.022.171.061	39,38
Jumlah		190.705.041.000	190.705.041.000	189.805.041.000	189.805.041.000	171.332.931.103	90,27	18.472.109.897	9,73



Gambar 3-34 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Per Jenis Belanja



Gambar 3-35 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Per Output Kegiatan

Pada Tahun 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan tetap mempertimbangkan pencapaian per *output* kegiatan yaitu:

1. Realisasi belanja pegawai mencapai 99,98% dikarenakan selisih pagu anggaran perencanaan perhitungan belanja pegawai dengan asumsi penyesuaian tunjangan kinerja/lainya pada pegawai yang beralih status menjadi pejabat fungsional tertentu bidang perkeretaapian;
2. Realisasi belanja barang tidak mencapai 100% sebagai langkah efisiensi pelaksanaan belanja barang di seluruh unit kerja di lingkungan Sekeretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu, pada akun belanja barang juga terdapat blokir *Automatic Adjustment* yang tidak bisa di realokasi ke BABUN;
3. Realisasi belanja modal tidak mencapai 100% merupakan selisih pagu anggaran terhadap kontrak pelaksanaan kegiatan.

Penyerapan anggaran berbasis kinerja sudah seharusnya berpegang pada tiga prinsip, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif dengan memperhatikan dan membandingkan *input* atas *output* dan *outcome*. Realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan serta indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 3-54 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Program	Kegiatan/Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	7.166.891.000	3.794.099.300	52,94%
Program Dukungan Manajemen	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan)	6.255.254.000	4.500.448.695	71,95%

Program	Kegiatan/Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/ keahlian	12.441.979.000	11.072.316.154	88,99%
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian	3.527.636.000	3.025.172.794	85,76%
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	11.503.441.000	10.357.037.574	90,03%
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian;	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	13.029.939.000	9.200.855.195	70,61%
		Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	5.801.206.000	4.026.648.803	69,41%
		Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian Bidang Perkeretaapian	6.415.812.000	5.068.644.738	79,00%
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	7.809.221.000	5.258.596.236	67,34%
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkantoran	115.853.662.000	115.029.111.614	99,29%
		Jumlah			189.805.041.000

BAB 4 PENUTUP

4.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada laporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2024), sebagai berikut:

Tabel 4-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pelaporan Kinerja Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	Penyelesaian kegiatan pendukung (studi/kajian) melalui asistensi berkala serta pembahasan konsep laporan akhir oleh Tim Pendamping dan Tim Pengarah untuk memastikan kegiatan pendukung selesai tepat waktu dan memenuhi sasaran pada kerangka acuan kerja termasuk menindaklanjuti seluruh masukan/saran dari <i>stakeholder</i> terkait.	Kegiatan studi/kajian Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan secara tepat waktu dan telah memenuhi seluruh lingkup pekerjaan sesuai ketentuan pada KAK serta juga telah ditetapkan/disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 234 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024.
	Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait penetapan/pengesahan hasil studi/kajian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian.	
	Penyesuaian rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu pada hasil kegiatan pendukung (studi/kajian).	Pada Tahun 2024, telah dilakukan penyusunan naskah teknokratik Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan selanjutnya akan dilakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan dan strategi mengacu pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan untuk selanjutnya dilakukan penetapan secara berjenjang.
	Melakukan pengarsipan secara digital hasil studi/kajian agar mudah diakses internal/eksternal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Hasil studi/kajian telah diarsip secara digital pada portal layanan Ditjen Perkeretaapian (fitu <i>database</i> perencanaan teknis) guna dapat mudah diakses oleh internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta meningkatkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Persentase pencapaian target legislasi (jumlah rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian	Koordinasi intensif dengan Biro Hukum Kementerian Perhubungan guna percepatan penerbitan peraturan bidang perkeretaapian yang telah disetujui Presiden (revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi).	Telah terbit PM 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi sebagai tindak lanjut revisi PM 68 Tahun 2016 pada tanggal 9 Desember 2024.
	Percepatan pembahasan lanjutan untuk penyelesaian beberapa ketentuan prioritas yang telah diusulkan Direktorat teknis, diantaranya terkait penyelenggaraan trem otonom, persyaratan teknis jalur kereta api, ketentuan jenis, kelas dan kegiatan di stasiun kereta api.	Pembahasan lanjutan antara Bagian Hukum dan Direktorat LLAKA serta stakeholder terkait lainnya direncanakan pada Januari 2025.
	Diperlukan masukan/saran dari <i>stakeholder</i> perkeretaapian terkait kajian evaluasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 melalui pelaksanaan FGD/seminar.	Telah dilaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) pada tanggal 21 November 2024 dengan turut mengundang berbagai <i>stakeholders</i> baik internal maupun eksternal Kementerian Perhubungan seperti Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian termasuk akademisi/Perguruan Tinggi dengan tujuan mengumpulkan perspektif/sudut pandang yang beragam dari setiap <i>stakeholders</i>, identifikasi masalah dan kebutuhan yang lebih luas, perumusan strategi yang inklusif serta penguatan kolaborasi dan komitmen.
	Diusulkan penyiapan kerangka regulasi mencakup kebutuhan legislasi/peraturan perundangan bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis	Telah dilakukan penyiapan kerangka regulasi yang mencakup kebutuhan legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 pada naskah teknokratik Renstra Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025-2029.
Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	Melanjutkan pendidikan dan pelatihan termasuk bimbingan teknis/<i>workshop</i> baik bidang manajerial/umum dan teknis perkeretaapian kepada ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai kebutuhan kompetensi dan ketersediaan anggaran.	Telah dilakukan serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang manajerial/umum pada Triwulan IV 2024 diantaranya pelatihan <i>Effective Coaching and Mentoring</i> pada November – Desember 2024 serta pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko (QRMO) pada November 2024.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka pemetaan kebutuhan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode mendatang.	Telah dilakukan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja guna pemetaan kebutuhan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029.
	Diusulkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja telah melebihi 110% guna memastikan pencapaian pada akhir tahun memenuhi kriteria <i>on the right track</i> (range capaian 90%-110%).	Telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Desember 2024 dimana pada indikator kinerja Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu dilakukan penyesuaian target kinerja tahunan (target semula 65% menjadi 70%) untuk memastikan capaian kinerja di akhir Tahun 2024 dapat memenuhi kriteria <i>on the right track</i> (capaian 90-110%).
	Penyesuaian penempatan pegawai setelah pengukuhan Jabatan Fungsional Tertentu bidang perkeretaapian sesuai kompetensi	Pada akhir Tahun 2024 telah dilakukan penyesuaian penempatan pegawai dengan jabatan fungsional perkeretaapian secara bertahap di seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	Penyelesaian Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan serta sebagai acuan dalam perencanaan TIK Tahun 2025-2029 sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Kementerian Perhubungan.	Pada Triwulan IV 2024, penyusunan Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah selesai dilaksanakan serta telah menyesuaikan dengan kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan dan sebagai acuan dalam perencanaan TIK Tahun 2025-2029 sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Kementerian Perhubungan..
	Penyelesaian pengembangan Portal Aplikasi sebagai Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (<i>Super Apps</i>) yang terintegrasi dengan aplikasi teknis lainnya sebagai modul-modul layanan serta optimalisasi fitur untuk dukungan manajemen dan teknis.	Pada Triwulan IV 2024, pengembangan Portal Aplikasi sebagai Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (<i>Super Apps</i>) telah dilakukan dan melakukan integrasi aplikasi teknis lainnya sebagai modul layanan. Hal tersebut sebagai langkah/tahapan penyederhanaan aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	Penyediaan <i>landing page</i> yang dapat mengakses berbagai modul layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Pada Triwulan IV 2024, telah tersedia landing page yang menampilkan berbagai modul layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Halaman <i>landing page</i> tersebut dapat di akses ke https://dika.kemenhub.go.id/.
	Koordinasi dalam penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Kementerian Perhubungan.	Pada Triwulan IV 2024, telah dilakukan koordinasi dengan Pusdatin Perhubungan dan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait arsitektur SPBE dan peta rencana SBPE.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Penyesuaian usulan kegiatan TIK pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 sebagaimana arahan Pusdatin dan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan (perubahan nomenklatur judul kegiatan serta pemindahan kegiatan pada koordinator TIK khususnya terkait usulan aplikasi/modul layanan pada Direktorat teknis/Balai)	Pada Triwulan IV 2024, telah dilakukan penyesuaian usulan kegiatan TIK pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 melalui surat Sesditjen Perkeretaapian Nomor TI.101/1/9/K1/DJKA/2024 tanggal 19 November 2024 hal Usulan Kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.
Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyelesaian majalah perkeretaapian sesuai tema yang telah dibahas dan disepakati dengan dukungan peliputan di wilayah tertentu.	Tim Humas telah melakukan penerbitan 2 edisi majalah perkeretaapian pada bulan Oktober (edisi I) dan Desember 2024 (edisi II).
	Tindak lanjut pengaduan/permintaan informasi publik bidang perkeretaapian melalui <i>website</i> atau <i>call center</i> 151.	Telah diltindaklanjuti seluruh permintaan informasi publik bidang perkeretaapian melalui <i>website</i> dan <i>call center</i> 151 dengan melibatkan unit kerja terkait.
	Peningkatan publikasi dalam bentuk berita/data/informasi melalui <i>website</i> serta siaran pers/liputan terkait perkeretaapian dengan menyiapkan berbagai topik antara lain persiapan Angkutan Nataru Tahun 2024/2025, program unggulan Tahun 2025, dan kebijakan pengembangan perkeretaapian 5 tahun ke depan	Telah dilakukan publikasi terkait pemanfaatan hasil-hasil pembangunan serta kebijakan pengembangan perkeretaapian ke depan dalam bentuk siaran pers, publikasi pada media sosial, pameran, dan kegiatan edukasi.
Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyesuaian hasil penilaian terhadap evaluasi implementasi SAKIP kepada 11 unit kerja non sampel mengacu standar/kriteria yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal.	Pada Triwulan IV, telah dilaksanakan koordinasi terkait perbaikan pengisian LKE untuk melengkapi data dukung evaluasi implementasi SAKIP pada masing-masing komponen, sub komponen dan kriteria melalui aplikasi SILAKI oleh 11 unit kerja non-<i>sample</i> dan hasil evaluasi telah disampaikan ke seluruh unit kerja non-<i>sample</i> dengan mengacu standar/kriteria yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal.
	Menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2024.	Telah ditindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Inspektorat Jenderal sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor PS.006/1/1/DJKA/2024 tanggal 30 Oktober 2024 kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.
	Melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi	Telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada bulan Desember 2024 dalam rangka penyesuaian sumber daya anggaran dan memastikan capaian kinerja di akhir Tahun 2024 dapat memenuhi

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	terhadap capaian indikator kinerja yang sudah tidak memenuhi kriteria <i>on the right track</i> (90% s.d 110%).	kriteria <i>on the right track</i> (capaian 90-110%).
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis guna meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka persiapan penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pada tanggal 11 s.d 13 Desember 2024 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP dan Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025 yang dihadiri perwakilan Direktorat, Balai dan Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta narasumber dari Kementerian PAN RB dan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan.
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinasi dan pembahasan terkait hasil evaluasi BPKP terhadap penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk selanjutnya digunakan sebagai capaian kinerja masing-masing unit kerja.	Pada Desember 2024, telah dilaksanakan pembahasan terkait hasil evaluasi BPKP terhadap penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	Penyusunan dokumen manajemen risiko Tahun 2025 serta koordinasi pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2024 di tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan.	Telah disusun penetapan konteks, profil risiko, rencana tindak pengendalian, piagam manajemen risiko, serta mengusulkan alokasi anggaran untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2025.
	Percepatan penetapan proses bisnis serta finalisasi kamus risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mendukung penerapan manajemen risiko Tahun 2025 sesuai KM 69 Tahun 2023.	Telah dilakukan penetapan Proses Bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 219 Tahun 2024 tanggal 28 November 2024. Selain itu, telah selesai dilakukan penyusunan Kamus Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan telah dilakukan penetapan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor SE-DJKA 3 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Kamus Risiko Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 3 Desember 2024.
	Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko kepada SDM yang bertugas sebagai Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Telah diselenggarakan pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada zJuni dan November 2024.
	Monitoring berkala terkait	Hingga akhir Tahun 2024, Satuan Biaya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	pelaksanaan TAC TA. 2024 dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan penetapan besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp)	Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp) untuk TAC Tahun 2024 masih dalam proses persetujuan di Kementerian Keuangan. Setelah mendapat persetujuan oleh Kementerian Keuangan, selanjutnya Badan Usaha akan melakukan pembayaran PNBP TAC melalui perhitungan <i>self assessment</i> . Adapun hasil perhitungan <i>self assessment</i> dari Badan Usaha tersebut akan dilakukan verifikasi oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan melibatkan BPKP serta memperhatikan kemampuan membayar dari Badan Usaha. Ditargetkan pada Triwulan I Tahun 2025, seluruh proses pembayaran TAC Tahun 2024 (penagihan, verifikasi dan penyetoran) dapat terealisasi.
	Penyelesaian regulasi pendukung untuk percepatan penagihan TAC TA. 2024	Hingga akhir Tahun 2024, penyiapan regulasi pendukung penagihan TAC TA 2024 secara paralel telah dilaksanakan. Namun, penetapan baru akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan terkait SBPP dan Fp dari Kementerian Keuangan.
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	Melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan pada Halaman III DIPA Periode Triwulan IV, serta penyusunan target dan realisasi capaian <i>output</i> yang nantinya akan berpengaruh pada capaian pada indikator Deviasi Halaman III DIPA dan indikator Capaian <i>Output</i>.	Secara rutin dan berkala pada Triwulan IV telah dilakukan pengisian dan perbaikan capaian <i>output</i> yang valid serta melakukan update Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI oleh seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	Menjelang memasuki periode akhir tahun anggaran, masing-masing satuan kerja akan menyisir kembali sisa anggaran kegiatan untuk dapat segera dilaksanakan kegiatan dan pembayarannya agar mengurangi beban pekerjaan di akhir tahun.	Telah dilaksanakan dengan baik pada Triwulan IV Tahun 2024 guna mendukung percepatan penyerapan anggaran dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan.
	Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait untuk percepatan perpanjangan MYC/perubahan skema dari SYC menjadi MYC pada beberapa kegiatan yang masih berproses.	Hingga akhir Tahun 2024, terdapat 11 kegiatan yang telah disetujui perpanjangan/perubahan MYC, selanjutnya seluruh Satker pengusul telah diinformasikan untuk dapat segera melengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024. Adapun batas waktu revisi luncuran adalah 23 Januari 2025 untuk SBSN SYC dan 14 Februari 2025 untuk luncuran SBSN MYC.
	Percepatan penugasan	Telah dilaksanakan kontrak pekerjaan IMO

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	penyelenggaraan IMO 2024 sehingga dapat segera dilaksanakan oleh masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian.	Tahun 2024 oleh 7 Balai Teknik Perkeretaapian pelaksana IMO dan telah dilakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut kepada PT. KAI.
	Koordinasi dan pengusulan anggaran yang terdampak <i>Automatic Adjustment</i> TA. 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar dapat di realokasi ke BABUN.	Hingga akhir Tahun 2024, proses realokasi anggaran yang terdampak <i>Automatic Adjustment</i> tidak dapat direalokasi ke BABUN sehingga berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran.
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Pelaksanaan sosialisasi KM 58 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan KM 84 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Telah dilaksanakan sosialisasi KM 58 Tahun 2024 dan KM 84 Tahun 2024 termasuk Bimbingan Teknis penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta penyusunan formasi ASN Tahun 2025-2029 pada tanggal 14 s.d 15 Oktober 2024 melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	Pelaksanaan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).	Telah dilaksanakan sosialisasi termasuk penandatanganan komitmen bersama terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta mitra kerja sektor perkeretaapian pada 5 November 2024 dan diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	Pelaksanaan renovasi ruang kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.	Telah dilaksanakan renovasi ruang kerja Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dan telah selesai sesuai kontrak pada Desember 2024.
	Pelaksanaan reviu/penyusunan SOP mikro terkait layanan kepegawaian, tata usaha dan umum/kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut penyusunan Proses Bisnis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Telah dilaksanakan penyusunan SOP mikro terkait layanan kepegawaian, tata usaha dan umum/kerumahtanggaan dan selanjutnya menunggu proses penetapan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Selain menindaklanjuti rekomendasi periode sebelumnya, disampaikan juga beberapa upaya peningkatan budaya kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2024 diantaranya:

1. Pelaksanaan Apel Pagi setiap bulan sebagai salah satu upaya peningkatan disiplin, etika dan integritas pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta rapat staf berkala setiap bulan guna koordinasi internal dalam peningkatan kinerja unit kerja.
2. Penggunaan absensi *biometric* serta pelaporan kinerja pegawai melalui aplikasi e-Kinerja sebagai salah satu acuan penilaian kinerja individu.
3. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO) yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai salah satu infrastruktur penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Pengukuhan dan penempatan pegawai fungsional tertentu bidang perkeretaapian (inspektur, penguji, auditor) guna dapat mendukung peningkatan kinerja unit kerja sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian.

4.2 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pelaksanaan program infrastruktur konektivitas dan program dukungan manajemen pada Perjanjian Kinerja terdiri dari:
 - a. Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan perkeretaapian;
 - b. Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
 - c. Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional;

- d. Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal;
 - e. Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian;
 - f. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Rata-rata capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 101,22%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-2 Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SP 1 Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan perkeretaapian	IK 1 Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas	%	100,00	100,00	100,00
SP 2 Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian	IK 2 Persentase pencapaian target legislasi (jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	108,89	108,89	100,00
SP 3 Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK 3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/ keahlian tertentu	%	70,00	76,62	109,46
SP 4 Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	IK 4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	74,00	74,07	100,09
SP 5 Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	IK 5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100,00	105,36	105,36
SP 6 Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK 6 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83,00	82,95	99,94
	IK 7 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3	3	100,00
	IK 8 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,00	92,57	92,57

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	IK 9 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	89,00	93,02	104,52
	IK 10 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,71	100,27
Rata-Rata Capaian Kinerja					101,22

3. Pada Tahun 2024, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp189.805.041.000,00 dengan realisasi sebesar Rp171.332.931.103,00 atau capaian penyerapan anggaran sebesar 90,27% serta efisiensi anggaran terhadap kinerja yang tercapai sebesar 7,01%.
4. Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran Tahun 2024 serta dapat memberikan berbagai informasi terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menjadi acuan dan tolak ukur keberhasilan/kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

4.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2024, diperoleh sebanyak 8 indikator kinerja kegiatan telah memenuhi target dan 2 indikator kinerja lainnya tidak mencapai target. Selanjutnya diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja serta melakukan perbaikan terhadap capaian indikator yang tidak mencapai target. Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti:

- a. Penyampaian hasil kajian/studi kepada *stakeholder* terkait untuk menjadi acuan/referensi dan ditindaklanjuti.
- b. Dokumentasi/arsip secara digital seluruh hasil studi/kajian agar mudah diakses unit kerja internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

(Direktorat teknis, Balai terkait) guna mempermudah akses dan meningkatkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Persiapan pelaksanaan kegiatan studi/kajian pendukung Tahun 2025 khususnya penyiapan dokumen untuk tahapan pengadaan barang dan jasa dan koordinasi dengan Biro LPPBMN.
- d. Antisipasi studi/kajian pendukung yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

2. Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian:

- a. Percepatan pembahasan dan penyelesaian peraturan/legislasi dengan dukungan kajian akademis yang memadai serta koordinasi intensif dengan Direktorat teknis, khususnya terkait isu strategis/mendesak seperti peninjauan Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, regulasi tentang kereta api cepat, trem otonom, pembentukan BUPP, dan regulasi angkutan barang dengan skema ROLA.
- b. Bekerjasama dan koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga lainnya termasuk Badan Kebijakan Transportasi dan akademisi/tenaga ahli hukum untuk membantu percepatan penyelesaian peraturan perundangan bidang perkeretaapian sesuai amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
- c. Penyesuaian kerangka regulasi pada rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu perkembangan isu/kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan.

3. Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan termasuk bimbingan teknis/workshop secara berkala baik bidang manajerial/umum dan

teknis perkeretaapian kepada ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai kebutuhan kompetensi dan ketersediaan anggaran.

- b. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka pemetaan kebutuhan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode mendatang guna mendukung pelaksanaan tugas sebagai regulator.
- c. Penyiapan kerangka kebutuhan SDM perkeretaapian termasuk SDM regulator perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis yang akan ditetapkan pada Tahun 2025.

4. Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian:

- a. Koordinasi, penyesuaian data dukung serta pendampingan tahapan *clearence* terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2025 sesuai kebijakan SPBE nasional dan Kementerian Perhubungan serta mengacu pada rencana penyederhanaan aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. Lanjutan pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan sistem TIK/modul layanan lainnya termasuk penataan domain sebagai upaya mendukung penyederhanaan aplikasi, meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses pengguna.
- c. Koordinasi dengan Direktorat teknis untuk meningkatkan layanan pengelolaan data yang terintegrasi serta persetujuan perizinan terpusat pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memudahkan pimpinan mengakses data dan layanan perizinan.
- d. Sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh unit kerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk penggunaan fitur perjalanan dinas *online*.
- e. Koordinasi dalam penyelesaian dukungan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Kementerian Perhubungan yang mencakup tata kelola,

proses bisnis, layanan, aplikasi, data dan informasi, keamanan, infrastruktur, dan audit TIK untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

- f. Pembentukan unit/kelompok baru yang khusus menangani tata kelola TIK serta memastikan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berjalan lancar, aman, sesuai dengan kebutuhan.

5. Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

- a. Peningkatan publikasi dalam bentuk berita/data/informasi melalui siaran pers/liputan dan buku saku terkait perkeretaapian dengan menyiapkan berbagai topik unggulan.
- b. Monitoring media dilaksanakan setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan *update* berkala "*Hot Issue Perkeretaapian*" serta upaya menyeimbangkan pemberitaan negatif dengan pemberitaan positif.
- c. Penyiapan program/strategi komunikasi Tahun 2025 termasuk sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

6. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

- a. Melakukan publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja ke dalam aplikasi e-SAKIP Reviu dan website secara tepat waktu.
- b. Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang selaras dengan arah strategi dan kebijakan pada dokumen naskah teknokratik Rencana Strategis Tahun 2025-2029 termasuk merencanakan target kinerja dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan melakukan analisa secara mendalam, sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat tercapai untuk setiap IKU/IKK sesuai kriteria *on the right track* (90% s.d 110%).

- c. Menuangkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) pada indikator kinerja di dokumen Laporan Kinerja.
- d. Mengungkapkan seluruh informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja termasuk di dalamnya tata cara perhitungan capaian kinerja di setiap indikator, penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja dan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmarking* kinerja).
- e. Menyeragamkan formulasi pengukuran efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- f. Penyiapan rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan termasuk proyeksi sumber daya anggaran.
- g. Pembentukan Tim Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025 yang mencakup Tim Penyusun Dokumen SAKIP dan Tim Monitoring dan Evaluasi melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan dukungan SDM yang kompeten.

7. Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

- a. Meningkatkan perbaikan atas capaian sasaran program/kegiatan dan melakukan peningkatan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Tindak lanjut *Area of Improvement* (AoI) dari hasil evaluasi penyelenggaraan maturitas SPIP terintegrasi periode sebelumnya.
- c. Melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, terstruktur dan sistematis didukung sumber daya anggaran yang memadai termasuk penyesuaian identifikasi risiko mengacu proses bisnis.
- d. Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM, meliputi pelatihan/bimtek/sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan dan

pengetahuan SDM dalam penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko dengan efektif.

- e. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko yang efisien dan akurat.
- f. Koordinasi dengan BPKP dan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan terkait persiapan penilaian maturitas SPIP Tahun 2025 diantaranya pembahasan kertas kerja dan metode penilaian/pengisian kertas kerja penilaian mandiri.

8. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

- a. Monitoring intensif untuk proses penagihan TAC Tahun 2024 termasuk koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan persetujuan besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp). Setelah persetujuan besaran SBPP, selanjutnya diperlukan penyusunan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Besaran Satuan Biaya Penggunaan pada Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.
- b. Percepatan penyelesaian sengketa/permasalahan aset antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Institusi terkait (Kementerian PUPR/lainnya) yang berpengaruh terhadap upaya optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan perolehan PNBP.
- c. Lanjutan pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan kebutuhan anggaran Tahun 2025 untuk pelaksanaan sertifikasi aset tanah/barang milik negara lainnya di 5 wilayah (Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur).

9. Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

- a. Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran agar kegiatan prioritas dapat diselesaikan tepat waktu

dengan *output* maksimal.

- b. Rapat koordinasi intensif, monitoring dan pelaporan rutin oleh seluruh unit kerja terkait realisasi anggaran dan progres/*output* kegiatan sesuai RPD/prognosa termasuk kesiapan dokumen perencanaan teknis dengan dukungan PMU/tenaga ahli.
- c. Melakukan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan pelaporan realisasi output pada aplikasi SAKTI secara rutin dan berkala guna meningkatkan nilai rata-rata NKA Satker, konsistensi serta nilai efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncheon SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 pada 11 kegiatan dengan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024.
- e. Pelatihan kepada operator aplikasi SAKTI agar dapat melakukan *input* data sesuai ketentuan dan valid.

10. Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

- a. Peningkatan layanan SDM/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana berdasarkan hasil survei masih terdapat penilaian yang kurang baik pada layanan pembinaan kepegawaian dan layanan mutasi dan jenjang karir pegawai.
- b. Pengoptimalan sistem TIK untuk *database* dan *share* informasi terkait layanan kepegawaian sehingga lebih cepat dan informatif kepada seluruh pegawai.
- c. Percepatan penetapan/pengesahan SOP mikro terkait layanan kepegawaian, tata usaha dan umum/kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut penyusunan Proses Bisnis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selain hal-hal tersebut di atas, pencapaian target Perjanjian Kinerja periode selanjutnya dimonitoring secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan serta pengukuran keberhasilan kegiatan dapat lebih mudah dilaksanakan. Selain itu juga diperlukan sinkronisasi dan konsistensi antara kegiatan melalui rencana kerja dan anggaran sesuai sasaran dan target yang hendak dicapai berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



LAMPIRAN

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN**



LAMPIRAN I

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PERKERETAAPIAN
REVIU TAHUN 2024





KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan diberlakukannya restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan di seluruh kementerian/lembaga, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 memuat kebijakan dan program di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang



akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, secara substansi juga sejalan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024 yang telah ditetapkan, khususnya pada bagian program dukungan manajemen unit kerja organisasi.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan program atau kegiatan pembangunan perkeretaapian sehingga semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang.

Jakarta, Februari 2024

 **Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian**



Jujun Endah Wahjuningrum

NIP 196607161995032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 DASAR HUKUM.....	6
1.2 LATAR BELAKANG	7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN.....	8
BAB II RENCANA STRATEGIS 2020-2024	12
2.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.....	12
2.2 TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.....	12
2.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN.....	14
2.4 TARGET KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	15
2.5 ISU STRATEGIS DAN POTENSI.....	17
2.6 TARGET KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	177
BAB III EVALUASI RENSTRA 2015-2019	19
3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/ PENDANAAN	19
3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT	20
3.3 EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	22
BAB IV RENCANA KINERJA TAHUN 2024	25
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024.....	25
4.1.1 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.....	26
4.1.2 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi.....	26
4.1.3 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	27
4.1.4 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.....	28
4.1.5 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	28
4.1.6 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	29
4.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	29
PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	13
Tabel 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022-2024	14
Tabel 2.3 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022-2024.....	13
Tabel 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019	19
Tabel 3.2 Capaian Output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015-2019.....	20
Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019	22
Tabel 3.4 Pencapaian dan Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015-2019	24
Tabel 4.1 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024	26
Tabel 4.2 Target Rincian Output (RO) Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Tahun 2024.....	26
Tabel 4.3 Target Rincian Output (RO) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024.....	27
Tabel 4.4 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024.....	28
Tabel 4.5 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024.....	29
Tabel 4.6 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024.....	29
Tabel 4.7 <i>Reviu</i> Target Kinerja Program Sekretariat Ditjen Perkeretaapian Tahun 2024.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	8
Gambar 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;

13. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.005/SK.89/DJKA/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024.
14. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.209/2/6/DJKA/2021 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.2 LATAR BELAKANG

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) unit kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 memuat kebijakan dan program dukungan manajemen yang menopang keberlangsungan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program-program pembangunan maupun program dukungan manajemen yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan tahun 2020.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 ini diharapkan dapat menopang dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen Perkeretaapian di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada tahun 2023 dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegritas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kinerja pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar masukan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024.

1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pasal 437-438 menyatakan bahwa tugas pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga di bidang perkeretaapian;

- d. Penyiapan koordinasi dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri, serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai 4 (empat) susunan unit kerja dibawahnya yang terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan sesuai dengan Pasal 440-441 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja jangka panjang dan jangka menengah, tinjau ulang rencana kerja, pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian, serta penyusunan program pinjaman luar negeri dan dalam negeri;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen anggaran, serta penyusunan program prioritas tahunan; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam Pasal 442 menyatakan bahwa Bagian Perencanaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Perencanaan memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Rencana; 2) Sub Koordinator Kelompok Program; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan sesuai dengan Pasal 443-444 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara, serta pembinaan tata kelola

Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perbendaharaan anggaran, tata usaha keuangan, dan pengelolaan barang milik negara, serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi anggaran, pembukuan dan perhitungan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam Pasal 445 menyatakan bahwa Bagian Keuangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Keuangan memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Pelaksana Anggaran; 2) Sub Koordinator Kelompok Pembendaharaan; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Verifikasi Anggaran.

3. Bagian Hukum

Bagian Hukum sesuai dengan Pasal 446-447 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri, serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang- undangan di bidang perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan perjanjian, kerja sama dan pelaksanaan advokasi, sosialisasi hukum di bidang perkeretaapian, serta pendokumentasian hukum; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemantauan dan inventarisasi pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian, publikasi dan edukasi publik tentang kebijakan bidang perkeretaapian, pengelolaan berita, serta penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Dalam Pasal 448 menyatakan bahwa Bagian Hukum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Hukum memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Peraturan Perundang-Undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum; 2) Sub Koordinator Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

4. Bagian SDM dan Umum

Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan Pasal 449-450 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, promosi dan mutasi pegawai, kepangkatan pegawai, standar kompetensi jabatan, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dan keprotokolan; dan
- c. Penyiapan bahan pengelolaan urusan umum dan rumah tangga, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam Pasal 451 menyatakan bahwa Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Kepegawaian dan Umum memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi; 2) Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga.

B A B II

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

2.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Adapun Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yaitu:

“Mewujudkan simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah:

1. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif;
2. Merumuskan regulasi perkeretaapian yang responsif dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan SDM regulator yang kompeten dan profesional;
4. Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Mengembangkan proses bisnis berbasis digital sesuai kemajuan teknologi; dan
6. Meningkatkan dukungan publik terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Sejalan dengan Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Aspek Pelayanan tersebut ditetapkan Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Rekomendasi Kebijakan yang mendukung konektivitas;
2. Perumusan regulasi yang adaptif dengan perkembangan waktu;
3. Peningkatan kualitas SDM Perkeretaapian yang berkelanjutan;
4. Pengelolaan birokrasi yang agile, efektif, dan efisien;
5. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi terbaru; dan
6. Peningkatan dukungan publik terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Mengacu kedudukan, tugas dan fungsinya yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta merujuk konsep Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020 - 2024 (Cascading Sasaran Strategis), bahwa Sasaran untuk unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian;
2. Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian;
3. Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional Yang Memiliki Sertifikat JFT/Teknis;
4. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Sistem Informasi yang andal; dan
6. Dukungan publik terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	TUJUAN	SASARAN			
		URAIAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1.	Penyediaan Rekomendasi Kebijakan yang mendukung Konektivitas	1.	Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	1.	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian (dokumen)
2.	Perumusan Regulasi yang Adaptif dengan perkembangan waktu	2.	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	2.	Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian (%)
3.	Peningkatan Kualitas SDM Perkeretaapian yang Berkelanjutan	3.	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang berkompeten dan profesional yang memiliki sertifikat JFT/ teknis	3.	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu (%)
4.	Pengelolaan Birokrasi yang Agile, Efektif, dan Efisien	4.	Terwujudnya Birokrasi yang <i>Good Governance</i>	4.	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
				5.	Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	TUJUAN	SASARAN			
		URAIAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
			dan <i>Clean Government</i>	6.	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
				7.	Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perkeretaapian (%)
				8.	Persentase pemenuhan fasilitas dan layanan perkantoran (%)
5.	Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi terbaru	5.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	9.	Persentase pemenuhan target Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (%)
6.	Peningkatan dukungan publik terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	6.	Dukungan publik terhadap Ditjen Perkeretaapian	10.	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian (%)

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian

2.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdiri dari 4 poin utama, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyediaan rekomendasi kebijakan yang mendukung konektivitas;
2. Mewujudkan pengelolaan birokrasi yang agile, efektif dan efisien;
3. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Perkeretaapian yang berkelanjutan; dan
4. Mewujudkan perumusan regulasi dan kebijakan yang adaptif dengan perkembangan.

Tabel 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022-2024

NO.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Mewujudkan penyediaan rekomendasi kebijakan yang mendukung konektivitas	1. Melaksanakan kegiatan survey/studi kebijakan/masterplan/studi kelayakan/pedoman teknis pembinaan dan peningkatan perkeretaapian; 2. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, RKT, PK) serta pelaksanaan evaluasi (LAKIP).
2.	Mewujudkan pengelolaan birokrasi yang agile, efektif dan efisien	1. Tingkat muturasi SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 2. Kegiatan layanan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perkeretaapian, layanan

NO.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		internal dan layanan perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi; 3. Monitoring pembayaran PNPB Bidang Perkeretaapian; 4. Monitoring pelaksanaan anggaran termasuk revisi anggaran dengan optimalisasi dan efisiensi penyerapan anggaran.
3.	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Perkeretaapian yang berkelanjutan	- Pembinaan dan pengembangan SDM perkeretaapian yang berkompeten dan profesional yang memiliki sertifikat JFT/Teknis.
4.	Mewujudkan perumusan regulasi dan kebijakan yang adaptif dengan perkembangan	- Penyusunan legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian.
5.	Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi terbaru	1. Implementasi tata kelola TIK yang andal 2. Dukungan implementasi <i>digital workplace</i> 3. Implementasi satu data Ditjen Perkeretaapian
6.	Peningkatan dukungan publik terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	- Penguatan strategi komunikasi melalui kebijakan strategi komunikasi.

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian

2.4 TARGET KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyusun indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian.
2. Persentase pencapaian target legislasi (jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian;
3. Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/ keahlian tertentu;
4. Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian;
5. Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian;
7. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8. Persentase pemenuhan fasilitas dan layanan perkantoran;
9. Persentase pemenuhan target Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
10. Persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

**Tabel 2.3 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun 2022-2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	SK A1 Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	IKK A1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	-	4	5	5	6
2.	SK A3 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	IKK A3 Persentase Pencapaian Target Legislasi (jumlah) Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian (%)	20	40	60	80	100
3.	SK A3 Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional memiliki Sertifikat JFT/ Teknis	IKK A3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki Sertifikat Kompetensi / Keahlian Tertentu (%)	25	35	45	55	65
4.	SK A4 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK A4.1 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	85	86	87	88	90
		IKK A4.2 Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	3	3	3	3	4
		IKK A4.3 Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian (<i>dalam Rp. Miliar</i>)	727	841	925	1.018	1.120
		IKK A4.4 Persentase Penyerapan Anggaran (%)	91	93	95	97	97
		IKK A4.5 Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Perkantoran (%)	100	100	100	100	100
5.	SK A5 Sistem informasi dan teknologi terbaru	IKK A5 Persentase Pemenuhan Target Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (%)	35	50	65	80	100
6.	SK A6 Dukungan publik terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	IKK A6 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian

2.5 ISU STRATEGIS DAN POTENSI

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perbaikan organisasi di masa mendatang. Pada unit organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Aspek Perencanaan, yaitu integrasi rencana strategis, penganggaran/program dan pengukuran kerja dalam sistem perencanaan pembangunan perkeretaapian dengan mempertimbangkan outcome kegiatan dan indikator kinerja dalam setiap unit kerja dalam lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Aspek Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian, yaitu penataan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk pengembangan pelayanan umum (BLU). Selain itu juga perlu dilakukan penguatan profesionalisme SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator penyelenggara perkeretaapian;
3. Aspek Keuangan, yaitu peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran serta percepatan pelaksanaan kegiatan yang transparansi dan akuntabilitas berlandaskan efisiensi, tepat guna, tepat waktu;
4. Aspek Barang Milik Negara yaitu inventaris barang milik negara serta pengesahan pencatatan aset tersebut dalam upaya Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Aspek Perundang-undangan dan legalitas hukum yaitu percepatan penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait peningkatan keselamatan, keamanan, dan kinerja pelayanan transportasi serta mendukung kemudahan investasi di sektor transportasi bidang perkeretaapian;
6. Aspek Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang yaitu tuntutan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) dalam peningkatan layanan administrasi perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.6 TARGET KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu antara lain:

1. Keterbatasan pendanaan melalui APBN sehingga perlu adanya sumber pendanaan alternatif yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
2. Keterbatasan jumlah SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara kuantitas dan kualitas yang memenuhi standar kompetensi/ sertifikat teknis khususnya untuk Unit Pelaksana Teknis/ Balai;

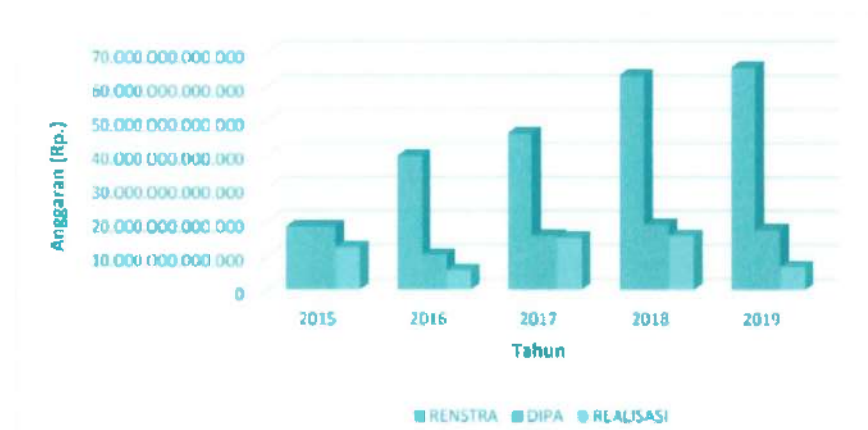
3. Fungsi pada Unit Pelaksana Teknis/Balai perlu ditingkatkan agar beban kerja dapat tepat dan proporsional;
4. Belum optimalnya pendataan aset dan pemanfaatan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk yang bersumber dari pengoperasian prasarana milik Negara;
5. Belum optimalnya pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka identifikasi dan mitigasi/ pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan pembangunan perkeretaapian.

BAB 3

EVALUASI RENSTRA 2015 - 2019

3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/ PENDANAAN

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 bidang perkeretaapian, diperoleh kebutuhan pendanaan untuk setiap penyelenggaraan perkeretaapian untuk Tahun 2015-2019 sekitar Rp 233 triliun. Namun dengan keterbatasan pembiayaan APBN, maka sampai dengan tahun 2019, investasi APBN dalam pembangunan perkeretaapian yang disediakan total hanya mencapai Rp. 81 triliun atau 35% dari total kebutuhan tahun 2015-2019 berdasarkan Renstra. Gap pembiayaan tahun 2015-2019 sampai mencapai Rp. 151 triliun.



Gambar 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019

Secara rinci per kegiatan/unit kerja eselon 2 dapat disampaikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019

TAHUN	RPJMN	REVIU RENSTRA	DIPA	REALISASI
2015	18.697.955.926.000	12.583.388.000	18.697.955.926.000	12.563.760.933.460
2016	39.558.846.384.000	11.690.413.000	10.407.315.735.000	5.801.339.893.298
2017	46.200.813.641.000	23.526.744.000	16.022.981.642.000	15.487.396.107.877
2018	63.253.294.900.000	32.810.329.000	19.188.457.243.000	15.949.445.231.083
2019	65.641.932.209.000	46.262.372.000	17.648.465.659.000	16.836.010.427.155
Total	233.352.843.060.000	126.873.247.000	81.965.176.205.000	56.637.952.592.873

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian

3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT

Sehubungan dengan pembiayaan/pendanaan pada APBN Ditjen Perkeretaapian tahun 2015-2017 hanya mencapai 43% dari kebutuhan berdasarkan Renstra 2015-2019, maka pencapaian output juga sebagian besar tidak dapat tercapai sesuai target. Berdasarkan target output dalam Renstra tahun 2015-2019, dapat diperoleh pencapaian sampai dengan tahun 2017 masing-masing kegiatan/output sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Tahun 2015-2019**

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Studi/Kajian/Masterplan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Dokumen	9	9	15	15						
Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	Kegiatan	4	4	4	4						
Sosialisasi/Seminar/Workshop/ Lokakarya	Tahun	1	1	3	3						
Rapat/Rakor/Rakonis/Raker	Tahun	1	1	10	10						
Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan			3	3						
Laporan Hasil Kegiatan/Kinerja	Laporan			12	11,1						
Pengumpulan dan Pengolahan Data Perkeretaapian	Laporan			1	1						
Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Ditjen Perkeretaapian	Laporan			1	0						
Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) di Lingk. Ditjen Perkeretaapian	Laporan			2	1						
Berita Acara Serah Terima Barang	Laporan			3	1						
Pembinaan Penerimaan Bukan Pajak	Laporan			1	1						
Laporan Keuangan	Laporan			1	1						
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait dgn Ops. Satker/UPT	Laporan			3	3						
Peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian setingkat Peraturan Menteri Perhubungan	Laporan			9	9						
Pengawasan di bidang perkeretaapian	Laporan			2	1						
Bantuan Hukum	Laporan			3	3						
Penyelenggaraan Humas	Laporan			6	5						
Pameran	Laporan			1	1						

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Kegiatan Kerjasama Luar Negeri	Laporan			1	1						
Penyertaan Pendidikan dan Pelatihan SDM Ditjen Perkeretaapian	Laporan			130	10						
Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	Laporan			99	70						
Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi	Laporan			13	9						
Layanan Perkantoran	Layanan			120	163,37	120	117,76	10	9	12	11,30
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Laporan			172	87,97						
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Laporan			491	291,65						
Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Perkeretaapian	Dokumen					13	13	11	11	10	10
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan					123	60,97	35	34	29	26,45
Layanan Internal (Overhead)	Layanan					18	14,8	13	12	13	12,67

3.3 EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Ditjen Perkeretaapian setiap tahun dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan LAKIP tahun 2019, berikut disampaikan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Ditjen Perkeretaapian.

Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	SP1 Meningkatkan KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	-	-	-	-	0,28	0,25	0,31	0,29	0,34	0,31
	SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah	IK2 Modal share angkutan penumpang kereta api IK3 Modal share angkutan barang kereta api	% total nasional % total nasional	-	-	-	-	4,0	5,03	5,2	5,35	5,3	5,62
	SP3 Meningkatkan KESELAMATAN dan	IK4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi	Kejadian kecelakaan n/ 1 juta	0,55	1,15	0,55	0,24	0,55	0,23	0,25	0,25	0,26	0,15

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	KEAMANAN transportasi kereta api	kereta api (<i>rate of accident</i>)	km tempuh										
		IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Kejadian gangguan keamanan/1 juta km tempuh	-	-	-	-	10,7	6,59	6,5	6,89	6,5	4,44
	SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK6 Prosentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	-	-	-	-	65	66,05	67	76,18	69	81,31
		IK7 Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian	%	-	-	-	-	6,04	15,32	18	18,61	20	29,52
			JutaTonCO ₂ /thn	-	-	-	-	3,51	3,817				

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian setiap tahun dievaluasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Pencapaian dan Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Jumlah rekomendasi kebijakan/pedoman teknis pembinaan dan peningkatan perkeretaapian	Dok	9	9	14	14	13	13	11	11	10	10
Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	Dok	-	-	-	-	10	11	6	14	9	6
Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis	%	-	-	-	-	-	-	30	25	45	26.85
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83.92	86.81	83.92	85.36	87.50	85.39	87.00	87.56	89.00	83.30
Persentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	65.00	65.78	65.00	60.17	85.00	82.19	85.00	83.12	85.00	83.84
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp. Miliar	1.500	905	1.500	922	1.000	932	1.100	1.016	1.020	1.016
Tingkat maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Perkeretaapian	Level	-	-	-	-	2	1	3	3	3	3

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian

BAB IV

RENCANA KINERJA

TAHUNAN 2024

Penjabaran Rencana Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 disusun sesuai dengan Konsep Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024.

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Program pembangunan Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun Tugas dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pengelolaan kepegawaian. Kegiatan pada 2 (dua) program berikut, Program Infrastruktur Konektivitas, antara lain:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.

Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2024, antara lain:

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian;
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian;
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian;
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian; dan
5. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Pada tahun anggaran 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdapat program infrastruktur konektivitas yang merupakan kegiatan konsultasi/ penyusunan dokumen perencanaan, akan dijabarkan sebagai berikut.

4.1.1 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu:

Tabel 4.1 Target Rincian Output (RO) Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN-STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian					10.189.312
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana			98.017.164		7.166.891
ABF.003	Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>)	rekomendasi	1	1.815.000	5	7.166.891
ABF.003	Rencana Induk (<i>Master Plan</i>)	rekomendasi	1	1.815.000	-	-
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			233.646.500		3.022.421
AFA.001	Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian	NSPK	11	215.000.000	2	3.022.421

Sumber : * Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020–2024 Bidang Perkeretaapian;
 ** DIPA Awal 2024 Ditjen Perkeretaapian;

4.1.2 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Tahun 2024 yaitu:

1. Layanan Organisasi & Tata Kelola Internal;
2. Layanan SDM, terdiri dari Layanan SDM.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2024 :

Tabel 4.2 Target Rincian Output (RO) Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Tahun 2024

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN-STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4600	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian					7.739.451
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					2.728.231
EBA.001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	layanan	-	-	1	2.728.231
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal					5.011.220
EBC.001	Layanan SDM	orang	-	-	1.045	5.011.220

Sumber : * Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020–2024 Bidang Perkeretaapian;
 ** DIPA Awal 2024 Ditjen Perkeretaapian;

4.1.3 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Kebijakan Perencanaan;
2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, terdiri dari Layanan Perencanaan;
3. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, terdiri dari Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Hukum dan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepegawaian dan Umum;
4. Layanan Umum, terdiri dari Layanan Organisasi dan Rumah Tangga;
5. Layanan Perkantoran, terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
6. Layanan Sarana Internal, terdiri dari Kendaraan Bermotor, Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi dan Peralatan fasilitas perkantoran; dan
7. Layanan Prasarana Internal, terdiri dari Gedung dan Bangunan.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2024 :

Tabel 4.3 Target Rincian Output (RO) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN-STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian					154.754.309
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				1	3.000.108
ABF.001	Kebijakan Perencanaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	1	3.000.108
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				3	105.923.551
EBA.957	Layanan Hukum	Layanan	-	-	1	1.837.415
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	-	-	1	10.371.641
EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	-	-	1	93.714.495
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				24	17.772.404
EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	-	-	23	3.932.849
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Unit	-	-	1	13.839.555

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				3	28.058.246
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	-	-	1	5.226.353
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	-	-	1	10.706.030
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	-	-	1	12.125.863

Sumber : * Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian;
 ** DIPA Awal 2024 Ditjen Perkeretaapian;

4.1.4 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu Layanan Data dan Informasi.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2024 :

Tabel 4.4 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4602	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian					3.923.109
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	-	-	1	1.223.109
FAB	Sistem Informasi Pemerintahan					
FAB.001	Sistem Informasi	Layanan	-	-	1	2.700.000

Sumber : * Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian;
 ** DIPA Awal 2024 Ditjen Perkeretaapian;

4.1.5 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu Layanan Kehumasan dan Protokol. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2024 :

**Tabel 4.5 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024**

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4603	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik					
EBA	Layanan Kehumasan dan Protokoler			16.440.222		11.503.441
EBA.958	Layanan humas dan protokoler	layanan	22	16.440.222	1	11.503.441

Sumber : * Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian;
** DIPA Awal 2024 Ditjen Perkeretaapian;

4.1.6 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian tahun 2024 yaitu layanan hukum. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

**Tabel 4.6 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi
Perkeretaapian Tahun 2024**

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4604	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian					
EBA	Layanan Hukum			2.897.626		2.595.419
EBA.957	Layanan Hukum	layanan	1	2.897.626	1	2.595.419

Sumber : * Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian;
** DIPA Awal 2024 Ditjen Perkeretaapian;

4.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2020-2024 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019, serta penyesuaian dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian **Kepdirjen Nomor HK.209/2/6/DJKA/2021 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian**, sebagaimana disampaikan berikut:

Tabel 4.7 *Reviu* Target Kinerja Program Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	BASE LINE REALISASI TAHUN 2023 TW III	TARGET RENSTRA TAHUN 2024*	REVIU TARGET TAHUN 2024**
1.	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian (SK1)	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas yang telah ditindaklanjuti (IKK1)	%	100,00	100,00	100,00
2.	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (SK2)	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian (IKK2)	%	97,78	100,00	100,00
3.	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional (SK3)	IKK3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (IKK3)	%	55,79	65,00	65,00
4.	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal (SK4)	IKK4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian (IKK4)	%	70,37	100,00	77,00
5.	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (SK5)	IKK5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian (IKK5)	%	75,15	100,00	100,00
6.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (SK6)	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (IKK6)	Nilai	82,70	90,00	83,00
		Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK7)	Level	3	4	3
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara	%	63,44	100,00	100,00

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	BASE LINE REALISASI TAHUN 2023 TW III	TARGET RENSTRA TAHUN 2024*	REVIU TARGET TAHUN 2024**
		Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian (IKK8)				
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian (IKK9)	%	77,33	97,00	89,00
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian (IKK10)	Nilai	3,68	-	3,70

Ket.: * Target 2024 berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian;

B A B 5

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi manajemen sektor perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan *New Initiatives* maka Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan review dan penyesuaian sebagaimana perkembangan yang terjadi selama tahun berjalan.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh *stakeholder* di bidang perhubungan khususnya insan perkeretaapian harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.

Akhir kata, semoga dokumen Reviu Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan/ pegangan/ pedomar/ arah bagi unit kerja dalam melaksanakan tugas maupun fungsi sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN II

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196507031991032001

LAMPIRAN A
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%
2	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%
3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu	%
4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%
5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%
6	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai

Jakarta, Desember 2024

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196507031991032001

LAMPIRAN B
REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100,00
2	Tertaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	108,89
3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu	%	70,00
4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	74,00
5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100,00
6	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83,00
		Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level	3
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,00
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	89,00
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,70

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Infrastruktur Konektivitas
- Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
2. Program Dukungan Manajemen
- a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian
- b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
- c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian
- d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian
- e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian

TOTAL

ANGGARAN

Rp. 10.189.312.000

Rp. 10.189.312.000

Rp. 179.615.729.000

Rp. 7.739.451.000

Rp. 154.249.762.000

Rp. 3.527.636.000

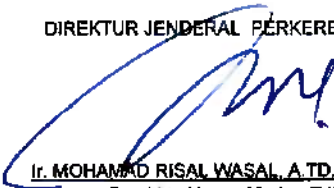
Rp. 11.503.441.000

Rp. 2.585.419.000

Rp. 189.805.041.000

Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

Jakarta, Desember 2024

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNGRUM, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196507031991032001

LAMPIRAN C
RENCANA AKSI ATAS REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN REVISI I PK (Rp)	ANGGARAN REVISI II PK (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
SK 1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian													7.166.891.000	7.166.891.000	7.166.891.000	Kabag Perencanaan
IKK 1	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti (%)	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	7.166.891.000	7.166.891.000	7.166.891.000	Kabag Perencanaan
	1) Penyusunan dokumen perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	7.166.891.000	7.166.891.000	7.166.891.000	Kabag Perencanaan
		0%	0%	0%	15%	15%	35%	78%	96%	100%	100%	100%	100%				
SK 2	Terselaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian													6.255.254.000	6.255.254.000	6.255.254.000	Kabag Hukum
IKK 2	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) (%)	97%	97%	102%	102%	102%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	108,89%	6.255.254.000	6.255.254.000	6.255.254.000	Kabag Hukum
	1) Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Kajian Naskah Akademis Usulan Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.822.420.000	1.822.420.000	1.822.420.000	Kabag Hukum
		0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	70%	98%	100%				
	2) Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkeretaapian	-	322.611.600	483.917.400	564.570.300	645.223.200	806.529.000	967.834.800	1.129.140.600	1.290.446.400	1.371.099.300	1.451.752.200	1.613.058.000	1.454.808.000	1.605.058.000	1.613.058.000	Kabag Hukum
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%				
	3) Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	38.416.000	57.624.000	67.228.000	76.832.000	96.040.000	115.248.000	134.456.000	153.664.000	163.268.000	172.872.000	192.080.000	280.330.000	130.080.000	192.080.000	Kabag Hukum
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%				
	4) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	62.476.400	123.714.600	144.333.700	164.952.800	206.191.000	247.429.200	288.667.400	329.905.600	350.524.700	371.143.800	412.382.000	412.382.000	412.382.000	412.382.000	Kabag Hukum
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%				
	5) Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	-	75.579.800	113.369.700	132.264.650	151.159.600	188.949.500	226.739.400	264.529.300	302.319.200	321.214.150	340.109.100	377.899.000	447.899.000	447.899.000	377.899.000	Kabag Hukum
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%				
	6) Pengelolaan Hukum	-	11.483.274	87.559.802	103.673.206	118.268.903	141.441.031	1.010.578.250	1.194.319.750	1.378.061.250	1.469.932.000	1.653.673.500	1.837.415.000	1.837.415.000	1.837.415.000	1.837.415.000	Kabag Hukum
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%				
SK 3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional													11.117.036.000	11.458.202.000	12.553.979.000	Kabag SDM dan Umum
IKK 3	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (%)	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	78%	78%	78%	78%	11.117.036.000	11.458.202.000	12.553.979.000	Kabag SDM dan Umum
	1) Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Jasa Konsultan Penilaian Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Roadmap kepegawaian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.001.000	1.200.001.000	1.200.001.000	Kabag SDM dan Umum
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%				
	2) Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis	-	1.949.728	14.866.650	17.602.522	20.080.704	24.015.065	171.584.600	202.781.800	233.979.000	249.577.600	280.774.800	311.972.000	332.418.000	242.418.000	311.972.000	Kabag SDM dan Umum
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%				
	3) Pengelolaan Kepegawaian	-	31.318.572	238.803.661	282.750.083	322.557.229	385.755.056	2.756.171.000	3.257.293.000	3.758.415.000	4.008.976.000	4.510.098.000	5.011.220.000	5.011.220.000	5.011.220.000	5.011.220.000	Kabag SDM dan Umum
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%				
	4) Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai	-	1.482.726	11.305.768	13.386.339	15.270.943	18.262.941	130.486.400	154.211.200	177.936.000	189.798.400	213.523.200	237.248.000	127.370.000	262.370.000	237.248.000	Kabag SDM dan Umum
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%				
	5) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	3.999.564	30.496.619	36.108.834	41.192.436	49.263.169	351.979.100	415.975.300	479.971.500	511.969.600	575.965.800	639.962.000	917.590.000	739.590.000	639.962.000	Kabag SDM dan Umum
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%				
	6) Character Building	-	31.461.415	239.892.836	284.039.697	324.028.401	387.514.471	2.768.741.800	3.272.149.400	3.775.557.000	4.027.260.800	4.530.668.400	5.034.076.000	3.365.737.000	3.826.903.000	5.034.076.000	Kabag SDM dan Umum
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%				
	7) Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	746.838	5.694.629	6.742.597	7.691.857	9.198.903	65.725.000	77.875.000	89.625.000	95.600.000	107.550.000	119.500.000	162.700.000	175.700.000	119.500.000	Kabag SDM dan Umum
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%				
SK 4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andel													3.923.109.000	3.527.636.000	3.527.636.000	Kabag Perencanaan
IKK 4	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian (%)	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	74%	3.923.109.000	3.527.636.000	3.527.636.000	Kabag Perencanaan
	1) Pengelolaan data dan informasi	-	244.621.800	366.932.700	428.088.150	489.243.600	611.554.500	733.865.400	856.176.300	978.487.200	1.039.642.650	1.100.798.100	1.223.109.000	1.223.109.000	1.223.109.000	1.223.109.000	Kabag Perencanaan
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%				
	2) Penyusunan Desain Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi	-	-	-	119.147.400	119.147.400	436.873.800	436.873.800	675.168.600	794.316.000	794.316.000	794.316.000	794.316.000	1.000.000.000	794.316.000	794.316.000	Kabag Perencanaan
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%				
	3) Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	453.063.300	453.063.300	453.063.300	453.063.300	453.063.300	453.063.300	1.057.147.700	1.480.006.780	1.510.211.000	1.700.000.000	1.510.211.000	1.510.211.000	Kabag Perencanaan
		0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	70%	88%	100%				
SK 5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian													11.503.441.000	11.503.441.000	11.503.441.000	Kabag Hukum
IKK 5	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian (%)	5%	15%	25%	30%	40%	61%	66%	74%	83%	90%	95%	100%	11.503.441.000	11.503.441.000	11.503.441.000	Kabag Hukum
	1) Pelayanan humas dan protokoler	-	64.666.750	493.083.036	583.823.836	666.017.836	796.509.036	6.326.892.550	7.477.236.650	8.627.580.750	9.202.752.800	10.353.096.900	11.503.441.000	11.503.441.000	11.503.441.000	11.503.441.000	Kabag Hukum
		0%	1%	4%	5%	6%	7%	55%	65%	75%	80%	90%	100%				

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN REVISI I PK (Rp)	ANGGARAN REVISI II PK (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
SK 6	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian													150.739.310.000	150.793.617.000	148.797.840.000	Kabag Perencanaan Kabag Keuangan Kabag Hukum Kabag SDM dan Umum
IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai)	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83	83	83	16.552.633.000	16.353.633.000	12.693.539.000	Kabag Perencanaan Kabag Keuangan Kabag SDM dan Umum
1)	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	330.750.380 6,68%	1.128.908.484 22,80%	1.522.541.048 30,75%	1.775.555.186 35,86%	1.972.123.900 39,83%	2.150.867.743 43,44%	2.604.411.678 52,60%	3.238.184.862 65,40%	3.514.965.495 70,99%	4.040.304.048 81,60%	4.244.794.927 85,73%	4.951.353.000 100,00%	5.226.353.000	5.196.353.000	4.951.353.000	Kabag Perencanaan
2)	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	- 0,00%	188.404.410 10,48%	199.370.697 11,09%	375.550.393 20,89%	419.775.092 23,35%	621.303.091 34,56%	814.201.881 45,29%	881.572.592 54,60%	1.147.325.326 63,82%	1.246.021.911 69,31%	1.438.201.600 80,00%	1.797.752.000 100,00%	1.656.752.000	1.417.752.000	1.797.752.000	Kabag Perencanaan
3)	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	- 0,00%	183.042.761 22,36%	453.268.233 55,37%	453.268.233 55,37%	453.268.233 55,37%	462.764.190 56,53%	462.764.190 56,53%	462.764.190 56,53%	643.432.962 78,60%	676.996.259 82,70%	676.996.259 82,70%	818.617.000 100,00%	794.617.000	928.617.000	818.617.000	Kabag Perencanaan
4)	Penyajian Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	- 0%	- 0%	38.702.400 10%	77.404.800 20%	116.107.200 30%	154.809.600 40%	193.512.000 50%	232.214.400 60%	270.916.800 70%	309.619.200 80%	348.321.600 90%	387.024.000 100%	516.024.000	387.024.000	387.024.000	Kabag Perencanaan
5)	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Sisd Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko	- 0%	97.528.869 12%	145.057.246 18%	190.273.002 24%	273.367.917 34%	273.367.917 34%	311.007.840 39%	311.007.840 39%	465.076.339 58%	509.574.384 64%	777.998.074 98%	797.456.000 100%	1.363.456.000	1.363.456.000	797.456.000	Kabag Perencanaan
6)	Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	- 0%	18.200.801 3%	70.419.765 10%	83.492.562 12%	89.559.496 12%	94.759.725 13%	193.852.974 27%	308.908.036 43%	338.303.774 47%	462.748.138 64%	650.028.600 90%	722.254.000 100%	1.039.254.000	1.039.254.000	722.254.000	Kabag Perencanaan
7)	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Asst Negara di Lingkungan Ditjen	- 0%	46.045.314 3%	46.045.314 3%	160.780.814 9%	160.780.814 9%	298.656.090 16%	916.651.000 50%	1.099.981.200 60%	1.283.311.400 70%	1.466.641.600 80%	1.649.971.800 90%	1.833.302.000 100%	1.720.302.000	1.620.302.000	1.833.302.000	Kabag Perencanaan
8)	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	- 0%	52.101.172 4%	52.101.172 4%	181.926.631 14%	181.926.631 14%	337.935.198 26%	644.383.500 50%	773.260.200 60%	902.136.900 70%	1.031.013.600 80%	1.159.890.300 90%	1.288.767.000 100%	1.068.767.000	1.233.767.000	1.288.767.000	Kabag Perencanaan
9)	Penyusunan kajian masterplan/kebijakan (Penyusunan Studi Potensi PNBP Potensi Pasar dan Bentuk Kejasama Pemanfaatan Stasiun Jaltnegara	- 0%	- 0%	- 0%	- 15%	- 15%	- 55%	- 55%	- 85%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	3.000.108.000	3.000.108.000	-	Kabag Keuangan
10)	Kegiatan Penunjang Non Operasional Organisasi (Pengembangan Organisasi di Lingkungan DJKA)	- 0%	- 0%	- 0%	- 15%	- 15%	- 55%	- 55%	- 85%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	167.000.000	167.000.000	97.014.000	Kabag SDM dan Umum
IKK 7	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Level)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4.481.979.000	5.204.452.000	6.035.406.000	Kabag Perencanaan Kabag Keuangan Kabag SDM dan Umum
1)	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	- 0%	15.150.000 1%	72.150.000 6%	120.549.600 10%	120.549.600 10%	120.549.600 10%	361.648.800 40%	482.198.400 50%	602.748.000 60%	723.297.600 80%	964.396.800 90%	1.205.496.000 100%	1.205.496.000	1.205.496.000	1.205.496.000	Kabag Keuangan
2)	Contact Center Bidang Perkeretaapian	- 0%	1.107.228 1%	8.442.585 5%	9.996.252 6%	11.403.581 6%	13.637.858 6%	97.440.750 55%	115.157.250 65%	132.873.750 75%	141.732.000 80%	159.448.500 90%	177.165.000 100%	177.165.000	177.165.000	177.165.000	Kabag SDM dan Umum
3)	Pembinaan Keprotokolan dan MC	- 0%	3.136.251 1%	23.913.867 5%	28.314.674 6%	32.300.973 6%	38.629.621 8%	276.003.750 55%	326.186.250 65%	376.368.750 75%	401.460.000 80%	451.642.500 90%	501.825.000 100%	182.871.000	260.871.000	501.825.000	Kabag SDM dan Umum
4)	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Manajemen Risiko	- 0%	23.319.663 1%	177.812.090 5%	210.534.391 6%	240.174.606 6%	287.231.412 8%	2.052.232.050 85%	2.425.365.150 95%	2.798.498.250 95%	2.985.064.800 95%	3.358.197.900 90%	3.731.331.000 100%	2.546.858.000	3.141.331.000	3.731.331.000	Kabag Perencanaan
5)	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	- 0%	2.622.301 1%	19.995.009 5%	23.674.639 6%	27.007.686 6%	32.299.236 8%	230.773.950 55%	272.732.850 65%	314.691.750 75%	335.671.200 80%	377.630.100 90%	419.589.000 100%	369.589.000	419.589.000	419.589.000	Kabag Keuangan
IKK 8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian Bidang Perkeretaapian (%)	1%	3%	23%	23%	23%	25%	79%	80%	89%	90%	92%	100%	6.270.812.000	6.070.812.000	6.330.812.000	Kabag Keuangan
1)	Pengusulan PNBP Yang Berkaitan Dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	81.106.700 10%	162.213.400 20%	243.320.100 30%	324.426.800 40%	364.980.150 45%	405.533.500 50%	446.086.850 55%	486.640.200 60%	567.746.900 70%	648.853.600 80%	729.960.300 90%	811.067.000 100%	811.067.000	811.067.000	811.067.000	Kabag Keuangan
2)	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	- 0%	1 63.520.300	1 50%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	535.203.000	535.203.000	535.203.000	Kabag Keuangan
3)	Peminjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	61.242.900 10%	122.485.800 20%	183.728.700 30%	244.971.600 40%	275.593.050 45%	306.214.500 50%	336.835.950 55%	367.457.400 60%	428.700.300 70%	489.943.200 80%	551.186.100 90%	612.429.000 100%	252.429.000	352.429.000	612.429.000	Kabag Keuangan
4)	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	- 47.834.500 10%	- 95.669.000 20%	- 143.503.500 30%	- 191.338.000 40%	- 215.255.250 45%	- 239.172.500 50%	- 263.089.750 55%	- 287.007.000 60%	- 334.841.500 70%	- 382.676.000 80%	- 430.510.500 90%	- 478.345.000 100%	438.345.000	478.345.000	478.345.000	Kabag Keuangan
5)	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	- 0%	23.157.373 1%	178.574.632 5%	209.069.207 6%	238.503.144 7%	285.232.466 8%	1.971.348.500 55%	2.329.775.500 65%	2.688.202.500 75%	2.967.416.000 80%	3.225.843.000 90%	3.584.270.000 100%	3.996.750.000	3.584.270.000	3.584.270.000	Kabag Keuangan
6)	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	- 0%	1.999.615 1%	15.247.037 5%	18.052.909 6%	20.594.499 7%	24.629.528 8%	170.223.900 55%	201.173.700 65%	232.123.500 75%	247.598.400 80%	278.548.200 90%	309.498.000 100%	237.018.000	309.498.000	309.498.000	Kabag Keuangan
IKK 9	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian (%)	19,24%	22,30%	53,14%	54,47%	55,31%	57,22%	59,52%	62,02%	71,00%	73,84%	79,28%	89,00%	7.959.221.000	8.397.221.000	7.984.221.000	Kabag Perencanaan Kabag Keuangan Kabag Hukum Kabag SDM dan Umum
1)	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	18.758.970 1%	37.517.940 2%	56.276.910 3%	75.035.880 4%	93.794.850 5%	112.553.820 6%	750.358.800 93%	937.948.500 100%	1.125.538.200 100%	1.313.127.900 100%	1.500.717.600 100%	1.875.897.000 100%	1.875.897.000	1.875.897.000	1.875.897.000	Kabag Keuangan
2)	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kesejahteraan serta Peningkatan Kelembagaan	16.095.920 8%	32.191.840 16%	48.287.760 24%	64.383.680 32%	80.479.600 40%	96.575.520 48%	112.671.440 56%	128.767.360 64%	144.863.280 72%	160.959.200 80%	177.055.120 88%	201.199.000 100%	566.199.000	354.199.000	201.199.000	Kabag SDM dan Umum
3)	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	136.192.000 8%	272.384.000 16%	408.576.000 24%	544.768.000 32%	680.960.000 40%	817.152.000 48%	953.344.000 56%	1.089.536.000 64%	1.225.728.000 72%	1.361.920.000 80%	1.498.112.000 88%	1.702.400.000 100%	1.202.400.000	1.702.400.000	1.702.400.000	Kabag Keuangan
4)	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	84.453.680 8%	168.907.360 16%	253.361.040 24%	337.814.720 32%	422.268.400 40%	506.722.080 48%	591.175.760 56%	675.629.440 64%	760.083.120 72%	844.536.800 80%	928.990.480 88%	1.055.671.000 100%	1.055.671.000	1.055.671.000	1.055.671.000	Kabag Perencanaan
5)	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan Perjanjian dan Kehumasan	68.396.800 8%	136.797.600 16%	205.196.400 24%	273.595.200 32%	341.994.000 40%	410.392.800 48%	478.791.600 56%	547.190.400 64%	615.589.200 72%	683.988.000 80%	752.386.800 88%	854.985.000 100%	854.985.000	854.985.000	854.985.000	Kabag Hukum
6)	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	137.527.600 8%	275.055.200 16%	412.582.800 24%	550.110.400 32%	687.638.000 40%	825.165.800 48%	962.693.200 56%	1.100.220.800 64%	1.237.748.400 72%	1.375.276.000 80%	1.512.803.600 88%	1.719.095.000 100%	1.619.095.000	1.719.095.000	1.719.095.000	Kabag Keuangan

KODE	DAIRAH / INDIKATOR / KEMANTAN	TARJUK / MENCIKA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN REVISI I (Rp)	ANGGARAN REVISI II (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
7	Pembinaan Pengkajian Bata/Saker di Lingkaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	40.997.520	94.595.840	127.963.760	183.991.680	229.989.600	275.987.520	321.985.440	367.983.360	413.981.280	459.979.200	505.977.120	551.975.040	784.974.000	934.974.000	574.974.000	Kabag Keuangan
100	Tingkat Keprasan Pelayanan Perkantoran Di Rn Perkeretaapian (Mile)	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	115.474.946.408	116.787.895.408	115.753.862.000	Kabag SDM dan Umum
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%				
1	Pembinaan Sistem Administrasi Perkerantoran	-	136.369.000	162.553.000	189.645.750	216.738.500	270.922.500	325.107.000	379.291.500	433.476.000	487.660.500	541.845.000	596.029.500	508.151.000	523.151.000	541.845.000	Kabag SDM dan Umum
2	Pengawasan Arap	-	75.844.588	127.967.304	157.899.624	157.899.624	171.361.594	127.214.500	152.857.400	178.190.300	203.543.200	228.986.100	254.429.000	362.629.000	243.629.000	254.429.000	Kabag SDM dan Umum
3	Monitoring Ketausahaan	-	106.831.330	628.603.244	779.844.885	2.030.778.251	2.157.489.063	53.603.650	59.448.500	71.338.200	83.227.900	95.117.600	110.892.000	295.058.000	223.058.000	119.867.000	Kabag SDM dan Umum
4	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketausahaan	10.276.700	20.553.400	30.830.100	51.383.500	584.613.988	92.490.300	123.330.400	133.997.100	143.873.800	154.427.200	184.980.600	205.534.000	264.769.000	287.788.000	265.534.000	Kabag SDM dan Umum
5	Inventarisasi arsip statis dan arsip teraja d lingkungan DJKA	8.140.100	16.280.200	24.420.300	40.700.500	637.450.953	73.283.300	97.681.200	126.821.300	113.961.400	139.241.600	149.521.800	182.892.000	150.102.000	105.102.000	182.892.000	Kabag SDM dan Umum
6	Administrasi Pengelapn Umum dan Rn Rn Tncn	12.410.100	24.820.200	37.230.300	62.690.500	259.704.845	111.690.900	145.991.200	161.351.300	173.741.800	199.961.800	223.391.800	249.292.000	474.135.000	350.135.000	249.292.000	Kabag SDM dan Umum
7	Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absen UPT/Bakti dan Sistem Perkeretaapian	1.193.130	2.386.260	3.579.390	4.772.520	5.965.650	7.158.780	8.351.910	9.545.040	10.738.170	11.931.300	13.124.430	14.317.560	378.361.000	348.361.000	119.313.000	Kabag SDM dan Umum
8	Program Pengawasan dan Pemberantasan Penyelundupan Peredaran Obat Narkotika (P4GN)	2.107.230	4.214.460	6.321.690	8.428.920	10.536.150	12.643.380	14.750.610	16.857.840	18.965.070	21.072.300	23.179.530	25.286.760	676.377.000	435.377.000	210.723.000	Kabag SDM dan Umum
9	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Umum	1.505.510	2.990.020	4.475.030	5.959.540	6.978.550	8.371.580	9.764.610	11.157.640	12.550.670	13.943.700	15.336.730	16.729.760	426.507.000	435.507.000	139.531.000	Kabag SDM dan Umum
10	Pemeliharaan Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BAK Perkerantoran DJKA	13.248.330	26.496.660	39.745.000	52.993.330	66.241.660	79.489.990	92.738.320	105.986.650	119.235.000	132.483.330	145.731.660	158.979.990	349.845.000	252.493.000	155.579.000	Kabag SDM dan Umum
11	Kendaraan Bermotor	1.309.758.205	3.456.452.000	3.456.452.000	3.456.452.000	3.456.452.000	3.456.452.000	3.456.452.000	3.456.452.000	3.456.452.000	3.456.452.000	3.456.452.000	3.456.452.000	3.002.846.000	3.599.750.000	3.456.452.000	Kabag SDM dan Umum
12	Rencana gedung dan bangunan	-	-	1.734.040.500	1.734.040.500	1.734.040.500	4.024.108.000	4.024.108.000	4.024.108.000	8.670.202.500	8.670.202.500	8.670.202.500	11.560.270.000	15.838.556.000	14.172.874.000	11.560.270.000	Kabag SDM dan Umum
13	Gaji dan Tunjangan	5.789.937.040	11.539.874.080	17.309.811.120	23.079.748.160	28.849.685.200	34.619.622.240	40.389.559.280	46.159.496.320	51.929.433.360	57.699.370.400	63.469.307.440	72.154.213.000	68.368.423.000	66.368.423.000	72.124.213.000	Kabag SDM dan Umum
14	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.115.685.760	4.231.371.520	6.347.057.280	8.462.743.040	10.578.428.800	12.694.114.560	14.809.800.320	16.925.486.080	19.041.171.840	21.156.857.600	23.272.543.360	25.388.229.000	27.511.660.000	27.346.672.000	28.448.072.000	Kabag SDM dan Umum
														190.795.041.000	190.795.041.000	189.805.041.000	

Jakarta, Desember 2024

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERATAPIAN

[Signature]

(Dr. JUAN ENDAH WAHLUNINGRUK, M.T)
Pembina Utama Madya (IVM)
NIP. 196507031981032001



LAMPIRAN III

REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

BERDASARKAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA BERDASARKAN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN TAHUN 2024**

No.	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti		
a.	Penyampaian hasil kajian/studi kepada <i>stakeholder</i> terkait untuk menjadi acuan/referensi dan ditindaklanjuti.	Triwulan I 2025	Bagian Perencanaan
b.	Dokumentasi/arsip secara digital seluruh hasil studi/kajian agar mudah diakses unit kerja internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Direktorat teknis, Balai terkait) guna mempermudah akses dan meningkatkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan.	Triwulan I 2025	Bagian Perencanaan
c.	Persiapan pelaksanaan kegiatan studi/kajian pendukung Tahun 2025 khususnya penyiapan dokumen untuk tahapan pengadaan barang dan jasa dan koordinasi dengan Biro LPPBMN.	Triwulan I 2025	Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian
d.	Antisipasi studi/kajian pendukung yang terdampak kebijakan <i>Automatic Adjustment</i> (AA) atau blokir dengan pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.	Triwulan I 2025	Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian
2	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian		
a.	Percepatan pembahasan dan penyelesaian peraturan/legislasi dengan dukungan kajian akademis yang memadai serta koordinasi intensif dengan Direktorat teknis, khususnya terkait	Triwulan I-IV 2025	Bagian Hukum

No.	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	isu strategis/mendesak seperti peninjauan Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, regulasi tentang kereta api cepat, trem otonom, pembentukan BUPP, dan regulasi angkutan barang dengan skema ROLA.		
	b. Bekerjasama dan koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga lainnya termasuk Badan Kebijakan Transportasi dan akademisi/tenaga ahli hukum untuk membantu percepatan penyelesaian peraturan perundangan bidang perkeretaapian sesuai amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.	Triwulan I-IV 2025	Bagian Hukum
	c. Penyesuaian kerangka regulasi pada rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu perkembangan isu/kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan.	Triwulan I-II 2025	Bagian Hukum, Bagian Perencanaan
3	Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu		
	a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan termasuk bimbingan teknis/workshop secara berkala baik bidang manajerial/umum dan teknis perkeretaapian kepada ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai kebutuhan kompetensi dan ketersediaan anggaran.	Triwulan I-IV 2025	Bagian SDM dan Umum
	b. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka pemetaan kebutuhan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode mendatang guna mendukung pelaksanaan tugas sebagai regulator.	Triwulan I 2025	Bagian SDM dan Umum

No.	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
c.	Penyiapan kerangka kebutuhan SDM perkeretaapian termasuk SDM regulator perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis yang akan ditetapkan pada Tahun 2025.	Triwulan I-II 2025	Bagian SDM dan Umum, Bagian Perencanaan
4	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian		
a.	Koordinasi, penyesuaian data dukung serta pendampingan tahapan <i>clearence</i> terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2025 sesuai kebijakan SPBE nasional dan Kementerian Perhubungan serta mengacu pada rencana penyederhanaan aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.	Triwulan I 2025	Bagian Perencanaan
b.	Lanjutan pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai <i>superapps</i> Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan sistem TIK/modul layanan lainnya termasuk penataan domain sebagai upaya mendukung penyederhanaan aplikasi, meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses pengguna.	Triwulan II-IV 2025	Bagian Perencanaan
c.	Koordinasi dengan Direktorat teknis untuk meningkatkan layanan pengelolaan data yang terintegrasi serta persetujuan perizinan terpusat pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memudahkan pimpinan mengakses data dan layanan perizinan.	Triwulan I-II 2025	Bagian Perencanaan
d.	Sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh unit kerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk penggunaan fitur perjalanan dinas <i>online</i> .	Triwulan I 2025	Bagian Perencanaan

No.	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
e.	Koordinasi dalam penyelesaian dukungan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Kementerian Perhubungan yang mencakup tata kelola, proses bisnis, layanan, aplikasi, data dan informasi, keamanan, infrastruktur, dan audit TIK untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan I 2025	Bagian Perencanaan
f.	Pembentukan unit/kelompok baru yang khusus menangani tata kelola TIK serta memastikan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berjalan lancar, aman, sesuai dengan kebutuhan.	Triwulan I-II 2025	Bagian Perencanaan, Bagian SDM dan Umum
5	Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian:		
a.	Peningkatan publikasi dalam bentuk berita/data/informasi melalui siaran pers/liputan dan buku saku terkait perkeretaapian dengan menyiapkan berbagai topik unggulan.	Triwulan I-IV 2025	Bagian Hukum
b.	Monitoring media dilaksanakan setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan <i>update</i> berkala " <i>Hot Issue</i> Perkeretaapian" serta upaya menyeimbangkan pemberitaan negatif dengan pemberitaan positif.	Triwulan I-IV 2025	Bagian Hukum
c.	Penyiapan program/strategi komunikasi Tahun 2025 termasuk sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.	Triwulan I 2025	Bagian Hukum
6	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
a.	Melakukan publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja ke dalam aplikasi e-SAKIP Reviu dan website secara tepat waktu.	Triwulan I 2025	Bagian Perencanaan

No.	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
b.	Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang selaras dengan arah strategi dan kebijakan pada dokumen naskah teknokratik Rencana Strategis Tahun 2025-2029 termasuk merencanakan target kinerja dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan melakukan analisa secara mendalam, sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat tercapai untuk setiap IKU/IKK sesuai kriteria <i>on the right track</i> (90% s.d 110%).	Triwulan I 2025	Bagian Perencanaan
c.	Menuangkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>) pada indikator kinerja di dokumen Laporan Kinerja.	Triwulan I 2025	Bagian Perencanaan
d.	Mengungkapkan seluruh informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja termasuk di dalamnya tata cara perhitungan capaian kinerja di setiap indikator, penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja dan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (<i>benchmarking</i> kinerja).	Triwulan I 2025	Bagian Perencanaan
e.	Menyeragamkan formulasi pengukuran efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan I 2025	Bagian Perencanaan
f.	Penyiapan rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan termasuk proyeksi sumber daya anggaran.	Triwulan I-II 2025	Bagian Perencanaan

No.	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
g.	Pembentukan Tim Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025 yang mencakup Tim Penyusun Dokumen SAKIP dan Tim Monitoring dan Evaluasi melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan dukungan SDM yang kompeten.	Triwulan I 2025	Bagian Perencanaan
7	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
a.	Meningkatkan perbaikan atas capaian sasaran program/kegiatan dan melakukan peningkatan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Triwulan I-IV 2025	Bagian Keuangan, Bagian Hukum
b.	Tindak lanjut <i>Area of Improvement</i> (Aoi) dari hasil evaluasi penyelenggaraan maturitas SPIP terintegrasi periode sebelumnya.	Triwulan I 2025	Seluruh Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian
c.	Melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, terstruktur dan sistematis didukung sumber daya anggaran yang memadai termasuk penyesuaian identifikasi risiko mengacu proses bisnis.	Triwulan I 2025	Bagian Perencanaan, Bagian SDM dan Umum
d.	Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM, meliputi pelatihan/bimtek/sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM dalam penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko dengan efektif.	Triwulan I-II 2025	Bagian Perencanaan, Bagian SDM dan Umum
e.	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko yang efisien dan akurat.	Triwulan I-IV 2025	Bagian Perencanaan

No.	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
f.	Koordinasi dengan BPKP dan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan terkait persiapan penilaian maturitas SPIP Tahun 2025 diantaranya pembahasan kertas kerja dan metode penilaian/pengisian kertas kerja penilaian mandiri.	Triwulan I 2025	Bagian Perencanaan
8	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian		Bagian Perencanaan
a.	Monitoring intensif untuk proses penagihan TAC Tahun 2024 termasuk koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan persetujuan besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp). Setelah persetujuan besaran SBPP, selanjutnya diperlukan penyusunan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Besaran Satuan Biaya Penggunaan pada Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.	Triwulan I-II 2025	Bagian Keuangan, Bagian Hukum
b.	Percepatan penyelesaian sengketa/permasalahan aset antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Institusi terkait (Kementerian PUPR/lainnya) yang berpengaruh terhadap upaya optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan perolehan PNBP.	Triwulan I-III 2025	Bagian Keuangan
c.	Lanjutan pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan kebutuhan anggaran Tahun 2025 untuk pelaksanaan sertifikasi aset tanah/barang milik negara lainnya di 5 wilayah (Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur).	Triwulan I-IV 2025	Bagian Keuangan

No.	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
9	Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
a.	Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran agar kegiatan prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dengan <i>output</i> maksimal.	Triwulan I 2025	Bagian Keuangan
b.	Rapat koordinasi intensif, monitoring dan pelaporan rutin oleh seluruh unit kerja terkait realisasi anggaran dan progres/ <i>output</i> kegiatan sesuai RPD/prognosa termasuk kesiapan dokumen perencanaan teknis dengan dukungan PMU/tenaga ahli.	Triwulan I-IV 2025	Bagian Keuangan
c.	Melakukan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan pelaporan realisasi output pada aplikasi SAKTI secara rutin dan berkala guna meningkatkan nilai rata-rata NKA Satker, konsistensi serta nilai efisiensi penggunaan anggaran.	Triwulan I-IV 2025	Bagian Keuangan, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian
d.	Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncturan SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 pada 11 kegiatan dengan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024.	Triwulan I 2025	Bagian Keuangan
e.	Pelatihan kepada operator aplikasi SAKTI agar dapat melakukan <i>input</i> data sesuai ketentuan dan valid.	Triwulan I-II 2025	Bagian Keuangan
10	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
a.	Peningkatan layanan SDM/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana berdasarkan hasil survei masih terdapat penilaian yang kurang baik pada layanan pembinaan kepegawaian dan layanan mutasi dan jenjang karir pegawai.	Triwulan I-IV 2025	Bagian SDM dan Umum

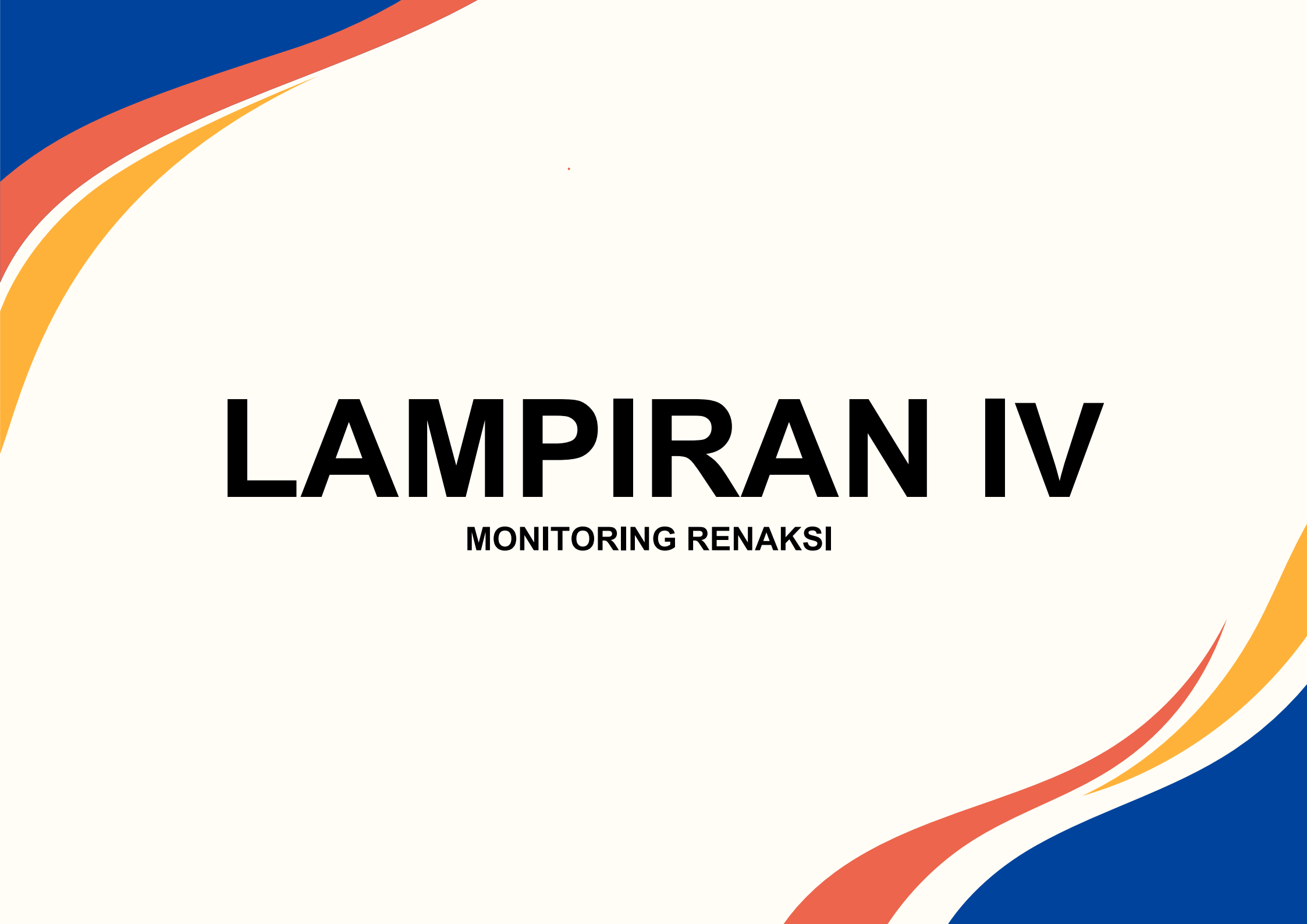
No.	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
b.	Pengoptimalan sistem TIK untuk <i>database</i> dan <i>share</i> informasi terkait layanan kepegawaian sehingga lebih cepat dan informatif kepada seluruh pegawai.	Triwulan I-IV 2025	Bagian SDM dan Umum, Bagian Perencanaan
c.	Percepatan penetapan/pengesahan SOP mikro terkait layanan kepegawaian, tata usaha dan umum/kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut penyusunan Proses Bisnis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan I 2025	Bagian SDM dan Umum

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM
NIP 196507031991032001



LAMPIRAN IV

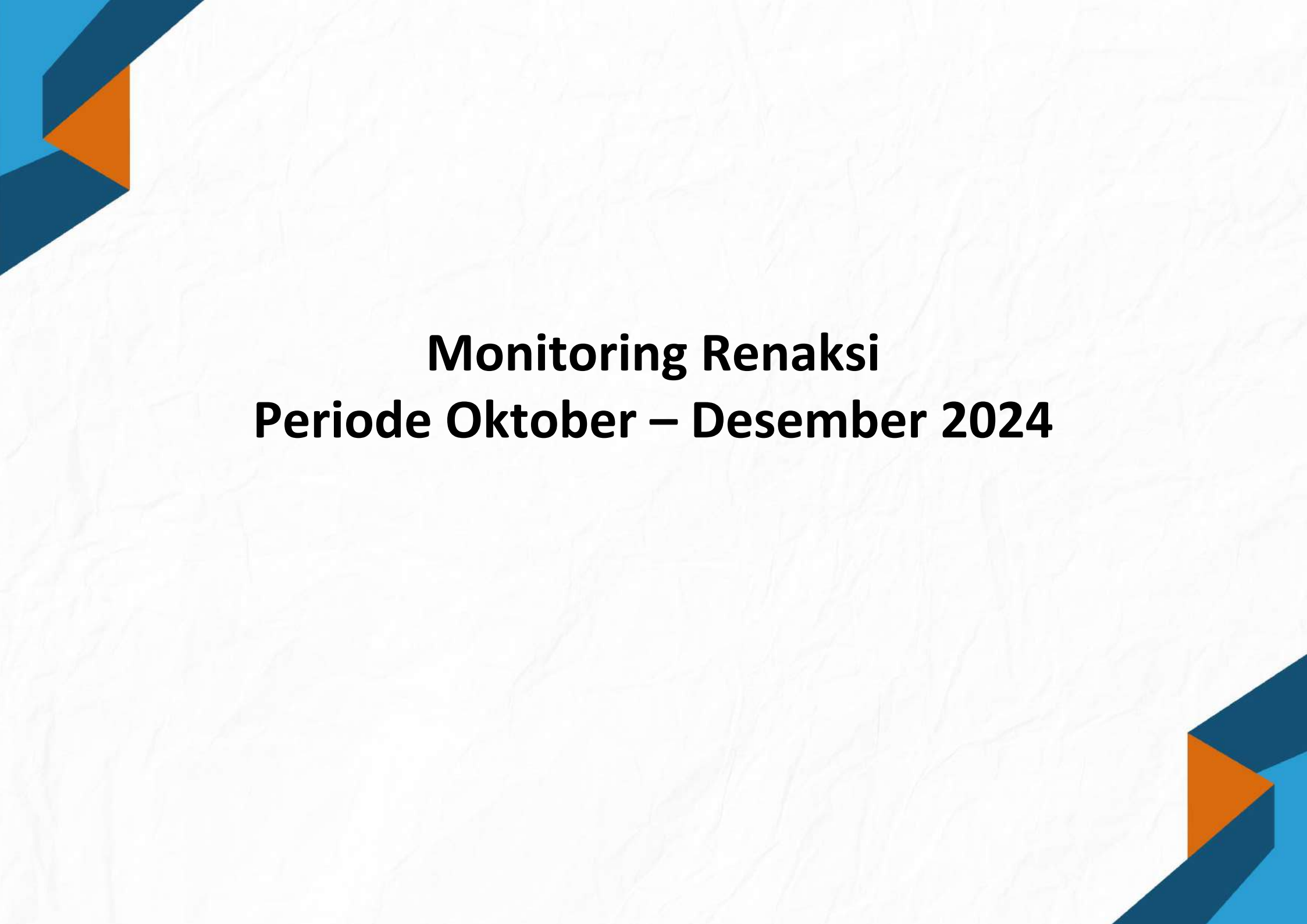
MONITORING RENAKSI



LAMPIRAN IV

Monitoring Renaksi Periode Januari – September 2024

<https://shorturl.at/QZFwC>



Monitoring Renaksi Periode Oktober – Desember 2024



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Oktober, Tahun: 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Dokumen	100	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Kajian Naskah Akademis Usulan Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2007)	-	1	-	-	1.275.694.000	15.63	-	692.070.237	-	54.25%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Dokumen	106	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	1.364.299.300	12.88	-	1.023.146.791	-	74.99%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	106	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	-	-	110.568.000	12.88	-	92.018.018	-	83.22%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	350.524.700	12.88	-	151.629.425	-	43.26%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	%	100	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	-	1	-	-	380.714.150	12.88	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Hukum	-	1	-	-	1.469.932.000	14.81	-	1.116.390.879	-	75.95%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Dokumen	65	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Jasa Konsultan Penataan Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Roadmap kepegawaian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	-	1	-	-	1.200.001.000	16	-	887.319.237	-	73.94%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis	-	1	-	-	193.934.400	17.2	-	99.479.310	-	51.3%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pengelolaan Kepegawaian	-	1	-	-	4.008.976.000	13.62	-	3.611.031.091	-	90.07%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai	-	1	-	-	209.896.000	12.29	-	237.243.060	-	113.03%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	591.672.000	15.47	-	639.961.181	-	108.16%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Character Building	-	1	-	-	3.061.522.400	12.46	-	2.596.914.605	-	84.82%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	140.560.000	15.35	-	49.433.295	-	35.17%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	1	-	-	4.240.224.048	22.54	-	1.915.013.441	-	45.16%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Dokumen	83	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	12	2	16.67	982.643.911	13.16	-	919.890.361	-	93.61%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Laporan	83	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	767.966.259	15.21	-	239.984.100	-	31.25%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	309.619.200	14.55	-	227.466.750	-	73.47%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden, Bappenas, Kemenko Marinvest, Kemenko	-	1	-	-	871.248.384	12.27	-	186.051.540	-	21.35%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	665.850.038	15.18	-	500.575.316	-	75.18%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	1.296.241.600	16.36	-	1.107.951.105	-	85.47%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	1	-	-	987.013.600	15.61	-	831.013.288	-	84.19%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Penyusunan kajian masterplan/kebijakan (Penyusunan Studi Potensi PNBPN, Potensi Pasar, dan Bentuk Kerjasama Pemanfaatan Stasiun Jatinegara dan Stasiun Manggarai)	-	1	-	-	3.000.108.000	16	-	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk kegiatan lain	Kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk kegiatan lain	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Kegiatan Penunjang Non Operasional Organisasi (Pengembangan Organisasi di Lingkungan DJKA)	-	1	-	-	167.000.000	16	-	97.014.000	-	58.09%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Laporan	3	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	1	-	-	723.297.600	15.1	-	827.101.823	-	114.35%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Contact Center Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	141.732.000	17.2	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	1	-	-	208.696.800	15.91	-	194.536.108	-	93.21%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Nilai	3	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Manajemen Resiko	-	1	-	-	2.513.064.800	15.65	-	1.725.506.693	-	68.66%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	1	-	-	335.671.200	15.94	-	96.784.789	-	28.83%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	100	Pengusulan PNBP Yang Berkaitan Dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	648.853.600	12.31	-	23.057.378	-	3.55%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Laporan	100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	11	1	9.09	535.203.000	10.42	-	172.952.826	-	32.32%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	281.943.200	12.31	-	367.663.894	-	130.4%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	11	1	9.09	382.676.000	12.31	-	234.667.498	-	61.32%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	1	-	-	2.867.416.000	11.96	-	3.139.695.992	-	109.5%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	1	-	-	247.598.400	16.24	-	80.426.334	-	32.48%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	1	-	-	1.313.127.900	16.63	-	927.059.818	-	70.6%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	-	-	283.359.200	12.74	-	139.897.544	-	49.37%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	1.361.920.000	12.74	-	698.215.746	-	51.27%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	1	-	-	844.536.800	12.74	-	603.037.106	-	71.4%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	1	-	-	683.988.000	12.74	-	403.276.224	-	58.96%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	1.375.276.000	12.74	-	645.996.132	-	46.97%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	667.979.200	12.74	-	60.012.700	-	8.98%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran	-	1	-	-	444.661.350	12.88	-	334.463.082	-	75.22%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Pengelolaan Arsip	-	1	-	-	194.903.200	11.07	-	254.381.353	-	130.52%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Monitoring Ketatausahaan	-	1	-	-	156.139.200	1.35	-	118.821.120	-	76.1%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	1	-	-	230.231.200	10.64	-	205.478.259	-	89.25%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	%	3,7	Inventarisasi arsip statis dan arsip terjaga di lingkungan DJKA	-	1	-	-	132.081.600	8.94	-	162.704.167	-	123.18%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	-	1	-	-	284.908.000	11.95	-	198.479.294	-	69.66%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian	-	1	-	-	243.866.700	16.63	-	70.312.025	-	28.83%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	-	1	-	-	304.763.900	16.63	-	139.821.284	-	45.88%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	1	-	-	304.854.900	16.63	-	134.895.003	-	44.25%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	%	3,7	Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	1	-	-	209.994.400	12.74	-	165.485.234	-	78.8%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Unit	3,7	Kendaraan Bermotor	13	259	23	8.88	3.599.730.000	8.81	13	2.665.630.000	56.52%	74.05%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dengan rincian sementara yaitu mobil expander 6 unit, gesits 3 unit, nmax 2 unit dan mobil hiace 2 unit	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Renovasi gedung dan bangunan	-	1	-	-	10.629.505.500	15.31	-	5.174.193.150	-	48.68%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Gaji dan Tunjangan	-	1	-	-	53.094.738.400	12.74	-	66.588.251.308	-	125.41%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	1	-	-	21.876.857.600	12.74	-	19.074.137.111	-	87.19%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERMANFAATKANYA KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS PERKERETA APIAN YANG TELAH DITINDAKLANJUTI	Dokumen	100	Penyusunan dokumen perencanaan	-	15	3	20	7.166.891.000	15.63	-	3.547.071.575	-	49.49%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	77	Pengelolaan data dan informasi	-	1	-	-	1.039.642.650	12.88	-	435.642.439	-	41.9%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	74	Penyusunan Desain Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi	-	1	-	-	794.316.000	16	-	436.873.800	-	55%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	74	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	1.057.147.700	15.63	-	982.538.700	-	92.94%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN PUBLIKASI DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pelayanan humas dan protokoler	-	1	-	-	9.202.752.800	16.41	-	6.196.014.767	-	67.33%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum

SEKRETARIS

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM

NIP. 19650703 199103 2 001



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: November, Tahun: 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Dokumen	100	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Kajian Naskah Akademis Usulan Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2007)	-	1	-	-	1.785.971.600	21.88	-	1.153.450.395	-	64.58%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan pelaksanaan kegiatan	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Dokumen	106	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	1.444.552.200	13.64	-	1.069.482.291	-	74.04%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan pelaksanaan kegiatan	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	106	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	-	-	117.072.000	13.64	-	92.018.018	-	78.6%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan pelaksanaan kegiatan	Kabag Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	371.143.800	13.64	-	151.629.425	-	40.85%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan pelaksanaan kegiatan	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	%	100	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	-	1	-	-	403.109.100	13.64	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Hukum	-	1	-	-	1.653.673.500	16.66	-	1.242.025.090	-	75.11%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Dokumen	65	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Jasa Konsultan Penataan Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Roadmap kepegawaian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	-	1	-	-	1.200.001.000	16	-	195.249.000	-	16.27%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis	-	1	-	-	218.176.200	19.35	-	99.479.310	-	45.6%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pengelolaan Kepegawaian	-	1	-	-	4.510.098.000	15.33	-	3.707.400.011	-	82.2%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai	-	1	-	-	236.133.000	13.83	-	237.243.060	-	100.47%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	665.631.000	17.4	-	639.961.181	-	96.14%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Character Building	-	1	-	-	3.444.212.700	14.02	-	2.605.414.605	-	75.65%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	158.130.000	17.27	-	68.833.295	-	43.53%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	1	-	-	4.454.833.427	23.68	-	2.330.478.534	-	52.31%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Dokumen	83	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	3	12	4	33.33	1.134.201.600	15.19	3	950.609.611	75%	83.81%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Laporan	83	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	767.966.259	15.21	-	292.859.775	-	38.13%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	348.321.600	16.36	-	259.962.000	-	74.63%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden, Bappenas, Kemenko Marinvest, Kemenko	-	1	-	-	1.330.187.674	18.74	-	209.070.824	-	15.72%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	935.328.600	21.32	-	563.950.755	-	60.29%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	1.458.271.800	18.41	-	1.295.696.575	-	88.85%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	1	-	-	1.110.390.300	17.56	-	964.416.948	-	86.85%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Penyusunan kajian masterplan/kebijakan (Penyusunan Studi Potensi PNBP, Potensi Pasar, dan Bentuk Kerjasama Pemanfaatan Stasiun Jatinegara dan Stasiun Manggarai)	-	1	-	-	3.000.108.000	16	-	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk kegiatan lain	Kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk kegiatan lain	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Kegiatan Penunjang Non Operasional Organisasi (Pengembangan Organisasi di Lingkungan DJKA)	-	1	-	-	167.000.000	16	-	97.014.000	-	58.09%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Laporan	3	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	1	-	-	964.396.800	20.14	-	860.126.213	-	89.19%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Contact Center Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	159.448.500	19.35	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	1	-	-	234.783.900	17.89	-	353.292.058	-	150.48%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Nilai	3	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Manajemen Resiko	-	1	-	-	2.827.197.900	17.61	-	2.242.332.093	-	79.31%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	1	-	-	377.630.100	17.93	-	141.928.347	-	37.58%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	100	Pengusulan PNBP Yang Berkaitan Dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	729.960.300	13.85	-	23.057.378	-	3.16%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Laporan	100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	11	1	9.09	535.203.000	10.42	-	183.119.206	-	34.21%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	317.186.100	13.85	-	503.470.958	-	158.73%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	11	1	9.09	430.510.500	13.85	-	238.884.298	-	55.49%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaa n	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	1	-	-	3.225.843.000	13.45	-	3.145.236.173	-	97.5%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	1	-	-	278.548.200	18.27	-	80.426.334	-	28.87%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	1	-	-	1.500.717.600	19	-	1.007.703.168	-	67.15%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	-	-	311.695.120	14.01	-	175.382.619	-	56.27%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	1.498.112.000	14.01	-	788.562.286	-	52.64%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	1	-	-	928.990.480	14.01	-	702.648.506	-	75.64%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	1	-	-	752.386.800	14.01	-	480.391.949	-	63.85%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	1.512.803.600	14.01	-	668.892.382	-	44.22%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	734.777.120	14.01	-	60.012.700	-	8.17%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran	-	1	-	-	470.817.900	13.64	-	465.448.082	-	98.86%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Pengelolaan Arsip	-	1	-	-	219.266.100	12.45	-	254.381.353	-	116.01%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Monitoring Ketatausahaan	-	1	-	-	178.444.800	1.54	-	118.821.120	-	66.59%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	1	-	-	259.010.100	11.97	-	205.478.259	-	79.33%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	%	3,7	Inventarisasi arsip statis dan arsip terjaga di lingkungan DJKA	-	1	-	-	148.591.800	10.05	-	162.704.167	-	109.5%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	-	1	-	-	320.521.500	13.44	-	198.479.294	-	61.92%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian	-	1	-	-	278.704.800	19	-	70.312.025	-	25.23%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	-	1	-	-	348.301.600	19	-	210.504.488	-	60.44%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	1	-	-	348.405.600	19	-	139.123.361	-	39.93%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	%	3,7	Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	1	-	-	230.993.840	14.01	-	165.485.234	-	71.64%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Unit	3,7	Kendaraan Bermotor	13	259	23	8.88	3.599.730.000	8.81	13	2.665.630.000	56.52%	74.05%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Renovasi gedung dan bangunan	-	1	-	-	10.629.505.500	15.31	-	5.174.193.150	-	48.68%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Gaji dan Tunjangan	-	1	-	-	58.404.212.240	14.01	-	67.030.974.654	-	114.77%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,7	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	1	-	-	24.064.543.360	14.01	-	21.084.129.551	-	87.61%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERMANFAATKANYA KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS PERKERETA APIAN YANG TELAH DITINDAKLANJUTI	Dokumen	100	Penyusunan dokumen perencanaan	-	15	3	20	7.166.891.000	15.63	-	3.794.099.300	-	52.94%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	77	Pengelolaan data dan informasi	-	1	-	-	1.100.798.100	13.64	-	563.453.994	-	51.19%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	74	Penyusunan Desain Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi	-	1	-	-	794.316.000	16	-	675.168.600	-	85%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	74	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	1.480.006.780	21.88	-	1.378.292.550	-	93.13%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN PUBLIKASI DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pelayanan humas dan protokoler	-	1	-	-	10.353.096.900	18.46	-	16.184.748	-	0.16%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum

SEKRETARIS

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM

NIP. 19650703 199103 2 001



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Desember, Tahun: 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Dokumen	100	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Kajian Naskah Akademis Usulan Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2007)	1	1	1	100	1.822.420.000	22.32	1	1.537.933.860	100%	84.39%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Dokumen	108,89	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkeretaapian	1	1	1	100	1.613.058.000	15.15	1	1.239.981.305	100%	76.87%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat efisiensi penyerapan anggaran	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	108,89	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	1	1	1	100	192.080.000	15.15	1	126.847.609	100%	66.04%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	1	1	1	100	412.382.000	15.15	1	177.559.025	100%	43.06%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	%	108,89	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	1	1	1	100	377.899.000	15.15	1	28.860.000	100%	7.64%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Hukum	1	1	1	100	1.837.415.000	18.51	1	1.389.266.896	100%	75.61%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat efisiensi penyerapan anggaran	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Dokumen	70	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Jasa Konsultan Penataan Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Roadmap kepegawaian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	1	1	1	100	1.200.001.000	16	1	789.321.000	100%	65.78%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	70	Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis	1	1	1	100	311.972.000	20.4	1	99.479.310	100%	31.89%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pengelolaan Kepegawaian	1	1	1	100	5.011.220.000	20.4	1	4.416.597.361	100%	88.13%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat efisiensi penyerapan anggaran	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	70	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai	1	1	1	100	237.248.000	20.4	1	237.243.060	100%	100%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kabag Kepegawaian dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	70	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	639.962.000	20.4	1	639.961.181	100%	100%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	70	Character Building	1	1	1	100	5.034.076.000	20.4	1	4.766.730.947	100%	94.69%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat efisiensi penyerapan anggaran.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	70	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	119.500.000	20.4	1	122.983.295	100%	102.91%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun sehingga realisasi melebihi target.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	1	1	1	100	4.951.353.000	15.73	1	3.256.776.386	100%	65.78%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Dokumen	83	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	4	12	4	33.33	1.797.752.000	19.48	4	1.579.721.619	100%	87.87%	Kegiatan telah dilaksanakan,	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Laporan	83	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	1	1	100	818.617.000	14.24	1	342.135.450	100%	41.79%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	387.024.000	18.18	1	324.952.500	100%	83.96%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat efisiensi penyerapan anggaran	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden, Bappenas, Kemenko Marinvest, Kemenko	1	1	1	100	797.456.000	19.21	1	310.164.324	100%	38.89%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	1	1	1	100	722.254.000	23.82	1	563.950.755	100%	78.08%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat efisiensi penyerapan anggaran	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	1.833.302.000	20.46	1	1.761.723.213	100%	96.1%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	1	1	1	100	1.288.767.000	19.51	1	964.416.948	100%	74.83%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Penyusunan kajian masterplan/kebijakan (Penyusunan Studi Potensi PNBPN, Potensi Pasar, dan Bentuk Kerjasama Pemanfaatan Stasiun Jatinegara dan Stasiun Manggarai)	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk kegiatan lain	Kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk kegiatan lain	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Kegiatan Penunjang Non Operasional Organisasi (Pengembangan Organisasi di Lingkungan DJKA)	1	1	1	100	97.014.000	16	1	97.014.000	100%	100%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Laporan	3	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	1	1	1	100	1.205.496.000	25.17	1	1.089.588.235	100%	90.39%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Contact Center Bidang Perkeretaapian	-	1	1	100	177.165.000	20.4	-	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan	Kegiatan tidak dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Pembinaan Keprotokolan dan MC	1	1	1	100	501.825.000	20.4	1	513.853.558	100%	102.4%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat efisiensi penyerapan anggaran.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Nilai	3	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Manajemen Resiko	1	1	1	100	3.731.331.000	20.4	1	2.242.332.093	100%	60.09%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT PERKERETA APIAN	Tahun	3	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	1	1	1	100	419.589.000	20.4	1	180.874.917	100%	43.11%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	100	Pengusulan PNPB Yang Berkaitan Dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNPB Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	811.067.000	15.38	1	232.922.228	100%	28.72%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Laporan	100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	11	1	9.09	535.203.000	10.42	1	409.483.453	100%	76.51%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	612.429.000	15.38	1	571.513.027	100%	93.32%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	11	1	9.09	478.345.000	15.38	1	263.810.368	100%	55.15%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	1	1	1	100	3.584.270.000	20.37	1	3.389.097.478	100%	94.55%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat efisiensi penyerapan anggaran	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	1	1	1	100	309.498.000	20.37	1	201.818.184	100%	65.21%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	1	1	1	100	1.875.897.000	23.75	1	1.353.557.761	100%	72.16%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	1	1	1	100	201.199.000	15.92	1	196.896.789	100%	97.86%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat efisiensi penyerapan anggaran	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	1.702.400.000	15.92	1	1.215.196.944	100%	71.38%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	1	1	1	100	1.055.671.000	15.92	1	768.010.006	100%	72.75%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	1	1	1	100	854.985.000	15.92	1	633.455.599	100%	74.09%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Hukum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	1.719.095.000	15.92	1	773.691.012	100%	45.01%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	1	1	100	574.974.000	15.92	1	317.788.125	100%	55.27%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran	1	1	1	100	541.845.000	15.15	1	465.448.082	100%	85.9%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat efisiensi penyerapan anggaran	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Pengelolaan Arsip	1	1	1	100	254.429.000	13.83	1	304.181.503	100%	119.55%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun sehingga realisasi melebihi target.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Monitoring Ketatausahaan	1	1	1	100	118.897.000	1.93	1	118.821.120	100%	99.94%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	1	1	1	100	205.534.000	13.3	1	255.416.049	100%	124.27%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun sehingga realisasi melebihi target.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	%	3,7	Inventarisasi arsip statis dan arsip terjaga di lingkungan DJKA	1	1	1	100	162.802.000	11.17	1	162.704.167	100%	99.94%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	1	1	1	100	248.202.000	14.94	1	239.949.449	100%	96.68%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian	1	1	1	100	119.313.000	23.75	1	119.152.025	100%	99.87%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	1	1	1	100	210.723.000	23.75	1	210.504.488	100%	99.9%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	1	1	1	100	139.531.000	23.75	1	139.123.361	100%	99.71%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	%	3,7	Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	1	1	1	100	165.579.000	15.92	1	165.485.234	100%	99.94%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Unit	3,7	Kendaraan Bermotor	23	259	23	8.88	3.456.452.000	8.81	23	476.681.002	100%	13.79%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Renovasi gedung dan bangunan	1	1	1	100	11.560.270.000	20.41	1	11.019.244.770	100%	95.32%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Gaji dan Tunjangan	1	1	1	100	72.124.213.000	15.92	1	72.798.442.021	100%	100.93%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun sehingga realisasi melebihi target.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	1	1	100	26.446.072.000	15.92	1	25.765.869.984	100%	97.43%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERMANFAATKANYA KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS PERKERETA APIAN YANG TELAH DITINDAKLANJUTI	Dokumen	100	Penyusunan dokumen perencanaan	3	12	3	25	7.166.891.000	15.17	3	3.794.099.300	100%	52.94%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	77	Pengelolaan data dan informasi	1	1	1	100	1.223.109.000	15.15	1	720.646.294	100%	58.92%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	74	Penyusunan Desain Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi	1	1	1	100	794.316.000	16	1	794.316.000	100%	100%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	74	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	1	1	100	1.510.211.000	22.32	1	1.510.210.500	100%	100%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN PUBLIKASI DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pelayanan humas dan protokoler	1	1	1	100	11.503.441.000	20.51	1	10.357.037.574	100%	90.03%	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kegiatan telah dilaksanakan.	Kabag Hukum

SEKRETARIS
 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM
 NIP. 19650703 199103 2 001



LAMPIRAN V

DATA DUKUNG PER-INDIKATOR KINERJA KEGIATAN



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN
KONEKTIVITAS PERKERETAAPIAN YANG TELAH DITINDAKLANJUTI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemenuh.go.id>
EMAIL : dijenka@kemenuh.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR: KP-DJKA 234 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN KEGIATAN STUDI KEBIJAKAN
PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dokumen-dokumen perencanaan di bidang transportasi perlu pengesahan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 271 Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Kewenangan dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, kajian evaluasi manfaat hasil pembangunan perlu pengesahan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pengesahan Dokumen Kegiatan Studi Kebijakan Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Kereta Api;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1710);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
9. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 271 Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Kewenangan dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN KEGIATAN STUDI KEBIJAKAN PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2024.

KESATU : Mengesahkan Dokumen Kegiatan Studi Kebijakan Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dokumen kegiatan studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai masa berlaku penggunaan maksimum 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 31 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM
NIP 196706081990031005

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
5. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
6. Direktur Sarana Perkeretaapian;
7. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

- KEDUA : Dokumen kegiatan studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai masa berlaku penggunaan maksimum 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 31 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ttd.

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM
NIP 196706081990031005

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
5. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
6. Direktur Sarana Perkeretaapian;
7. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ZEN HADIANTO, S.H., M.H
NIP 197907042005011005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR **KP-DJKA 234 TAHUN 2024**
TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN KEGIATAN STUDI
KEBIJAKAN PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN
2024

NO.	KEGIATAN
1.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogyakarta-Solo-Palur
2.	Rekomendasi Lokasi Kantor Balai Pengujian Perkeretaapian

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM
NIP 196706081990031005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR: KP-DJKA 234 TAHUN 2024
TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN KEGIATAN STUDI
KEBIJAKAN PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN
1.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogyakarta-Solo-Palur
2.	Rekomendasi Lokasi Kantor Balai Pengujian Perkeretaapian

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ttd.

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM
NIP 196706081990031005

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


KEP. MADIANTO, S.H., M.H
NIP 197907042005011005



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGISLASI (RANCANGAN DAN PERATURAN
PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemhub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 47/KI-3 / 1 / 2025

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari : Kepala Bagian Hukum
Hal : Data Dukung penyusunan Laporan Kinerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2024
Tanggal : 17 Januari 2025

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.205/1/1/K1/DJKA/2025 tanggal 3 Januari 2025 perihal Undangan Rapat Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja, disampaikan bahwa Bagian Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung capaian indikator kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yaitu presentase capaian publikasi sosial media, capaian publikasi oleh media online, presentase capaian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan yang sedang dalam pembahasan ataupun yang akan dibahas, presentase kegiatan pendampingan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan data dukung capaian kinerja Triwulan III dari Bagian Hukum untuk mendukung indikator kinerja dimaksud.

Atas perkenan arahan dan petunjuk lanjut diucapkan terima kasih.

Zen Hadiano, S. H., M. H.
NIP 197907042005011005

Tembusan :
Kepala Bagian Perencanaan

Daftar Regulasi yang Perlu Dilakukan Evaluasi Periode Triwulan IV Tahun 2024

No.	JUDUL REGULASI	PIC	Posisi	Urgensi	KETERANGAN
1.	Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase	Direktorat LLAKA	Direktorat LLAKA	Untuk mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian	Telah dilakukan pembahasan pada tanggal 27 Juli 2024. Akan dimintakan persetujuan Menteri terkait proses lanjut rencana revisi PM Terdapat arahan Menteri untuk dilakukan evaluasi ulang.
2.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api	Direktorat LLAKA	Bagian Hukum	• Penentuan Kelas stasiun berkaitan dengan penyesuaian/penyusunan Standar Pelayanan Minimum di Stasiun. • Belum terdapat pengaturan mengenai perubahan nama stasiun	telah dilakukan pembahasan tanggal 7-9 Agustus 2024

Daftar Regulasi yang Perlu Dilakukan Evaluasi Periode Triwulan IV Tahun 2024

No.	JUDUL REGULASI	PIC	Posisi	Urgensi	KETERANGAN
1.	Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase	Direktorat LLAKA	Direktorat LLAKA	Untuk mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian	Telah dilakukan pembahasan pada tanggal 27 Juli 2024. Akan dimintakan persetujuan Menteri terkait proses lanjut rencana revisi PM Terdapat arahan Menteri untuk dilakukan evaluasi ulang.
2.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api	Direktorat LLAKA	Bagian Hukum	• Penentuan Kelas stasiun berkaitan dengan penyesuaian/penyusunan Standar Pelayanan Minimum di Stasiun. • Belum terdapat pengaturan mengenai perubahan nama stasiun	telah dilakukan pembahasan tanggal 7-9 Agustus 2024

3.	Revisi PM 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api	Direktorat Prasarana	Direktorat Prasarana	Untuk mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian khususnya pada jalur kereta api	Akan direncanakan pembahasan
4.	Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan	Direktorat Keselamatan	Direktorat Keselamatan	Perlu dievaluasi terkait penggunaan Rumija untuk pemasangan portal / pintu perlintasan di perlintasan sebidang	Telah dilakukan rapat pembahasan tanggal 21-22 Mei 2024. Substansi Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 akan diformulasikan ulang oleh Direktorat Keselamatan sebelum dilakukan proses lanjut.
5.	Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Standar Pengujian Lokomotif	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Bagian Hukum		Telah diadakan rapat pada tanggal 13 Desember 2024 bersama stakeholder terkait dan selanjutnya akan dilakukan pembahasan lanjut.

6.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan Dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Bagian Hukum	Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api terdapat pada PP 6 Tahun 2017 namun belum terdapat peraturan turunan yang mengatur secara teknis.	Akan direncanakan pembahasan
7.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Bagian Hukum	Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api terdapat pada PP 6 Tahun 2017 namun belum terdapat peraturan turunan yang mengatur secara teknis.	Akan direncanakan pembahasan
8.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api.	Direktorat LLAKA	Bagian Hukum	Menindaklanjuti reviu dari BPK	Telah dilaksanakan pembahasan pada tanggal 5-6 Desember 2024, selanjutnya akan dilakukan pembahasan kembali.
9.	Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121	Direktorat LLAKA	Bagian Hukum	PM 121 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perkeretaapian	Telah dilaksanakan pembahasan pada tanggal Desember 2024, selanjutnya akan

	Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api				dilakukan pembahasan kembali.

Daftar Regulasi yang telah terbit Periode Triwulan IV Tahun 2024

No.	JUDUL REGULASI	KETERANGAN
1	Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Tanggal Penetapan: 11 Juni 2024 Tanggal Pengundangan: 28 Juni 2024
2	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2024 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	Tanggal Penetapan: 25 Juni 2024 Tanggal Pengundangan: 4 Juli 2024
3	Perpres Nomor 33 Tahun 2024 Perubahan ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Tanggal Penetapan 22 Februari 2024 Tanggal Pengundangan: 22 Februari 2024
4.	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2024 Tentang Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	Tanggal Penetapan 8 Juli 2024 Tanggal Pengundangan 23 Juli 2024

5.	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	Tanggal Penetapan: 27 September 2024 Tanggal Pengundangan: 14 Oktober 2024
6.	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 31 Tahun 2024 Tentang Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian	Tanggal Penetapan 29 November 2024 Tanggal Pengundangan 12 Desember 2024
7.	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi	Tanggal Penetapan: 9 Desember 2024

Daftar Regulasi yang telah dilakukan Harmonisasi bersama Kemenkumham Periode Triwulan IV Tahun 2024

No.	JUDUL REGULASI	KETERANGAN		
1	Harmonisasi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Safety Assessment	Pembahasan dilakukan bulan November dengan Kumham juga Direktorat Keselamatan	Biro Hukum Kementerian Perhubungan RI	Sedang menunggu tanggal penetapan dan pengundangan

Daftar Regulasi yang perlu dilakukan evaluasi dan masih dikaji oleh Direktorat Teknis Periode Triwulan IV Tahun 2024

No.	JUDUL REGULASI	PIC	Posisi	Urgensi	KETERANGAN
1.	Revisi PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain.	Direktorat Prasarana	Direktorat Prasarana	Perlu dievaluasi terkait persyaratan teknis Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain pada jalur Kereta Api dalam kota dan Jalur Ganda.	Sedang dilakukan kajian dan pembahasan internal di Direktorat Prasarana Perkeretaapian
2.	Revisi PM 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian	Direktorat Prasarana	Direktorat Prasarana	Untuk mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian karena tata cara untuk pengujian prasarana perkeretaapian dengan teknologi baru berbeda dengan konvensional.	Sedang dilakukan kajian dan pembahasan internal di Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

3.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian (AKAN MENJADI PERDIRJEN BUKAN RPM)	Direktorat Keselamatan	Bagian Hukum	Sebagai Pedoman bagi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian	Akan dilakukan pembahasan.
4.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2011 Tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api	Dit. LLAKA		Untuk pengaturan kelas stasiun	Sedang dalam pembahasan di Dit.LLAKA dan Konsultan serta simulasi penilaian stasiun.

Daftar Kegiatan Perjanjian Periode Triwulan IV Tahun 2024

No	Perjanjian	Badan Usaha	Tanggal Penandatanganan
1.	Sewa Tanah Untuk Penanaman Pipa Air Baku Sejajar Jalur Kereta Api Pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	21 Oktober 2024
2.	Sewa Tanah Untuk Penanaman Pipa Air Baku dan Kabel Power Intake WTP Yang Sejajar dan Melintasi Jalur Kereta Api Pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PT Bakti Nugraha Yuda Energy	1 November 2024
3.	Sewa Tanah Untuk Penanaman Pipa Gas Melintasi Jalur Kereta Api Pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Perta Samtan Gas	7 November 2024
4.	Sewa Tanah Untuk Penanaman Pipa Gas Melintasi Jalur Kereta Api Pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PT Air Liquide	8 November 2024

5.	Sewa Tanah Untuk Penanaman Kabel Fiber Optik Melintasi Jalur Kereta Api Di 11 (Sebelas) Titik Lokasi Pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PT Asia Net (11 titik)	19 November 2024
6.	Sewa Tanah Untuk Penanaman Kabel Fiber Optik Melintasi Jalur Kereta Api Di 13 (Tiga Belas) Titik Lokasi Pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PT Asia Net (13 titik)	19 November 2024
7.	Perpanjangan Sewa Tanah untuk Penanaman Pipa Air Limbah Melintasi Jalur Kereta Api Pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PT Fajar Surya Wisesa Tbk	6 Desember 2024
8.	Sewa Tanah Untuk Penanaman Kabel Fiber Optik Melintasi Jalur Kereta Api Di 14 (Empat Belas) Titik Lokasi Pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PT Trans Indonesia Superkoridor	13 Desember 2024
9.	Sewa Tanah Untuk Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM. 28+604 Antara Stasiun Pondok Cina – Stasiun Depok Baru Lintas Manggarai – Bogor Di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Perum Perumnas (JPO Pondok Cina) Adendum	31 Desember 2024

Daftar Kegiatan Pendampingan Hukum Periode Triwulan IV Tahun 2024

No	Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat/Turut Tergugat	Keterangan
1.	212/Pdt.G/2024/PN.Bks	1. Bahum 2. Idris 3. Jarudin 4. Gunawan	1. Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian (Tergugat I) 2. Pemerintah RI Cq. Kementerian PUPR (Tergugat II) 3. Kantor Pertanahan Kota Bekasi (Turut Tergugat)	Putusan sudah berkekuatan hukum tetap MENGADILI: 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II mengenai lewat waktu atau daluwarsa; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/ PN.Bks. 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
2.	6/Pdt.G/2024/PN.Kis	1. Alimuddin 2. Edi Sopian	1. Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Tergugat I) 2. Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Tergugat II) 3. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara (Tergugat III)	Putusan sudah berkekuatan hukum tetap MENGADILI: Dalam Eksepsi: - Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai Para Penggugat Tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan A Quo; Dalam Pokok Perkara; 1. Menyatakan Gugatan

				Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara sebesar Rp. 1.577.500,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3.	238/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel	1. Holilah	1. PT.Kereta Api Indonesia 2. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 3. PT. Perum Perumnas	Putusan sudah berkekuatan hukum tetap M E N G A D I L I: DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI: • Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi; DALAM POKOK PERKARA: • Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard); DALAM REKONVENSI: DALAM PROVISI: • Menyatakan gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA: • Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

				DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.097.500,00 (satu juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4.	128/Pdt.G/2024/PN.Skt	1. Bambang Hartono Iman S. 2. Dewi Lelyana	1. Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan (Tergugat); 2. BPN Kota Surakarta (Turut Tergugat I) 3. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Turut Tergugat II)	Penggugat Mengajukan Banding MENGADILI: DALAM EKSEPSI - Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>); - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp932.500,00 (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5.	111/Pdt.G/2024/PN.Kis	1. Alimuddin 2. Edi Sopian	1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Tergugat I); 2. Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Tergugat II); 3. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II	Proses Persidangan

			Wilayah Sumatera Bagian Utara (Tergugat III); 4. Gubernur Sumatera Utara (Tergugat IV); 5. Kepala ATR/BPN Kabupaten Asahan (Tergugat V).	
6.	638/Pdt.G/2024/PN.Smg	1. PT. Chakra Sarana Sentosa 2. PT. Nusantara Satria Tama	1. PT. Kereta Api (Tergugat) 2. PT. Mutumanikam Abadi Jaya (Turut Tergugat I) 3. Kementerian Perhubungan (Turut Tergugat II)	Proses Persidangan
7.	137/Pdt.G/2024/PN.Yyk	1. GKR Condrokirono	1. PT. Kereta Api (Persero); 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Tergugat II); 3. Kantor Badan Pertanahan Yogyakarta (Turut Tergugat I); 4. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Turut Tergugat II); 5. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Turut Tergugat III).	Mediasi dinyatakan Berhasil dan menunggu relaas panggilan sidang lanjutan untuk Putusan Damai.
8.	09/G/2024/PTUN.Bdg	1. Endah Frulita Ningsih	1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung (Tergugat) 2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia	Penggugat mengajukan Kasasi MENGADILI EKSEPSI: <i>Menerima Eksepsi Tergugat.</i>



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT
KOMPETENSI/KEAHLIAN

**REKAP JUMLAH PEGAWAI DITJEN PERKERETAAPIAN
PEMILIK SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH SDM PEMILIK SERTIFIKAT KOMPETENSI/ KEAHLIAN
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	100
2	Direktorat LLAKA	84
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	134
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	106
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	119
6	BTP Kelas I Medan	82
7	BTP Kelas II Padang	48
8	BTP Kelas II Palembang	62
9	BTP Kelas I Jakarta	83
10	BTP Kelas I Bandung	68
11	BTP Kelas I Semarang	67
12	BTP Kelas I Surabaya	67
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	66
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	81
15	BPKAR Sumatera Selatan	40
16	BPKA Sulawesi Selatan	43
TOTAL		1250

Keterangan :

- 1) Total pegawai DJKA pemilik sertifikat kompetensi/keahlian sebanyak 1250 pegawai
- 2) Posisi s.d akhir Desember 2024

Jakarta, 16 Januari 2025

Kepala Bagian SDM dan Umum



Indriati, S.E., M.M

NIP 198106072005022001

ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN
Per Desember 2024

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS												KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL										Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja		
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jabang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT GoA 3	Diklat Kereta Cepat	Arslaris	Kepegawaian	Penyetaan Jablung	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli KPB	Diklat Manajerial (Manaj,Krisis, BLU, Database, MR, dll)	PPK Tipe C	K3 UMUM				
1	ACHYAR PASARIBU	19730506 199703 1 001	PNS	DIKA	√		√		√	√																			Dit. Prasarana Perkeretaapian	
2	ADDIN ARISTOTIKA	19851103 2010121001	PNS	DIKA	√	√				√	√																		Dit. Sarana Perkeretaapian	
3	AGUS TRIONO	19830827 200604 1 002	PNS	DIKA	√																								Dit. LLAKA	
4	ANDHIKA SETIAWAN	19850607 201012 1 002	PNS	DIKA	√	√					√	√																	Balai Perawatan Perkeretaapian	
5	ANTON APRIANTO	19710418 199803 1 002	PNS	DIKA	√		√	√																					Dit. Prasarana Perkeretaapian	
6	Ardisa Pramudhita	199204242019022005	PNS	DIKA	√											√													Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
7	AWANG KURNIAWAN	19830204 201012 1 002	PNS	DIKA	√		√		√	√									√ (QRMA)										Dit. LLAKA	
8	ENDANG SETIAWAN, S.T.	197402201999031002	PNS	DIKA																		√ (PKA) √(Coaching and Mentoring)							BTP Kelas II Padang	
9	Ir. ANDI HERMANSYAH, ST., MM	198510082008121002	PNS	DIKA																		√ (PKA) √(Coaching and Mentoring)							Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
10	ZEN HADIANTO, SH., MH	197907042005011005	PNS	DIKA																		√(Coaching and Mentoring)							Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
11	RUDI PITOYO, S.E.	198007082002121001	PNS	DIKA																		√(Coaching and Mentoring)							BTP Kelas I Semarang	
12	CHANDRAWAN ADHIPUTRANTO	19710812 200502 1 001	PNS	DIKA	√	√					√	√								√ (QRMA) / √ (QRMP)		√ (PKA) √(Coaching and Mentoring)							Dit. LLAKA	
13	DANNY PALGUNADI	19771022 200312 1 001	PNS	DIKA	√		√	√												√ (QRMA)									BTP Kelas II Padang	
14	DEAN ANDRE YUNIE ARDI	19880623 201012 1 004	PNS	DIKA	√		√	√			√							√											Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
15	DIMAS RESKA PUTRA	19821225 200912 1 002	PNS	DIKA	√		√												√	√ (QRMA) / √ (QRMP)									Dit. Prasarana Perkeretaapian	
16	DONY CHRISNA SANJAYA	19880903 201012 1 003	PNS	DIKA	√	√					√	√																	Dit. Sarana Perkeretaapian	
17	ERNI BASRI	19760813 200212 2 001	PNS	DIKA	√		√	√	√																				Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
18	ERNI DWI ASTUTI	198906032010122009	PNS	DIKA	√															√ (QRMO)				√						Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
19	FAHRUL RIVAI HASBIUAN	19850609 200912 1 001	PNS	DIKA	√																								BTP Kelas I Jakarta	
20	FARID RISDIYANTO	198603012009121002	PNS	DIKA	√																								Dit. LLAKA	
21	FREDERIK PONGTULURAN	19750225 200604 1 001	PNS	DIKA	√		√	√	√			√					√	√		√ (QRMA)		√(Coaching and Mentoring)								Dit. Keselamatan Perkeretaapian
22	GUNADI RAHARJO	19811208 200604 1 002	PNS	DIKA	√		√		√	√	√	√						√		√ (QRMA)		√(Coaching and Mentoring)								Dit. Keselamatan Perkeretaapian
23	HARI SUSANTO	19790920 200604 1 001	PNS	DIKA	√		√		√	√										√ (QRMA)										BTP Kelas I Semarang
24	HARYO KUMORO RAHMANDHEWO	19830220 201012 1 003	PNS	DIKA	√	√					√							√		√ (QRMA)										Dit. Keselamatan Perkeretaapian
25	HENDARWAN Rianto	19801121 201012 1 001	PNS	DIKA	√							√								√ (QRMO)										Dit. Sarana Perkeretaapian
26	HERU PRASETYO	19710418 200312 1 001	PNS	DIKA	√		√	√	√											√ (QRMA)										Dit. Sarana Perkeretaapian
27	IMAM PRASETYO	19801129 200502 1 001	PNS	DIKA	√		√													√ (QRMP)		√ (Coaching and Mentoring)					√			Dit. Keselamatan Perkeretaapian
28	IRWAN WIJAYA	19791124 201012 1 001	PNS	DIKA	√	√					√	√																		Dit. Sarana Perkeretaapian
29	JHAN ELYA PASHA	19820530 200712 2 001	PNS	DIKA	√							√																		Dit. Keselamatan Perkeretaapian
30	LUSIAWAN JATI	19760719 200912 1 001	PNS	DIKA	√																									Dit. Prasarana Perkeretaapian
31	MAMAT HARYANTO	19810106 200912 1 004	PNS	DIKA	√	√					√	√						√												Dit. Sarana Perkeretaapian
32	MOH FATAWI	19670827 199303 1 002	PNS	DIKA	√		√	√	√																					Dit. Prasarana Perkeretaapian
33	MOHAMAD RISAL WASAL	19670608 199003 1 005	PNS	DIKA	√	√					√									√ (INOVATECH)										Dit. LLAKA
34	HENDRY NURYANUAR	19780103 200604 1 002	PNS	DIKA		√					√	√								√ (QRMA)		√(Coaching and Mentoring)								Dit. Sarana Perkeretaapian
35	F.J. ARISMAN HAREFA	19700501 199603 1 002	PNS	DIKA		√			√	√	√											√ (Manaj) Krisis)								Dit. Keselamatan Perkeretaapian
36	ARI SUPRIANTORO	19790915 200112 1 002	PNS	DIKA		√					√	√					√	√		√ (QRMA)		√(Coaching and Mentoring)								Dit. Sarana Perkeretaapian
37	CHOIRUDIN	19780909 200312 1 002	PNS	DIKA			√		√	√								√				√(Coaching and Mentoring)								Dit. Sarana Perkeretaapian
38	MOHAMAD ZULKARNAIN	19761111 200604 1 002	PNS	DIKA			√		√	√										√ (QRMP)		√(Coaching and Mentoring)								BTP Kelas I Surabaya
39	MUTTAQIN	19691226 199703 1 002	PNS	DIKA	√	√					√	√																		BTP Kelas I Semarang
40	M. FACHRUL FIRMANSYAH	19801218 200812 1 002	PNS	DIKA			√	√	√																					Dit. Keselamatan Perkeretaapian
41	JUPER PANJAITAN	19760308 200604 1 001	PNS	DIKA			√	√																						Dit. Prasarana Perkeretaapian
42	DENI SETIADI	19841211 200604 1 001	PNS	DIKA			√		√	√		√																		Dit. LLAKA
43	AKHMAD AFI SETIAWAN	19840810 201012 1 001	PNS	DIKA			√	√	√																					Dit. Prasarana Perkeretaapian
44	FAHMI ALAMSYAH	19871216 201012 1 004	PNS	DIKA			√	√	√																					Dit. Keselamatan Perkeretaapian
45	RUSDY ARSYAD	19780114 200604 1 002	PNS	DIKA			√	√														√ (Manaj) Kinerja)								Dit. Keselamatan Perkeretaapian
46	MULYANTO	19650903 200604 1 001	PNS	DIKA				√																						BTP Kelas I Jakarta
47	INDAH WIDYA ASTUTI	19860126 200912 2 006	PNS	DIKA				√												√ (QRMA)				√						Dit. Prasarana Perkeretaapian
48	DIANITA HERDIANA	19801213 200912 2 001	PNS	DIKA				√												√ (QRMA)				√						Dit. Prasarana Perkeretaapian
49	BERNADI ARMISETYO	19821112 200912 1 005	PNS	DIKA			√	√									√			√ (QRMA)										BTP Kelas I Bandung
50	AGUNG ARI PAMUNGKAS	19790707 200604 1 001	PNS	DIKA				√																						Dit. Keselamatan Perkeretaapian
51	PRATOMO GUNO SAPUTRO	19800529 200312 1 003	PNS	DIKA			√	√												√ (QRMA)		√ (PKA)								Dit. Prasarana Perkeretaapian

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS												KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL										Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jabang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT GoA 3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawain	Penyertaan Jablung	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli KPB	Diklat Manajerial (Manaj.Krisis, BLU, Database, MR, dll)	PPK Tipe C	K3 UMUM		
52	GITA LANIATI	19810821 200312 2 002	PNS	DIKA			√	√				√									√ (Analisis Kompetensi)							Dit. Keselamatan Perkeretaapian
53	ANUNG SADPUTRO	19770901 200712 1 001	PNS	DIKA			√	√											√ (QRMO)		√ (Coaching and Mentoring)							BTP Kelas I Bandung
54	EKO RAHADI N.	19820410 200912 1 003	PNS	DIKA				√											√ (QRMA)			√						BTP Kelas I Surabaya
55	ILIYA ILMA AZIZAH	19870408 200912 2 006	PNS	DIKA			√	√					√						√ (QRMO)									BTP Kelas II Palembang
56	DONNY SATRIA	19830426 201012 1 003	PNS	DIKA			√	√																				Dit. Prasarana Perkeretaapian
57	ANTONIUS MAY HERMAN	19820517 201012 1 003	PNS	DIKA								√	√															Balai Pengujian Perkeretaapian
58	RYCO PRADHANA CANDRA	19880416 201012 1 001	PNS	DIKA				√			√																	BPKA Sulawesi Selatan
59	WIDI ADITYA	19890213 201012 1 004	PNS	DIKA				√				√							√ (QRMO)									Balai Pengujian Perkeretaapian
60	M. ZAENUDDIN	19890331 201012 1 003	PNS	DIKA																								Dit. Keselamatan Perkeretaapian
61	FERIAL RAMDHAN	19860522 200812 1 002	PNS	DIKA			√	√				√									√ (Hospitality)							Dit. Keselamatan Perkeretaapian
62	SETYO GUNAWAN	19720322 199803 1 002	PNS	DIKA		√		√				√	√								√ (Public Speaking, PIM Tk II)							Dit. Sarana Perkeretaapian
63	AMANDA PRITASARI	19840319 200712 2 001	PNS	DIKA			√	√				√					√			√ (QRMA)								Balai Pengujian Perkeretaapian
64	ANNAS RIFAI	19810726 200604 1 001	PNS	DIKA		√		√				√	√						√ (QRMA)									Balai Pengujian Perkeretaapian
65	ABDUL KAMAL	19760308 2009121 001	PNS	DIKA				√											√ (QRMA)									BTP Kelas I Medan
66	DEWI HESTIWUHYANTI	19781227 200012 2 001	PNS	DIKA								√	√						√ (QRMA)									Dit. Prasarana Perkeretaapian
67	CHANDRA ANDAR LANDOASI	19860706 2009121 004	PNS	DIKA				√			√			√														Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
68	MELISA GARNISIA	19880514 200912 2 001	PNS	DIKA				√											√ (QRMA)									Dit. Prasarana Perkeretaapian
69	EDI WIDIARTO	19860412 2008121 001	PNS	DIKA				√				√									√ (PKP)							Dit. LLAKA
70	NUR MUHAMMAD S.R.	19870225 2010121 004	PNS	DIKA			√	√					√						√ (QRMO)									Balai Perawatan Perkeretaapian
71	DABMANILLAS	19880507 200604 2 002	PNS	DIKA				√											√ (QRMO)				√					Balai Pengujian Perkeretaapian
72	MUHAMMAD RAFLI KADAFI	19860607 2010121 005	PNS	DIKA																			√					Balai Pengujian Perkeretaapian
73	ARIEF SUDYATMOKO	19790518 200604 1 001	PNS	DIKA			√	√											√ (QRMA)		√ (BLU)							Dit. Prasarana Perkeretaapian
74	BAMBANG G. KUNTO	19760121 200604 1 001	PNS	DIKA			√	√											√ (QRMA)									BTP Kelas I Jakarta
75	JIMMY MICHAEL GULTOM	19791031 200604 1 002	PNS	DIKA			√	√									√		√ (QRMA)		√ (Coaching and Mentoring)							Dit. Prasarana Perkeretaapian
76	YOPI OKATRISZA	19820530 200712 1 001	PNS	DIKA			√	√																				BTP Kelas I Semarang
77	BERNARD HASIBUAN	19821226 200604 1 003	PNS	DIKA				√											√ (QRMA)									BTP Kelas I Semarang
78	DONNY SILANDO, ST	19820315 200712 1 001	PNS	DIKA			√	√											√ (QRMA)									Dit. Prasarana Perkeretaapian
79	MUHAMMAD YUSUF	19801002 200604 1 001	PNS	DIKA			√		√	√									√ (QRMA)									BTP Kelas I Medan
80	LUTHFIN NIAM	19770912 200912 1 002	PNS	DIKA					√																			BTP Kelas I Semarang
81	RENALDI PRABUDIMAN	19811212 200912 1 003	PNS	DIKA			√		√	√							√											BTP Kelas I Semarang
82	MELISA SILVIA ANGGRAINI	19870525 200812 2 001	PNS	DIKA				√	√	√																		Dit. Prasarana Perkeretaapian
83	M. ZAKI ALAM YUSRANI	19871214 201012 2 002	PNS	DIKA				√																				BTP Kelas I Jakarta
84	AKHMAD BARELVI	19881007 201012 1 007	PNS	DIKA				√	√	√																		Dit. Prasarana Perkeretaapian
85	INDRA EBEN HUTABARAT	19861210 201012 1 003	PNS	DIKA					√	√			√															BTP Kelas I Medan
86	WAHYU PUJA P.	19880824 201012 1 003	PNS	DIKA					√	√										√ (QRMO)				√				Dit. Prasarana Perkeretaapian
87	AFRIZA TELA KURNIA	19840409 201012 1 001	PNS	DIKA				√	√	√																		Dit. Prasarana Perkeretaapian
88	DINO FRANDINATA	19760710 200812 1 001	PNS	DIKA			√		√	√		√																Dit. Prasarana Perkeretaapian
89	ARI WIBOWO	19831225 201012 1 003	PNS	DIKA			√		√	√		√							√ (QRMA)									Dit. Prasarana Perkeretaapian
90	ROSLAENI	19770108 200912 2 002	PNS	DIKA				√	√	√																		Dit. Prasarana Perkeretaapian
91	ISKANDAR	19800610 2007121 001	PNS	DIKA			√		√	√			√						√ (QRMA)									BTP Kelas I Medan
92	NAOMI MASSANG LOLOK	19801110 200604 2 002	PNS	DIKA			√		√	√											√ (Coaching and Mentoring)							Dit. Prasarana Perkeretaapian
93	RETNO SARI SUNARTO	19820923 200604 2 003	PNS	DIKA			√		√	√									√ (QRMA)									Dit. LLAKA
94	FERDIAN SUIRYO ADHI P	19800215 200712 1 002	PNS	DIKA			√		√	√											√ (PKA) √ (Coaching and Mentoring)							BTP Kelas I Semarang
95	ARI PRANOVI INDRIANTO	19791024 200912 1 003	PNS	DIKA							√																	BTP Kelas II Palembang
96	PRIH GALIH	19680410 199703 1 002	PNS	DIKA			√				√	√							√ (QRMP)									Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
97	ADITYA YUNianto	19850609 200712 1 001	PNS	DIKA			√				√	√							√ (QRMP)	√								BPKAR Sumatera Selatan
98	RUSTAMIAJI JATMIKO	19810725 201012 1 002	PNS	DIKA							√	√													√			Balai Pengujian Perkeretaapian
99	AKHMAD YASKUR	19781004 201012 1 001	PNS	DIKA		√					√																	Dit. Sarana Perkeretaapian
100	M. SYARIF HIDAYAT	19791201 200912 1 006	PNS	DIKA							√	√																Dit. Sarana Perkeretaapian
101	ANIK SETIANI	19740112 200502 2 001	PNS	DIKA		√					√	√																Dit. Sarana Perkeretaapian
102	UDUT PANGIHUTAN S.	19830717 200812 1 002	PNS	DIKA		√					√								√ (QRMA)									Balai Perawatan Perkeretaapian
103	SITI HENYAWATI	19721016 200604 1 003	PNS	DIKA							√	√									√ (Coaching and Mentoring)							Dit. Sarana Perkeretaapian
104	YAYAN KUSHARYANTO	19801110 200604 1 003	PNS	DIKA							√	√																Dit. Sarana Perkeretaapian
105	VENNY ARIANTI	19870605 200912 2 002	PNS	DIKA		√					√	√							√ (QRMO)									Dit. Sarana Perkeretaapian
106	ARMAINI DEWI	19710515 200312 2 001	PNS	DIKA							√	√																Dit. Sarana Perkeretaapian
107	BOMBY DUSWARA	19870601 201504 1 002	PNS	DIKA		√					√																	Dit. Sarana Perkeretaapian

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS													KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL										Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jabang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT GoA 3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawain	Penyetaan Jablung	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli KPB	Diklat Manajerial (Manaj,Krisis, BLU, Database, MR, dll)	PPK Tipe C	K3 UMUM			
108	M.DANU PRAWIRA	19920420 201503 1 005	PNS	DIKA							√																	Dit. Sarana Perkeretaapian	
109	DANIEL PAUNDANAN	19740524 200712 1 001	PNS	DIKA		√					√								√ (QRMA)									Dit. Sarana Perkeretaapian	
110	MYRNA SECUNDA	19830307 201012 2 002	PNS	DIKA	√	√					√	√																Balai Pengujian Perkeretaapian	
111	TODD BINSAR PARULIAN	19830429 201012 1 003	PNS	DIKA		√					√	√							√ (QRMA)									Dit. Sarana Perkeretaapian	
112	RAHMAWATY	197107292006042001	PNS	DIKA		√													√ (QRMO)									Dit. Sarana Perkeretaapian	
113	ULUK MUJARI	198206092005011006	PNS	DIKA						√	√	√										√						Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
114	AGUS SUNARYO HADI S. P.	198608202014021001	PNS	DIKA		√					√																	Dit. Sarana Perkeretaapian	
115	TATI HENDRAWATI	196910222012122003	PNS	DIKA		√					√																	Balai Pengujian Perkeretaapian	
116	TUTI	197705172006042005	PNS	DIKA							√																	Balai Pengujian Perkeretaapian	
117	DWI KURNIADI GUNAWAN	198911262015031001	PNS	DIKA		√					√	√							√ (QRMO)									Dit. Sarana Perkeretaapian	
118	HARDIANTO EKO PRASETIO	198312132010121004	PNS	DIKA		√					√								√ (QRMO)									Dit. Sarana Perkeretaapian	
119	FERRY CANDRA HASIBUAN	19821226 200312 1 001	PNS	DIKA							√	√								√								BTP Kelas II Palembang	
120	ARIE KURNIAWAN	19810128 200604 1 001	PNS	DIKA							√																	Dit. Sarana Perkeretaapian	
121	M. HIDAYAT	19800327 200604 1 002	PNS	DIKA			√				√	√						√	√ (QRMA)									Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
122	RIO APRILIANA	19810417 200812 2 001	PNS	DIKA										√			√											Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
123	DINY FEBRIANTY	19800226 201012 2 001	PNS	DIKA		√											√		√ (QRMA)									Balai Pengujian Perkeretaapian	
124	FAUZI BAAMIR	19840408 201012 1 003	PNS	DIKA													√											Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
125	UNTUNG MARGONO	19620311 198302 1 001	PNS	DIKA													√											Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
126	IRAWATI SIURMAN	19681127 199403 2 003	PNS	DIKA			√											√										Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
127	IRVAN ARIESTIANA	19790623 200502 1 002	PNS	DIKA		√	√											√	√ (QRMP)		√ (BLU, PKA) √(Coaching and Mentoring)							Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
128	HEPPY EKA PRASETYA	19830224 200912 1 002	PNS	DIKA			√											√	√ (QRMA)									Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
129	AGUSTINUS DANANG F S	19850509 200712 1 001	PNS	DIKA			√											√	√ (QRMA)									Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
130	ANDI GUNTUR ASAPA	19840724 200712 1 001	PNS	DIKA			√											√	√ (QRMP, QRMA)									Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
131	EDDY SUSANTO	19801118 201012 1 001	PNS	DIKA														√										Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
132	WARDoyo	19820818 201012 1 005	PNS	DIKA			√					√						√	√ (QRMA)		√ (Manaj Proyek)	√						Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
133	ROESANTOR HENDRO PUTRO	19780925 200812 1 001	PNS	DIKA		√												√										Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
134	JUMANTO	19690103 199310 1 001	PNS	DIKA														√	√ (QRMA)									Dit. LLAKA	
135	JOICE	19820330 200312 2 002	PNS	DIKA			√					√					√	√ (QRMA)	√ (QRMA)	√ (Analisis Kompetensi) √ (Coaching and Mentoring)									Dit. LLAKA
136	HARIS FARIZI	19820127 200604 1 002	PNS	DIKA			√											√	√ (QRMA)	√ (Analisis Kompetensi)								Dit. LLAKA	
137	VONNY MAHENDRI	19850508 200912 2 005	PNS	DIKA			√											√	√ (QRMA)	√ (Analisis Kompetensi)								Dit. LLAKA	
138	ADITYA KARSA	19860902 200812 1 001	PNS	DIKA														√		√(Coaching and Mentoring)								Dit. LLAKA	
139	FIRMANSYAH TEGUH S	19800812 200712 1 001	PNS	DIKA			√											√	√ (QRMA)									Dit. Prasarana Perkeretaapian	
140	L.SAMUEL NAINGGOLAN	19770109 200604 1 001	PNS	DIKA			√											√	√ (QRMA)	√(Coaching and Mentoring)								Dit. Prasarana Perkeretaapian	
141	EKA ARISTA ANGGOROWATI	19850402 200812 2 002	PNS	DIKA			√											√		√(Coaching and Mentoring)								Dit. Prasarana Perkeretaapian	
142	NANGIM ULINNUHA	19861021 201012 1 002	PNS	DIKA	√		√		√	√	√									√ (PKP)								Dit. Prasarana Perkeretaapian	
143	ARY LUNDI AYU OKTRADA	19821004 200604 2 002	PNS	DIKA		√												√	√ (QRMA) / √ (QRMP)	√(Coaching and Mentoring)								Dit. Sarana Perkeretaapian	
144	POIBE IRENE P SIMATUPANG	19691008 199603 2 002	PNS	DIKA														√	√ (QRMA)									Dit. Sarana Perkeretaapian	
145	DANAN WIDHONARKO	19690201 199803 1 001	PNS	DIKA			√					√						√	√ (QRMA)	√(Coaching and Mentoring)								Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
146	HOTMA PARULIAN L	19770718 200712 1 001	PNS	DIKA			√					√						√	√ (QRMA)									Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
147	WINDI MAHATESYASNA	19821221 200312 1 001	PNS	DIKA			√											√										Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
148	FATHIR PAYUNGAN SIREGAR	19790402 200012 1 001	PNS	DIKA			√											√										Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
149	ARTHA EKA WIJAYA, ST	19860309 200812 1 003	PNS	DIKA			√					√						√										Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
150	EVY KRISTIANA, SE., M.M.TR	19721224 199803 2 002	PNS	DIKA		√												√		√(Coaching and Mentoring)								Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
151	INTAN NOVIANINGSIH, S.SLT., M.T.	19871122 200912 2 002	PNS	DIKA														√										Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
152	BUDIHARTI OKTIVA DEWI, SE., M.M.	19671015 200604 2 002	PNS	DIKA		√						√						√		√ (Analisis Kompetensi)								Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
153	RIZAL FATHONI ASAD, S.E	197504182007121003	PNS	DIKA			√						√						√ (QRMO)									BTP Kelas I Surabaya	
154	WALDO MORO, ST., M.SI	197610292008121001	PNS	DIKA									√							√	√ (Barjas)	√						Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
155	ADRIANTO BUDI PRABOWO, SE, MBA	197705072010121001	PNS	DIKA									√	√					√ (QRMO)	√ (Manaj Krisis)								Dit. LLAKA	
156	TALUFIK ERFIN	198308222009121003	PNS	DIKA									√															BTP Kelas II Palembang	
157	YUSTINA NURHAYATI, ST., MT	197805112009122001	PNS	DIKA			√						√						√ (QRMO, QRMA)	√ (PKP)								BTP Kelas I Surabaya	
158	ARI HENDRIATNO, ST	197611182014091001	PNS	DIKA									√															BTP Kelas I Medan	
159	RONY LESMANA, A.MD.KA	198709162010121005	PNS	DIKA									√						√ (QRMA)	√ (Okupas PPK)								BTP Kelas II Padang	
160	TRUANTO BRODIO SUSATUO, S.E	197203222014091002	PNS	DIKA									√															BTP Kelas I Medan	
161	RENDY JULYANTO, SE	199507292019021003	PNS	DIKA									√															Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
162	RANGGA PERDANA A, S.S.T (TD)	199312222018011002	PNS	DIKA									√							√ (Barjas)								BTP Kelas I Medan	
163	M RIZKI FATURRAHMAN, ST	199402252019021002	PNS	DIKA									√															Dit. Sarana Perkeretaapian	
164	RISKA SASANTI DANARTINI, ST., M.Sc	197808202009122002	PNS	DIKA			√						√						√ (QRMA)									BTP Kelas I Semarang	
165	NIKEN DWIKINASHI	19900220 202012 2 005	PNS	DIKA	√																							Dit. Keselamatan Perkeretaapian	

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL										Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jalang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT GoA 3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawaian	Penyusunan Jablung	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli KPB	Diklat Manajerial (Manaj,Krisis, BLU, Database, MR, dll)	PPK Tipe C	K3 UMUM				
166	READY REBERTO, SE	199010102020121003	PNS	DIKA																									Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
167	NOVA HANDOYO	19781105 200312 1 002	PNS	DIKA	√	√					√																		Dit. Sarana Perkeretaapian	
168	MUHAMMAD ANSHARI, S.S.T (TD)	199110212015031002	PNS	DIKA																									BTP Kelas II Padang	
169	IR. IMAM AZIZ WIJAYANTO, ST	198608262009121003	PNS	DIKA			√																						Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
170	ALEXANDER REINHARD G. MANIK	198610302009121004	PNS	DIKA						√																			BTP Kelas I Jakarta	
171	JOKO WAHYU SETYAWAN, ST	198404152010121004	PNS	DIKA																									Balai Perawatan Perkeretaapian	
172	EKO NOWIARDI	198011072009121002	PNS	DIKA		√													√ (QRMO) / √ (QRMA) / √ (QRMP)		√ (Manaj Proyek)								Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
173	EKO PURNOMO, SE	197812272010121004	PNS	DIKA								√																	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
174	NOVIE HASTA WAHYUDI, ST	198511162008121002	PNS	DIKA																									Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
175	DEDI HUMAIDI, S.St.	198603182009121002	PNS	DIKA																									BTP Kelas II Padang	
176	DUTA PRATAMA, ST	198810202009121002	PNS	DIKA			√																						Dit. LLAKA	
177	ABDURAHMAN AHMAD	19960801 201801 1 001	PNS	DIKA				√																					Balai Pengujian Perkeretaapian	
178	HASMAN SYUHAS	19810820 200604 1 001	PNS	DIKA						√	√																		BPKA Sulawesi Selatan	
179	RIKA RAHM	19880510 201012 2 003	PNS	DIKA			√			√	√																		BTP Kelas I Semarang	
180	ARI SURYOKO	19810504 201012 1 002	PNS	DIKA						√	√																		Dit. Prasarana Perkeretaapian	
181	FERRY WIJO UTOMO	19961014 201801 1 003	PNS	DIKA							√														√				Balai Pengujian Perkeretaapian	
182	MUHAMMAD HAFID	19920505 201801 1 003	PNS	DIKA							√																		Balai Pengujian Perkeretaapian	
183	NUR SETIAWAN SIDIQ	197703122002121003	PNS	DIKA			√																		√ (BLU)	√			Dit. Prasarana Perkeretaapian	
184	ROSITA	198001192001122001	PNS	DIKA			√																						Dit. LLAKA	
185	DANDUN PRAKOSA	196801051997031001	PNS	DIKA			√																						Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
186	DEDIK TRI ISTIANTARA	197710102000121002	PNS	DIKA			√																		√				BPKAR Sumatera Selatan	
187	LUKMAN AL AMIN	198101242001121001	PNS	DIKA			√																		√ (Coaching and Mentoring)				Dit. Prasarana Perkeretaapian	
188	SYAFEK JAMHARI	196809101994031004	PNS	DIKA			√					√																	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
189	MOCHAMAD ANDI HARY MURTY	197507312002121001	PNS	DIKA		√																							Balai Perawatan Perkeretaapian	
190	NURHADI UNGGUL WIBOWO	197111161998031002	PNS	DIKA			√																		√ (Coaching and Mentoring)				BTP Kelas I Surabaya	
191	SURANTO	196804251993031002	PNS	DIKA			√																		√ (PIM Tk II)				Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
192	RIZKY HANDARU BASUKI	198301092007121001	PNS	DIKA																									BTP Kelas I Medan	
193	HASBUDI SAMAD	197903282009031002	PNS	DIKA																									BPKA Sulawesi Selatan	
194	ARIN INDRIA VERDANI	198505152009122003	PNS	DIKA																					√ (QRMA)				BTP Kelas I Semarang	
195	ANDRE BUDI DHARMAWAN	198510052010121001	PNS	DIKA								√													√ (QRMO)				Dit. LLAKA	
196	NOVA WAHYU CAHYONO	199211302020121003	PNS	DIKA		√																					√	√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
197	RISWANTARA	199108032020121004	PNS	DIKA																									BTP Kelas I Bandung	
198	YOHANES YUANA NATANIEL NARTUPULU	199801292020121007	PNS	DIKA						√																√ (Bahasa Inggris)				BTP Kelas I Jakarta
199	MUHAMMAD RAFI AL-FARIZI, S	199502172020121008	PNS	DIKA																								√	BTP Kelas I Bandung	
200	ARINTA LUWIYANA	197004071993032001	PNS	DIKA																									Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
201	AKBARANI CANTIKA	199807102020122003	PNS	DIKA																								√	Dit. Sarana Perkeretaapian	
202	VIKI OKISA SAIFUDIN	199510022018011001	PNS	DIKA																						√			Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
203	YOSEP YOGO WIDHIYATMOKO	198610222020121003	PNS	DIKA																						√ (QRMO)		√	Balai Perawatan Perkeretaapian	
204	TRINANDA MEINAR ARIANI	199605132020122006	PNS	DIKA																						√ (QRMO)		√	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
205	ANGELA MERICI YOSHINTA RINAWATI	199201302020122007	PNS	DIKA																								√	Dit. Sarana Perkeretaapian	
206	DEDI SATRIA	199306102020121008	PNS	DIKA																								√	BTP Kelas I Medan	
207	HERRY KURNIAWAN KADAR SMANTO	198611232020121003	PNS	DIKA																								√	BPKAR Sumatera Selatan	
208	RIZKI FERNANDO	199001112020121002	PNS	DIKA																						√ (QRMO) / √ (QRMA)		√	BTP Kelas II Palembang	
209	RANTI AHMAD ALRASYID	199102262020121004	PNS	DIKA																						√		√	BTP Kelas I Surabaya	
210	MUHAMMAD HANNAFI	199702282020121006	PNS	DIKA																									BTP Kelas I Surabaya	
211	YUSUF FAJAR RAMADHAN	199407142020121009	PNS	DIKA																					√	√ (MC)		√	BTP Kelas II Padang	
212	MAULANA ACHSAN	199804222020121003	PNS	DIKA																									Dit. Prasarana Perkeretaapian	
213	KIKI SENIA PUSPITASARI	198608272010122005	PNS	DIKA																						√ (Pengegola Barjas)				Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
214	SUPANDIANSYAH	198702202020121004	PNS	DIKA																						√ (QRMO) / √ (QRMA)		√	BTP Kelas II Palembang	
215	ESTINNA SARIE	199408022020122014	PNS	DIKA																						√ (QRMO)		√	Balai Pengujian Perkeretaapian	
216	TULLUS NIRWANSYAH AWI	200006022021121001	PNS	DIKA																						√ (QRMO)			BTP Kelas I Jakarta	
217	ANIS CHORUNISA	199603222020122005	PNS	DIKA																								√	BTP Kelas I Surabaya	
218	NOVIANA NISA'UL ROHMAH	199411292016122001	PNS	DIKA																									Dit. LLAKA	
219	SIDIQ SALEH	199301132020121001	PNS	DIKA																								√	BTP Kelas I Jakarta	
220	RIZKY MUHAMMAD	199312072020121005	PNS	DIKA							√															√ (Barjas)				Dit. Sarana Perkeretaapian
221	FAISAL KRISTOFFEL LUMBAN TOBING	199507052016121001	PNS	DIKA																									Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
222	AYU PERMATA SANI	199401202016122002	PNS	DIKA								</																		

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS										KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL										Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja			
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jalbang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT GoA 3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawain	Penyertaan Jablung	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli KPB	Diklat Manajerial (Manaj,Krisis, BLU, Database, MR, dll)			PPK Tipe C	K3 UMUM	
232	MUHAMMAD FATHURAMAN PRINGGATAMA	199705082020121003	PNS	DIKA																									Balai Perawatan Perkeretaapian
233	ANNE RUFADAH	198009072007122002	PNS	DIKA			√												√ (QRMO)										BTP Kelas I Bandung
234	INKA PRATIWI	199101022020122007	PNS	DIKA															√ (QRMO)			√					√		BTP Kelas I Semarang
235	MOH MAULANA RIZKI ZAINUR BOFIQ	199604012018011003	PNS	DIKA															√ (QRMO)			√							Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
236	GENTUR WIKU PRIBADI	199308292020121004	PNS	DIKA															√ (QRMO)							√			Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
237	SITTI HASMIDA	199803072020122002	PNS	DIKA															√ (QRMO)										BPKA Sulawesi Selatan
238	ANDHIKA MARDIUNI	198503272010121003	PNS	DIKA															√ (QRMO)										Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
239	MERINDA PANGESTIKASARI	199603252020122008	PNS	DIKA															√ (QRMO)							√			Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
240	RIZKA MAULIDA	199608202020122006	PNS	DIKA															√ (QRMO)							√			Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
241	DIMAS Aji SUKMA, S.Kom.	19970707 202012 1 004	PNS	DIKA															√ (QRMO)							√			BPKAR Sumatera Selatan
242	INDAH YENI SUMIATI NINGSIH, S.Hum	19920107 202012 2 004	PNS	DIKA																						√			BPKAR Sumatera Selatan
243	JAYARI, S.Si	19900415 202012 1 007	PNS	DIKA																						√			BPKAR Sumatera Selatan
244	AHKMAD IPANDY, S.Kom	19880616 202012 1 008	PNS	DIKA							√															√			BPKAR Sumatera Selatan
245	KHOIRUNNISA, S.Hum	19930407 202012 2 012	PNS	DIKA																						√			BPKAR Sumatera Selatan
246	REZI RADIKA, A.Md. KA	19980611 202012 1 006	PNS	DIKA																						√			BPKAR Sumatera Selatan
247	MUHAMMAD RIDHO YUSHARDI, A.Md.T	19940326 202012 1 004	PNS	DIKA																						√			BPKAR Sumatera Selatan
248	TEO TRI GOMI, A. Md.KA	19980522 202012 1 006	PNS	DIKA																						√			BPKAR Sumatera Selatan
249	KEVIN REYNALDO, S. Kom.	19931028 202012 1 005	PNS	DIKA																						√			Balai Pengujian Perkeretaapian
250	FAHMI ISMAIL, S.Hum.	19970529 202012 1 002	PNS	DIKA															√ (QRMO)							√			Balai Pengujian Perkeretaapian
251	NURZAMAN, S.Si.	19971029 202012 1 006	PNS	DIKA															√ (QRMO)							√			Balai Pengujian Perkeretaapian
252	SEPTIAN ILHAM MULFAHMI	19970911 202012 1 001	PNS	DIKA							√															√			Balai Pengujian Perkeretaapian
253	NUGROHO TRI PAMUNGKAS, S.Kom	19960126 202012 1 006	PNS	DIKA																	√ (Digital Marketing)					√			Balai Pengujian Perkeretaapian
254	EDWIN DWI AHMAD, S.Kom.	19961015 202012 1 005	PNS	DIKA							√														√	√			Balai Pengujian Perkeretaapian
255	EZRA AGUNG PRATAMA, A.Md. KA.	19980423 202012 1 005	PNS	DIKA																				√		√			Balai Pengujian Perkeretaapian
256	DYANITA INDRIA SENNIA, A.Md.KA	19960807 202012 2 006	PNS	DIKA																						√			Balai Pengujian Perkeretaapian
257	JOELFIKA RAMADHANIA, Amd. KA	19970126 202012 2 009	PNS	DIKA																						√			Balai Pengujian Perkeretaapian
258	LINGGAR SUBEKTI, A. Md. T	19980228 202012 1 003	PNS	DIKA																						√			Balai Pengujian Perkeretaapian
259	Aji PERMANA PUTRA	19960526 202012 1 006	PNS	DIKA							√															√			Balai Pengujian Perkeretaapian
260	IWIN MANURUNG, S.T	19930416 202012 1 004	PNS	DIKA																						√			Balai Perawatan Perkeretaapian
261	SAUT MARTUA JAHENDA SIRINGO-RINGO, S.T.	19900204 202012 1 003	PNS	DIKA																	√ (Barjas, Okupasi PPK)					√			Balai Perawatan Perkeretaapian
262	IBNU IBRAHIM NURCAHYO, S.T.	19970525 202012 1 008	PNS	DIKA																						√			Balai Perawatan Perkeretaapian
263	RIZKI CATUR PUTRA, S.Kom.	19931201 202012 1 011	PNS	DIKA																						√			Balai Perawatan Perkeretaapian
264	LU'LU' ATUZZAHROH, S.Hum	19950103 202012 2 009	PNS	DIKA																						√			Balai Perawatan Perkeretaapian
265	RENDYA PURNAMA SARI, S.Kom	19900117 202012 2 007	PNS	DIKA																						√			Balai Perawatan Perkeretaapian
266	TIMBUL TRIYANTO, S.E.	19880508 202012 1 002	PNS	DIKA																	√ (Barjas)		√			√			Balai Perawatan Perkeretaapian
267	GEMA AKBAR PUTRA PAMUNGKAS, A.Md. KA	19930615 202012 1 009	PNS	DIKA												√										√			Balai Perawatan Perkeretaapian
268	PANDU BAGUS ANDIKA, A.Md.KA	19940814 202012 1 009	PNS	DIKA																	√ (Hospitality)					√			Balai Perawatan Perkeretaapian
269	ANINDITA HARSAYANUGRAHA MURWASTO, A.Md. KA	19930101 202012 1 007	PNS	DIKA																						√			Balai Perawatan Perkeretaapian
270	AJENG PRAMITA NINGTYAS, A.Md.KA	19941003 202012 2 007	PNS	DIKA																						√			Balai Perawatan Perkeretaapian
271	DERI DWI CAHYA, S.Kom	19941210 202012 1 001	PNS	DIKA																						√			Balai Perawatan Perkeretaapian
272	ERIC VAN CHRISMAN LBN. BATU, S.E.	19901120 202012 1 002	PNS	DIKA															√ (QRMO)		√ (BLU, Bahasa Inggris)					√			BTP Kelas I Jakarta
273	SHOFWATINIDA, S.Kom.	19970412 202012 2 007	PNS	DIKA																	√ (Public Speaking)					√			BTP Kelas I Jakarta
274	GILANG WISNU SAPUTRA, S.Kom.	19950724 202012 1 004	PNS	DIKA																					√ (Manaj Talenta)	√			BTP Kelas I Jakarta
275	APRIYANTO, S.IP.	19950410 202012 1 006	PNS	DIKA																						√			BTP Kelas I Jakarta
276	DIAN YUARDI, S.T.	19920917 202012 1 009	PNS	DIKA																						√			BTP Kelas I Jakarta
277	AGUSTINAH RIZKY AMALIA, S.T.	19920824 202012 2 007	PNS	DIKA							√										√ (QRMO)					√			BTP Kelas I Jakarta
278	IRFAN FAJAR HERMAWAN, A.Md. KA.	19940620 202012 1 002	PNS	DIKA																	√ (QRMO)					√			BTP Kelas I Jakarta
279	SYAFIRA CAESARIA WAHYUNINGTYAS, A.Md. KA	19990311 202012 2 002	PNS	DIKA																						√			BTP Kelas I Jakarta
280	LISA FAQIATUZZAHROH, A.Md.	19900710 202012 2 007	PNS	DIKA													√									√ (QRMO)			BTP Kelas I Jakarta
281	LIA LAELASARI, S.I.Pus.	19950101 202012 2 016	PNS	DIKA																						√			BTP Kelas I Bandung
282	ISMIE KHANZA HASTUTI, S.Sos.	19950518 202012 2 010	PNS	DIKA																						√			BTP Kelas I Bandung
283	ANISA ALFIANI RAHAYU, S.Si.	19910718 202012 2 003	PNS	DIKA																	√ (QRMO)					√			BTP Kelas I Bandung
284	ADI WINASIS, S.T.	19860223 202012 1 003	PNS	DIKA			√																			√			BTP Kelas I Bandung
285	FIRMANSYAH, S.T	19911106 202012 1 006	PNS	DIKA							√															√			BTP Kelas I Bandung
286	DANANG PANGESTU WIBOWO, A.Md. KA	19970131 202012 1 008	PNS	DIKA																						√			BTP Kelas I Bandung

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS												KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL										Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jabang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT GoA 3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawain	Penyetaraan Jablung	Manajemen Risiko (QRM/QRMA/QRM O)	Ahli KPBU	Diklat Manajerial (Manaj,Krisis, BLU, Database, MR, dll)	PPK Tipe C	K3 UMUM		
287	HARTATA PUTRA MAI MARTA, A.Md. KA	19970527 202012 1 003	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Bandung	
288	PRİYANTO SUPRAYOGI, A.Md. KA	19910430 202012 1 006	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Bandung	
289	PUPU PURYANTIKA, A.Md. KA	19921026 202012 2 007	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Bandung	
290	ARIA INDI WICAKSANA, S.I.Kom.	19950116 202012 1 005	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Semarang	
291	IBNU WAHYU ROCHIDIN, S.Kom.	19910609 202012 1 009	PNS	DIKA															√ (QRM0)		√ (Bahasa Inggris)					√	BTP Kelas I Semarang	
292	BURHANUDIN NURSETO PRATOMO, S.E.	19930224 202012 1 006	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Semarang	
293	RA RAHMAWATI NURLELY, S.Hum.	19950219 202012 2 011	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Semarang	
294	ROHMAD JARWANTO, S.T.	19850430 202012 1 001	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Semarang	
295	RHOFAJAR AGUSTA YOGABRATA, S.Si.	19870813 202012 1 001	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Semarang	
296	EVAN BENYAMIN NATANAEL, A.Md. KA	19960611 202012 1 007	PNS	DIKA																				√	√	√	BTP Kelas I Semarang	
297	MUHAMMAD ADITYA PRADANA, A.Md. KA	19980610 202012 1 003	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Semarang	
298	YUSUP HAKIM JUARNO, A.Md.KA	19960110 202012 1 005	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Semarang	
299	FADHIL MUHAMMAD, A.Md. T	19970530 202012 1 005	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Semarang	
300	ALFARIEGA SEPTIAN PRABANGASTA, S.Kom.	19930909 202012 1 008	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Surabaya	
301	CHOIRUNNISA FATANUS SAFA, S.I.Kom.	19971208 202012 2 004	PNS	DIKA																√ (QRM0)		√ (MC)				√	BTP Kelas I Surabaya	
302	WIWIT PURWANTI, S.T.	19970328 202012 2 015	PNS	DIKA																√ (QRM0)						√	BTP Kelas I Surabaya	
303	KUSUMA MAULISANTI, S.E.	19950811 202012 2 007	PNS	DIKA																		√ (BLU)				√	BTP Kelas I Surabaya	
304	RIZQI PRASTYO	19940818 202012 1 005	PNS	DIKA							√			√												√	BTP Kelas I Surabaya	
305	ALFAN ALIEF SEKTIANANDA	19970328 202012 1 007	PNS	DIKA							√															√	BTP Kelas I Surabaya	
306	AGUSTINA SLAMET, S.T.	19930818 202012 2 009	PNS	DIKA																√ (QRM0)						√	BTP Kelas I Surabaya	
307	ARIZAL ERRY WICAKSONO	19890330 202012 1 007	PNS	DIKA			√													√ (QRM0)						√	BTP Kelas I Surabaya	
308	AGUS MIFTAKUL KHOIRI, A. Md. T	19960811 202012 1 002	PNS	DIKA												√										√	BTP Kelas I Surabaya	
309	NSRINA MAHFUDHAH, A.Md. KA	19931230 202012 2 011	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Surabaya	
310	A. MUSTAGHFIRIN, A.Md. T	19971029 202012 1 005	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Surabaya	
311	YUSA SEPTIANDITYAS PUTRA, A.Md. KA	19900917 202012 1 008	PNS	DIKA												√										√	BTP Kelas I Surabaya	
312	HENDRA HUSMADI, S.T.	19890511 202012 1 006	PNS	DIKA											√											√	BTP Kelas II Padang	
313	TESSA PRIHARTINA PARHUSIP, S.Stat.	19961029 202012 2 008	PNS	DIKA																			√			√	BTP Kelas II Padang	
314	MUHAMMAD DZUL AKBAR, S.T.	19960326 202012 1 006	PNS	DIKA																√ (QRM0)						√	BTP Kelas II Padang	
315	RAHMAT SETIAWAN, S.Sos.	19910911 202012 1 004	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas II Padang	
316	ALFAURI PRIMA NOVEL, S.E.	19970210 202012 1 002	PNS	DIKA																√ (QRM0)						√	BTP Kelas II Padang	
317	VEVI GUS LIA NOVA, S. Kom	19911124 202012 2 011	PNS	DIKA																√ (QRM0)						√	BTP Kelas II Padang	
318	MUHAMMAD YUSUF, A.Md.KA	19980814 202012 1 002	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas II Padang	
319	FAJAR ALAMSYAH, A.Md. KA	19980908 202012 1 002	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas II Padang	
320	MARIOSEN PURBA, S.T.	19960801 202012 1 007	PNS	DIKA				√		√										√ (QRM0)						√	BTP Kelas II Palembang	
321	ZULFAZUL, S.Stat.	19961122 202012 1 004	PNS	DIKA										√		√				√ (QRM0)						√	BTP Kelas II Palembang	
322	TITO AKBAR TAMARA, S.I.Kom	19960322 202012 1 005	PNS	DIKA																√ (QRM0)						√	BTP Kelas II Palembang	
323	JULIO RECCA OKILAHUTAMA, S.T.	19910121 202012 1 008	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas II Palembang	
324	ARIE GENTA, A.Md.KA	19980709 202012 1 001	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas II Palembang	
325	RIZKY SULISTYO WALIHADI, A.Md. KA	19970228 202012 1 004	PNS	DIKA																√ (QRM0)						√	BTP Kelas II Palembang	
326	MIFTHAQUL ALFARETSI, A.Md.KA	19970724 202012 1 003	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas II Palembang	
327	RISKI DIRGAGUNARSYAH, A.Md. KA	19911016 202012 1 005	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas II Palembang	
328	HEINRICH UDANG HUTASOIT, S.Kom	19910514 202012 1 006	PNS	DIKA																√ (QRM0)		√ (Barjas)				√	BTP Kelas I Medan	
329	ALDI B.J. HAMDANI	19940605 202012 1 005	PNS	DIKA							√					√				√ (QRM0)						√	BTP Kelas I Medan	
330	RAHAYU INDAH RAMADHAN, S.I.Kom.	19910330 202012 2 003	PNS	DIKA																		√ (MC)				√	BTP Kelas I Medan	
331	CINDYE AMANDA, A.Md. KA	19980920 202012 2 002	PNS	DIKA																√ (QRM0)						√	BTP Kelas I Medan	
332	FIRMAWAN TRIATMAJA, A.Md. KA	19940202 202012 1 005	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Medan	
333	LASRIADO TRI RAMOSKI BANARJANAHOR, A.Md.KA	19961218 202012 1 001	PNS	DIKA																						√	BTP Kelas I Medan	
334	ANASTASIA AJENG CEMPAKA SARI, S.Kom.	19881104 202012 2 005	PNS	DIKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
335	HENDRY MUNDAN, S.Kom	19880716 202012 1 005	PNS	DIKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
336	MIFTAKHUL JANAH, S.Ikom	19900105 202012 2 004	PNS	DIKA																		√ (MC)				√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
337	AHMAD BUKHARI MUSLIM, S.Si.	19960921 202012 1 008	PNS	DIKA							√															√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
338	ADITYA PRANATAMA, S.Kom.	19970322 202012 1 003	PNS	DIKA							√											√ (Pengelola Database)				√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
339	AIDIL PERMANA, S.Kom	19960220 202012 1 011	PNS	DIKA			√									√										√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS										KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL										Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja	
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jabang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT Go 3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawain	Penyetaraan Jablung	Manajemen Risiko (QRM/QRMA/QRM O)	Ahli KPBU	Diklat Manajerial (Manaj,Krisis, BLU, Database, MR, dll)			PPK Tipe C
340	LUKMAN NUL HAKIM, S.T	19961019 202012 1 005	PNS	DIKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
341	AGUSWAN AMIRUL ARIF, S.T.	19940801 202012 1 007	PNS	DIKA																	√ (Barjas)					√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
342	RANDY JANUAR SYAEFULLOH, ST	19930122 202012 1 007	PNS	DIKA			√									√										√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
343	SARAH FAUZYIYAH, S.I.P.	19960930 202012 2 006	PNS	DIKA										√										√ (MC)		√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
344	AMBARITA RUSMIAR MERLYN, A.Md.KA	19930912 202012 2 006	PNS	DIKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
345	PRADIPTA AGUNG NUGROHO, A.Md. KA	19960304 202012 1 003	PNS	DIKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
346	NOVAL MARINGAN SINAGA, S.kom.	19961110 202012 1 005	PNS	DIKA																	√ (Pengelola Database)					√	Dit. LLAKA
347	HELPI JAVANTIAR SITUMORANG, S.Kom	19910101 202012 2 014	PNS	DIKA																						√	Dit. LLAKA
348	ISTY WAHYU ERLINA, S.Stat	19980417 202012 2 006	PNS	DIKA																	√					√	Dit. LLAKA
349	NABILAH HSANI, S.Sol.	19970116 202012 2 006	PNS	DIKA																						√	Dit. LLAKA
350	RIZKY SUZENNO, S.kom	19940305 202012 1 005	PNS	DIKA					√	√						√					√ (QRMQ)	√				√	Dit. LLAKA
351	AHMAD RONALDY SAPUTRA, S.Stat.	19970425 202012 1 003	PNS	DIKA			√																			√	Dit. LLAKA
352	PRIMA LESTARI HANIF, S.Si.	19960922 202012 2 006	PNS	DIKA																	√ (QRMQ)					√	Dit. LLAKA
353	IMAM ALI RAMADHAN, S.IP	19900405 202012 1 007	PNS	DIKA																						√	Dit. LLAKA
354	AHMAD SUBHAN FATAH MAHFUZO, S.I.P.	19940109 202012 1 004	PNS	DIKA																	√ (QRMQ)		√ (Barjas)			√	Dit. LLAKA
355	MUHAMMAD AKBAR, S.I.Pus.	19940408 202012 1 007	PNS	DIKA																						√	Dit. LLAKA
356	BIKY REZAMIL, S.Kom.	19950505 202012 1 006	PNS	DIKA				√																		√	Dit. LLAKA
357	AFFANDA ABDUL HAKIM AMINULLAH, S.Stat.	19960623 202012 1 002	PNS	DIKA																						√	Dit. LLAKA
358	MOHAMAD TRI RAMDHANI, S.Kom.	19900408 202012 1 005	PNS	DIKA																			√			√	Dit. LLAKA
359	RAY PRABOWO SULISTYANTO, S.Kom.	19860707 202012 1 008	PNS	DIKA				√		√																√	Dit. LLAKA
360	MASYKUR HIDAYATULLAH, S.Hum.	19960514 202012 1 001	PNS	DIKA																	√ (QRMQ)	√ (Public Speaking)				√	Dit. LLAKA
361	YOSUA BINTANG	19940628 202012 1 004	PNS	DIKA						√																√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
362	CHOLUB SARIJAI, S.T.	19940822 202012 1 004	PNS	DIKA				√		√														√		√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
363	HAIRIL FIDRI SULAIMAN, S.Kom.	19940916 202012 1 006	PNS	DIKA				√													√ (QRMQ)					√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
364	ROBBY NUR DIANSYAH	19900327 202012 1 002	PNS	DIKA							√															√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
365	REJA RISMANANDAR, S.kom	19890213 202012 1 001	PNS	DIKA																	√ (Digital Marketing)					√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
366	MOCH. ERDIANA PUTRA BAKTI, S.T.	19950402 202012 1 003	PNS	DIKA					√	√																√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
367	TITIS PRASETYO, S.Kom.	19970821 202012 1 004	PNS	DIKA					√	√																√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
368	LAILA TRI NUR HAYATI, S.I.Kom.	19920525 202012 2 008	PNS	DIKA																				√ (MC)		√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
369	VEBBY AMELYA NORA, S.Si	19930822 202012 2 008	PNS	DIKA				√		√																√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
370	MENTARI HIDANTI, S.T.	19950119 202012 2 011	PNS	DIKA					√	√											√ (Bahasa Inggris)					√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
371	ARY INDAH NRIILANITA	19930420 202012 2 011	PNS	DIKA						√																√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
372	ANNAM ADAM PRAKOSO, S.Stat.	19930910 202012 1 006	PNS	DIKA																	√ (QRMQ)	√				√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
373	VINSENSIA SIPRIANA ZEGA	19970920 202012 2 004	PNS	DIKA							√															√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
374	CANDRA MARIO, A.Md. KA	19930603 202012 1 004	PNS	DIKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
375	FADHILAH ABDI AKBAR, A.Md.KA	19951124 202012 1 004	PNS	DIKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
376	TRI TUNGGA DEWI ARYANTI, A.Md.KA	19980531 202012 2 003	PNS	DIKA																	√ (QRMQ)					√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
377	IBNU PRAKOSO, A.Md.KA	19960721 202012 1 003	PNS	DIKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
378	RIAN SESTIANTO, A.Md.KA	19921122 202012 1 006	PNS	DIKA																	√ (QRMQ)					√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
379	MOHAMMAD RIZKI HARIADI, A.Md.KA	19980204 202012 1 001	PNS	DIKA																	√ (QRMQ)					√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
380	JOSINTYA RILA PITUANIKA, A.Md.KA	19930724 202012 2 007	PNS	DIKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
381	AGUNG SUHENDRA, A.Md.KA	19880714 202012 1 006	PNS	DIKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
382	HOTNATANAEI MARULUTUA MALAU, S.T.	19841128 202012 1 003	PNS	DIKA			√																			√	Dit. Sarana Perkeretaapian
383	MAHENDRA WISHNU BUWANA, S.T.	19901006 202012 1 005	PNS	DIKA			√																			√	Dit. Sarana Perkeretaapian
384	HAEZAH QISTHINA, S.P.W.K.	19950501 202012 2 011	PNS	DIKA																						√	Dit. Sarana Perkeretaapian
385	ERNA SOELINA, S.M.	19890901 202012 2 005	PNS	DIKA																	√ (QRMQ)		√ (Manaj Talenta)			√	Dit. Sarana Perkeretaapian
386	ARION JANUAR PRASASTI, S.T.	19910121 202012 1 006	PNS	DIKA			√														√ (QRMQ)					√	Dit. Sarana Perkeretaapian
387	MUHAMMAD ANDRI, S.T.	19941027 202012 1 002	PNS	DIKA			√																			√	Dit. Sarana Perkeretaapian
388	DITO AFANDI, S.T.	19870112 202012 1 001	PNS	DIKA																						√	Dit. Sarana Perkeretaapian
389	INE DAMAYANTI, S.IP	19960907 202012 2 008	PNS	DIKA																	√ (QRMQ)					√	Dit. Sarana Perkeretaapian
390	DANIEL MARTHINUS TOGHAS, S.P.W.K	19970315 202012 1 006	PNS	DIKA			√																			√	Dit. Sarana Perkeretaapian
391	ANITYA PUTRI, S.PWK.	19970124 202012 2 007	PNS	DIKA																	√ (QRMQ)					√	Dit. Sarana Perkeretaapian
392	ADHITYA BAGAS PRATAMA, A.Md. T	19980302 202012 1 001	PNS	DIKA																	√ (Manaj Proyek)					√	Dit. Sarana Perkeretaapian

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS										KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL										Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja	
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jabang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT Go A 3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawaian	Penyetaraan Jabfung	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli KPB	Diklat Manajerial (Manaj,Krisis, BLU, Database, MR, dll)			PPK Tipe C
393	ALFIRA BERLIANTI, A.Md. KA	19971215 202012 2 005	PNS	DIKA																						√	Dit. Sarana Perkeretaapian
394	RIKA FARDIYANTI, A.Md.KA	19910330 202012 2 001	PNS	DIKA																						√	Dit. Sarana Perkeretaapian
395	OKI KURNIAWAN, A.Md.T	19981011 202012 1 003	PNS	DIKA																						√	Dit. Sarana Perkeretaapian
396	SARA HAYATI, A.Md. KA	19950321 202012 2 009	PNS	DIKA																						√	Dit. Sarana Perkeretaapian
397	DESMON EVENT BUTAR BUTAR, S.Kom.	19931219 202012 1 004	PNS	DIKA																						√	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
398	RENALDY APREVIA LUTFI, S.Stat.	19950405 202012 1 006	PNS	DIKA															√ (QRMO)							√	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
399	TRI RAHMIATI, S.S.	19871029 202012 2 002	PNS	DIKA															√ (QRMO)		√ (Bahasa Inggris)					√	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
400	MAULANA ERWINSYAH PUTRA, S.T.	19910920 202012 1 004	PNS	DIKA										√					√ (QRMO)							√	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
401	YULIANTO, S.Kom	19890720 202012 1 007	PNS	DIKA																	√ (Manaj Risiko)					√	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
402	ANISA NUR ARIFAH, S.Kom.	19951017 202012 2 014	PNS	DIKA															√ (QRMO)							√	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
403	TIARA FITRI BERLIAN, S.Kom.	19960225 202012 2 010	PNS	DIKA																	√ (Manaj Aset)					√	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
404	ARDIAN BAGUS WIDIYANTORO	19900728 202012 1 006	PNS	DIKA						√									√ (QRMO)							√	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
405	DANANG SEPTIAN WIJANARKO, S.St	19890926 202012 1 005	PNS	DIKA															√ (QRMO)							√	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
406	IIN INTAN ULIANAH, S.Kom	19950627 202012 2 005	PNS	DIKA															√ (QRMO)							√	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
407	CHINDY CLAUDIA PASKARIA SIANTUBI, S.I.Pus.	19950414 202012 2 008	PNS	DIKA															√ (QRMO)							√	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
408	PRADISTYA HAYU PURBOSINI, S.S.	19950407 202012 2 006	PNS	DIKA																						√	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
409	KHOIRU NIKMAH, S.IP.	19951205 202012 2 005	PNS	DIKA																	√ (MC)					√	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
410	NABILA NAQYA NAZDA, S.T	19961001 202023 2 016	PNS	DIKA															√ (QRMO)							√	BTP Kelas I Bandung
411	YANUARINI TRI KUSWANTI	19830122 200912 2003	PNS	DIKA															√ (QRMO)	√			√				Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
412	HANIF JUNISAF AHMAD	19970603 202012 21003	PNS	DIKA																√	√ (Public Speaking, Desain Graphics)						Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
413	HERMAN SITORUS	19860127 202012 21002	PNS	DIKA		√														√							Dit. Sarana Perkeretaapian
414	GADANG ENDORAYANTO	19880406 201012 21003	PNS	DIKA															√ (QRMO)	√							Dit. LLAKA
415	HARRY PERHANTYO	19880417 201012 21006	PNS	DIKA			√												√ (QRMO)	√							Dit. LLAKA
416	ESTY DWI CAHYANI	19960626 202012 22015	PNS	DIKA															√ (QRMO)	√							BTP Kelas I Bandung
417	BAYU NUUR KHOLUS	19831216 200712 21001	PNS	DIKA			√													√							BTP Kelas I Semarang
418	YULI NUGRAHINI	19800705 200604 2001	PNS	DIKA		√													√ (QRMO)	√							BTP Kelas I Surabaya
419	DWI MADA NINGRUM	19810521 201012 22002	PNS	DIKA															√ (QRMO)	√							Balai Perawatan Perkeretaapian
420	RAMA BHAkti WIBAWA	19960715 202012 21004	PNS	DIKA				√		√				√							√ (Public Speaking)						Dit. Prasarana Perkeretaapian
421	BUDI FEBRIAN	19740224 199703 21003	PNS	DIKA			√				√			√					√ (QRMA)		√ (Coaching and Mentoring)						Dit. Keselamatan Perkeretaapian
422	PRAYUDI	19711208 199903 1 007	PNS	DIKA	√		√	√		√											√ (PIM Tk II) √ (Coaching and Mentoring)						Dit. Sarana Perkeretaapian
423	DANY KRISTIAN PAAYS	19751111 200912 21003	PNS	DIKA			√							√								√					BTP Kelas I Jakarta
424	ICHSANUL AMALIA	19920908 202012 22004	PNS	DIKA										√													Balai Pengujian Perkeretaapian
425	RESTIANA ULFA	19970504 202012 22004	PNS	DIKA										√													BTP Kelas I Bandung
426	SUKRIANSYAH	19811122 200912 21002	PNS	DIKA			√							√													BTP Kelas I Semarang
427	PRAYITNO	19770311 200312 21001	PNS	DIKA										√													Balai Perawatan Perkeretaapian
428	EKO PRASETIA	19810518 201012 21001	PNS	DIKA										√													Balai Perawatan Perkeretaapian
429	MUTHIA RIFQAH	19960328 202012 22002	PNS	DIKA										√													BPKAR Sumatera Selatan
430	AKHMAD IPANDY	19880616 202012 21008	PNS	DIKA										√					√ (QRMO)								BPKAR Sumatera Selatan
431	DWI INDIRYANI	19871205 202012 22009	PNS	DIKA										√					√ (QRMO)								BPKA Sulawesi Selatan
432	M. SHUFYAN ROIS AL MUBAROK	19940724 202012 21003	PNS	DIKA										√					√ (QRMO)								BPKA Sulawesi Selatan
433	SITI MA'SHUMAH	19980510 202012 22002	PNS	DIKA						√					√				√ (QRMO)								BTP Kelas I Semarang
434	RIZAL SYAM ARIFIN	19961105 202012 21013	PNS	DIKA										√													Balai Pengujian Perkeretaapian
435	MUHAMMAD NUR SALIM	19921122 202012 21004	PNS	DIKA						√				√													Balai Pengujian Perkeretaapian
436	MA'ARIF AZIZ	19950531 202012 21007	PNS	DIKA			√							√					√ (QRMO)								Dit. Sarana Perkeretaapian
437	HAFIDH ADITYA NUGROHO	19971104 202012 21002	PNS	DIKA										√													BPKA Sulawesi Selatan
438	GHORA VIRIA MADYA JALA	19970512 202012 21008	PNS	DIKA										√													BPKA Sulawesi Selatan
439	EGA CAHYA PRAMULA	19990108 202012 21002	PNS	DIKA										√													Balai Perawatan Perkeretaapian
440	AGLAIJA PUTRI WIDYA	19980808 202012 22010	PNS	DIKA										√													BTP Kelas II Palembang
441	FAJAR RAMADHAN		PNS	DIKA															√ (QRMO)								BTP Kelas I Jakarta
442	FLORENTINA RIAN YULITA		PNS	DIKA															√ (QRMO)								BPKAR Sumatera Selatan
443	INDAZARDUL ALYAH		PNS	DIKA															√ (QRMO)								Balai Perawatan Perkeretaapian
444	IVONNE SYAFITRI HARAHAP		PNS	DIKA															√ (QRMO)								Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
445	LUDY SAPUTRA		PNS	DIKA															√ (QRMO)								Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
446	MEGA IZMARAYA		PNS	DIKA		√													√ (QRMO)								BTP Kelas II Palembang
447	MUHAMMAD RYANDORA		PNS	DIKA															√ (QRMO)								BTP Kelas I Bandung
448	NADIA BALKIS		PNS	DIKA															√ (QRMO)								Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
449	PRAPITA GNEIS RUJDIANA		PNS	DIKA															√ (QRMO)								BTP Kelas II Padang
450	RECHTY DWI RETNOWATY		PNS	DIKA															√ (QRMO)								Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
451	SIGIT SUKMORO		PNS	DIKA															√ (QRMO)								Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
452	TALIPHQ HIDAYAT SUWARSONO		PNS	DIKA															√ (QRMO)								Dit. Prasarana Perkeretaapian
453	WIDYA DAMAYANTI		PNS	DIKA															√ (QRMO)								BTP Kelas I Jakarta
454	YURNALIZA		PNS	DIKA															√ (QRMO)								Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS												KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL							Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja			
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jabang	Penguji Fosop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi IRT Go 3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawaian	Penyetaan Jablung	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli KPB	Diklat Manajerial (Manaj.Krisis, BLU, Database, MIR, dll)	PPK Tipe C	K3 UMUM		
460	LIDIA WATI HUTAGALLUNG		PNS	DIKA																		V (QRMO)						Dit. LLAKA
461	MUHAMMAD SOFYAN HADI MUSTOFA		PNS	DIKA																		V (QRMO)	V (Talenta)					Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
462	NIA NUR ANNISA		PNS	DIKA																		V (QRMO)						Dit. Prasarana Perkeretaapian
463	RIDWAN IMAM MUTTAQIN		PNS	DIKA																		V (QRMO)						Dit. Prasarana Perkeretaapian
464	SATRIO HARIMURTI		PNS	DIKA			V					V										V (QRMO, QRMA)			V			Dit. LLAKA
465	SRI RAHAYU		PNS	DIKA																		V (QRMO)						Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
466	WIDYA NAUFALINDA		PNS	DIKA				V			V											V (QRMO)						Dit. Prasarana Perkeretaapian
467	A. ZAKY		PNS	DIKA			V															V (QRMA)	V (Talenta)					Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
468	ADIEF ANGGAPERMANA		PNS	DIKA			V															V (QRMA)						BTP Kelas I Surabaya
469	FITRI ANTARA		PNS	DIKA		V																V (QRMA)						BTP Kelas I Bandung
470	MADE HAPPY MARTIN		PNS	DIKA								V										V (QRMA)						BTP Kelas I Bandung
471	SANDE RITIN IRAWAN		PNS	DIKA			V															V (QRMA)			V			Dit. LLAKA
472	THERESIA FAJAR PURBOSARI		PNS	DIKA																		V (QRMA)						Dit. Prasarana Perkeretaapian
473	UMAR PRIONO ADJI		PNS	DIKA			V															V (QRMA)	V (Bahasa Inggris) V(Coaching and Mentoring)					BTP Kelas II Palembang
474	ANDRY MORIN SIMATUPANG		PNS	DIKA																		V (QRMA)						BTP Kelas I Medan
475	EKO BUDI SANTOSO		PNS	DIKA			V															V (QRMA)	V(Coaching and Mentoring)					BTP Kelas I Semarang
476	FAJAR TRI PAMBUDI		PNS	DIKA																		V (QRMA)						BTP Kelas I Medan
477	GALIH PRANANDA		PNS	DIKA			V					V										V (QRMA)						Dit. LLAKA
478	LUSIAWAN JATI		PNS	DIKA																		V (QRMA)						Dit. Prasarana Perkeretaapian
479	MUHAMMAD CHUSNUL		PNS	DIKA																		V (QRMA)						BTP Kelas I Medan
480	MUJUS NANGGANI CAPAH		PNS	DIKA																		V (QRMA)				V		BTP Kelas I Medan
481	REINALDO BUTAR BUTAR		PNS	DIKA			V															V (QRMA)	V (Manaj Krisis)					BTP Kelas II Palembang
482	TONGGAM FERDINAND LEONARDO		PNS	DIKA		V						V										V (QRMA)	Andi Hermansyah					BTP Kelas I Surabaya
483	FADLIANSYAH		PNS	DIKA																		V (QRMA)						Dit. Prasarana Perkeretaapian
484	ARIF ANWAR		PNS	DIKA			V										V					V (QRMP)	V (PIM Tk.II) V (Coaching and Mentoring)					Dit. LLAKA
485	SUPANDI		PNS	DIKA			V					V										V (QRMP)	V (PIM Tk.II)					BTP Kelas II Padang
486	Catur Wicksono	197004191995031001	PNS	DIKA		V						V										V (QRMP)	V(Coaching and Mentoring)					Dit. Sarana Perkeretaapian
487	Hendrialdi	197007291994031003	PNS	DIKA			V															V (QRMP)	V (PIM Tk.II) V(Coaching and Mentoring)					Dit. Keselamatan Perkeretaapian
488	Yohn Ferry	197206101992011001	PNS	DIKA			V										V											Dit. Keselamatan Perkeretaapian
489	Aulinawati Sirait	197105111993032000	PNS	DIKA			V					V					V											BTP Kelas II Padang
490	Ni Made Sri Budi Utami	199607222019022002	PNS	DIKA			V															V (QRMO)						Dit. LLAKA
491	RENDY FAJAR RIADI	19860611 200502 1 001	PNS	DIKA		V																						Dit. Sarana Perkeretaapian
492	RIDWAN ARASIDI	199403032019021002	PNS	DIKA		V							V									V (QRMO)						Dit. Sarana Perkeretaapian
493	Rieha Nurschmady	198211022009121004	PNS	DIKA			V					V										V (QRMA)			V			Dit. Keselamatan Perkeretaapian
494	Putri Ayuning Mulya	198908222019092003	PNS	DIKA					V	V																		Dit. Keselamatan Perkeretaapian
495	Sarwo De Hart	197809242009011007	PNS	DIKA								V																BTP Kelas I Jakarta
496	Sulbiyah Utami	199607292020122016	PNS	DIKA								V													V			BTP Kelas I Jakarta
497	Rs Sumati	198410062009122002	PNS	DIKA																								BTP Kelas I Bandung
498	Sigit Purnomo	197412032012121001	PNS	DIKA																								BTP Kelas I Semarang
499	Muhammad Arif Hidayatulloh	199703052019021002	PNS	DIKA																								Dit. Prasarana Perkeretaapian
500	Erwin Nugroho	197607202012121006	PNS	DIKA																								Balai Perawatan Perkeretaapian
501	RUDI DAMANIK	196705011996031001	PNS	DIKA			V					V										V (QRMP)	V (Coaching and Mentoring)					Dit. Sarana Perkeretaapian
502	ARYO ERLANGGA	198409092010121003	PNS	DIKA			V															V (QRMA)	V (Manaj Proyek, PKP)					BTP Kelas I Medan
503	SONYANTO SEPFRIMADA	198609052010121006	PNS	DIKA			V																					Dit. LLAKA
504	ALI NURSETO	199506112020121004	PNS	DIKA			V																					Dit. Sarana Perkeretaapian
505	AMIR RIFAI	197704162010121001	PNS	DIKA			V	V														V (QRMO)						Dit. LLAKA
506	ARIEF HERNOWO	199511182020121009	PNS	DIKA			V																					Dit. Sarana Perkeretaapian
507	ARIFIN BUDIMAN	199301242020121002	PNS	DIKA			V																			V		Dit. Sarana Perkeretaapian
508	CANDRA BANGUN	198405032006041001	PNS	DIKA			V																					Dit. LLAKA
509	DEKRI FAKTI BOWO	198810192020121001	PNS	DIKA			V																	V (Barjasi)				Dit. Sarana Perkeretaapian
510	DONI ADI KUNCORO	198201052009121002	PNS	DIKA			V															V (QRMO)						Dit. Sarana Perkeretaapian
511	HANIBAL NURIL HAKIM	199508142020121001	PNS	DIKA			V																					Dit. Sarana Perkeretaapian
512	HOTMA SAHALA TUA HUTAGALLUNG	197109072009011002	PNS	DIKA			V																					Dit. Sarana Perkeretaapian
513	INDRA NDERESA	197811072003121003	PNS	DIKA			V																					Dit. Sarana Perkeretaapian
514	IVANA	198008052006042001	PNS	DIKA			V																					Dit. Sarana Perkeretaapian
515	MOHAMMAD IVAN YANUAR	199401032020121013	PNS	DIKA			V																					Dit. Sarana Perkeretaapian
516	MUHAMMAD IMSA RHOMADON	198705262010121004	PNS	DIKA			V																					Dit. LLAKA
517	NUR CHOLIS	198210222008121003	PNS	DIKA			V																					Dit. Sarana Perkeretaapian
518	AWANG MEINDRA	198105162002121003	PNS	DIKA				V				V												V (Coaching and Mentoring)				Dit. LLAKA
519	JOKO PRAHORO	196603041990031002	PNS	DIKA			V															V (QRMP)	V (Coaching and Mentoring)					Dit. LLAKA
520	PUTU SUMARJAYA	198310292006041002	PNS	DIKA			V																					BTP Kelas I Semarang
521	RODE PAULUS GAGOK PUDIJOHO	19751109199031002	PNS	DIKA			V																V (Coaching and Mentoring)	V(Coaching and Mentoring)				BPKAR Sumatera Selatan
522	SOFIA AVIANTIE	196708131996032001	PNS	DIKA			V					V													V			Dit. Keselamatan Perkeretaapian
523	YENNESI ROSITA	196607161995032001	PNS	DIKA			V																					Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
524	DIAN ANGGRAENI	198203032008122003	PNS	DIKA			V																					Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
525	EBEN TORSIA TONGAM S.	198405282007121003	PNS	DIKA			V																					BPKAR Sumatera Selatan
526	RACHMAT DALU	197006261993031001	PNS	DIKA			V															V (QRMA)						BPKA Sulawesi Selatan
527	YAYAT HENDAYANA	198101142007121001	PNS	DIKA			V																V(Coaching and Mentoring)					Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
528	ACHMAD AFFANDY	198711052010011003	PNS	DIKA			V																					BPKA Sulawesi Selatan
529	ADE CHANDRA	199506262020301011	PNS	DIKA			V															V (QRMO)						BTP Kelas II Padang
530	AOTHA FIRMANSYAH	198903292010121001	PNS	DIKA			V																					Dit. LLAKA
531	BEJO PRIONO	198903142018011001	PNS	DIKA			V																					Dit. Keselamatan Perkeretaapian
532	DEDY PUPUT PURBAYA	198812082015031003																										

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS										KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL										Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja	
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jalbang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT GoA 3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawain	Penyertaan Jablung	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli KPB	Diklat Manajerial (Manaj,Krisis, BLU, Database, MR, dll)			PPK Tipe C
533	FAIRI ALBANNA	198307112008041001	PNS	DIKA			√														√ (Unit Komp. Tertentu)						BPKAR Sumatera Selatan
534	HERY PRIYADI	199212292018011001	PNS	DIKA			√																				Dit. Keselamatan Perkeretaapian
535	ICHSAN WIRAHADI KUSUMAH	199207122019021003	PNS	DIKA			√																				Dit. Keselamatan Perkeretaapian
536	JONNY FRANHUT SITOMPUL	198110282009121001	PNS	DIKA			√																				BTP Kelas I Jakarta
537	KUKUH SETYO PRIYANTO	198011032010121001	PNS	DIKA			√																	√			Dit. LLAKA
538	LURIANTO LUKITO	197502112014091002	PNS	DIKA			√												√ (QRMO)				√				BTP Kelas I Surabaya
539	M ZAKI ALAM Y	198712142010121002	PNS	DIKA			√				√								√ (QRMO)				√				BTP Kelas I Jakarta
540	MOCH. ATMA ADHYAKSA	198703132010121005	PNS	DIKA			√												√ (QRMO)								Dit. LLAKA
541	MUHAMMAD ZAENUDIN	198903312010121003	PNS	DIKA			√												√ (QRMA)								Dit. Keselamatan Perkeretaapian
542	MUHAMMAD MAULANA YUSUF	198711032009121003	PNS	DIKA			√																				BTP Kelas II Palembang
543	NURUL HIDAYATI	198801032010122007	PNS	DIKA			√																				Dit. Keselamatan Perkeretaapian
544	OSO HOTMARTUA SISWANTO LUMBANBATU	198305302008031001	PNS	DIKA			√					√															Balai Pengujian Perkeretaapian
545	R REZA MAULLANA MAGHRIBI	198303162009121001	PNS	DIKA			√												√ (QRMA)								BTP Kelas I Semarang
546	RAMOS TALUFIQ N	197603072009121002	PNS	DIKA			√															√					BTP Kelas I Jakarta
547	RENY HARWANTI	198710222010122001	PNS	DIKA			√																				Dit. LLAKA
548	RIEKI MEIDI YUWANA	198405252010121001	PNS	DIKA			√												√ (QRMO)								Dit. Prasarana Perkeretaapian
549	RINTHO F. LUMBAN GAOL	198111192006041001	PNS	DIKA			√																				BTP Kelas I Jakarta
550	RIO APRILLIANA	198104172008122001	PNS	DIKA			√																				Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
551	RUDI ARYADI	197712152006041016	PNS	DIKA			√																				BPKAR Sumatera Selatan
552	SOPIAN HIDAYAT RANGKUTI	198204062010121002	PNS	DIKA			√																				Dit. Keselamatan Perkeretaapian
553	SUSIANA	197105102007012001	PNS	DIKA			√																				BTP Kelas I Bandung
554	TITO AJI YANTO	198512092009121006	PNS	DIKA			√					√															Dit. LLAKA
555	WASKITO AGUNG PRABOWO	198111292009121001	PNS	DIKA			√																				BTP Kelas I Bandung
556	YASER ARAFAT	198208102010121002	PNS	DIKA			√																				Dit. Keselamatan Perkeretaapian
557	ARIEF YUNIARTO	19870608 202012 1 003	PNS	DIKA							√																Balai Pengujian Perkeretaapian
558	RESTI KANDI SARI	19970820 202012 2 003	PNS	DIKA							√																Balai Pengujian Perkeretaapian
559	BAGUS AULIA SAPUTRO	19980520 202203 1 008	PNS	DIKA							√																Balai Pengujian Perkeretaapian
560	MOCH SYAWALUDDIN FATRA,	19950317 202012 1 003	PNS	DIKA							√											√ (Barjas)					Dit. Sarana Perkeretaapian
561	DIAN FITRIANA PURWANINGSIH	19900427 202012 2 013	PNS	DIKA							√																Dit. Sarana Perkeretaapian
562	IQBAL RAMADHAN HARAHAP	19910415 202012 1 005	PNS	DIKA							√													√			Dit. Keselamatan Perkeretaapian
563	RIZKI NATHAN RAMADHANI	19981224 202210 1 001	PNS	DIKA							√																BTP Kelas I Medan
564	GHINA DWI AQILA	19980113 202012 1 006	PNS	DIKA							√											√ (Bahasa Inggris)					BTP Kelas II Palembang
565	MUHAMMAD SYAHRUL FADHIL	19960127 202203 1 007	PNS	DIKA							√																BTP Kelas II Palembang
566	RIO SANDI	19950121 202012 1 004	PNS	DIKA							√								√ (QRMO)								BTP Kelas II Padang
567	ANANDA AZARIA FEBRIANA	19970203 202203 2 017	PNS	DIKA							√																BTP Kelas II Padang
568	NELY ULWIYATI	19950910 202203 2 014	PNS	DIKA							√																BTP Kelas I Semarang
569	IRFAN YUSUF FEBRYAN	19960205 202203 1 003	PNS	DIKA							√																BTP Kelas I Jakarta
570	CHANDRA SETIAWAN	19890911 202012 1 003	PNS	DIKA				√		√																	Balai Pengujian Perkeretaapian
571	RIVA ADITYA PRATAMA	19940109 202012 1 003	PNS	DIKA						√																	Balai Pengujian Perkeretaapian
572	NINTASHA PRAHASTUTI RINDU	19940717 202012 2 013	PNS	DIKA				√		√																	Balai Pengujian Perkeretaapian
573	ALI RHAMDANI	19880430 202203 1 005	PNS	DIKA				√		√																	Balai Pengujian Perkeretaapian
574	MUHAMMAD AVIZ SHENA	19861110 202012 1 003	PNS	DIKA				√	√	√									√ (QRMO)								Balai Pengujian Perkeretaapian
575	MOCHAMAD ARIEF	19880227 202012 1 002	PNS	DIKA					√	√																	Balai Pengujian Perkeretaapian
576	ACHMAD CHUSNUL KHULUQI	19901202 202012 1 001	PNS	DIKA					√	√	√																Balai Pengujian Perkeretaapian
577	WAHYU ARIEF KUSUMA	19970213 202012 1 003	PNS	DIKA							√								√ (QRMO)								Balai Pengujian Perkeretaapian
578	SAFIDA REYNITA SARI	19970226 202203 2 014	PNS	DIKA					√	√																	Balai Pengujian Perkeretaapian
579	RIKI SOLIHIN	19931115 202012 1 005	PNS	DIKA					√	√																	Dit. Prasarana Perkeretaapian
580	DIAN INAYAH	19960526 202012 2 010	PNS	DIKA				√		√																	Dit. Prasarana Perkeretaapian
581	NOVIE ROFTUL JAMIAH	19881107 202012 2 004	PNS	DIKA				√		√																	Dit. Prasarana Perkeretaapian
582	M. AZIZUN HAKIM	19970719 202012 1 003	PNS	DIKA						√	√																Dit. Prasarana Perkeretaapian
583	YUSUF ARI SETYO NUGROHO	19970824 202012 1 004	PNS	DIKA				√		√																	Dit. Prasarana Perkeretaapian
584	ASHI CHANDRAWATY	19890515 202012 2 003	PNS	DIKA					√	√												√ (MC, Manaj. Krisis)					Dit. Prasarana Perkeretaapian
585	IQBAL PUJI AKBAR	19970208 202012 1 007	PNS	DIKA					√	√	√																Dit. Prasarana Perkeretaapian
586	DAULAT ELY ARIYANTO	19921228 202203 1 004	PNS	DIKA			√			√									√ (QRMO)								Dit. Prasarana Perkeretaapian
587	ALFIAN NURDIANSYAH	19940825 201801 1 001	PNS	DIKA				√		√																	Dit. Prasarana Perkeretaapian
588	RIKY REZAMIL	19950505 202012 1 006	PNS	DIKA							√																Dit. LLAKA
589	REZZA NOVIAN NOOR ROCHMAT	19921115 202012 1 004	PNS	DIKA				√		√																	Dit. LLAKA
590	DIMAS HADIPUTRA	19880920 200912 1 001	PNS	DIKA			√			√									√ (QRMO)				√				BTP Kelas I Surabaya
591	OKY PANJI SETYA DHARMA	19940929 202012 1 006	PNS	DIKA				√		√									√ (QRMO)								BTP Kelas I Surabaya
592	ROFI NURMAN	19971002 202203 1 006	PNS	DIKA						√	√																BTP Kelas I Surabaya
593	SUARI SURYA	19941128 202203 1 007	PNS	DIKA				√		√																	BTP Kelas I Medan
594	WIBY ADHITYA PRAYOGA	19970617 202203 1 008	PNS	DIKA			√			√									√ (QRMO)								BTP Kelas I Medan

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS										KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL										Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja		
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jabang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT GoA 3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawain	Penysetaran Jablung	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli KPB	Diklat Manajerial (Manaj,Krisis, BLU, Database, MR, dll)			PPK Tipe C	K3 UMUM
595	NABILA ALIFANI	19970202 202204 2 001	PNS	DIKA					√	√																		BTP Kelas I Medan
596	SEPTIANUS TODING RANTE	19920919 202012 1 006	PNS	DIKA				√		√																		BTP Kelas II Palembang
597	YUNITA ZULAYKA RAHIM	20000630 202203 2 002	PNS	DIKA				√		√																		BTP Kelas II Palembang
598	I WAYAN KRISNA WICAKSANA	19960525 202203 1 020	PNS	DIKA				√		√																		BTP Kelas II Palembang
599	KABUL	19880804 201503 1 004	PNS	DIKA				√		√																		BTP Kelas II Palembang
600	ISMAIL HASYIM WIBISONO	19980407 202203 1 009	PNS	DIKA					√	√																		BTP Kelas II Palembang
601	ALKAHFIAN RAMADHANI WIASANTO	19960204 202012 1 003	PNS	DIKA				√		√																		BTP Kelas II Palembang
602	RIRIS ARYANTI	19881216 201012 2 003	PNS	DIKA	√															√ (QRMO)								Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
603	RISKY HARWAHYUDI	19850508 200912 1 009	PNS	DIKA	√	√					√	√									√ (Bahasa Inggris)							BTP Kelas I Medan
604	RONALD J. SIMBOLON	19790303 200502 1 002	PNS	DIKA	√		√		√	√		√								√ (QRMA)				√ (PKA)				BTP Kelas I Jakarta
605	S. TIATUR WIDIANTO	19651207 199303 1 002	PNS	DIKA	√	√					√	√												√ (Coaching and Mentoring)				Dit. LLAKA
606	SALUS MAHFUDHOH	19920806 202012 2007	PNS	DIKA	√															√ (QRMO)	√		√ (Pengelola Database)		√			Dit. LLAKA
607	SITI SARAYA DWI AMALINA	19870625 201012 2002	PNS	DIKA	√						√					√							√ (Analisis Kompetensi)					Dit. Keselamatan Perkeretaapian
608	SYERIN NISIRINA TAHANI	19980419 202012 2 001	PNS	DIKA	√																							Dit. Keselamatan Perkeretaapian
609	TEDDY PRIVANTORO	19830601 201012 1 002	PNS	DIKA	√						√	√								√ (QRMO, QRMA)								Dit. Sarana Perkeretaapian
610	YENY RACHMAN	19881008 201012 2004	PNS	DIKA	√							√		√														Dit. Keselamatan Perkeretaapian
611	YOHARY BARUNA PUTRA	19821227 200912 1 002	PNS	DIKA	√	√		√			√	√					√			√ (QRMA)								Balai Pengujian Perkeretaapian
612	ANDI RASTYO WIBOWO	19870223 200604 1 001	PNS	DIKA								√																Balai Pengujian Perkeretaapian
613	FADRY SUKITO	19811231 201012 1 003	PNS	DIKA								√																Dit. Keselamatan Perkeretaapian
614	FARAH DINA EKA SYAMRIATI	19790701 201212 2 004	PNS	DIKA								√																BTP Kelas II Palembang
615	MIAN	19790720 201012 1 003	PNS	DIKA								√																Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
616	RENDY FAJAR RIADI	19860611 200502 1 001	PNS	DIKA								√																Dit. Sarana Perkeretaapian
617	RISKA PREVITA SARI	19871219 201012 2 003	PNS	DIKA								√																Dit. LLAKA
618	SHANTI MUHARANI	19831008 200912 2 001	PNS	DIKA								√																Balai Pengujian Perkeretaapian
619	SAPRIUDIN PRAWIRA NEGARA	19680507 200701 1 003	PNS	DIKA								√												√				Balai Pengujian Perkeretaapian
620	ANDRIANSYAH SYAIFULLAH	19771202 200312 1 002	PNS	DIKA								√																Dit. Sarana Perkeretaapian
621	BASUKI RACHMAT	19720317 200604 1 001	PNS	DIKA								√																Dit. Keselamatan Perkeretaapian
622	ANDREAS KOSOEMO NOEGROHO	19730401 200604 1 013	PNS	DIKA	√						√									√ (QRMA)								Balai Pengujian Perkeretaapian
623	ARI RATNA ANINDITA	19851127 200912 2 002	PNS	DIKA								√												√ (Manaj Stres)				Balai Pengujian Perkeretaapian
624	FAUZI BAAMIR	19840408 201012 1 003	PNS	DIKA								√								√ (QRMO)			√ (Talenta)	√				Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
625	IMELDA KARTIKA SARI	19850828 200812 2 003	PNS	DIKA								√														√		Dit. Keselamatan Perkeretaapian
626	ADITYA NUGROHO	19820121 201503 1 002	PNS	DIKA								√								√ (QRMO)			√ (Barjas)					Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
627	NUGROHO PURHADOMO	19850106 201012 1 003	PNS	DIKA								√																Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
628	SURYO OPTO RAHARJO	19860818 201012 1 002	PNS	DIKA								√																Dit. LLAKA
629	HAFID ALFIAN	19991104 202012 1 001	PNS	DIKA														√										Dit. Keselamatan Perkeretaapian
630	YANUARJO WIDI HANDONO	19750127 200701 1 001	PNS	DIKA														√										Dit. Prasarana Perkeretaapian
631	MUHAMMAD WILDAN AL BAIHAQI	19990826 202012 1 001	PNS	DIKA														√										Balai Pengujian Perkeretaapian
632	ALFIAN GANI FIRDAUS	19990312 202012 1 001	PNS	DIKA														√										BPKAR Sumatera Selatan
633	SEPTIAN WAHYU SIS INDIRIANTO	19960912 202003 1 005	PNS	DIKA														√										Dit. Prasarana Perkeretaapian
634	DODI SURYOPURNOMO	19831219 201012 1 002	PNS	DIKA														√										Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
635	ELISABET CELIA GOLDIANINGTYAS	20001104 202012 1 001	PNS	DIKA														√										Dit. LLAKA
636	PUTRI IKHDINA NINGTYAS	20000619 202012 1 001	PNS	DIKA														√										Dit. Sarana Perkeretaapian
637	BAGUS AJULIA SAPUTRO	19980520 202003 1 008	PNS	DIKA														√										Balai Pengujian Perkeretaapian
638	MUHAMMAD IHAM AMANULLAH	20000107 202012 1 001	PNS	DIKA														√										Balai Perawatan Perkeretaapian
639	NADIF ABINAYA RAMADHANII	20001221 202012 1 001	PNS	DIKA														√										Dit. Sarana Perkeretaapian
640	RIZAL WAHYU PRATAMA	20000524 202012 1 001	PNS	DIKA														√										BTP Kelas I Jakarta
641	AGUS JUNAEDI	19770730 200312 1 002	PNS	DIKA																				√ (Barjas)	√			BTP Kelas I Medan
642	Ni Made Agni Febby Wulandari	19960219 201801 2 002	PNS	DIKA																√ (QRMO)			√ (BLU)					Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
643	DIRANI YULIA	19970710 202012 2 009	PNS	DIKA																√ (QRMO)			√ (MC)					Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
644	MUHAMMAD RAYNALDI HARIA KUSUMA	20000518 201212 1 001	PNS	DIKA																			√ (Workshop Pelayanan)					Dit. LLAKA
645	MAULUNDA	20000614 202112 2 001	PNS	DIKA																			√ (Workshop Pelayanan)					BPKA Sulawesi Selatan
646	CHERILLYA RISEL	20010824 202210 2 001	PNS	DIKA																			√ (Workshop Pelayanan)					BPKA Sulawesi Selatan
647	RIFY KURNIA ADIPUTRA	20000804 202210 1 002	PNS	DIKA																			√ (Workshop Pelayanan)					BPKA Sulawesi Selatan
648	NOPPI REPPIYANTI, A.Md	19840205 200604 2 001	PNS	DIKA																				√ (AKPK)				Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
649	SITI KHOIRIYAH, SE.	19681215 201212 2 000	PNS	DIKA																			√ (Hospitality)					BTP Kelas I Semarang
650	INDZAROTUL ALYAH, A.MD	19810507 201212 2 000	PNS	DIKA																				√ (Hospitality)				Balai Perawatan Perkeretaapian
651	CHRYS ADRIAN LOLO, S.T.	19931103 202203 1 005	PNS	DIKA																				√ (Barjas)				BTP Kelas I Jakarta

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS										KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL										Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja		
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jabang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PKPA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT GoA 3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawaian	Penyertaan Jablung	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli KPB	Diklat Manajerial (Manaj.Krisis, BLU, Database, MR, dll)			PPK Tipe C	K3 UMUM
652	RIA ANGRANI/ SPANGKAR, S.E	19931027 201612 2 001	PNS	DIKA																	V (BLU)							Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
653	DIAZ IDHAFIZA, A.Md.Ak.	20000316 202202 1 001	PNS	DIKA																	V (BLU)							BTP Kelas I Jakarta
654	RIZKI JULIA SALSABILA, A.Md.Ak.	19990910 202101 2 002	PNS	DIKA																	V (Manaj Aset)							Dit. Prasarana Perkeretaapian
655	MUHAMMAD AYUB QONAA MUKTI, A. Md. Ak.	19960310 201801 1 001	PNS	DIKA																	V (QRMO)							Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
656	CLIFFSEA FAHMI AMRILLAH	199911262021122001	PNS	DIKA																	V (QRMO)							BTP Kelas II Padang
657	M. KARIL SAMBA ATHARI	199811252020121004	PNS	DIKA																	V (QRMO)							Balai Perawatan Perkeretaapian
658	REZKY BUDIMAN	19911222202031011	PNS	DIKA																	V (QRMO)							BTP Kelas II Padang
659	SHAKINA DWI ARIESTA PUTRI	199612032018012001	PNS	DIKA																	V (QRMO)							Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
660	WAHYU TIA ANDIKA	19970219202031005	PNS	DIKA																	V (QRMO)							Dit. Keselamatan Perkeretaapian
661	ADITYA ASTIKA BRATA	198801242009121001	PNS	DIKA																	V (QRMA)							BTP Kelas I Jakarta
662	DEFRI WIGUNAWAN	198706162010121005	PNS	DIKA																	V (QRMA)							BTP Kelas I Bandung
663	HASTORO PAMULALUNG SUMBOWO	198206172009121002	PNS	DIKA																	V (QRMA)							BTP Kelas I Bandung
664	HERLY NOVRIADI	198411272009121004	PNS	DIKA																	V (QRMA)							BTP Kelas II Palembang
665	IKHSAN TRI YANUAR	198801292010121003	PNS	DIKA																	V (QRMA)							BTP Kelas I Bandung
666	VIDIA WIDIASTUTI W., S.AP.	199101172010502006	PNS	DIKA																								
667	ADITYARINI MAHANDARI K. E., ST	198201092009122002	PNS	DIKA																	V (Manaj Krisis)							BPKA Sulawesi Selatan
668	MAGDALENA, S.SOS	197211051998032001	PNS	DIKA																	V (Manaj Talenta)							BTP Kelas I Semarang
669	MUAYYADAH, SE	197909142007122001	PNS	DIKA																	V (Manaj Talenta)							BPKA Sulawesi Selatan
670	GUNAWATI, SH., MH	196908251991032001	PNS	DIKA																								Balai Perawatan Perkeretaapian
671	SOESANTO W. ADI PUTRO, SE	197809252012121001	PNS	DIKA																	V (BLU)							Balai Perawatan Perkeretaapian
672	IKHDA USWATUN KHASANAH, S.Si.	199608172020122002	PNS	DIKA																	V (Pengelola Database)							Dit. Keselamatan Perkeretaapian
673	JUNIKO, A.Md.T	199606042020121005	PNS	DIKA																	V (Pengelola Database, Desain Graphic)							Balai Perawatan Perkeretaapian
674	ATO SUMARDI	198110082012121003	PNS	DIKA																	V (Pengelola Database)							BTP Kelas I Bandung
675	OKSATRIANI S.Sos	198310242010012019	PNS	DIKA																	V (Manaj Risiko)							Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
676	LISA PARAMITA HARDITO, SE	198009302009122003	PNS	DIKA																	V (Barjas)							Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
677	AZIS OKTA RISDIANA, ST	198710042010121002	PNS	DIKA																	V (Barjas)							Dit. Prasarana Perkeretaapian
678	SUTRISNO, A.MD.KA	199006112019021001	PNS	DIKA																	V (Barjas)							BPKAR Sumatera Selatan
679	CECEP BUNYAMIN, ST	197104282007011001	PNS	DIKA																	V (Barjas)							BTP Kelas I Jakarta
680	ADDINTA UMARA, A.Md	199408272016122001	PNS	DIKA																	V (Penyusunan BMN)							Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
681	DEWI AMALIA BUDIMAN	199212242018012001	PNS	DIKA																	V (Penyusunan BMN)							Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
682	RIO FREDIAN PRATAMA, A.Md.KA	198912212019021001	PNS	DIKA																	V (Penyusunan BMN)							Balai Perawatan Perkeretaapian
683	FEBRYO SETYAWAN	198602252010121005	PNS	DIKA																	V (Manaj Proyek)							Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
684	ROBBY NUGRAHA	199805282021011003	PNS	DIKA																	V (QRMO)							Dit. Keselamatan Perkeretaapian
685	RASIDI	197806112009121005	PNS	DIKA																	V (QRMO)							Dit. Keselamatan Perkeretaapian
686	ADHI PRADONO	198410022009121003	PNS	DIKA																	V (QRMO)							BTP Kelas I Surabaya
687	MUHAMMAD NUR BASKORO ADI	19920303202031007	PNS	DIKA																	V (QRMO)							BTP Kelas II Padang
688	FURRY AYU AGUSTIANI	19930812202032012	PNS	DIKA																	V (QRMO)							Dit. Prasarana Perkeretaapian
689	HIKMAN SANDALAS	199308242020121003	PNS	DIKA																	V (QRMO)							BTP Kelas I Jakarta
690	FAISAL ABDU	199805072020121003	PNS	DIKA																	V (QRMO)							BTP Kelas I Medan
691	BAGUS DHARMA BHLAWA	197604182009121004	PNS	DIKA																	V (QRMO)							BTP Kelas I Surabaya
692	DONNY WAHYUKUSUMADI	197907162010121002	PNS	DIKA																	V (QRMO)							Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
693	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT	198502032006041001	PNS	DIKA																	V (QRMO)							BTP Kelas I Medan
694	PANDU WICAKSONO	199905072020121001	PNS	DIKA																	V (QRMO)							Dit. Prasarana Perkeretaapian
695	DIA CAHYA PUTRI	199411012019022004	PNS	DIKA																	V (QRMO)							BTP Kelas II Padang
696	MAHARSIDEWI KUSHARYANI	199009032019022005	PNS	DIKA																	V (QRMO)							Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
697	MUHARNIA DEWI ADILIA	198808142020122002	PNS	DIKA																	V (QRMO)							Dit. Keselamatan Perkeretaapian
698	ANGGI SANJAYA	199101282019021001	PNS	DIKA																	V (QRMO)							BTP Kelas I Jakarta
699	AIR BENNY SETIAWAN	199802092020121002	PNS	DIKA																	V (QRMO)							BPKAR Sumatera Selatan
700	DITA JULIA KISTHANY	199908102021122001	PNS	DIKA																	V (QRMA)							Dit. LLAKA
701	BUDIYONO	198206302010121001	PNS	DIKA																	V (QRMO)							BTP Kelas I Semarang
702	ASNANI PRITA S	197010222005022001	PNS	DIKA																	V (QRMA)							BTP Kelas I Bandung
703	MUHAMMAD RIFKY ARIANSYAH	199405022016121001	PNS	DIKA																	V (QRMA)							BTP Kelas I Jakarta
704	WIBOWO ADI SAPUTRO	198807282010121008	PNS	DIKA																	V (QRMA)							BTP Kelas II Palembang
705	GALLUHWATI	197606012010122002	PNS	DIKA																	V (QRMA)							BTP Kelas I Medan
706	DIAN WIDYAWATI	19850929 200912 2 001	PNS	DIKA																								BTP Kelas I Surabaya
707	OKTAVIRA TRIANDANI CAHAYAPUTRI	19971027 202012 2 002	PNS	DIKA																	V (Manaj krisis)							Balai Perawatan Perkeretaapian
708	FEBRY VABIAN MANURUNG	19990217 202112 1 001	PNS	DIKA																	V (Desain Graphic)							BTP Kelas I Surabaya
709	DWIKI BAGAS SETYAWAN	20000508 202112 1 003	PNS	DIKA																	V (Desain Graphic)							BTP Kelas I Surabaya
710	ROCHMAD BASUKI	19																										

[illegible]

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS										KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL										Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja		
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jalang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PKKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi IRT GoA 3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawaian	Penyetaraan Jabfung	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli KPB	Diklat Manajerial (Manaj. Krisis, BLU, Database, MIR, dll)			PPK Tipe C	K3 UMUM
948	Gandhis Amanda Prahesty, A.Md.Tra	200201162023102002	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Jakarta
949	Izza Wahyu Fajuruddin, S.Tr.Tra	200010142023101002	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Jakarta
950	Munir Yusuf Arifin, A.Md.Tra	200005142023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Jakarta
951	Rian Bagus Mahendra, A.Md.T	200006112023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Jakarta
952	Rifki Andrian Ade Maulana, A.Md.T	200203092023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Jakarta
953	Ryan Syah Putra, S.Tr.Tra	200010312023101003	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Jakarta
954	Shinta Ayu Prayoga, A.Md.Tra	200201042023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Jakarta
955	Yoga Andry Pratama, S.Tr.Tra	200001112023101002	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Jakarta
956	Abdul Latif Auliarahman, A.Md.T	200206172023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
957	Adelia Sentika Wandesari, A.Md.Tra	200006222023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
958	Mhd Eno Azriel Setiawan, S.Tr.Tra	200111092023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
959	Shafira Anyandini Suyanto Putri, A.Md.Tra	200207032023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
960	Alpin Pebriansyah, S.Tr.Tra	200102052023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
961	Arendita Estyas Cahyaningrum, A.Md.Tra	200208102023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
962	Belgis Priya Nanda Dewi, A.Md.T	200102122023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
963	David Dimas Aditya, A.Md.Tra	200010262023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
964	Diah Ayu Maharani, A.Md.Tra	200103242023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
965	Dimas Adi Pamungkas, S.Tr.Tra	199909102023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
966	I Gede Adyasa Pramana, S.Tr.Tra	200101142023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
967	Khoirul Yuda, A.Md.T	200202192023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
968	Muhamad Farrel Fauzan, A.Md.T	200107112023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
969	Muhammad Firdaus Rama Arrachman, A.Md.T	200211212023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
970	Pande Kadek Krisna Yoga Mahaputra, S.Tr.Tra	200101112023101003	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
971	Rismadhany Pratama Anwar, S.Tr.Tra	199701202023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
972	Renny Rahayu Nadhiroh, A.Md.Tra	200104212023102003	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
973	Rizky Agung Prasetya, A.Md.T	200102052023101003	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
974	Shafa Cesania Gianto, A.Md.Tra	200204272023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
975	Uswatun Sholehah, A.Md.Tra	200105172023102002	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
976	Zulfikar Iman Mukti, S.Tr.Tra	200104252023101002	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Bandung
977	Adib Mas'An, A.Md.Tra	200203192023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
978	Robby Ahmad Santoso, A.Md.Tra	200110312023101002	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
979	Anthony Juan Dhiaulhaq, A.Md.T	200106222023101003	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
980	Ardya Zhella Mica, A.Md.T	200104122023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
981	Bagoes Faridki, S.Tr.Tra	199908232023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
982	Harpen Lukal Tarigan, S.Tr.Tra	200107152023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
983	Ila Sefti Nugraeni, A.Md.Tra	200209102023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
984	Miftakhul Hudis, A.Md.Tra	200007152023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
985	Mochammad Fathoni Akbar, A.Md.T	200202142023101002	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
986	Mohammad Rendy Saifulloh, A.Md.T	200109292023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
987	Muhammad Aroyan Noer Fahrezy, A.Md.T	200202142023101003	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
988	Nur Fauziah Rahman, A.Md.Tra	200201062023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
989	Prima Darsis Setiawan, A.Md.T	200208112023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
990	Roni Yanuar Saputro, A.Md.T	199901112023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
991	Sekar Ayu Perdanawati, A.Md.Tra	200106022023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
992	Titania Dewi Samudra, A.Md.Tra	200106012023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
993	Yusuf Hanan Ardiansyah, S.Tr.Tra	200201052023101002	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Semarang
994	Azzarin Azizah Rais, A.Md.T	200206202023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya
995	Genny Kusuma Dewi, A.Md.Tra	200104262023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya
996	Oliver Somba Tandirerung, S.Tr.Tra	200108092023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya
997	Sello Iza Samudra, A.Md.T	200207032023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya
998	Shinta Puspitasari, A.Md.Tra	200206062023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya
999	Abhirama Windhy Gumilang, A.Md.T	200110032023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya
1000	Agustinus Indra Purnama, A.Md.Tra	200201022023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya
1001	Ahmad Fauzi Fakhri, A.Md.T	200103302023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya
1002	Evi Jovita, A.Md.Tra	200106212023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya
1003	Faras Hana Fitriani, A.Md.T	200112232023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya
1004	Icha Nurliwati, A.Md.T	200206102023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya
1005	Irfani Dwi Arlianto, A.Md.Tra	200104132023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya
1006	Moch Salman Eka Syafiqi, A.Md.T	200012182023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya
1007	Muhammad Ikmal Setiadi, S.Tr.Tra	199707252023101001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya
1008	Muklis Saefulloh, A.Md.Tra	200004142023101003	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya
1009	Oksana Audisa Prameswari, A.Md.Tra	200208112023102001	PNS	DIKA																							√	BTP Kelas I Surabaya

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS												KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL										Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jabang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT Go 3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawaian	Penyetaan Jabfung	Managemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli KPBu	Diklat Manajerial (Manaj,Krisis, BLU, Database, MR, dll)	PPK Tipe C	K3 UMUM		
1072	Bintar Praditya Bagas Rumekti, A.Md.Tra	200111052023101001	PNS	DIKA																							√	BPKAR Sumatera Selatan
1073	Firman Choirony, A.Md.Tra	200101262023101001	PNS	DIKA																							√	BPKAR Sumatera Selatan
1074	Irvan Maulana Sudbiyo, A.Md.Tra	200110022023101001	PNS	DIKA																							√	BPKAR Sumatera Selatan
1075	Mohammad Ainun Nuruh Rezanabab, A.Md.Tra	200205062023101001	PNS	DIKA																							√	BPKAR Sumatera Selatan
1076	Mohammad Taufik Sugiyanto, A.Md.Tra	199905232023101001	PNS	DIKA																							√	BPKAR Sumatera Selatan
1077	Muhammad Hanif, A.Md.Tra	200205252023101001	PNS	DIKA																							√	BPKAR Sumatera Selatan
1078	Satriya Aditama Erlangga, A.Md.Tra	200204302023101002	PNS	DIKA																							√	BPKAR Sumatera Selatan
1079	Taqvin Rahmad Alamsyah, A.Md.T	200210202023101001	PNS	DIKA																							√	BPKAR Sumatera Selatan
1080	Teti Widia Wati Tanjung, S.Tr.Tra	200007082023102001	PNS	DIKA																							√	BPKAR Sumatera Selatan
1081	Wahyu Nurrahmad Isyam MS, A.Md.Tra	200201082023101001	PNS	DIKA																							√	BPKAR Sumatera Selatan
1082	Wily Dzakharia Guswanto, A.Md.T	200202022023101001	PNS	DIKA																							√	BPKAR Sumatera Selatan
1083	Ailfan Yudha Yudiantra, A.Md.T	200003242023101001	PNS	DIKA																							√	BPKA Sulawesi Selatan
1084	Mohammad Farid Firmansyah, A.Md.T	200105222023101001	PNS	DIKA																							√	BPKA Sulawesi Selatan
1085	Muhammad Iqbal, A.Md.T	200103292023101001	PNS	DIKA																							√	BPKA Sulawesi Selatan
1086	Mukhammad Risky, S.Tr.Tra	200107242023101004	PNS	DIKA																							√	BPKA Sulawesi Selatan
1087	Ricky Agus Prayoga, A.Md.T	200109222023101001	PNS	DIKA																							√	BPKA Sulawesi Selatan
1088	Ahmad Ilyas Surdiansyah, A.Md.Tra	200204152023101002	PNS	DIKA																							√	BPKA Sulawesi Selatan
1089	Galih Nandiatmika, A.Md.Tra	200202232023101001	PNS	DIKA																							√	BPKA Sulawesi Selatan
1090	haldi Nur Riski, A.Md.Tra	200202172023101001	PNS	DIKA																							√	BPKA Sulawesi Selatan
1091	Josua Saputra Sianturi, A.Md.Tra	200202012023101001	PNS	DIKA																							√	BPKA Sulawesi Selatan
1092	M.Farid Hafiduddin Huda, A.Md.Tra	200003302023101002	PNS	DIKA																							√	BPKA Sulawesi Selatan
1093	Muhammad Ihfla Risky, A.Md.Tra	200205102023101001	PNS	DIKA																							√	BPKA Sulawesi Selatan
1094	Muhammad Rian Kurniawan, A.Md.Tra	200207232023101001	PNS	DIKA																							√	BPKA Sulawesi Selatan
1095	DITYA MUKTI SABARIAN	19981026202301008	PNS	DIKA																					√		Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
1096	ANISHA GALIH PURWATI	200008192023122001	PNS	DIKA																					√		Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
1097	BAYU Aji PAMUNGKAS	200005252023121001	PNS	DIKA																					√		Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
1098	FAIZAL BISRI	200005252023121001	PNS	DIKA																					√		Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
1099	FELLYCHA NUR HIDAYATUL FITRI	200008072023022001	PNS	DIKA																					√		Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
1100	FKRI BAGUS SAPUTRO	200011012023121001	PNS	DIKA																					√		Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
1101	GEDE PANJI WIKRAMA WIRADA	-																							√		Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
1102	INDIRA EKA PRASWANTI	-																							√		Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
1103	LEONARDO ALIF IBRAHIM	199908172021121001	PNS	DIKA																					√		Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
1104	MARTUANI SORMIN	198502032020212001	PNS	DIKA																					√		Balai Perawatan Perkeretaapian	
1105	MUHLISIN	-																							√		Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
1106	RAMA NUZULHANTO	-																							√		Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
1107	RINI PRIANI	-																							√		Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
1108	WAHAB IHAM YULIANSYAH RYAS	200107222022101001	PNS	DIKA																					√		Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
1109	ANGKAT NOPRI SUJANI	198411052012121002	PNS	DIKA	√																							Dit. Keselamatan Perkeretaapian
1110	CRISTIAN PICASO	19951210202301013	PNS	DIKA	√																							Dit. Keselamatan Perkeretaapian
1111	DEDDY RAJA IDOP SIMARMATA	19940706202301016	PNS	DIKA	√																							BTP Kelas I Jakarta
1112	FARAH DINA EKA SYAMRIATI	197907012012122004	PNS	DIKA	√																							BTP Kelas II Palembang
1113	FERRY WIJO UTOMO	199610142018011003	PNS	DIKA	√																							Balai Pengujian Perkeretaapian
1114	HANNA PANJAITAN	199211172019022003	PNS	DIKA	√																							Dit. LLAKA
1115	JAMSEP ANDREAS OBAJA S.	19960904202301006	PNS	DIKA	√																							BTP Kelas I Jakarta
1116	LASRIADO TRI RAMOSKI B.	199612182020121001	PNS	DIKA	√																							BTP Kelas I Medan
1117	LUCKY BINDRI SOEGITO	197707122002122001	PNS	DIKA	√																							Dit. Keselamatan Perkeretaapian
1118	M. ALLIF FANSYAH NUGRAHA K.	200006302022101003	PNS	DIKA	√																							BTP Kelas II Padang
1119	MELISA GARNISIA	198805142009122001	PNS	DIKA	√																							Dit. Prasarana Perkeretaapian
1120	MUHAMMAD FARIS ARIEF S.	199610172019021001	PNS	DIKA	√																							Dit. Prasarana Perkeretaapian
1121	MUHAMMAD YUSUF HAMZAH	19960203202301011	PNS	DIKA	√																							BTP Kelas I Surabaya
1122	READY REBERTO	1990101020230121003	PNS	DIKA	√																							Dit. Keselamatan Perkeretaapian
1123	RUSDY	197801142006041002	PNS	DIKA	√																							BPKA Sulawesi Selatan
1124	RUSTAMIAJI JATMIKO	198107252010121002	PNS	DIKA	√																							Balai Pengujian Perkeretaapian
1125	SAUL REINHARD SIMAMORA	199904242022101001	PNS	DIKA	√																							BTP Kelas I Jakarta
1126	SILVA SISCA SIMANJUNTAK	197608032010122002	PNS	DIKA	√																							Dit. Prasarana Perkeretaapian
1127	AMIKO RAHMAYANI	199712042022032020	PNS	DIKA		√																						Dit. Sarana Perkeretaapian
1128	ANANDA AZARIA FEBRIANA	199702032022032017	PNS	DIKA		√																						BTP Kelas II Padang
1129	ASNANI PRITA S	197010222005022001	PNS	DIKA		√																						BTP Kelas I Bandung
1130	DESTI WAHYU ANANDA	199312052020122002	PNS	DIKA		√																						Dit. Sarana Perkeretaapian
1131	FADRY SUKITO	198112312010121003	PNS	DIKA		√																						Dit. Keselamatan Perkeretaapian
1132	GIVO ENDRIKA PUTRI	198908312020122002	PNS	DIKA		√																						Dit. Sarana Perkeretaapian

[illegible]

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS													KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL										Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jabang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT Go 3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawain	Penyertaan Jablung	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli KPB	Diklat Manajerial (Manaj,Krisis, BLU, Database, MR, dll)	PPK Tipe C	K3 UMUM			
1197	ANUNG SADPUTRO	19770901 200712 1 001	PNS	DIKA						√																	BTP Kelas I Semarang		
1198	ARIEF SUDYATMOKO	19790518 200604 1 001	PNS	DIKA						√												√(Coaching and Mentoring)					BTP Kelas II Palembang		
1199	DANNY PALGUNADI	19771022 200312 1 001	PNS	DIKA						√												√(Coaching and Mentoring)					BTP Kelas I Bandung		
1200	HERU PRASETIO	19710418 200312 1 001	PNS	DIKA						√												√(Coaching and Mentoring)					Dit. Sarana Perkeretaapian		
1201	BERNADI ARMISEYO	19821112 200912 1 005	PNS	DIKA						√																	BTP Kelas II Padang		
1202	DONNY SATRIA	19830426 201012 1 003	PNS	DIKA						√																	BTP Kelas I Surabaya		
1203	DONNY SILANDO	19820315 200712 1 001	PNS	DIKA						√																	Dit. Prasarana Perkeretaapian		
1204	FAHMI ALAMSYAH SIREGAR	19871216 201012 1 004	PNS	DIKA						√																	Dit. Keselamatan Perkeretaapian		
1205	GITA LANIATI	19810821 200312 2 002	PNS	DIKA						√																	Dit. Keselamatan Perkeretaapian		
1206	MOCH. FACHRUL FIRMANSYAH	19801218 200812 1 002	PNS	DIKA						√																	BTP Kelas I Semarang		
1207	MUHAMAD ZAENUDIN	19890331 201012 1 003	PNS	DIKA						√																	BPKA Sulawesi Selatan		
1208	NUR MUHAMMAD SYAIFULLAH RAHMAN	19870225 201012 1 004	PNS	DIKA						√																	Balai Perawatan Perkeretaapian		
1209	IBNU IBRAHIM NURCAHYO	199705252020121008	PNS	DIKA						√																	Balai Perawatan Perkeretaapian		
1210	RIFAN FATHURRAHMAN	199605252020121001	PNS	DIKA						√																	Balai Perawatan Perkeretaapian		
1211	ANTONIUS MAY HERMAN	19820517 201012 1 003	PNS	DIKA						√																	Balai Pengujian Perkeretaapian		
1212	DARMAINILLAS	19680507 200604 2 002	PNS	DIKA						√																	Balai Pengujian Perkeretaapian		
1213	DIANITA HERDIANA	19801213 200912 2 001	PNS	DIKA						√																	Dit. Prasarana Perkeretaapian		
1214	INDAH WIDYA ASTUTI	19860126 200912 2 006	PNS	DIKA						√																	Dit. Prasarana Perkeretaapian		
1215	MEILISA GARNISA	19880514 200912 2 001	PNS	DIKA						√																	Dit. Prasarana Perkeretaapian		
1216	MOCHAMMAD RAFLU KADAFI	19860607 201012 1 005	PNS	DIKA						√																	Balai Pengujian Perkeretaapian		
1217	WIDI ADITYA	19890213 201012 1 004	PNS	DIKA						√																	Balai Pengujian Perkeretaapian		
1218	DEWI HESTIWUAYANTI	19781227 200012 2 001	PNS	DIKA						√																	Balai Pengujian Perkeretaapian		
1219	SOBIRIN		PPNPN	DIKA						√																	BTP Kelas I Jakarta		
1220	ADE EVA DIANA	199510202020122003	PNS	DIKA						√																	Balai Perawatan Perkeretaapian		
1221	ALKAHFIAN RAMADHANI WIASANTO	199602042020121003	PNS	DIKA						√																	BTP Kelas I Semarang		
1222	AMAR SIDIK PRASETIO	198603012018011001	PNS	DIKA						√																	Dit. Keselamatan Perkeretaapian		
1223	ARBIE	19880411 200912 1 003	PNS	DIKA						√																	BTP Kelas I Jakarta		
1224	BARA NUANSA	19940419 2020301004	PNS	DIKA						√																	Balai Perawatan Perkeretaapian		
1225	DANI YUARDI	199209172020121009	PNS	DIKA						√																	BTP Kelas I Jakarta		
1226	FAJAR SUBEKTI	199503162020121004	PNS	DIKA						√																	Balai Perawatan Perkeretaapian		
1227	HAMID YUSUF PUTRANTO	199805182020301009	PNS	DIKA						√																	Balai Perawatan Perkeretaapian		
1228	HARSENDO PRASETIO MUKTI PRABOWO	200010082022101005	PNS	DIKA						√																	Dit. LLAKA		
1229	IKHSANDY WANTO HATTA	19810105 200604 1 001	PNS	DIKA						√																	BTP Kelas II Palembang		
1230	INDRA HIDAYAT	198209292008011016	PNS	DIKA						√																	BPKA Sulawesi Selatan		
1231	JOKO WAHYU SETYAWAN	198404152010121004	PNS	DIKA						√																	Balai Perawatan Perkeretaapian		
1232	LISA PARAMITA HARDITO	198009302009122003	PNS	DIKA						√																	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
1233	LUQMAN LATIF	199103252020121002	PNS	DIKA						√																	Balai Perawatan Perkeretaapian		
1234	MARTUANI SORMIN	198502032020121001	PNS	DIKA						√																	Balai Perawatan Perkeretaapian		
1235	MELINA KRISNAWATI	199405072020122007	PNS	DIKA						√																	Dit. LLAKA		
1236	MOHAMAD SHUFYAN ROIS AL-MUBAROK	199407242020121003	PNS	DIKA						√																	BPKA Sulawesi Selatan		
1237	SHANTI MUHARANI	198310082009122001	PNS	DIKA						√																	Balai Pengujian Perkeretaapian		
1238	SIGIT SUKMORO	198411132008121003	PNS	DIKA						√																	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
1239	INDRIATI	198106072005022001	PNS	DIKA						√										√ (Rakor)			√(Coaching and Mentoring)				Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
1240	HENGKI ANGKASAWAN	196701081993031001	PNS	DIKA						√										√ (Rakor)			√ (Coaching and Mentoring)				Dit. Prasarana Perkeretaapian		
1241	DENNY MICHELS ADLAN	197902052006041002	PNS	DIKA						√													√ (Coaching and Mentoring)				BTP Kelas I Surabaya		
1242	MUHAMMAD HIDAYAT	198003272006041002	PNS	DIKA						√													√ (Coaching and Mentoring)				Dit. Keselamatan Perkeretaapian		
1243	JULIUN ENDAH WAHJUNINGRUM	196507031991032001	PNS	DIKA						√													√ (Coaching and Mentoring)				Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
1244	BERNADETTE. E.S. MAYASHANTI	196908031998032001	PNS	DIKA						√													√ (Coaching and Mentoring)				Dit. Keselamatan Perkeretaapian		
1245	BAMBANG SISWOYO	197108091997031002	PNS	DIKA						√													√ (Coaching and Mentoring)				Dit. Sarana Perkeretaapian		
1246	YUWONO WIARCO	197504261998031002	PNS	DIKA						√													√ (Coaching and Mentoring)				Dit. Keselamatan Perkeretaapian		
1247	UTLITHIA B. HANGGARAWATI	198505252007122000	PNS	DIKA						√													√ (Coaching and Mentoring)				Dit. Keselamatan Perkeretaapian		

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS										KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL										Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja		
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Pemasaran	Penguji Jabang	Penguji Fasop	Penguji Pemasaran	Penguji Sarana	Asesor	PPRS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT GKA 3	Diklat Kereta Cepat	Asiparis	Kepegawaian	Penyusunan Jabang	Manajemen Risiko (URMP/QRMA/QRMO)	Ahli KPSU	Diklat Manajerial (Manaj. Krisis, BLU, Database, MR, dll)			PPK Tipe C	K3 UMUM
1248	RONALD JACKSON SIMBOLON	1979030320050211002	PNS	DIKA																					√ (Coaching and Mentoring)			Balai Pengujian Perkeretaapian
1249	DEBY HOSPITAL	198312222009121000	PNS	DIKA																					√ (Coaching and Mentoring)			BPKA Sulawesi Selatan
1250	BLICHIANI OKTIVA DEWI	198710152006042002	PNS	DIKA																					√ (Coaching and Mentoring)			Dit. Keselamatan Perkeretaapian

Jakarta, 16 Januari 2025
Kepala Bagian SDM dan Umum


Indriati, S.E., M.M.
NIP 198106072005022001

Daftar Pejabat Fungsional Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
1	JOKO PRAHORO	19660304 199003 1 002	IV/a	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
2	IR. S. TJATUR WIDIANTO	19651207 199303 1 002	IV/b	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
3	RETNO SARI SUNARTO	19820923 200604 2 003	IV/a	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
4	ARTHA EKA WIJAYA	19860309 200812 1 003	III/c	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
5	A.ZAKY	19760715 200502 1 002	IV/a	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
6	JUMANTO	19690103 199310 1 001	IV/a	ARSIPARIS AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
7	POIBE IRENE P. SIMATUPANG	19691008 199603 2 002	III/d	ARSIPARIS AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
8	ROESianto HENDRO PUTRO	19780925 200812 1 001	III/d	ARSIPARIS AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
9	FIRMANSYAH TEGUH SUGIARTO	19800812 200712 1 001	III/d	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
10	WARDOYO	19820818 201012 1 005	III/d	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
11	IRAWATI SJURMAN	19681127 199403 2 003	IV/a	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
12	ANDI GUNTUR ASAPA	19840724 200712 1 001	III/d	PERENCANA AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
13	AGUSTINUS DANANG FAJAR SURYANTO	19850509 200712 1 001	III/d	PERENCANA AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
14	DIAN ANGGRAENI	19820303 200812 2 003	III/d	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
15	TRINANDA MEINAR ARIANI	19960513 202012 2 006	III/a	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
16	GENTUR WIKU PRIBADI	19930829 202012 1 004	III/a	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
17	ANDREAS MISWARDI PUTRA	19911023 202321 1 015	IX	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PPPK
18	SYAHRIZAL RAMADHAN	19940305 202321 1 017	IX	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PPPK
19	ACHMAD HARRIS CAHYADI	19880127 202321 1 015	IX	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PPPK
20	ERICK DWI WIBOWO	19930531 202321 1 017	IX	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PPPK
21	IRENA GHIKA PRATIWI	19950502 202321 2 043	IX	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PPPK
22	UCOK BONGGAL	19820519 202321 1 010	IX	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PPPK
23	FAUZI BAAMIR	19840408 201012 1 003	III/a	ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
24	YULIANTO	19890720 202012 1 007	III/a	ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
25	CHINDY CLAUDIA PASKARIA SIANTURI	19950414 202012 2 008	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
26	KHOIRU NIKMAH	19951205 202012 2 005	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
27	IMAM ALI RAMADHAN	19900405 202012 1 007	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
28	AHMAD SUBHAN FATAH MAHFUZD	19940109 202012 1 004	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
29	MUHAMMAD AKBAR	19940408 202012 1 007	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
30	NABILAH IHSANI	19970116 202012 2 006	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
31	MASYKUR HIDAYATULLAH	19960514 202012 1 001	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
32	INE DAMAYANTI	19960907 202012 2 008	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
33	SARAH FAUZIYYAH	19960930 202012 2 006	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
34	APRIYANTO	19950410 202012 1 006	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PNS
35	LIA LAELASARI	19950101 202012 2 016	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
36	IKA RAHMAWATI NURLELY	19950219 202012 2 011	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PNS
37	DEDI SATRIA	19930610 202012 1 008	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PNS
38	RAHMAT SETIAWAN	19910911 202012 1 004	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PNS
39	LU'LU' ATUZZAHROH	19950103 202012 2 009	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PNS
40	INDAH YENI SUMIATI NINGSIH	19920107 202012 2 004	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	PNS
41	KHOIRUNNISA	19930407 202012 2 012	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	PNS
42	RANTI AHMAD ALRASYID	19910226 202012 1 004	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PNS
43	FAHMI ISMAIL	19970529 202012 1 002	III/a	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
44	ASIH RAHAYU	19930310 202321 2 047	IX	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Bagian SDM dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian,	PPPK
45	AYU PRATIWI PARAMITHA	19890125 202321 2 038	IX	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
46	SUGENG RIADI	19880724 202321 1 011	IX	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PPPK
47	IDRUS CHAIRIANSYAH ATMODJO	19930427 202321 1 021	IX	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PPPK
48	DEDI PRIYADI KUSTIAWAN	19860316 202321 1 018	IX	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PPPK
49	EKA SUSILOWATI	19841105 202321 2 039	IX	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PPPK
50	USWATUNNISAH	19941203 202321 2 040	IX	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PPPK
51	YOLA AFIA MASDAR	19971219 202321 2 016	IX	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PPPK
52	ABDUL MUIZ ISHAQ MUZAWIR	19970903 202321 1 006	IX	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PPPK
53	ANITA FAJAR KRISTIAWAN	19820905 202321 2 033	IX	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PPPK
54	RIZKY IKA WIDIANTO	19950713 202321 1 018	IX	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PPPK

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
55	HANS CHRISTO ALEXANDER SILABAN	19931111 202321 1 024	IX	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
56	HASTIKA DARMAWATI	19900805 202321 2 049	IX	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
57	NABILA NAQYA NAZDA	19961001 202203 2 016	III/a	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
58	PRADISTYA HAYU PURBOSINI	19950407 202012 2 006	III/a	PENERJEMAH AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
59	TRI RAHMIATI	19871029 202012 2 002	III/a	PENERJEMAH AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
60	AGUSTINA SLAMET	19930818 202012 2 009	III/a	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	PNS
61	WIWIT PURWANTI	19970328 202012 2 015	III/a	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	PNS
62	MILA DATI PRAWESTY	19960806 202321 2 024	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PPPK
63	NUR AZIZ SETIADI	19950504 202321 1 013	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PPPK
64	EKIN CHRISTIAN SEMBIRING	19930701 202321 1 027	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PPPK
65	WINANDA MASHLAHAT	19980901 202321 2 010	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PPPK
66	NORMA KHAIRUNISA	19990922 202321 2 002	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PPPK
67	HIDAYATULLAH	19950606 202321 1 015	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PPPK
68	DEWI KHALIMA	19940420 202321 2 039	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PPPK
69	MUHAMMAD RINALDO	19970926 202321 1 005	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PPPK
70	MUTIARA RIZKI KHATULISTIWA	19940416 202321 2 052	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PPPK
71	PEGGI LHUCITA RULIYAN	19910611 202321 2 040	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PPPK
72	DESLAND TIGS CHRISTINA	19831209 202321 2 019	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PPPK
73	GUSTARA IQBAL	19910819 202321 1 019	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
74	MUH. YARDI IDRIS	19910109 202321 1 016	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
75	WAHYUDI EKA SAPUTRA	19901217 202321 1 023	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
76	AFMI	19770429 202321 1 001	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PPPK
77	MIFTAHURRAHMI	19970321 202321 2 017	IX	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PPPK
78	AFRIADI PONGTULURAN	19871116 202321 1 013	IX	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PPPK
79	FADHILA RACHMAT WINDIARTO	19990511 202321 1 002	IX	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PPPK
80	RINDA NANDY PANGASTUTI	19940914 202321 2 047	IX	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PPPK
81	DOLLYGRAREO STELIX VIKOYUSUFO	19920703 202321 1 014	IX	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PPPK
82	LADY PERMATA INSANI	19940617 202321 2 038	IX	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PPPK

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
83	YOSUA BINTANG	19940628 202012 1 004	III/a	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
84	MOCH. ERDIANA PUTRA BAKTI	19950402 202012 1 003	III/a	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
85	DIAN YUARDI	19920917 202012 1 009	III/a	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PNS
86	AGUSTINAH RIZKY AMALIA	19920824 202012 2 007	III/a	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
87	ROHMAD JARWANTO	19850430 202012 1 001	III/a	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PNS
88	INKA PRATIWI	19910102 202012 2 007	III/a	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PNS
89	HENDRA HUSMADI	19890511 202012 1 006	III/a	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PNS
90	JULIO RECXA OKILAHUTAMA	19910121 202012 1 008	III/a	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PNS
91	IWIN MANURUNG	19930416 202012 1 004	III/a	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PNS
92	LUTHFI FAKHRIZA ARFAI	19970917 202321 1 006	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	PPPK
93	INDRA NURRAHMAN	19930920 202321 1 019	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
94	REZA MUHAMAD FAHLEVI	19910814 202321 1 032	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
95	SAMSUL SIANIPAR	19870223 202321 1 015	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
96	DWIKI NURRAHMAN	19960326 202321 1 012	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PPPK
97	MOHAMMAD IVAN ALRIZKY	19940708 202321 1 019	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PPPK
98	TULUS SAPUTRA	19910122 202321 1 017	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PPPK
99	WIJANARKO SETYO SALAM	19960820 202321 1 009	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PPPK
100	FEBRINA HASIDA IDHAM	19920206 202321 2 052	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PPPK
101	TRI WIBOWO	19931218 202321 1 018	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PPPK
102	NAUVAL FEBRIAN	19820209 202321 1 009	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PPPK
103	EMIL ANDREAN KUSUMA	19930909 202321 1 032	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PPPK
104	RYO EKA DARMAWAN	19890522 202321 1 010	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PPPK
105	HERMI VIYANDI HB	19880109 202321 1 009	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
106	HUSNI	19840924 202321 1 019	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
107	MUHAMMAD ABDAL	19950610 202321 1 032	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
108	SAFRIZAL	19910408 202321 1 027	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
109	ADITYA PERDANA PERKASA	19890215 202321 1 013	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PPPK
110	SODIKIN	19920820 202321 1 031	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PPPK

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
111	NOVA SURYANGGA	19941105 202321 1 012	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PPPK
112	SAKTI PATAHILLAH ASRI	19981001 202321 1 004	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PPPK
113	ARFINDO FIRMANSYAH	19970313 202321 1 008	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PPPK
114	SOFIYUDIN DWI LAKSONO	19880927 202321 1 019	IX	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PPPK
115	RIZKA MAULIDA	19960820 202012 2 006	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
116	KHAIRANA TIARDI	19960904 202012 2 012	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
117	MAULANA ERWINSYAH PUTRA	19910920 202012 1 004	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
118	ARION JANUAR PRASASTI	19910121 202012 1 006	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
119	HOTNATANAEL MARULITUA MALAU	19841128 202012 1 003	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
120	DANIEL MARTHINUS TOGHAS	19970315 202012 1 006	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
121	HAEZAH QISTHINA	19950501 202012 2 011	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
122	ERNA SOELINA	19890901 202012 2 005	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
123	ERIC VAN CHRISMAN LBN. BATU	19901120 202012 1 002	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PNS
124	RISWANTARA	19910803 202012 1 004	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
125	BURHANUDIN NURSETO PRATOMO	19930224 202012 1 006	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PNS
126	HARMITA MORGAN	19900306 202012 2 005	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PNS
127	ALFAJRI PRIMA NOVEL	19970210 202012 1 002	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PNS
128	SUPANDIANSYAH	19870220 202012 1 004	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PNS
129	TIMBUL TRIYANTO	19880508 202012 1 002	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PNS
130	HERRY KURNIAWAN KADAR ISMANTO	19861123 202012 1 003	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	PNS
131	KUSUMA MAULISANTI	19950811 202012 2 007	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	PNS
132	ESTINNA SARIE	19940802 202012 2 014	III/a	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
133	RIZKY SYAIFUL RAMADHAN	19910410 202321 1 024	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PPPK
134	SHEILA NABILA	19950307 202321 2 038	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
135	VIDYA PURWITASARI	19951230 202321 2 032	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PPPK
136	DWI APRILIA NINGTIYAS	19970407 202321 2 025	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PPPK
137	ATIKA YUSRINA	19930403 202321 2 057	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PPPK
138	HULY RIZKA	19911227 202321 1 015	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
139	CUT FAHRA MARISSA	19930705 202321 2 050	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
140	PUJI PURWADI	19930604 202321 1 023	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PPPK
141	HENDIAN FANDITYA	19961110 202321 1 015	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PPPK
142	AGUS WIYANTO	19820120 202321 1 008	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PPPK
143	BAGASKARA PRAWIRA	19961018 202321 1 009	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PPPK
144	GALANG GILLESSPI	19930628 202321 1 020	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PPPK
145	GUNAWAN WIBISONO	19921206 202321 1 023	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PPPK
146	FEBRIAN DWI PUTRA	19940205 202321 1 014	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api RinganSumatera Selatan	PPPK
147	NULHANUDDIN	19970716 202321 1 005	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api RinganSumatera Selatan	PPPK
148	AHMAD GOFAR KUSMAYADI	19860501 202321 1 026	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api SulawesiSelatan	PPPK
149	ERWIN ARSYAD	19830519 202321 1 014	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api SulawesiSelatan	PPPK
150	RONALDO	19951124 202321 1 018	IX	PERENCANA AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api SulawesiSelatan	PPPK
151	DESMON EVENT BUTAR BUTAR	19931219 202012 1 004	III/a	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
152	LAILA TRI NUR HAYATI	19920525 202012 2 008	III/a	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
153	AKBARANI CANTIKA	19980710 202012 2 003	III/a	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
154	MIFTAKHUL JANAH	19900105 202012 2 004	III/a	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
155	SHOFWATINIDA	19970412 202012 2 007	III/a	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PNS
156	ISMIE KHANZA HASTUTI	19950518 202012 2 010	III/a	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
157	ARIA INDHI WICAKSANA	19950116 202012 1 005	III/a	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PNS
158	RAHAYU INDAH RAMADHAN	19910330 202012 2 003	III/a	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PNS
159	TITO AKBAR TAMARA	19960322 202012 1 005	III/a	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PNS
160	YOSEP YOGO WIDHIYATMOKO	19861022 202012 1 003	III/a	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PNS
161	CHOIRUNNISA FATANUS SAFA	19971208 202012 2 004	III/a	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PNS
162	NUGROHO TRI PAMUNGKAS	19960126 202012 1 006	III/a	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
163	FAJAR ANUGRAH TUMANGGOR	19960611 202321 1 009	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	PPPK
164	MUHAMMAD MIZAN ADIL	19861030 202321 1 011	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	PPPK
165	MUHAMMAD MUZAKKI	19910103 202321 1 016	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	PPPK
166	PUJA DIAS CHANDRA OCTANTO	19931024 202321 1 018	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	PPPK

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
167	TRI UTARI SAPUTRI	19980422 202321 2 012	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	PPPK
168	YOLAN MEIDIFA EKASARI	19940508 202321 2 031	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PPPK
169	GALUH WIDYASARI	19990312 202321 2 005	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PPPK
170	ITA RETNO SARI	19921220 202321 2 043	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PPPK
171	AJI PRAKOSO	19910511 202321 1 031	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PPPK
172	HARRY MULIA	19870303 202321 1 021	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PPPK
173	AHMAD NURSANI	19950324 202321 1 015	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
174	AULIA NUR ARHAMNI	19970123 202321 1 008	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
175	REZA IMAN KAUSTAR	19930911 202321 1 012	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
176	TRI AJI	19941015 202321 1 011	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
177	CITRA PUTRI KUSUMADEWI	19940421 202321 2 045	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PPPK
178	NIVITA SALDYNI ADIIBAH	19960326 202321 2 023	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PPPK
179	GUSTIA DEWINDA	19980816 202321 2 012	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PPPK
180	HANNA SURYADIKA MUTIHA ROTUA	19920317 202321 2 053	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PPPK
181	NISA ALAWIYAH ISKANDAR	19960518 202321 2 031	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PPPK
182	ANNISA RAHMANIA	19930922 202321 2 036	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
183	MEGA SILVIA KUNCAHYA	19960802 202321 2 035	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PPPK
184	AYU AGDI KARLINA	19990801 202321 2 004	IX	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	PPPK
185	DANANG SEPTIAN WIJANARKO	19890926 202012 1 005	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
186	TIARA FITRI BERLIAN	19960225 202012 2 010	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
187	REZA AHMAD	19940324 202012 1 005	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
188	ARDIAN BAGUS WIDIYANTORO	19900728 202012 1 006	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
189	GUNAWAN	19910530 202012 1 004	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
190	IIN INTAN ULJANAH	19950627 202012 2 005	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
191	ANISA NUR ARIFAH	19951017 202012 2 014	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
192	NOVAL MARINGAN SINAGA	19961110 202012 1 005	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
193	MOHAMAD TRI RAMDHANI	19900408 202012 1 005	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
194	RIKY REZAMIL	19950505 202012 1 006	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
195	RAY PRABOWO SULISTYANTO	19860707 202012 1 008	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
196	RIZKY SUZENNO	19940305 202012 1 005	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
197	HELPHY JAYANTIAR SITUMORANG	19910101 202012 2 014	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PNS
198	MELINA KRISNAWATI	19940507 202012 2 007	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
199	VINSENSIA SIPRIANA ZEGA	19970920 202012 2 004	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
200	HAIRIL FIQRI SULAIMAN	19940916 202012 1 006	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
201	TITIS PRASETYO	19970821 202012 1 004	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
202	ARY INDAH IVRILIANITA	19930420 202012 2 011	III/b	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
203	ROBBY NUR DIANSYAH	19900327 202012 1 002	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
204	JOHANNES ANGGA PRIMA	19941115 202012 1 005	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
205	ADITYA PRANATAMA	19970322 202012 1 003	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
206	HENDRY MUNDAN	19880716 202012 1 005	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	PNS
207	GILANG WISNU SAPUTRA	19950724 202012 1 004	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PNS
208	MUHAMMAD RAFI AL-FARIZI. S	19950217 202012 1 008	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
209	IBNU WAHYU ROCHIDIN	19910609 202012 1 009	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PNS
210	HEINRICH LIDANG HUTASOIT	19910514 202012 1 006	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PNS
211	VEVI GUS LIA NOVA	19911124 202012 2 011	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PNS
212	RIKI FERNANDO	19901011 202012 1 002	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PNS
213	RIZKI CATUR PUTRA	19931201 202012 1 011	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PNS
214	RENDYA PURNAMA SARI	19900117 202012 2 007	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PNS
215	DERI DWI CAHYA	19941210 202101 1 001	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PNS
216	AHKMAD IPANDY	19880616 202012 1 008	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	PNS
217	JAYARI	19900415 202012 1 007	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	PNS
218	ALFAVIEGA SEPTIAN PRAVANGASTA	19930909 202012 1 008	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PNS
219	KEVIN REYNALDO	19931028 202012 1 005	III/a	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
220	MUSTIKA MERDEKA RIYANTI	19950815 202321 2 039	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PPPK
221	IDA ADHA KAMILASARI	19900913 202321 2 039	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PPPK
222	DEDEN FACHMI RIDWAN	19960225 202321 1 013	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Bagian SDM dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian,	PPPK

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
223	AOFA UL MAZIDAH	19900720 202321 2 051	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas dan AngkutanKereta Api	PPPK
224	ASEP WAHYUDIN	19960912 202321 1 007	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas dan AngkutanKereta Api	PPPK
225	KRISTIAN WIJAYANTO	19841215 202321 1 017	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas dan AngkutanKereta Api	PPPK
226	YUDY PRASETYO NUGROHO	19921227 202321 1 019	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas dan AngkutanKereta Api	PPPK
227	BAMBANG HERIYANTO	19821024 202321 1 008	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
228	NOFRIZAL PRASETIO	19940106 202321 1 025	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
229	PANJI AULIAWISELA	19921206 202321 1 025	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
230	RIZKA MUSLIMATURROHMAH	19911029 202321 2 036	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
231	TAFDLILA SYAHRIFAN MIHAR S.T	19950819 202321 1 013	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
232	KHOTIBUL UMAM	19930807 202321 1 027	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PPPK
233	PURWO SETYO AJI	19890501 202321 1 027	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PPPK
234	IRZAN KAMARULLAH	19901207 202321 1 018	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PPPK
235	REXSY RUSTIANA SUPARMAN	19950410 202321 1 017	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PPPK
236	ARIEF PEBRIANSYAH	19980224 202321 1 005	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PPPK
237	DIAN ADRIAN ZAKARYA	19840819 202321 1 008	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PPPK
238	NIKKO RIADI	19880716 202321 1 023	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PPPK
239	TOTOK HARIYADI	19751008 202321 1 006	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PPPK
240	NOVITA SARI	19910611 202321 2 046	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
241	RASTAMIN AQIMUDDIN	19861117 202321 1 017	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
242	RATIH PUSPITA SARI	19961129 202321 2 030	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PPPK
243	RIFAL KASA DINAR	19950423 202321 1 018	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PPPK
244	ISKANDAR ZULKARNAEN SYAMSU	19911125 202321 1 015	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PPPK
245	BAYU RIYADI FEBRIANTO	19980204 202321 1 005	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PPPK
246	DWI CAHYO WIBISONO	19910609 202321 1 020	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PPPK
247	FADLY YOGA PRATAMA	19940506 202321 1 015	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PPPK
248	FERY JULIANTO	19740726 202321 1 002	IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PPPK
249	RENALDY APREVIA LUTFI	19950405 202012 1 006	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
250	MERINDA PANGESTIKASARI	19960325 202012 2 008	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
251	PRIMA LESTARI HANIF	19960922 202012 2 006	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
252	AFFANDA ABDUL HAKIM AMINULLAH	19960623 202012 1 002	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
253	SALIS MAHFUDHOH	19920806 202012 2 007	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
254	AHMAD RONALDY SAPUTRA	19970425 202012 1 003	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
255	ISTY WAHYU ERLINA	19980417 202012 2 006	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
256	ANNAM ADAM PRAKOSO	19930910 202012 1 006	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PNS
257	ANGELA MERICI YOSHINTA RINAWATI	19920130 202012 2 007	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
258	AHMAD BUKHARI MUSLIM	19960921 202012 1 008	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	PNS
259	ANISA ALFIANI RAHAYU	19910718 202012 2 003	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
260	RHIOFAJAR AGUSTA YOGABRATA	19870813 202012 1 001	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PNS
261	TESSA PRIHARTINA PARHUSIP	19961029 202012 2 008	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PNS
262	ZULFAZLI	19961122 202012 1 004	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PNS
263	ALFAN ALIEF SEKTIANANDA	19970328 202012 1 007	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PNS
264	NURZAMAN	19971029 202012 1 006	III/a	STATISTISI AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
265	DELIS ANISA	19920617 202321 2 032	IX	STATISTISI AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PPPK
266	IHSAN ALI NURFAUZI	19980609 202321 1 001	IX	STATISTISI AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PPPK
267	SITI RAHMAHWATI	19950920 202321 2 038	IX	STATISTISI AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PPPK
268	WIMYASARI FISTIA WISDAWATI	19921201 202321 2 045	IX	STATISTISI AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PPPK
269	DEFNI WAHYUNI	19911011 202321 2 046	IX	STATISTISI AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PPPK
270	AKHMAD BARELVI	19881007 201012 1 007	Penata Muda Tingkat I (III/b)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN MAHIR	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
271	PAMELA META PRABANDARI	19970519 201902 2 001	Pengatur Tingkat I (II/d)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
272	DYANITA INDRIA SENNIA	19960807 202012 2 006	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
273	AGHNI MAULANA HARIONO	19970226 202012 1 002	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
274	JOELFIKA RAMADHANIA	19970126 202012 2 009	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
275	FAJAR BAGUS SAMPURNO	19991025 202112 1 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
276	YORRIS ADAM FIRMANSYAH	20000617 202112 1 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
277	GEMA AKBAR PUTRA PAMUNGKAS	19930615 202012 1 009	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
278	SALMA FEBRY RAHMASARI	20000213 202112 2 003	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
279	ELANG DAFFA WIDIANTARA	20000809 202112 1 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PNS
280	LEONARDO ALIF IBRAHIM	19990817 202112 1 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PNS
281	SANDY SABILILLAH	19990905 202112 1 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PNS
282	TATI HENDRAWATI	19691022 201212 2 003	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
283	AJI PERMANA PUTRA	19960526 202012 1 006	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
284	LINGGAR SUBEKTI	19980228 202012 1 003	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
285	MUHAMMAD RIZKY NUR RACHMAT	19960502 202012 1 004	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
286	GITA FITRI RAMADHANI	19980129 202012 2 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
287	YOHANES ANDUNG PANGESTU	20000820 202112 1 002	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
288	MUHAMMAD WILDAN AL BAIHAQI	19990826 202112 1 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
289	ADHIMAS ILHAM PRAMADITYA	20000218 202112 1 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
290	GUNADI RAHARJO	19811208 200604 1 002	Pembina (IV/a)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
291	LUCKY BINDRI SOEGITO	19770712 200212 2 001	Pembina (IV/a)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
292	RUSDY	19780114 200604 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	PNS
293	DONY CHRISNA SANJAYA	19880903 201012 1 003	Penata (III/c)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	PNS
294	LUSIAWAN JATI	19760719 200912 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
295	RISKY HARIWAHYUDI	19850508 200912 1 009	Penata (III/c)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
296	DIMAS RESKA PUTRA	19821225 200912 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
297	RENDY FAJAR RIADI	19860611 200502 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
298	TEDDY PRIVANTORO	19830601 201012 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
299	HENDARWAN RIAN TO	19801121 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
300	ADDIN ARISTOTIKA	19851103 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
301	RIRIS ARYANTI	19881216 201012 2 003	Penata (III/c)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
302	HARYO KUMORO RAHMANDHEWO	19830220 201012 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
303	DEAN ANDREE YUNIE ARDI	19880623 201012 1 004	Penata (III/c)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
304	YENY RACHMAN	19881008 201012 2 004	Penata (III/c)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
305	SITI SARAYA DWI AMALINA	19870625 201012 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
306	AGUS TRIONO	19830827 200604 1 002	Penata (III/c)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
307	RIDWAN ARASJID	19940303 201902 1 002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
308	ERNI DWI ASTUTI	19890603 201012 2 009	Penata Muda Tingkat I (III/b)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
309	ARDISA PRAMUDHITA	19920424 201902 2 005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
310	NOVA WAHYU CAHYONO	19921130 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	AUDITOR PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
311	ARIEF SUDYATMOKO	19790518 200604 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PNS
312	HERU PRASETIJO	19710418 200312 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
313	CHOIRUDIN	19780909 200312 1 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
314	YAYAT HENDAYANA	19810114 200712 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
315	DANNY PALGUNADI	19771022 200312 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
316	ANUNG SADPUTRO	19770901 200712 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PNS
317	EKO BUDI SANTOSO	19830416 200712 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PNS
318	UMAR PRIONO ADJI	19750310 200312 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PNS
319	SOFIA AVIANTIE	19670813 199603 2 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
320	MUHAMMAD HIDAYAT	19800327 200604 1 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
321	BUDI FEBRIAN	19740224 199703 1 003	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
322	NAOMI MASSANG LOLOK	19801110 200604 2 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
323	ANTON APRIANTO	19710418 199803 1 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
324	L. SAMUEL NAINGGOLAN	19770109 200604 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
325	MOHAMAD ZULKARNAIN	19761111 200604 1 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
326	NUR MUHAMMAD SYAIFULLAH RAHMAN	19870225 201012 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PNS
327	RAMOS TAUFIQ NASUTION	19760307 200912 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PNS
328	DANY KRISTIAN PAAYS	19751111 200912 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PNS
329	JONNY FRANHUT SITOMPUL	19811028 200912 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PNS
330	WALDO MORO	19761029 200812 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PNS
331	SARWO DE HART	19780924 200901 1 007	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PNS
332	ADITYA ASTIKA BRATA	19880124 200912 1 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PNS
333	MUHAMMAD ZAKI ALAM YUSRANI	19871214 201012 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PNS
334	MUHAMMAD MAULANA YUSUF	19871103 200912 1 003	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
335	NANGIM ULINNUHA	19861021 201012 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PNS
336	SUPRIYADI	19820407 200501 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PNS
337	MUSLIM	19770902 201212 1 003	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PNS
338	AMIR RIFAI	19770416 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
339	DUTA PRATAMA	19881020 200912 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
340	GALIH PRANANDA	19870928 200812 1 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
341	HARRY PRIHANTYO	19880417 201012 1 006	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
342	KUKUH SETYO PRIYANTO	19801103 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
343	RENY HARWANTI	19871022 201012 2 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
344	SATRIO HARIMURTI	19871212 200912 1 003	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
345	TITO AJI YANTO	19851209 200912 1 006	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
346	ADITIA FIRMANSYAH	19890329 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
347	MOCH. ATMA ADHYAKSA	19870313 201012 1 005	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
348	SANDE RITIN IRAWAN	19880814 201012 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
349	SURYO CIPTO RAHARJO	19860818 201012 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
350	RISKA PREVITA SARI	19871219 201012 2 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
351	DIAN IKA SULISTIWATI	19851022 201012 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
352	RIO APRILLIANA	19810417 200812 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
353	EKO PURNOMO	19781227 201012 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
354	YANUARINI TRI KUSWANTI	19830122 200912 2 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
355	DEDDY KURNIAWAN	19810918 201503 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
356	REZHA NURACHMADY	19821102 200912 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
357	SOFYAN HIDAYAT RANGKUTI	19820406 201012 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
358	ANNE RUFAIDAH	19800907 200712 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
359	SUSIANA	19710510 200701 2 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
360	IIS SUMIATI	19841006 200912 2 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
361	BERNADI ARMISETYO	19821112 200912 1 005	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PNS
362	MUHAMAD ZAENUDIN	19890331 201012 1 003	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
363	MOCH. FACHRUL FIRMANSYAH	19801218 200812 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PNS
364	RIZAL FATHONI ASAD	19750418 200712 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PNS
365	DONNY SATRIA	19830426 201012 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PNS
366	LURIANTO LUKITO	19750211 201409 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PNS
367	DEDY PUPUT PURBAYA	19881208 201503 1 003	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PNS
368	NURUL HIDAYATI	19880103 201012 2 007	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
369	FAHMI ALAMSYAH SIREGAR	19871216 201012 1 004	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
370	RATIH ANGGA APRIANI	19850412 200812 2 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
371	GITA LANIATI	19810821 200312 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
372	HOTMA PARULIAN LUMBANTORUAN	19770821 200312 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
373	WINDI MAHATESYASNA	19821221 200312 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
374	BASUKI RACHMAT	19720317 200604 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
375	YASER ARAFAT	19820810 201012 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
376	ROSNAENI	19770108 200912 2 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
377	THERESIA FAJAR PURBOSARI	19851128 200812 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
378	DONNY SILANDO	19820315 200712 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
379	RENALDI PRABUDIMAN	19811212 200912 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
380	AWANG KURNIAWAN	19830204 201012 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
381	PATRICK MORONNEY	19770318 201012 1 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
382	AZIS OKTA RISDIANA	19871004 201012 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
383	SRI MARTINI	19700305 199703 2 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
384	TAUFIK HIDAYAT	19850103 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PNS
385	MUHAMMAD CHUSNUL	19860811 200912 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PNS
386	GALUHWATI	19760601 201012 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PNS
387	MUHLIS HANGGANI CAPAH	198109272 01012 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PNS
388	ADI WINASIS	19860223 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
389	MUHAMAD RIYANDORA	19970910 202012 1 002	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
390	ESTY DWI CAHYANI	19960626 202012 2 015	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
391	MUHAMMAD RIFKY ARIANSYAH	19940502 201612 1 001	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
392	ARIZAL ERRY WICAKSONO	19890330 202012 1 007	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PNS
393	BEJO PRIYONO	19890314 201801 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
394	ICHSAN WIRAHADI KUSUMAH	19920712 201902 1 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
395	HERY PRIYADI	19921229 201801 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
396	RANDY JANUAR SYAEFULLOH	19930122 202012 1 007	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
397	FERY CHRISNATA SANTOSO	19901226 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
398	IKHSAN TRI YANUAR	19880129 201012 1 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
399	EVY KRISTIANA	19721224 199803 2 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
400	FERRY CANDRA HASIBUAN	19821226 200312 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
401	BUDHIARTI OKTIVA DEWI	19671015 200604 2 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
402	ARI SUPRIANTORO	19790915 200112 1 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
403	HENDRY NURYANUAR	19780103 200604 1 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
404	ARY LUNDI AYU OKTRADA	19821004 200604 2 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
405	EKO NOVIARDI	19801107 200912 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
406	ANDHIKA SETIAWAN	19850607 201012 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PNS
407	ARBIE	19880411 200912 1 003	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PNS
408	BOMBY DUSWARA	19870601 201504 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PNS
409	HARDIANTO EKO PRASETIO	19831213 201012 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PNS
410	CANDRA BANGUN	19840503 200604 1 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
411	SONYANTO SEPFRIMADA	19860905 201012 1 006	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
412	MUHAMMAD IMSA RHOMADON T.	19870526 201012 1 004	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
413	YUYUT WIBOWO	19821120 200912 1 006	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
414	IVANA	19800805 200604 2 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
415	ANIK SETIANI	19740112 200502 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
416	IRWAN WIJAYA	19791124 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
417	VENNY ARIANTI	19870605 200912 2 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
418	RAHMAWATY	19710729 200604 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
419	AKHMAD YASKUR	19781004 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
420	ANDRIANSYAH SYAIFULLAH	19771202 200312 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
421	HOTMA SAHALA TUA HUTAGALUNG	19710907 200901 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
422	INDRA NOERESA	19781107 200312 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
423	NUR CHOLIS	19821022 200812 1 003	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
424	DANIEL PAUNDANAN	19740524 200712 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
425	TODO BINSAR PARULIAN	19830429 201012 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
426	DONI ADI KUNCORO	19820105 200912 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
427	ELFRIDA PANE	19860913 200812 2 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
428	RIFAN FATHURRAHMAN	19960525 202012 1 001	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PNS
429	LUHUR PAMBUDI KUSUMA JATI	19950912 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PNS
430	IBNU IBRAHIM NURCAHYO	19970525 202012 1 008	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian	PNS
431	FIRMANSYAH	19911106 202012 1 006	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
432	DWI KURNIADI GUNAWAN	19891126 201503 1 001	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
433	AGUS SUNARYO HADI SANG PUTRO	19860820 201402 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
434	MA'ARIF AZIZ	19950531 202012 1 007	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
435	MUHAMMAD ANDRI	19941027 202012 1 002	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
436	AJI NURSETO	19950611 202012 1 004	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
437	MOHAMMAD IVAN YANUAR	19940103 202012 1 013	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
438	MOCH SYAWALUDDIN FATRA	19950317 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
439	PRABOWO ARDIATOMO	19931229 201902 1 004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
440	MOCHENDRA	19890519 202012 1 004	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
441	ARIFIN BUDIMAN	19930124 202012 1 002	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
442	DIAN FITRIANA PURWANINGSIH	19900427 202012 2 013	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
443	HERMAN SITORUS	19860127 202012 1 002	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
444	DEKRI FAKTI BOWO	19881019 202012 1 001	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
445	HANIBAL NURIL HAKIM	19950814 202012 1 001	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
446	HARTATA PUTRA MAI MARTA	19970527 202012 1 003	II/c	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PNS
447	AULIA HUSNA PARINDURI	19980828 202012 2 005	II/c	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PNS
448	MUHAMAD YUSUF	19980814 202012 1 002	II/c	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
449	RYCO PRADHANA CANDRA	19880416 201012 1 001	Penata (III/c)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	PNS
450	ARI WIBOWO	19831225 201503 1 003	Penata (III/c)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
451	WIDI ADITYA	19890213 201012 1 004	Penata (III/c)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
452	ANTONIUS MAY HERMAN	19820517 201012 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
453	DARMAINILLAS	19680507 200604 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
454	OSIO HOTMARTUA SISWANTO LUMBANBATU	19830530 200803 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
455	DENI SETIADI	19841211 200604 1 001	Penata (III/c)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
456	MOCHAMMAD RAFLI KADAFI	19860607 201012 1 005	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
457	WAHYU PUJA PRADINTA	19880824 201012 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
458	MELISA SILVIA ANGGRAINI	19870525 200812 2 001	Penata (III/c)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
459	ERFAN WAHYUDIANTO	19801004 201012 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
460	INDAH WIDYA ASTUTI	19860126 200912 2 006	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
461	MEILISA GARNISIA	19880514 200912 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
462	DIANITA HERDIANA	19801213 200912 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
463	MARIDOSEN PURBA	19960801 202012 1 007	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PNS
464	WIDYA NAUFALINDA	19970305 201902 2 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
465	MUHAMMAD AVIZ SHENA	19861110 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
466	RIVA ADITYA PRATAMA	19940109 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
467	ACHMAD CHUSNUL KHULUQI	19901202 202012 1 001	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
468	CHANDRA SETIAWAN	19890911 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
469	MOCHAMAD ARIEF	19880227 202012 1 002	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
470	MUHAMMAD NUR SALIM	19921122 202012 1 004	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
471	M. AZIZUN HAKIM	19970719 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
472	ASIH CHANDRAWATY	19890515 202012 2 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
473	CHOLIB SARIAJI	19940822 202012 1 004	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
474	NOVIE ROFI'UL JAMIAH	19881107 202012 2 004	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
475	IQBAL PUJI AKBAR	19970208 202012 1 007	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
476	DIAN INAYAH	19960526 202012 2 010	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
477	RIKI SOLIHIN	19931115 202012 1 005	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
478	MENTARI HIDANTI	19950119 202012 2 011	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
479	SITI HENIYAWATI	19721016 200604 2 001	Pembina (IV/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
480	ARI PRANOVI INDRIANTO	19791024 200912 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
481	TUTI	19770517 200604 2 005	Penata (III/c)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
482	MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT	19791201 200912 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
483	YAYAN KUSHARYANTO	19801110 200604 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
484	MYRNA SECUNDA	19830307 201012 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
485	RUSTAMIAJI JATMIKO	198107252010121002	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
486	MAMAT HARYANTO	19810106 200912 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
487	ANDI RASTYO WIBOWO	19870223 200604 1 001	Penata (III/c)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
488	DEWI HESTIWIJAYANTI	19781227 200012 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
489	LILIK MUJAKI	19820609 200501 1 006	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
490	ARMAINI DEWI	19710515 200312 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
491	IQBAL RAMADHAN HARAHAP	19910415 202012 1 005	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
492	EDWIN DWI AHMAD	19961015 202012 1 005	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
493	ARIEF YUNIARTO	19870608 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
494	FERRY WIJO UTOMO	19961014 201801 1 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
495	MUCHAMAD HAFID	19920505 201801 1 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
496	SEPTIAN ILHAM MULFAHMI	19970911 202012 1 001	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
497	RESTI KANDI SARI	19970820 202012 2 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian	PNS
498	RIZKY MUHAMMAD	19931207 202012 1 005	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian	PNS
499	ANNISA DIAN PUNGKASARI, A.MD.TRA	200206022023102001	II/c	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	PNS
500	DIAN FEBRYLIANA, A.MD.TRA	200102142023102002	II/c	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	PNS
501	GHA Fur CHANDRA JIWANEGAR, A.MD.TRA	200112022023101001	II/c	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	PNS
502	HASHIM DIMAS STANY, A.MD.TRA	200112212023101001	II/c	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	PNS
503	INDAH KIRANI, A.MD.TRA	200105272023102001	II/c	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	PNS
504	MUAMMAR IBNU SOLICHIN, A.MD.TRA	200112202023101002	II/c	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
505	MUCH ARIEF JANUAR, A.MD.TRA	200201122023101001	II/c	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	PNS
506	MUHAMMAD RIZKI RAMADHANI, A.MD.TRA	200209282023101002	II/c	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	PNS
507	REGITA LOVANY ARACELY ASRIYANI METALIA, A.MD.TRA	200207082023102002	II/c	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	PNS
508	RIZKA NURUL HIDAYAH, A.MD.TRA	200203162023102001	II/c	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	PNS
509	DHANY ALFIANSYAH HIKMAWAN	199909182024211002		ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
510	KRISNA BAYU SUBASTIAN, A.MD.T	200105162023101002	II/c	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	PNS
511	MUHAMAD SABILIL ROUF, A.MD.T	200205282023101003	II/c	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	PNS
512	FATWA MUFIDAH	199904282024212015		ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PPPK
513	MUHAMMAD RAHMAN IMAN, A.MD.T	200111132023101001	II/c	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PNS
514	PATRISSIA DIAH JANUARDIANA, A.MD.T	200101012023102001	II/c	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PNS
515	BAMBANG HADI WIBOWO	19841223 202321 1 010	VII	Pranata Komputer Terampil	Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PPPK
516	MUHAMAD SATRIO BUDI CAHYONO	19970811 202321 1 008	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PPPK
517	M. MAWARDI	19860719 202321 1 012	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
518	MUHAMMAD HILAL BADRI	19870114 202321 1 014	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
519	NASLIADI	19881010 202321 1 035	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
520	NICO PARERA	19970708 202321 1 011	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
521	RICCO AUDRYAN CHRISTOPHER	19961224 202321 1 009	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
522	WILDAN YUQO MADAZZAMAN	19921121 202321 1 016	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PPPK
523	DHANA ADYAKSA FERICHI	19980418 202321 1 003	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PPPK
524	DWIKY HARISSA	19990630 202321 1 002	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PPPK
525	EVI PUJI UTAMI	19971112 202321 2 022	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PPPK
526	RYAN AULYA	19960603 202321 1 007	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PPPK
527	PRADIYOGA ALMAWARDI	19980724 202321 1 004	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	PPPK
528	MOCHAMAD FAISAL SUHENDI	19910526 202321 1 019	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PPPK
529	ZANI NURLESMANA	19910619 202321 1 009	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	PPPK
530	DESTIK DWI PUSPASARI	19951206 202321 2 032	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	PPPK
531	ADE AYU YULIA SARASWATI LABINA	19940527 202321 2 033	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	PPPK
532	ADITYA FAHMI PRATAMA	19930630 202321 1 020	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	Status
533	ALDINO ASHARI	19931213 202321 1 023	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	PPPK
534	ARYANTO EDI WIBOWO	19980822 202321 1 007	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PPPK
535	MUHAMMAD FADEL FARHAN	19980424 202321 1 003	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	PPPK
536	MIRANTIKA KUSUMA DEWI	19950307 202321 2 039	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian	PPPK
537	MARKO JUNIOR SIAGIAN	19920630 202321 1 022	VII	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	PPPK
538	MAHARSIDEWI KUSHARYANI	199009032019022005	III/b	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
539	INDRA PURNAMA EFFENDI	199005072015031007	III/c	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
540	DEWI SUCI INDRAWATI	19780720 200712 2 001	III/d	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
541	RIZKI AULIA SALSABILA	19990910 202101 2 002	II/c	Pranata Keuangan APBN Terampil	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PNS
542	ROBBY NUGRAHA	19980528 202101 1 003	II/c	Pranata Keuangan APBN Terampil	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	PNS
543	HERAWATI, S.T, M.SC., M.ENG	198210042009122004	IV/a	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	PNS
544	YENNESI ROSITA	19660716 199503 2 001	IV/b	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS
545	ROIMON INDIARKO, SH	198110062009121001	III/d	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PNS

Kepala Bagian SDM dan Umum,



Indriati, S.E., M.M
NIP 198106072005022001



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4

PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TIK BIDANG PERKERETAAPIAN

**Progres Kegiatan Pengembangan Aplikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun
2024 Per-Triwulan IV Tahun 2024**

No.	Program/Kegiatan	Unit Kerja/PIC	Program Kegiatan
1.	Pengelolaan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	Setditjen Perkeretaapian	Progres pekerjaan pada Semester II tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain: a. Integrasi Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian dengan SSO Kemenhub/Hubnet. b. Pengembangan Modul Chat pada Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian. c. Penyusunan SOP Integrasi Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian dengan aplikasi lainnya. d. Operation support dan maintenance issue. e. Peningkatan keamanan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian. f. Menjadikan Portal Aplikasi DJKA menjadi SuperApps/Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2.	Pengembangan Website Ditjen Perkeretaapian	Setditjen Perkeretaapian	Progres pekerjaan pada Semester II tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain: a. Integrasi Website Ditjen Perkeretaapian dengan SSO Kemenhub/Hubnet. b. <i>Recovery</i> pasca insiden serangan <i>cyber</i>. c. Memperbaiki <i>bug</i> dan penyempurnaan fitur pada Website Ditjen Perkeretaapian. d. Progres dwibahasa terhadap konten Website Ditjen Perkeretaapian. e. Menindaklanjuti hasil <i>Vulnerability Assesment (VA)</i>. f. <i>Redesign</i> tampilan halaman utama Website Ditjen Perkeretaapian.
3.	Roadmap TIK Ditjen Perkeretaapian	Setditjen Perkeretaapian	Progres pekerjaan pada Semester II tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain: a. Melakukan analisa kebutuhan pengembangan TIK termasuk melakukan benchmarking lanjutan dengan BUPP/BUPS, analisa kebutuhan strategi dan tahapan dengan mempertimbangkan rumusan daftar risiko serta rumusan baseline dan target arsitektur TIK. b. Melakukan perumusan tata kelola SPBE di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa kerangka kerja arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan di lingkungan Direktorat Jenderal

			Perkeretaapian sesuai dengan arsitektur TIK Kemenhub. c. Melakukan perumusan manajemen SPBE di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE. d. Melakukan perumusan kebijakan, strategi dan tahapan (<i>grand design</i>) penyelenggaraan SPBE Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk kebijakan penyederhanaan aplikasi dengan pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai integrator dan Super Apps yang dimanfaatkan oleh stakeholder perkeretaapian. e. Melakukan perumusan standarisasi teknologi dan framework sistem TIK guna membangun ekosistem aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk standar interoperabilitas dan integrasi data baik untuk aplikasi internal dan eksternal (<i>stakeholders</i>) di bidang perkeretaapian. f. Melakukan perumusan target kinerja TIK, program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan/pengembangan/pengelolaan TIK pada periode 2025-2029. g. Merumuskan panduan/SOP penerapan kebijakan dan layanan dalam penyelenggaraan SPBE dengan mengacu arsitektur TIK meliputi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur serta keamanan informasi di lingkungan DJKA.
4.	Pembaruan Aplikasi ANSYS Dalam Rangka Pelaksanaan Rancang Bangun Sarana Perkeretaapian	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena pagu anggaran tahun 2024 mengalami Automatic Adjustment yang menyebabkan anggaran Pembaruan Aplikasi ANSYS Dalam Rangka Pelaksanaan Rancang Bangun Sarana Perkeretaapian ditiadakan.
5.	Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Progres pekerjaan pada Semester II tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain:

	Kelaikan Sarana Perkeretaapian		a. Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian ini telah mengacu pada peraturan dan pedoman perundangan-undangan yang berlaku di Kementerian Perhubungan; b. Pemeliharaan aplikasi ini sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan; c. Telah dilakukan <i>corrective maintenance</i> ketika ditemukan <i>error</i> atau terjadi gangguan sistem pada aplikasi; d. Telah ditambahkan otorisasi user untuk melihat informasi tertentu pada aplikasi ini; e. Telah menerapkan fitur <i>Single Sign On (SSO)</i> untuk pegawai yang terintegrasi dengan portal DJKA, namun perlu dilakukan penyesuaian kembali agar terintegrasi dengan SSO Hubnet yang dikembangkan oleh Pusdatin; f. Telah dilakukan uji coba pada server dev untuk terintegrasi dengan aplikasi penetapan identitas sarana perkeretaapian dan aplikasi milik Balai Pengujian Perkeretaapian; g. Telah dilakukan ITSA oleh BSSN dan temuan hasil ITSA telah di tindaklanjuti; h. Telah dilakukan <i>Vulnerability Assessment</i> oleh Pusdatin dan temuan pada hasil <i>Vulnerability Assessment</i> telah di remediiasi pada tanggal 12 Juli 2024.
6.	Penyusunan Database Perlindungan secara Digital	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Progres pekerjaan pada Semester II tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain: a. Penyusunan Database Perlindungan Secara Digital akan mengacu pada Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM 112 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan; b. Penyusunan Database Perlindungan Secara Digital akan mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM Nomor 150 Tahun 2021 tentang tata Kelola data di lingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga tidak terjadi double data antar lintas Direktorat Teknis pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Penyusunan Database Perlindungan Secara Digital menggunakan

			Metode <i>SDLC (System Development Life Cycle)</i> sesuai dengan KP 536 Tahun 2016 tentang panduan Teknis Penerapan <i>System Development Life Cycle</i> Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM 107 Tahun 2023 tentang kebijakan dan standar sistem manajemen keamanan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Pengetesan Database Perlintasan Secara digital akan dilakukan di akhir pekerjaan dan akan dilakukan test <i>UAT, SIT, VA, dan Penetration Testing (Pentest)</i>
7.	Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran terkena optimalisasi untuk keperluan Kegiatan prioritas yang ada pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.
8.	Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pekerjaan tidak dapat dilakukan dikarenakan Kegiatan terkena <i>Automatic Adjustment (AA)</i> .
9.	<i>Management Studio Geodatabase</i> Lanjutan	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	Progres pada monitoring Semester I tahun 2024, anggaran diblokir dari DJA, Kemenkeu karena terdampak <i>Automatic Adjustment (AA)</i> .
10.	Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Online	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	Progres pekerjaan pada Semester II tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain: a. <i>Updating</i> dan analisis kebutuhan data/informasi: 1) Mengupdate bahasa pemrograman/teknologi terkini / terbaru; 2) Melakukan inventarisasi sistem informasi/aplikasi yang akan diintegrasikan; 3) Melakukan analisa terhadap sistem informasi/aplikasi dan database yang akan diintegrasikan termasuk untuk mengatur hak akses Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Online; 4) Melakukan desain kebutuhan fitur aplikasi; 5) Integrasi dengan Portal Aplikasi DJKA (Super Apps DJKA), integrasi data melalui ESB, integrasi dengan Aplikasi Online

			Single Submission (OSS) dan Aplikasi SIMPONI; 6) Penerapan SSO Kemenhub. b. Pemeliharaan: 1) Melakukan pemeliharaan perangkat lunak terhadap Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Online; 2) Melakukan backup basis data Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Online; 3) Memastikan proses bisnis dan fitur pada aplikasi perizinan online berjalan dengan baik dan handal. c. Peningkatan keamanan dan kinerja Aplikasi Perizinan <i>Online</i>: 1) Melakukan pengujian kinerja jaringan Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Online; 2) Melakukan pengujian keamanan Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Online.
11.	Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlindungan Sebidang	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	Progres pekerjaan pada Semester II tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain: a. Perawatan 1) Melakukan perawatan pada alat pemantauan cctv yang dipasang pada 45 (Empat Puluh Lima) lokasi Stasiun dan 6 (Enam) perlindungan sebidang di wilayah Jawa dan/atau Sumatera; 2) Terpeliharanya alat pemantauan dari kerusakan dan gangguan. b. Pengawasan: 1) Tercapainya <i>output</i> gambar / tampilan CCTV yang baik serta koneksi yang realtime pada alat pemantauan di 45 (empat puluh lima) lokasi stasiun dan 6 (enam) perlindungan sebidang di Jawa dan/atau Sumatera; 2) Tersedianya alat pemantauan di 45 (empat puluh lima) lokasi stasiun dan 6 (enam) perlindungan sebidang di wilayah Jawa dan/atau Sumatera.
12.	Bandwidth dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Progres pekerjaan pada Semester II tahun 2024 antara lain: a. Instalasi Bandwidth CCTV dilaksanakan di 45 (empat puluh lima) lokasi stasiun dan 6 (enam) perlindungan sebidang di Pulau Jawa

			dan/atau Sumatera dan sewa Bandwidth selama 11 Bulan. b. Sewa Bandwidth di wilayah: 1) Sewa Bandwidth di Wilayah DKI Jakarta; 2) Sewa Bandwidth di Wilayah Jawa; 3) Sewa Bandwidth di Wilayah Sumatera; dan 4) Sewa Bandwidth di Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa.

Jakarta, Januari 2025
Koordinator Kelompok Evaluasi dan
Pelaporan,
Ditjen Perkeretaapian,

ANDI GUNTUR ASAPA
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198407242007121001

1. Pengembangan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Monitoring Reviu - Daftar Kegiatan

Detail Kegiatan

Detail Monitoring

Nama Kegiatan	: Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Monitoring	: MONITORING SEMESTER II
Status Rekomendasi	: Kegiatan Dapat Dilanjutkan
Nilai Kontrak	: 1,319,179,500
Nama Vendor	: PT. METANOVA INFROMATIKA
Realisasi Waktu Pelaksanaan	: 15 Mei 2024 s/d 10 Desember 2025
Teknologi Yang Digunakan	: Bahasa Pemrograman : JavaScript Framework : Express JS 4.18.2 & React JS 18.0.2 Webserver : NGINX 1.24.0 Database : Postgre SQL 12.15 Sistem Operasi : Rocky Linux 9
Alamat Domain	: https://dika.dephub.go.id/
Source Code Aplikasi	:
Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: 1. Terkait dengan SPBE, pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan KM 112 Tahun 2022. 2. Ketentuan terkait RITIK Kemenhub telah digunakan dalam KAK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 4. Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat integrasi data dengan sistem informasi lainnya sehingga menggunakan standar data, memenuhi kaidah interoperabilitas data termasuk menggunakan kode referensi/data induk. Selain itu, pelaksanaan kegiatan menggunakan web service untuk integrasi dari data master yang dihasilkan/diproduksi unit terkait untuk dapat berbagi pakai. 5. Pengembangan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian telah menggunakan teknologi cloud Alfresco, Sistem Operasi Rocky Linux versi terkini 9 dan didukung dengan teknologi bahasa pemrograman, framework, database versi terbaru sebagai bentuk peningkatan keamanan aplikasi. 6. Dalam pelaksanaan kegiatan sudah berkoordinasi dan berpedoman pada prinsip SDLC sesuai KP 536 Tahun 2016 diantaranya dalam proses integrasi dan penggunaan data center Kemenhub. Selanjutnya diakhir kegiatan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian akan dilakukan tahapan User Acceptance Test (UAT) dan Penetration Testing yang akan berkoordinasi dengan Pusdatin Perhubungan. 7. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan pengelolaan terkait Aset Tak Berwujud bidang TIK. 8. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023. Progres pekerjaan pada Semester II tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain: a. Integrasi Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian dengan SSO Kemenhub/Hubnet. b. Pengembangan Modul Chat pada Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian. c. Penyusunan SOP Integrasi Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian dengan aplikasi lainnya. d. Operation support dan maintenance issue. e. Peningkatan keamanan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian. f. Menjadikan Portal Aplikasi Dika menjadi SuperApps/Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kendala Pekerjaan	: Tidak ada
Status Pelaksanaan Kegiatan	: Sudah Selesai Dilaksanakan
Status Monitoring	: DISETUJUI
Peta Rencana	: Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian
Arsitektur Proses Bisnis	: Sistem Integrasi Moda Transportasi Perkeretaapian
Arsitektur Layanan	: Layanan Data dan Informasi Publik Perkeretaapian
Arsitektur Data dan Informasi	: Data Internal Bidang Perkeretaapian
Arsitektur Aplikasi	: Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Arsitektur Infrastruktur	: Server Ditjen Perkeretaapian, Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Arsitektur Keamanan	: 1. Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kemenhub 3. KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kemenhub
Pelaksanaan UAT	: Belum dilaksanakan
Pelaksanaan VA	: Belum dilaksanakan
Pelaksanaan Pentest	: Belum dilaksanakan

Diajukan Oleh : VIKI OKISSA SAIFUDIN, S.S.(TD).
Waktu Pengajuan : 2025-01-03 18:34:55

2. Website Ditjen Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Nama Vendor

: CV. TORCHE INDONESIA

Realisasi Waktu Pelaksanaan

: 15 Maret 2024 s/d 10 September 2024

Teknologi Yang Digunakan

: Bahasa Pemrograman : PHP 8.1.27 Framework : Yii2 Webserver : Apache 2.4.52 Database : MySQL 8.1 Sistem Operasi : Ubuntu 22.04

Alamat Domain

: https://djka.dephub.go.id/

Source Code Aplikasi

: Ya, jika source code aplikasi sudah diberikan oleh pengembang

Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi

: 1. Terkait dengan SPBE, pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan KM 112 Tahun 2022. 2. Ketentuan terkait RITIK Kemenhub telah digunakan dalam KAK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 4. Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat integrasi data dengan sistem informasi lainnya sehingga menggunakan standar data, memenuhi kaidah interoperabilitas data termasuk menggunakan kode referensi/data induk. Website Ditjen Perkeretaapian telah menyediakan API untuk integrasi/berbagi data. 5. Proses pengelolaan Website Ditjen Perkeretaapian telah menggunakan teknologi Sistem Operasi Ubuntu versi terkini 22 dan didukung dengan teknologi bahasa pemrograman, framework, database versi terbaru sebagai bentuk peningkatan keamanan aplikasi. 6. Dalam pelaksanaan kegiatan sudah berkoordinasi dan berpedoman pada prinsip SDLC sesuai KP 536 Tahun 2016 diantaranya dalam proses integrasi dan penggunaan data center Kemenhub. Selanjutnya diakhir kegiatan Website Ditjen Perkeretaapian akan dilakukan tahapan User Acceptance Test (UAT) dan Penetration Testing yang akan berkoordinasi dengan Pusdatin Perhubungan. 7. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan pengelolaan terkait Aset Tak Berwujud bidang TIK. 8. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023, Progres pekerjaan pada Semester II tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain: a. Integrasi Website Ditjen Perkeretaapian dengan SSO Kemenhub/Hubnet. b. Recovery pasca insiden serangan cyber. c. Memperbaiki bug dan penyempurnaan fitur pada Website Ditjen Perkeretaapian. d. Progres dwibahasa terhadap konten Website Ditjen Perkeretaapian. e. Menindaklanjuti hasil Vulnerability Assessment (VA). f. Redesign tampilan halaman utama Website Ditjen Perkeretaapian.

Kendala Pekerjaan

: Tidak ada

Status Pelaksanaan Kegiatan

: Sudah Selesai Dilaksanakan

Status Monitoring

: DiSETUJUI

Peta Rencana

: Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Arsitektur Proses Bisnis

: Sistem Integrasi Moda Transportasi Perkeretaapian

Arsitektur Layanan

: Layanan Data dan Informasi Publik Perkeretaapian

Arsitektur Data dan Informasi

: Data publik bidang perkeretaapian

Arsitektur Aplikasi

: Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Arsitektur Infrastruktur

: Server Ditjen Perkeretaapian, Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Arsitektur Keamanan

: 1. Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kemenhub 3. KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kemenhub

Pelaksanaan UAT

: Belum dilaksanakan

Pelaksanaan VA

No	Tanggal	Judul	Keterangan	File VA	Berita Acara
1	2024-05-29	Laporan Vulnerability Assessment	Laporan Vulnerability Assessment (VA) ke-1		-
2	2024-06-18	Laporan Vulnerability Assessment	Laporan Vulnerability Assessment (VA) ke-2		-
3	2024-07-09	Laporan Vulnerability Assessment	Laporan Vulnerability Assessment (VA) ke-3		-
4	2024-07-16	Laporan Vulnerability Assessment	Laporan Vulnerability Assessment (VA) ke-4		-

Pelaksanaan Pentest

: Belum dilaksanakan

3. Reviu *Roadmap* TIK Ditjen Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Monitoring Reviu - Daftar Kegiatan

Detail Kegiatan

Detail Monitoring

Nama Kegiatan	: Reviu Roadmap TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Monitoring	: MONITORING SEMESTER II
Status Rekomendasi	: Kegiatan Dapat Dilanjutkan
Nilai Kontrak	: 794,316,000
Nama Vendor	: PT. TRI CIPTA INTERNASIONAL
Realisasi Waktu Pelaksanaan	: 30 Mei 2024 s/d 25 Desember 2024
Kesesuaian Output	: 1. Penyusunan Reviu Roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sudah selaras dengan rekomendasi Pusdatin berpedoman pada Perpres 95 Tahun 2018, KM 112 Tahun 2022, RITIK Kemenhub 2020-2024 dan merupakan pendetilan dari Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 2. Progres pekerjaan pada Semester II tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain : - Melakukan analisa kebutuhan pengembangan TIK termasuk melakukan benchmarking lanjutan dengan BUPP/BUPS, analisa kebutuhan strategi dan tahapan dengan mempertimbangkan rumusan daftar risiko serta rumusan baseline dan target arsitektur TIK - Melakukan perumusan tata kelola SPBE di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa kerangka kerja arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan arsitektur TIK Kemenhub. - Melakukan perumusan manajemen SPBE di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SOM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE. - Melakukan perumusan kebijakan, strategi dan tahapan (grand design) penyelenggaraan SPBE Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk kebijakan penyederhanaan aplikasi dengan pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai integrator dan Super Apps yang dimanfaatkan oleh stakeholder perkeretaapian. - Melakukan perumusan standarisasi teknologi dan framework sistem TIK guna membangun ekosistem aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk standar interoperabilitas dan integrasi data baik untuk aplikasi internal dan eksternal (stakeholders) di bidang perkeretaapian. - Melakukan perumusan target kinerja TIK, program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan/pengembangan/pengelolaan TIK pada periode 2025-2029. - Merumuskan panduan/SOP penerapan kebijakan dan layanan dalam penyelenggaraan SPBE dengan mengacu arsitektur TIK meliputi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur serta keamanan informasi di lingkungan DJKA.
Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: 1. Terkait dengan SPBE, pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan KM 112 Tahun 2022. 2. Ketentuan terkait RITIK Kemenhub telah digunakan dalam KAK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. 3. Reviu Roadmap TIK disusun mengacu/mendetil dari Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan.
Kendala Pekerjaan	: Tidak ada
Status Pelaksanaan Kegiatan	: Sudah Selesai Dilaksanakan
Status Monitoring	: DISETUJUI
Peta Rencana	: Penyusunan Regulasi di Bidang Perkeretaapian
Arsitektur Proses Bisnis	: Sistem Integrasi Moda Transportasi Perkeretaapian
Arsitektur Layanan	: Layanan Data dan Informasi Publik Perkeretaapian

Diajukan Oleh : VIKI OKISSA SAIJUDIN, S.S.T(TD).

Waktu Pengajuan : 2025-01-03 18:25:10

4. Pembaruan Aplikasi ANSYS Dalam Rangka Pelaksanaan Rancang Bangun Sarana Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Monitoring Reviu - Daftar Kegiatan

Detail Kegiatan

Detail Monitoring

Nama Kegiatan	: Pembaruan Aplikasi ANSYS Dalam Rangka Pelaksanaan Rancang Bangun Sarana Perkeretaapian
Monitoring	: MONITORING SEMESTER II
Status Rekomendasi	: Kegiatan Dapat Dilanjutkan
Nilai Kontrak	: 0
Nama Vendor	:
Realisasi Waktu Pelaksanaan	:
Teknologi Yang Digunakan	:
Alamat Domain	:
Source Code Aplikasi	:
Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	:
Kendala Pekerjaan	: Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena pagu anggaran tahun 2024 mengalami Automatic Adjustment yang menyebabkan anggaran Pembaruan Aplikasi ANSYS Dalam Rangka Pelaksanaan Rancang Bangun Sarana Perkeretaapian ditiadakan
Status Pelaksanaan Kegiatan	: Belum Selesai Dilaksanakan
Status Monitoring	: DISETUJUI
Peta Rencana	: Software ANSYS
Arsitektur Proses Bisnis	: Persetujuan rancang bangun dan rekayasa sarana
Arsitektur Layanan	: Layanan Pengawasan Bidang Sarana Perkeretaapian
Arsitektur Data dan Informasi	: Data Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
Arsitektur Aplikasi	: Ansys
Arsitektur Infrastruktur	:
Arsitektur Keamanan	: 1) Standar Audit SPBE yang diterbitkan BSSN/BPPT sesuai standar Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE; 2) Kepmenhub nomor KP.64 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Kemenhub
Pelaksanaan LIAT	: Belum dilaksanakan
Pelaksanaan VA	: Belum dilaksanakan
Pelaksanaan Pentest	: Belum dilaksanakan

Diajukan Oleh : AMIKO RAHMAYANI
Waktu Pengajuan : 2025-01-02 10:37:31

5. Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Monitoring Reviu - Daftar Kegiatan

Detail Kegiatan

Detail Monitoring

Nama Kegiatan	: Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
Monitoring	: MONITORING SEMESTER II
Status Rekomendasi	: Kegiatan Dapat Dilanjutkan
Nilai Kontrak	: 98.900.000
Nama Vendor	: PT. TRI GIITA INTERNASIONAL
Realisasi Waktu Pelaksanaan	: 21 Februari 2024 s/d 21 Juni 2024
Teknologi Yang Digunakan	: Aplikasi yang dikembangkan memiliki spesifikasi sebagai berikut: Basis Aplikasi: Web Bahasa Pemrograman: PHP Framework: Laravel Apache Web Server Basis Data: MySQL OS: Linux
Alamat Domain	: sinaka.djka.kemendhub.go.id
Source Code Aplikasi	: -
Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: 1. Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian ini telah mengacu pada peraturan dan pedoman perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Perhubungan; 2. Pemeliharaan aplikasi ini sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan; 3. Telah dilakukan corrective maintenance ketika ditemukan error atau terjadi gangguan sistem pada aplikasi; 4. Telah ditambahkan otorisasi user untuk melihat informasi tertentu pada aplikasi ini; 5. Telah menerapkan fitur Single Sign On (SSO) untuk pegawai yang terintegrasi dengan portal DJKA, namun perlu dilakukan penyesuaian kembali agar terintegrasi dengan SSO Hubnet yang dikembangkan oleh Pusdatin; 6. Telah dilakukan uji coba pada server dev untuk terintegrasi dengan aplikasi penetapan identitas sarana perkeretaapian dan aplikasi milik Balai Pengujian Perkeretaapian; 7. Telah dilakukan ITSA oleh BSSN dan temuan hasil ITSA telah di tindaklanjuti; 8. Telah dilakukan Vulnerability Assessment oleh Pusdatin dan temuan pada hasil Vulnerability Assessment telah di remediasi pada tanggal 12 Juli 2024.
Kendala Pekerjaan	: Penanganan kendala tidak dapat diselesaikan karena keterbatasan SDM
Status Pelaksanaan Kegiatan	: Belum Selesai Dilaksanakan
Status Monitoring	: DISETUJUI
Peta Rencana	: Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
Arsitektur Proses Bisnis	: Sertifikasi Kelaikan sarana (Pengujian sarana perkeretaapian)
Arsitektur Layanan	: Layanan Pengawasan Bidding Sarana Perkeretaapian
Arsitektur Data dan Informasi	: Data Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
Arsitektur Aplikasi	: Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
Arsitektur Infrastruktur	: Server Dijen Perkeretaapian, Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
Arsitektur Keamanan	: 1. Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 3. KM 107 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Pelaksanaan UAT	: Belum dilaksanakan
Pelaksanaan VA	: Belum dilaksanakan
Pelaksanaan Pentest	: Belum dilaksanakan

Diajukan Oleh : AMIKO RAHMAYANI
Waktu Pengajuan : 2025-01-02 10:33:22

6. Penyusunan Database Perlintasan secara Digital

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Monitoring Reviu - Daftar Kegiatan

Detail Kegiatan

Detail Monitoring

Nama Kegiatan	: Penyusunan Database Perlintasan secara Digital
Monitoring	: MONITORING SEMESTER II
Status Rekomendasi	: Kegiatan Dapat Dilanjutkan
Nilai Kontrak	: 965.922.000
Nama Vendor	: PT. ARDI WIDYA UTAMA
Realisasi Waktu Pelaksanaan	: 20 Mei 2024 s/d 20 Desember 2024
Teknologi Yang Digunakan	: 1. Menggunakan PHP Versi 8.2.20 2. Menggunakan Framework Laravel 3. Menggunakan google maps sebagai SIG (Sistem Informasi Geografis) untuk Pemetaan Perlintasan sebidang
Alamat Domain	: masih dalam tahap UAT, VA, dan Pentest
Source Code Aplikasi	: Ya, jika source code aplikasi sudah diberikan oleh pengembang
Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: Penyusunan Database Perlintasan Secara Digital akan mengacu pada Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM 112 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Penyusunan Database Perlintasan Secara Digital akan mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM Nomor 150 Tahun 2021 tentang tata kelola data di lingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga tidak terjadi double data antar lintas Direktorat Teknis pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Penyusunan Database Perlintasan Secara Digital menggunakan Metode SDLC (System Development Life Cycle) sesuai dengan KP 536 Tahun 2015 tentang panduan Teknis Penerapan System Development Life Cycle Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM 107 Tahun 2023 tentang kebijakan dan standar sistem manajemen keamanan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Pengujian Database Perlintasan Secara digital akan dilakukan di akhir pekerjaan dan akan dilakukan test UAT, SIT, VA, dan Penetration Testing (Pentest)
Kendala Pekerjaan	: 1. Saat ini sedang dilaksanakan Test UAT, selanjutnya akan dilaksanakan VA Test serta Penetration Testing (Pentest); 2. Untuk alamat domain masih belum diberikan dikarenakan UAT, VA, dan Pentest masih sedang berjalan
Status Pelaksanaan Kegiatan	: Sudah Selesai Dilaksanakan
Status Monitoring	: DISETUJUI
Peta Rencana	: Database Perlintasan Secara Digital
Arsitektur Proses Bisnis	: Sistem Integrasi Moda Transportasi Perkeretaapian
Arsitektur Layanan	: Layanan Data dan Informasi Publik Perkeretaapian
Arsitektur Data dan Informasi	: Data Perlintasan sebidang
Arsitektur Aplikasi	: Penyusunan Database Perlintasan Secara Digital
Arsitektur Infrastruktur	: Server Dijen Perkeretaapian, Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Arsitektur Keamanan	: Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Perhubungan KM 107 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Standar SMK di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Pelaksanaan UAT	: Belum dilaksanakan
Pelaksanaan VA	: Belum dilaksanakan
Pelaksanaan Pentest	: Belum dilaksanakan

7. Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Monitoring Reviu - Daftar Kegiatan

Detail Kegiatan

Detail Monitoring

Nama Kegiatan	: Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian
Monitoring	: MONITORING SEMESTER II
Status Rekomendasi	: Kegiatan Dapat Dilanjutkan
Nilai Kontrak	: 447.552.000
Nama Vendor	:
Realisasi Waktu Pelaksanaan	: 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
Teknologi Yang Digunakan	: pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran terkena optimalisasi untuk keperluan Kegiatan prioritas yang ada pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Alamat Domain	: pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran terkena optimalisasi untuk keperluan Kegiatan prioritas yang ada pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Source Code Aplikasi	: -
Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran terkena optimalisasi untuk keperluan Kegiatan prioritas yang ada pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Kendala Pekerjaan	: pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran terkena optimalisasi untuk keperluan Kegiatan prioritas yang ada pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Status Pelaksanaan Kegiatan	: Belum Selesai Dilaksanakan
Status Monitoring	: DISETUJUI
Peta Rencana	: Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian
Arsitektur Proses Bisnis	: Sertifikasi Sumber Daya Manusia Perkeretaapian
Arsitektur Layanan	: Layanan Data dan Informasi Publik Perkeretaapian
Arsitektur Data dan Informasi	: Data Sertifikasi SDM Perkeretaapian
Arsitektur Aplikasi	: Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian
Arsitektur Infrastruktur	: Server Dijen Perkeretaapian Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Arsitektur Keamanan	: Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kemenhub KM 107 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Standar SMK di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Pelaksanaan UAT	: Belum dilaksanakan
Pelaksanaan VA	: Belum dilaksanakan
Pelaksanaan Pentest	: Belum dilaksanakan

Diajukan Oleh : ADITYA PRANATAMA, S.Kom.
Waktu Pengajuan : 2025-01-03 23:12:57

8. Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Monitoring Reviu - Daftar Kegiatan

Detail Kegiatan

Detail Monitoring

Nama Kegiatan	: Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian
Monitoring	: MONITORING SEMESTER II
Status Rekomendasi	: Kegiatan Dapat Dilanjutkan
Nilai Kontrak	: 2.420.617.000
Nama Vendor	:
Realisasi Waktu Pelaksanaan	: 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
Teknologi Yang Digunakan	: Pekerjaan tidak dapat dilakukan dikarenakan Kegiatan terkena Automatic Adjustment (AA)
Alamat Domain	: Pekerjaan tidak dapat dilakukan dikarenakan Kegiatan terkena Automatic Adjustment (AA)
Source Code Aplikasi	: -
Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: Pekerjaan tidak dapat dilakukan dikarenakan Kegiatan terkena Automatic Adjustment (AA)
Kendala Pekerjaan	: Pekerjaan tidak dapat dilakukan dikarenakan Kegiatan terkena Automatic Adjustment (AA)
Status Pelaksanaan Kegiatan	: Belum Selesai Dilaksanakan
Status Monitoring	: DISETUJUI
Peta Rencana	: Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian
Arsitektur Proses Bisnis	: Audit dan Inspeksi Keselamatan
Arsitektur Layanan	: Layanan Pengawasan Bidang Keselamatan Perkeretaapian
Arsitektur Data dan Informasi	: Data Audit Dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian
Arsitektur Aplikasi	: Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian
Arsitektur Infrastruktur	:
Arsitektur Keamanan	:
Pelaksanaan UAT	: Belum dilaksanakan
Pelaksanaan VA	: Belum dilaksanakan
Pelaksanaan Pentest	: Belum dilaksanakan

Diajukan Oleh : ADITYA PRANATAMA, S.Kom.
Waktu Pengajuan : 2025-01-03 23:12:57

9. Management Studio Geodatabase Lanjutan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Monitoring Reviu - Daftar Kegiatan

Detail Kegiatan

Detail Monitoring

Nama Kegiatan	: Management Studio Geodatabase Lanjutan
Monitoring	: MONITORING SEMESTER I
Status Rekomendasi	: Kegiatan Dapat Dilanjutkan
Nilai Kontrak	: 0
Nama Vendor	:
Realisasi Waktu Pelaksanaan	:
Teknologi Yang Digunakan	:
Alamat Domain	:
Source Code Aplikasi	:
Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	:
Kendala Pekerjaan	: Anggaran diblokir dari DJA, Kemenku karena terdampak Automatic Adjustment (AA)
Status Pelaksanaan Kegiatan	: Belum Selesai Dilaksanakan
Status Monitoring	: DISETUIJ
Peta Rencana	: Management Service Studio Geodatabase Virtual
Arsitektur Proses Bisnis	: Basis Perkeretaapian
Arsitektur Layanan	: Layanan Data dan Informasi Publik Perkeretaapian
Arsitektur Data dan Informasi	: Data geospasial rencana pengembangan jaringan jalur kereta api
Arsitektur Aplikasi	: Management Studio Geodatabase Lanjutan
Arsitektur Infrastruktur	: Server Dijen Perkeretaapian, Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Arsitektur Keamanan	: 1. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan 3. KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Pelaksanaan UAT	: Belum dilaksanakan
Pelaksanaan VA	: Belum dilaksanakan
Pelaksanaan Pentest	: Belum dilaksanakan

10. Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Online

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Monitoring Reviu - Daftar Kegiatan

Detail Kegiatan

Detail Monitoring

Nama Kegiatan	: PEMELIHARAAN APLIKASI PERIZINAN ONLINE												
Monitoring	: MONITORING SEMESTER I												
Status Rekomendasi	: Kegiatan Dapat Dilanjutkan												
Nilai Kontrak	: 264.501.900												
Nama Vendor	: PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL												
Realisasi Waktu Pelaksanaan	: 09 Juli 2024 s/d 31 Desember 2024												
Teknologi Yang Digunakan	: Web Server : apache Database : mariaDB Bahasa Program : PHP 8 Protokol : HTTPS SSL												
Alamat Domain	: https://izin.djka.dephub.go.id/												
Source Code Aplikasi	:												
Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: 1. Terkait dengan SPBE, pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan KM 112 Tahun 2022; 2. Ketentuan terkait RITK Komenhub telah digunakan dalam KAK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan; 3. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan; 4. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan pengelolaan terkait Aset Tak Berwujud bidang TIK; 5. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023.												
Kendala Pekerjaan	: pekerjaan masih berlangsung hingga waktu akhir pelaksanaan												
Status Pelaksanaan Kegiatan	: Belum Selesai Dilaksanakan												
Status Monitoring	: DISETUIJ												
Peta Rencana	: Aplikasi Perizinan Online												
Arsitektur Proses Bisnis	: Pelayanan Angkutan KA												
Arsitektur Layanan	: Layanan Data dan Informasi Publik Perkeretaapian												
Arsitektur Data dan Informasi	: Data Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian												
Arsitektur Aplikasi	: Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Online												
Arsitektur Infrastruktur	: Server Dijen Perkeretaapian, Apilis												
Arsitektur Keamanan	: Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik												
Pelaksanaan UAT	<table><thead><tr><th>No</th><th>Tanggal</th><th>Judul</th><th>Keterangan</th><th>File UAT</th><th>Berita Acara</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2024-01-30</td><td>User Acceptance Test Pengembangan Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Online</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	No	Tanggal	Judul	Keterangan	File UAT	Berita Acara	1	2024-01-30	User Acceptance Test Pengembangan Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Online			
No	Tanggal	Judul	Keterangan	File UAT	Berita Acara								
1	2024-01-30	User Acceptance Test Pengembangan Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Online											
Pelaksanaan VA	<table><thead><tr><th>No</th><th>Tanggal</th><th>Judul</th><th>Keterangan</th><th>File VA</th><th>Berita Acara</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2024-01-08</td><td>Vulnerability Assessment Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Online</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	No	Tanggal	Judul	Keterangan	File VA	Berita Acara	1	2024-01-08	Vulnerability Assessment Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Online			
No	Tanggal	Judul	Keterangan	File VA	Berita Acara								
1	2024-01-08	Vulnerability Assessment Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Online											
Pelaksanaan Pentest	<table><thead><tr><th>No</th><th>Tanggal</th><th>Judul</th><th>Keterangan</th><th>File Pentest</th><th>Berita Acara</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2022-11-20</td><td>Laporan Uji Penetrasi Keamanan Web Aplikasi</td><td></td><td></td><td>-</td></tr></tbody></table>	No	Tanggal	Judul	Keterangan	File Pentest	Berita Acara	1	2022-11-20	Laporan Uji Penetrasi Keamanan Web Aplikasi			-
No	Tanggal	Judul	Keterangan	File Pentest	Berita Acara								
1	2022-11-20	Laporan Uji Penetrasi Keamanan Web Aplikasi			-								

11. Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Monitoring Reviu - Daftar Kegiatan

Detail Kegiatan

Detail Monitoring

Nama Kegiatan	: Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang
Monitoring	: MONITORING SEMESTER I
Status Rekomendasi	: Kegiatan Dapat Dilanjutkan
Nilai Kontrak	: 1,548,450,000
Nama Vendor	: PT. BINTANG USAHA SEJAHTERA
Realisasi Waktu Pelaksanaan	: 30 Januari 2024 s/d 24 Desember 2024
Teknologi Yang Digunakan	: 1. Kabel CCTV RG-59 + Power 1 Roll 300M; 2. Paket Cleaning Kamera Kit; 3. BNC(Bayonet Neil Concelman) Connector; 4. LS CABLE Modular Plug RJ45 Cat.6, 100 pcs; 5. Kabel UPT cat.5e, 1 roll/300 m; 6. Kamera Body (Outdoor) Fix Camera; 7. Kamera Speed dome (700 IV); 8. DVR (4 dan 8 channel); 9. Monitor; 10. Maintenance aplikasi server; 11. Maintenance web server.
Kesesuaian Spesifikasi Teknis	: sudah sesuai dengan spesifikasi teknis
Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: 1. Terkait dengan SPBE, pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan KM 112 Tahun 2022; 2. Ketentuan terkait RITIK Kemenhub telah digunakan dalam KAK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan; 3. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan; 4. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan pengelolaan terkait Aset Tak Berwujud bidang TIK. 5. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023.
Kendala Pekerjaan	: Kegiatan masih berlangsung hingga akhir waktu pelaksanaan
Status Pelaksanaan Kegiatan	: Belum Selesai Dilaksanakan
Status Monitoring	: DISETJUI
Peta Rencana	: Alat Pemantauan Di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang
Arsitektur Proses Bisnis	: Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian
Arsitektur Layanan	: Layanan Pengawasan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Arsitektur Aplikasi	: Penyediaan Alat Pemantauan Stasiun dan Perlintasan Sebidang
Arsitektur Infrastruktur	: Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang
Arsitektur Keamanan	: Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kemenhub KM 107 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Standar SMK di Lingkungan Kementerian Perhubungan

12. Bandwidth dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Monitoring Reviu - Daftar Kegiatan

Detail Kegiatan

Detail Monitoring

Nama Kegiatan	: BANDWIDTH DAN JARINGAN PEMANTAUAN PERJALANAN KERETA API
Monitoring	: MONITORING SEMESTER I
Status Rekomendasi	: Kegiatan Dapat Dilanjutkan
Nilai Kontrak	: 2,321,000,000
Nama Vendor	: PT. PHATRIA INTI PERSADA
Realisasi Waktu Pelaksanaan	: 01 Februari 2024 s/d 31 Desember 2024
Teknologi Yang Digunakan	: Aplikasi : IVMS
Kesesuaian Spesifikasi Teknis	: sesuai dengan spesifikasi teknis
Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: 1. Diwajibkan mengacu pada a. Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) b. KM nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, c. peraturan menteri keuangan nomor 239/PMK.01-2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 233/PMK. 01/2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK di lingkungan kementerian keuangan 2. Ketentuan terkait RITIK Kemenhub telah digunakan dalam KAK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, 3. berkoordinasi dengan pustikom di tahun depan tidak ada nya clearance dan sudah menjadi kegiatan rutin 4. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan pengelolaan terkait Aset Tak Berwujud bidang TIK. 5. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023.
Kendala Pekerjaan	: Pekerjaan masih berlangsung hingga akhir waktu pelaksanaan
Status Pelaksanaan Kegiatan	: Belum Selesai Dilaksanakan
Status Monitoring	: DISETJUI
Peta Rencana	: Bandwidth dan jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api
Arsitektur Proses Bisnis	: Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian
Arsitektur Layanan	: Layanan Pengawasan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Arsitektur Aplikasi	: Penyediaan Bandwidth
Arsitektur Infrastruktur	:
Arsitektur Keamanan	: 1. Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kemenhub 3. KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kemenhub



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5

PERSENTASE PEMENUHAN PUBLIKASI DITJEN PERKERETAAPIAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemhub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 47/KI-3 / 1 / 2025

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari : Kepala Bagian Hukum
Hal : Data Dukung penyusunan Laporan Kinerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2024
Tanggal : 17 Januari 2025

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.205/1/1/K1/DJKA/2025 tanggal 3 Januari 2025 perihal Undangan Rapat Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja, disampaikan bahwa Bagian Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung capaian indikator kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yaitu presentase capaian publikasi sosial media, capaian publikasi oleh media online, presentase capaian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan yang sedang dalam pembahasan ataupun yang akan dibahas, presentase kegiatan pendampingan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan data dukung capaian kinerja Triwulan III dari Bagian Hukum untuk mendukung indikator kinerja dimaksud.

Atas perkenan arahan dan petunjuk lanjut diucapkan terima kasih.

Zen Hadiano, S. H., M. H.
NIP 197907042005011005

Tembusan :
Kepala Bagian Perencanaan

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 47/41.3/1/2025
 Tanggal : 12 JANUARI 2025

A. Rekapitulasi Siaran Pers di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian Periode Triwulan IV Tahun 2024

No	Siaran Pers	Judul
1.	15/SP/10/DJKA	Indonesia Promosikan Kemajuan Perkeretaapian di Global Rail Transport Infrastructure & Exhibition 2024
2.	16/SP/11/DJKA	DJKA Raih Penghargaan Internasional untuk Proyek LRT Jabodebek*
3.	17/SP/12/DJKA2024	Pemerintah Fasilitas Angkutan Sepeda Motor Gratis dengan Kereta Api Selama Nataru 2024

B. Rekapitulasi Publikasi Sosial Media di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian Periode Triwulan IV Tahun 2024

No	Uraian	Judul
1.	Rekapitulasi Publikasi pada sosial media Ditjen Perkeretaapian	Jumlah postingan sosial media 60 konten publikasi
2.	Rekapitulasi publikasi oleh media online	1. Publikasi Pembangunan Simpang Joglo kerjasama dengan Media Kompas.com; 2. Publikasi kegiatan mudik motor gratis Nataru dengan Wartakota, CNN, Sonora FM, Tirta, Nusantara TV, dan Tribun News; 3. Kerjasama dengan KOL publikasi mudik motor gratis Nataru dengan media B-TV; 4. Kegiatan DJKA Maskot Competition bekerjasama dengan Kompas.com.

ditjenperkeretaapian

Follow

Message



3,639 posts

93.4K followers

138 following

DitjenPerkeretaapian

Government organization

Perkeretaapian meningkatkan mobilitas, aksesibilitas & konektivitas.

Akun resmi Ditjen Perkeretaapian.

@djka.dephub.go.id

Followed by yudyasadditananda, raka_yanuar + 29 more



FAQ Motis 20...



Himbauan



PSBB



Quote



COVID-19



WAWASAN

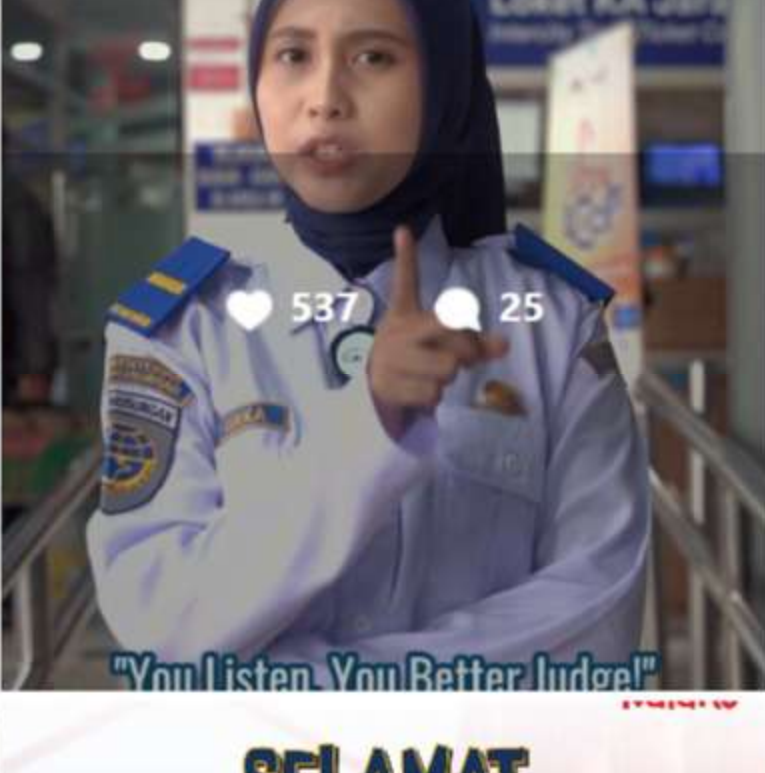
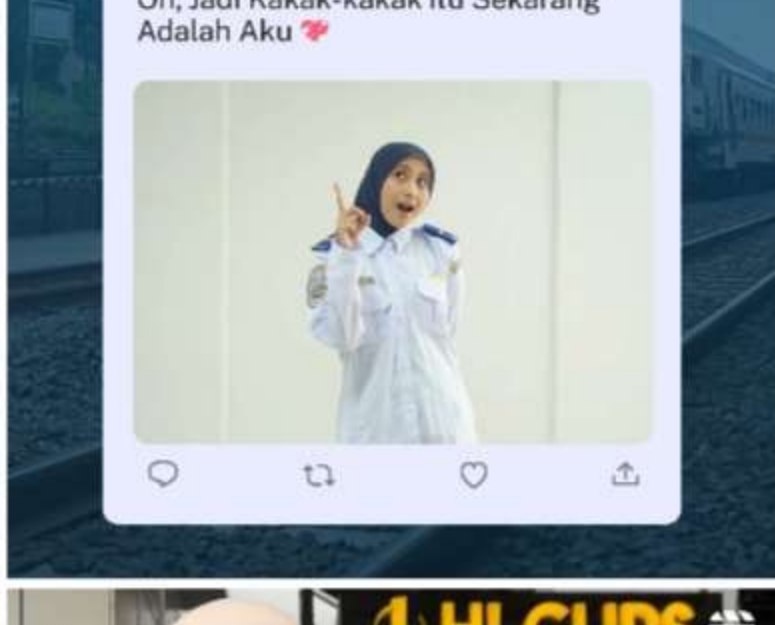
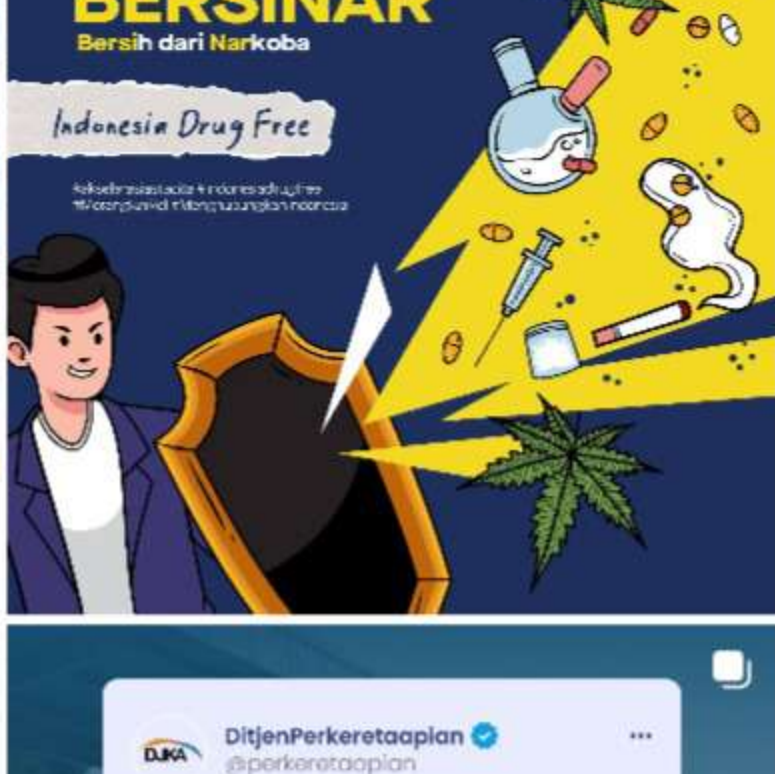


GIVEAWAY

POSTS

REELS

TAGGED





DJKA

Calendar Plan

2024

Calendar Plan Januari



Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
1	2	3	4	5	6	7
Ucapan Tahun Baru 2024	Ucapan terimakasih kepada masyarakat karena telah melaksanakan masa angkutan natal dan tahun baru 2023/2024	Infografis Kegiatan strategis DJKA 2024	Berapa Km sih jalur KA terbangun di tahun 2023 ??	Kuis DJKA / Ucapan duka laka KA	Apa Itu Sintelis Pada KA?	
8	9	10	11	12	13	14
Update jumlah kecelakaan kereta api selama tahun 2023/ Update pembanguna jalur KA Kiaracondong-Cicalengka	Yuk Flasback "stasiun baru" di tahun 2023 apa aja yah?	Infografis Update apa saja proyek PSN DJKA Tahun 2024	Jembatan Cikacepit jembatan kereta api non aktif teroanjang di indonesia	Apasih kuliner favorit kalian kalau lagi naik kereta api ?	TTS DJKA	
15	16	17	18	19	20	21
Postingan fixed blok (bahan udh pernah dibikin tp blm diposting)	Moving Block Pada LRT	Update proyek perkeretaapian	Stasiun Larangan, tempat persilangan darurat	Pesona stasiun LRT Palembang	Rangkaian KA Terpanjang di Indonesia	
22	23	24	25	26	27	28
Abar Kereta Api. Apa itu Abar?	Jenis-jenis Rem Kereta Api	Tetap Aman Dengan Peralatan Keselamatan Pada KA	Awas! Ada Lori Pengecek Mau Melintas!	KA Rute terpendek ada di Aceh	Hari Memompa ASI (Ruang Menyusui/ Laktasi di Stasiun KA)	
29	30	31				
Imbauan Keselamatan (Dahulukan penumpang turun)	Ragam sarana kereta untuk perbaikan prasarana perkeretaapian	Komik				

Calendar Plan Februari



Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
			1	2	3	4
			Pesona Stasiun Plabuan di Pinggir Pantai	Integrasi Feeder LRT Sumsel	KUIS DJKA	-
5	6	7	8	9	10	11
Sintelis (Sinyal, Telekomunikasi, Listrik) pada KA	Video perbandingan naik LRT Jabodebek vs Naik Mobil	Update Pembangunan Kiracondong-Cicalengka	Greeting Isra Miraj	Greeting Hari Pers	Greeting Imlek	-
12	13	14	15	16	17	18
Reminder promo LRT Jabodebek masih berlangsung	Update Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang KA JGMS	Fixed Block pada KA/Update LRT Provinsi Sumsel	Pembangunan Jalur KA Padang Pariaman	Update Pembangunan MRT Fase 2A	TTS DJKA	-
19	20	21	22	23	24	25
Moving Block pada LRT Jabodebek	Greeting Hari Pekerja Nasional	Video Hari Peduli Sampah Nasional	Berapa ya jumlah penumpang yang diangkut dalam 1 gerbong?	Integrasi Antarmoda di Stasiun Paledang	Video 6 Kereta Perintis	-
26	27	28				
Update Pembangunan LRT Fase 1B	Video Imbauan Keselamatan (Wawancara pengunjung kereta ttg Keselamatan di Stasiun)	KOMIK				

Calendar Plan Maret



Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
				1	2	3
				Kenapa harus ikut motis? Syarat Motis & Jalur Motis	Periode & Lokasi daftar Motis	-
4	5	6	7	8	9	10
Jadwal Motis dibuka	Promo tarif LRT Jabodebek diperpanjang	Update MRT Fase 2A / LRT Fase 1B	Update LRT Provinsi Sumsel	Integrasi LRT Jabodebek	Hari Perempuan Nasional	-
11	12	13	14	15	16	17
Greeting hari Nyepi	KUIS DJKA	Video Jaga kebersihan di LRT	Video Ngabuburit naik MRT Jakarta, Bisa Kemana Aja ya?	TTS DJKA	Video Reminder pendaftaran Motis segera di tutup	-
18	19	20	21	22	23	24
Pendaftaran Motis ditutup	Berapa ya jumlah penumpang yang diangkut dalam 1 gerbong?	Syarat Naik KA untuk Mudik 2024	Jangan Lakukan Ini Saat Ngabuburit! / Jangan Lakukan Ini Saat Mudik Naik KA!	Buka Puasa di Kereta Restorasi	Video STMJ	-
25	26	27	28	29	30	31
Update Kuota Motis/Stich Video	Aturan Bagasi Kereta Api saat Mudik Lebaran	Integrasi Antarmoda di Stasiun Paledang	Video Limbuan Keselamatan (Wawancara pengunjung kereta ttg Keselamatan di Stasiun) - SKSD	Greeting Wafat Yesus Kristus	-	Greeting Paskah

Reliable

Economical

Liabe

Calendar Plan April



Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
1	2	3	4	5	6	7
5 Stasiun yang melayani kereta Bandara	Reminder daftar motis/ Persiapan DJKA mendukung keamanan dan keselamatan Mudik	Buka Puasa di Kereta Restorasi CTA: Momen mudik mengesankan naik kereta?	Update kuota motis / Info Keberadaan Posko Mudik DJKA	Video Imbauan Barang Bawaan Saat Mudik	Video Imbauan Ketentuan Motor pada program Motis	-
8	9	10	11	12	13	14
Video Huru Hara Saat Mudik	Video Motis di St. Jakarta Gudang	Greeting Lebaran (Konsep Video)	KUIS DJKA	TTS DJKA	1 Kartu untuk berbagai Transportasi. Apa saja ya?	-
15	16	17	18	19	20	21
Reminder H-3 Daftar Motis	Video Wawancara Peserta/Pemudik dengan Motis	Info Posko Mudik DJKA	Motion MOTIS Ditutup	Berapa ya jumlah penumpang yang diangkut dalam 1 gerbong?	Greeting Hari Konsumen Nasional	Greeting Kartini
22	23	24	25	26	27	28
Greeting Hari Bumi	Naik kereta juga ada etika	Greeting Hari Angkutan Nasional	Berbagai Istilah LRT yang perlu kamu tau!	Update Pembangunan Jalur Ganda Kiaracandong - Cicalengka	Video Ngopi Cantik di dekat Stasiun MRT	-
29	30					
Peningkatan Jalur KA antara Maos-Cilacap	Video Kenapa sih harus naik MRT?					

Calendar Plan Mei



Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
		1	2	3	4	5
		Hari Buruh Nasional	Hari Pendidikan Nasional	Long Span pada LRT	Sticth Video	-
6	7	8	9	10	11	12
Update progres pembangunan st tanah abang	Kenalan sama Automatic Train Wash Plant	Update pembangunan simpang joglo	Kenaikan Yesus Kristus	Kenalan Sama Train Attendant LRT Jabodetabek	Video Ngopi Cantik di dekat Stasiun MRT	-
13	14	15	16	17	18	19
Himbauan keselamatan saat akan naik kri waspada celah peron	Inilah Alasan Tak Boleh Makan di Sekitar Peron KA!	Update perkeretaapian di jawa timur	Video Kenapa sih harus naik MRT? (Wawancara pnp)	Seberapa Kuat Suara Klakson Lokomotif?	KUIS DJKA	-
20	21	22	23	24	25	26
Perbedaan LRT Jakarta, Sumsel, Jabodebek	Update Pembangunan LRT (Veldrome - Manggarai)	Video Naik KA jangan egois	Hari raya Waisak	Perbedaan Interchange Station dan Typical Station	TTS DJKA	-
27	28	29	30	31		
Video Himbauan keselamatan	Update Pembangunan MRT Fase 2 (Bundaran HI - Kota)	Hari Lansia Nasional	Revitalisasi stasiun rangkasbitung			

Calendar Plan Juni



Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
					1	2
					Hari lahir pancasila	-
3	4	5	6	7	8	9
Update Pembangunan MRT Fase 2 (Bundaran HI - Kota)	Teknologi U shaped girder	Revitalisasi stasiun rangkasbitung	Teknologi LRB	Perbedaan LRT Jakarta, Jabodebek, dan Sumsel	Teknologi Clamping	-
10	11	12	13	14	15	16
	Video TAP Kartu Jangan Asal	Update Pembangunan Jalur Ganda Kiaracondong-Cicalengka	Teknologi Moving/CBTC	KUIS DJKA	Video SKSD	-
17	18	19	20	21	22	23
Hari Idul adha	Video Pengalaman Seru petugas LRT	Yuk kenali Surabaya Regional Railway Line (SRRL)	Teknologi GOA 3 / Perbedaan Interchange Station dan Typical Station	Video MinKA Jalan-jalan ngopi	Hari ultah Jakarta	-
24	25	26	27	28	29	30
TTS DJKA	Video Himbauan Keselamatan	Hari anti narkoba sedunia	Teknologi SDAS	Update Pembangunan LRT (Veldrome - Manggarai)	Video Tipe Anker	-

Calendar Plan Juli



Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
1	2	3	4	5	6	7
Video Tipe Anker	Automatic Train Washing Plant (ATWP)	Update Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang KA JGMS	Bedanya Interchange Station dan Typical Station	Video WFC Naik Kereta	Macam tenaga penggerak KA	Greeting Tahun Baru Islam
8	9	10	11	12	13	14
Jembatan terpanjang rel kereta api	Mengenal Longspan LRT	Update progres pembangunan st tanah abang	CBTC di LRT	Video Salah Tap Kartu	Kuis DJKA	-
15	16	17	18	19	20	21
SDAS LRT	Electric Multiple Unit (EMU) pada Whoosh	Update Pembangunan LRT (Veldrome - Manggarai)	Dua Emergency Brake pada Whoosh	Imbauan Keselamatan di kereta	Macam tenaga penggerak KA	-
22	23	24	25	26	27	28
MRT/LRT/KRL ramah anak lewat bangku prioritas, KTR	Video Hari anak nasional	Update Pembangunan Jalur Ganda Kiaracondong-Cicalengka	Video Konten cek khodam	Video Alat pijat di kereta dan isi ulang air	TTS DJKA	-
29	30	31				
Video Petugas keamanan perempuan	Video Streetfood Dekat Stasiun?	Update Pembangunan MRT Fase 2A				

Calendar Plan Agustus



Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
			1	2	3	4
			Update Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang KA JGMS	Video Khodam	Macam tenaga penggerak KA	-
5	6	7	8	9	10	11
Hari Dharma Wanita Nasional	Manfaat Double Track pada Rel Kereta Api	Update progres pembangunan st tanah abang	Lima Stasiun Tertua yang Aktif di Indonesia	Persinyalan siemens dan halske manual	Alat Evakuasi Kereta Api, Telescopic Railway Crane	-
12	13	14	15	16	17	18
Update Pembangunan LRT (Veldrome - Manggarai)	Video Jangan Ya Dek Ya! (Imbauan Keselamatan)	Greeting Hari Pramuka	KUIS DJKA	Video Jelang HUT RI	Greeting HUT ke-79 RI	-
19	20	21	22	23	24	25
Genta Kereta Api	Electric Multiple Unit (EMU) pada Whoosh / Video Petugas Perempuan	Update Pembangunan Jalur Ganda Kiaracondong-Cicalengka	Kenapa Kereta Bisa Anjlok?	Kereta Ukur , apaan tuh?	TTS DJKA	-
26	27	28	29	30	31	
Ramcheck dulu sebelum Let's Go!	Video Petugas Perempuan	Update Pembangunan MRT Fase 2A	Batas Maksimal Kecepatan Kereta Api?	Tipe-Tipe Stasiun Penumpang	Video Streetfood dekat stasiun KRL	-

Calendar Plan September



Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
2	3	4	5	6	7	8
Apa yang dilakukan DJKA dalam 10 Tahun?	capaian 10 tahun terkait Keselamatan kinerja sektor transportasi (Kepatuhan aturan)	Greeting hari Pelanggan	capaian 10 tahun terkait Keselamatan kinerja sektor transportasi (Aman naik kereta)	Video Petugas Perempuan	capaian 10 tahun terkait Keselamatan kinerja sektor transportasi (Himbauan Keselamatan)	-
9	10	11	12	13	14	15
capaian 10 tahun terkait Konektivitas kinerja sektor transportasi (Pembangunan infrastruktur perkeretaapian)	capaian 10 tahun terkait Konektivitas kinerja sektor transportasi (Reaktivasi jalur KA)	Batas Maksimal Kecepatan Kereta Api?	capaian 10 tahun terkait Konektivitas kinerja sektor transportasi (Teknologi Perkeretaapian)	capaian 10 tahun terkait Konektivitas kinerja sektor transportasi (Non infrastruktur) / TTS DJKA	Video Tipe Anker	-
16	17	18	19	20	21	22
Greeting Maulid Nabi	Greeting Hari Perhubungan Nasional	Kereta Ukur , apaan tuh?	Video Alat pijat di kereta dan isi ulang air	Persinyalan siemens dan halske manual	Kenapa Kereta Bisa Anjlok?	-
23	24	25	26	27	28	29
Alat Evakuasi Kereta Api, Telescopic Railway Crane	Video Cerita inspiratif pekerja sektor Transportasi (anak muda/petugas)	Electric Multiple Unit (EMU) pada Whoosh	Lima Stasiun Tertua yang Aktif di Indonesia	Video Streetfood dekat stasiun KRL	Greeting Hari Kereta Api	-
30						
Video infrastruktur Kereta ramah disabilitas						

Calendar Plan Oktober



Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
	1	2	3	4	5	6
	Hari Kesaktian Pancasila	Hari Batik Nasional	Sekolah Perkeretaapian	Video Masinis pertama di Indonesia	Emisi yang dikeluarkan saat naik KA	-
7	8	9	10	11	12	13
capaian 10 tahun terkait Konektivitas kinerja sektor transportasi (Panjang Jalur KA)	capaian 10 tahun terkait Konektivitas kinerja sektor transportasi (Prasarana Perkeretaapian)	capaian 10 tahun terkait Konektivitas kinerja sektor transportasi (On Time Performance)	capaian 10 tahun terkait Konektivitas kinerja sektor transportasi (Teknologi Perkeretaapian)	Video Global Rail Transport	Capaian transportasi perkeretaapian dari tahun ke tahun	-
14	15	16	17	18	19	20
Capaian Proyek Strategis	Video Testimoni Rel Layang Simpang Joglo	Video Pameran Foto Stasiun Perkeretaapian Indonesia	-	Imbauan Keselamatan	Ucapan Terima Kasih Jokowi & Maruf	Ucapan Selamat Prabowo - Gibran
21	22	23	24	25	26	27
Video Dirjen KA Sambut Menteri David di LRT	Stasiun Pondok Rajeg resmi reaktivasi	Selamat bertugas Menteri Perhubungan Dudy - Suntuana	Wakil Presiden Tinjau Proyek MRT 2A	Uji beban elevated track simpang joglo	Kuis DJKA	-
28	29	30	31			
Hari Sumpah Pemuda	Video Petugas Perempuan	Bukan di Jawa, jalur kereta ini melewati Situs Warisan Dunia! (Jalur KA Makpar)	Lebih murah dari topping seblak, naik KA di Aceh cuma bayar segini!			

Calendar Plan November



Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
				1	2	3
				Ternyata ini yang bikin Trem Otonom bisa beroperasi dengan selamat! (sensor pada ART)	Video Streetfood dekat Stasiun Duren Kalibata	-
4	5	6	7	8	9	10
Kenapa Kereta Bisa Anjlok?	Ini lho Fungsi Bordes Kereta Api!	Batas Maksimal Kecepatan Kereta Api?	Hari ini masih duduk di bordes? Gak jaman! (tips keselamatan agar tidak beraktivitas di bordes, referensinya konten buka pintu pas kereta jalan)	Video Alat pijat di kereta dan isi ulang air	Intip jumlah Stasiun KA yang melayani penumpang dari tahun ke tahun!	Greeting Hari Pahlawan
11	12	13	14	15	16	17
Progres pembangunan MRT Fase 2A	Main layangan pas liburan? Hindari area rawan di sekitar jalur KA!	Kereta Ukur , apaan tuh?	Berapa Gerbong sih yang bisa ditarik 1 lokomotif?	Persinyalan siemens dan halske manual	Video Heritage stasiun kereta	-
18	19	20	21	22	23	24
Alat Evakuasi Kereta Api, Telescopic Railway Crane	Terus Bertambah! Ini dia panjang Jalur KA menurut jenis rel! (di ppt capaian kinerja hal 5)	Electric Multiple Unit (EMU) pada Whoosh	Meningkat drastis! Segini jumlah penumpang Kereta Whoosh! (di ppt capaian kinerja hal 12)	#KuisDJKA	Video Kuliner legendaris dekat Stasiun KA	-
25	26	27	28	29	30	1
Greeting Hari Guru	Awal mula Kereta Api bukan untuk mengangkut orang? Lalu apa ya? Req : Story Gimik Motis 2024	Indonesia gak sendiri, ini negara lain yang juga pakai Trem Otonom! Req : Story Rute nya	Video ramcheck sarana ka	Rawan Selip, Ini Teknik Aman Melewati Perlintasan Kereta Req : ikut Motis 2024 bisa		

Calendar Plan Desember



Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
2	3	4	5	6	7	8
INFO MOTIS : Tata carapendaftaran Motis 2024	Greeting Hari Disabilitas Nasional	INFO MOTIS : Syarat apa saja untuk ikutan MOTIS 2024 ?	INFO MOTIS : Info Kuota Motis 2024	INFO MOTIS : berikut ka motis yang tergabung dg ka pnp,,, jgn sampai salah booking tiket .	Yuk kenaln dengan KA Penolong	-
9	10	11	12	13	14	15
INFO MOTIS : Apakah motor yang ikut motis dapat asuransi ?	INFO MOTIS : Sejarah Motis,, Motis ada sejak kapan sih?? Trus kenapa pemerintah menyelenggarakan Motis??	Siapa sih yang melakukan rampcehck sarana perkeretaapian ? yuk kenali	INFO MOTIS : Motis arus balik ataucontra flow.. Emangada ??	Rawan Selip. Ini Teknik Aman Melewati Perlintasan Kereta	Himbauan keselamatan saat melintasi perlintasansebidang	-
16	17	18	19	20	21	22
INFO MOTIS : Ada kendala saat pendaftaran MOTIS bisa hubungin ke no	Di DJKA adalah org yang wajib menyatakan keselamatan perkeretaapian, Yuk kenaln dengan inspektur keselamatan	INFO MOTIS : Testimoni peserta Motis 2024	INFO MOTIS : Update sisa kuotamotis 2023	Greeting Hari Ibu	Tips liburan naik kereta api	-
23	24	25	26	27	28	29
INFO MOTIS : Apa yang perlu diperhatikan saat ikut Motisdan kenapa mesti ikutan motis ?	Yuk intip beberapastasiun yang deketaksenya ke tempatwisata	Greeting Natal dan #KuisDJKA	INFO MOTIS : Update Motis untuk angkutan Balik	Berikut no telpenting apabila adakejadian emergencypada saat kamu lgliburan,,,	Ucapan terimakasih ataskeikut serta padakegiatan motis 2024	Main layanan pas liburan? Hindari area rawan di sekitar jalur KA!
30	31					
INFO MOTIS : Total keseluruhan pesertaMOTIS 2024	Recap 2024 Jumlah total jalurka yg terbangun ditahun 2024, jumlah perlintasansebidang KA ygditutup di tahun2024, besarsansubsidi yang diberikanpemerintah pdangkutanpenumpang, revitalisasi stasiundi th 2024 dan groundbreaking					

VOL.1

Newsletter

TRANSIT



TREM OTONOM
TRANSPORTASI MASA DEPAN
YANG RAMAH LINGKUNGAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



HARHUBNAS

2024

TRANSPORTASI MAJU
NUSANTARA BARU

SELAMAT MEMPERINGATI
HARHUBNAS 2024
HARI PERHUBUNGAN NASIONAL KE-53 TAHUN
17 SEPTEMBER 2024



DARI REDAKSI

Salam hangat,

Kemajuan pesat di sektor perkeretaapian Tanah Air menjadi hal yang amat menggembirakan sekaligus membanggakan. Teknologi kereta api yang kian melaju, sarana dan prasarana dengan kelengkapan terbaru, serta pelayanan yang semakin bermutu, tentu bertujuan untuk menciptakan moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan selamat.

Untuk itulah, pada edisi ini kami ingin mengajak Anda melihat kembali evolusi moda transportasi umum, termasuk perkeretaapian, dari masa ke masa. Selain itu, melalui edisi ini pula kami kenalkan kembali Trem Otonom, kendaraan masa depan yang dikendalikan secara nirawak serta berfitur canggih, dan sudah hadir di Ibu Kota Nusantara.

Berbagai upaya pengembangan infrastruktur perkeretaapian juga kami laporkan pada edisi kali ini. Seperti pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, serta pengembangan sarana transportasi massal di Surabaya. Tak hanya itu, sejumlah informasi menarik dan profil sosok inspiratif di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) juga kami bagikan di sini. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Dewan Redaksi

 ditjenperkeretaapian

 ditjenperkeretaapian

 ditjenperkeretaapian

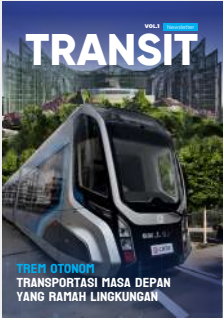
 djka.dephub.go.id

 @perkeretaapian

 ditjenperkeretaapian

TRANSIT

Newsletter



Penanggung Jawab

Direktur Jenderal Perkeretaapian
dan Sekretaris Direktorat
Jenderal Perkeretaapian

Penyunting Naskah

Zen Hadianito
Dian Anggraeni

Pembuat Artikel

Hanif Junisaf Ahmad
Regina Veronica Pratiwi

Desain Grafis & Fotografer

Jamal Misbah
Mirna Nurviani
Desmon Event Butar Butar

Sekretariat Redaksi

Finkan Mutia Herianne
Maulida Cahyati
Pradistya Hayu Purbosini

Alamat Redaksi

Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan
Gedung Karya Lantai 14, Jl. Medan
Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat



5 LANGSIRAN

- 5 Rel Layang Terpanjang di Indonesia
- 7 SRRL Solusi Kemacetan di Kota Pahlawan



9 HISTORI

Dari Trem Bertenaga Kuda sampai Kereta Listrik Kecepatan Tinggi

SOSOK

- 15 Penguji Harus Melek Teknologi

PERON KEMENHUB

- 18 Transparansi Bukan Pilihan Tapi Keharusan
- 20 Sekilas KPB

PERON DJKA

- 22 Ayo Sekolah!

AGENDA

- 24 LRT FEST 2024
Dihadiri Ribuan Penonton



12 TEKNOLOGI

Trem Otonom
Transportasi Masa Depan yang Ramah Lingkungan

OPINI

- 26 Transportasi Publik Inklusif
Difabel Kian Produktif

BUGAR

- 28 Naik Tangga
Dapat Menurunkan Berat Badan
Hoaks Atau Fakta ?

TIP & TRIK

- 30 Do's & Don'ts Di Transportasi Publik



STOP MENEROBOS DI PERLINTASAN KERETA SEBIDANG

Budaya Keselamatan, Tanggung Jawab Bersama

Mari #Berteman
(Berhenti, Tengok Kanan Kiri, Aman Jalan)



DJKA

Dirgahayu DITJEN PERKERETAAPIAN

5 Agustus 2024

**"S19 AP
MEMBANGUN
PERKERETAAPIAN
NASIONAL"**

 [ditjenperkeretaapian](#)

 [ditjenperkeretaapian](#)

 [ditjenperkeretaapian](#)

 [djka.dephub.go.id](#)

 [@perkeretaapian](#)

 [ditjenperkeretaapian](#)





LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6

NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

Nomor : PS.302/6/25/ITJEN/2024 Jakarta, 01 Agustus 2024
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024
pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Yth. Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE 1-ITJEN-Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 49 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja Eselon I saja, namun juga dilakukan uji petik terhadap akuntabilitas kinerja pada beberapa unit kerja yaitu:
 - a. Direktorat Prasarana;
 - b. Direktorat Keselamatan;
 - c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
 - d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
 - e. Balai Pengujian Perkeretaapian.
3. Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

4. Dari hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai **82,95 (Predikat A)** dengan interpretasi **"Memuaskan"** yaitu terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
5. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,61
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,83
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,00
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	82,95
Predikat			A

6. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 23,61 dari nilai maksimal 30,00, dengan catatan:

- 1) Masih terdapat beberapa kelengkapan Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan ke dalam aplikasi e-SAKIP Reviu tepat waktu (akhir bulan Februari tahun berjalan);
- 2) Informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) belum tertuang di dalam dokumen LKIP;
- 3) Masih terdapat beberapa target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja tidak tercapai untuk setiap IKU/IKK sesuai kriteria *on the right track* yaitu realisasi capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d 110%;
- 4) Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja berupa penurunan target dengan melakukan revisi dokumen PK sehingga pada akhir tahun capaian kinerja terlihat lebih baik (*on the right track*).

b. Pengukuran Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 25,83 dari nilai maksimal 30,00, terdapat beberapa catatan pada Sub Komponen yang belum terpenuhi, yaitu:

- 1) Masih terdapat keberadaan dokumen pengukuran kinerja sebagian unit kerja yang belum dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir;
- 2) Pengukuran efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja pada sebagian unit kerja belum menggambarkan adanya efisiensi sumber daya atas capaian kinerjanya.

c. Pelaporan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 12,50 dari nilai maksimal 15,00, dengan catatan:

- 1) Laporan Kinerja pada sebagian unit kerja telah dilakukan reviu secara berjenjang dan disampaikan tepat waktu, namun belum dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir;
- 2) Laporan Kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikannya, namun belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja seperti tata cara perhitungan capaian kinerja di setiap indikator, penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja dan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 21,00 dari nilai maksimal 25,00, dengan catatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal di sebagian unit kerja belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja pada level eselon I maupun unit kerja, hal ini ditunjukkan masih terdapat sebagian kinerja yang belum tercapai maupun *anomali*.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen unit kerja untuk melakukan publikasi dokumen perencanaan ke dalam aplikasi e-SAKIP Reviu pada akhir bulan Februari tahun berjalan;
2. Menuangkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) pada indikator kinerja di dokumen Laporan Kinerja;
3. Merencanakan target kinerja dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan melakukan analisa secara mendalam, sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat tercapai untuk setiap IKU/IKK sesuai kriteria *on the right track* yaitu realisasi capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d 110% serta meminimalisir adanya perbaikan/revisi berupa penurunan target pada Perjanjian Kinerja di akhir tahun;
4. Meningkatkan komitmen dan konsistensi unit kerja dalam mempertahankan keberadaan dokumen baik dokumen perencanaan maupun dokumen pelaporan kurun waktu 5 tahun terakhir;

5. Menyeragamkan formulasi pengukuran efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Mengungkapkan seluruh informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja termasuk di dalamnya tata cara perhitungan capaian kinerja di setiap indikator, penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja dan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja);
7. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menyajikan catatan serta rekomendasi yang memadai (pemenuhan, kualitas, serta pemanfaatan) di setiap komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian disampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



Inspektur Jenderal

Arif Toha

NIP. 196703201992031003

Tembusan:

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemenhub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PS.006/1/1/DJKA/2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
Implementasi SAKIP Direktorat
Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Jakarta, 30 Oktober 2024

Yth. Inspektur Jenderal
Kementerian Perhubungan

Menindaklanjuti surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.302/6/25/ITJEN/2024 tanggal 1 Agustus 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan ini disampaikan tindak lanjut rekomendasi dari hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terhadap implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Meningkatkan komitmen unit kerja untuk melakukan publikasi dokumen perencanaan ke dalam aplikasi e-SAKIP Reviu pada akhir bulan Februari tahun berjalan.	- Telah dilakukan himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui rapat pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang diselenggarakan pada 8-10 Oktober 2024. Pada periode sebelumnya juga telah dilakukan pembahasan (27-28 Maret 2024) dengan melibatkan Kemenpan RB untuk menjelaskan pembaruan fitur pada aplikasi e-SAKIP Reviu termasuk untuk meningkatkan kepatuhan dalam publikasi dokumen SAKIP pada aplikasi e-SAKIP Reviu. - Telah disampaikan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/3/3/K1/DJKA/2024 perihal Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II 2024 kepada masing-masing unit kerja yang juga mencakup kepatuhan terhadap pengisian/publikasi dokumen pada aplikasi e-SAKIP Reviu agar senantiasa melakukan <i>update</i> dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada e-SAKIP Reviu.
2	Menuangkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>)	Berdasarkan hasil rapat pembahasan pelaporan Triwulan III 2024, telah dihimbau dan ditambahkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>) pada Laporan Monitoring Triwulan III 2024 Direktorat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	pada indikator kinerja di dokumen laporan kinerja.	Jenderal Perkeretaapian dan unit kerja lainnya diantaranya informasi hubungan/kerjasama bidang lain yang dilakukan melibatkan Badan Usaha, Pemerintah Daerah, Sektor Industri, lainnya dalam upaya pencapaian kinerja.
3	Merencanakan target kinerja dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan melakukan analisa secara mendalam, sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat tercapai untuk setiap IKU/IKK sesuai kriteria <i>on the right track</i> yaitu realisasi capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d 110 serta meminimalisir adanya perbaikan/revisi berupa penurunan target pada Perjanjian Kinerja di akhir tahun.	- Telah dilakukan rapat pembahasan pada tanggal 6-7 Agustus 2024 terkait target kinerja Tahun 2024 masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk memastikan usulan revisi target kinerja yang diusulkan telah memperhatikan realisasi tahun sebelumnya berdasarkan LKIP dan melakukan analisa secara mendalam untuk memprediksi capaian kinerja akhir tahun agar sesuai kriteria <i>on the right track</i> (range 90-110%) sehingga mencegah penurunan target kinerja di akhir tahun. Selain itu, evaluasi target dan rencana aksi pada Perjanjian Kinerja juga dilakukan terhadap realisasi kinerja yang anomali (melebihi 110%). - Sampai dengan Triwulan III 2024, unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian belum melaksanakan revisi Perjanjian Kinerja dikarenakan rata-rata capaian kinerja masih <i>on the right track</i> (102,81%) dan tidak ada perubahan lingkungan yang bersifat strategis.
4	Meningkatkan komitmen dan konsistensi unit kerja dalam mempertahankan dokumen baik dokumen perencanaan maupun dokumen pelaporan kurun waktu 5 tahun terakhir.	- Komitmen dan konsistensi unit kerja dalam mempertahankan dokumen baik dokumen perencanaan maupun dokumen pelaporan kurun waktu 5 tahun terakhir telah dilaksanakan dengan pembahasan dan evaluasi berkala/setiap triwulan terhadap pelaporan kinerja termasuk pembahasan bersama terkait revisi dokumen Perencanaan Kinerja untuk meningkatkan komitmen dan konsistensi sesuai ketentuan. - Hal lain yang dilaksanakan adalah penyediaan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang setiap tahun <i>diupdate</i> sebagai acuan tim penyelenggaraan SAKIP dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal. - Selain itu, setiap akhir tahun juga dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam upaya persiapan periode berikutnya sehingga dapat mempertahankan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan.
5	Menyeragamkan formulasi pengukuran efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber data manusia dalam mencapai kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	- Berdasarkan hasil rapat pembahasan pelaporan Triwulan III 2024, telah dihimbau kepada seluruh unit kerja agar mengecek kembali dan memperbaiki formulasi pengukuran efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber data manusia. - Untuk formulasi pengukuran efisiensi atas penggunaan anggaran mengacu PMK 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran diantaranya mencakup efisiensi output program untuk Eselon I dan efisiensi RO untuk tingkat Satker.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
6	Mengungkapkan seluruh informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja termasuk di dalamnya tata cara perhitungan capaian kinerja di setiap indikator, penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja dan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (<i>benchmarking</i> kinerja).	- Berdasarkan hasil rapat pembahasan pelaporan Triwulan III 2024, telah dihimbau dan telah ditindaklanjuti pada penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III 2024 dengan menyajikan seluruh informasi capaian kinerja dalam termasuk di dalamnya tata cara perhitungan capaian kinerja di setiap indikator dan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (<i>benchmarking</i> kinerja). - Untuk sumber data dukung capaian kinerja telah disampaikan pada lampiran laporan dengan persetujuan PIC/penanggungjawab kinerja serta dilengkapi penyampaian/nota dinas dari Bagian/Bidang/Sub Unit Kerja terkait.
7	Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menyajikan catatan serta rekomendasi yang memadai (pemenuhan, kualitas serta pemanfaatan) di setiap komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	- Pada Oktober 2024, dilaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi dalam rangka meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan tim evaluator dan evaluatan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta melibatkan Tim Inspektorat Jenderal Kemenhub mencakup: - Penjelasan dan Persamaan Persepsi terhadap Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kemenhub; - Evaluasi Implementasi SAKIP ada Unit Kerja Non Sample.

(Dokumen pendukung terkait tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagaimana pada link: <https://bit.ly/TLEvaluasiSAKIPDJKA2024>)

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perkeretaapian
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
3. Inspektur IV selaku Koordinator Evaluasi SAKIP.



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7

TINGKAT MATURITAS SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*), Faksimile (021) 85903713
E-mail deputi1@bpkp.go.id, Website www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/S – 868/D1/03/2024 24 Desember 2024
Lampiran : Satu laporan
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun
2023/2024 yang Telah Dilakukan Penjaminan
Kualitas oleh APIP pada Kementerian
Perhubungan

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
di Jakarta

Kami telah melakukan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023/2024 yang Telah Dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP pada Kementerian Perhubungan, sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR.201/118/SKJ2024 tanggal 18 Juli 2024, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,382 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Pengendalian yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah atau mendeteksi adanya penyimpangan.
2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,034 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dan memiliki kerangka penerapan manajemen risiko yang berkualitas serta penyelenggaraan manajemen risiko yang konsisten namun belum menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional.
3. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,000 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2, menunjukkan bahwa risiko korupsi telah mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi

kegiatan-kegiatan cegah-deteksi-respons masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.

Hasil evaluasi selengkapnya kami sajikan Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023/2024 yang Telah Dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP pada Kementerian Perhubungan Nomor PE.09.03/LHP-194/D103/2/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Kementerian Perhubungan untuk digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan/rekomendasi dalam pengambilan keputusan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Aryanto Wibowo

Tembusan Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan





BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN INFRASTRUKTUR,
TATA RUANG, DAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
TAHUN 2023/2024 YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN KUALITAS OLEH APIP
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR : PE.09.03/LHP- 194/D103/2/2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG INFRASTRUKTUR,
TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (Hunting), Faksimile (021) 85906456
E-mail dep1.dir3@bpkp.go.id, Website www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP- 194/D103/2/2024
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
SPIP Terintegrasi pada Kementerian
Perhubungan Tahun 2024

23 Desember 2024

Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024 disajikan dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB II : UMUM

BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,382 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Pengendalian yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah atau mendeteksi adanya penyimpangan.
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,034 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dan memiliki kerangka penerapan manajemen risiko yang berkualitas serta penyelenggaraan manajemen risiko yang konsisten namun belum menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional.
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,000 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2, menunjukkan bahwa risiko korupsi telah mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi kegiatan-kegiatan cegah-deteksi-respons masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.

B. Rekomendasi

Meskipun Kementerian Perhubungan telah mencapai SPIP level 3, namun masih terdapat pegawai di Kementerian Perhubungan yang terlibat kasus korupsi. Selain itu, hasil pengawasan BPKP menunjukkan masih terdapat kelemahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Maka Kementerian Perhubungan perlu memperkuat pengendalian di semua lini kegiatan untuk memastikan empat tujuan SPIP (efektivitas dan efisiensi pencapaian

tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) dapat tercapai.

Terkait proses Penilaian Mandiri, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Kepala Biro Perencanaan dalam menyusun laporan penilaian mandiri SPIP tingkat kementerian agar diungkapkan potret pengendalian yang telah dilakukan secara umum dan kelemahan-kelemahan pengendalian yang masih perlu untuk ditingkatkan, serta hasil pelaksanaan tindak lanjut atas Aol yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya.
2. Inspektur Jenderal agar mengkoordinasikan monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas Aol yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya.

Terkait substansi hasil Penilaian Mandiri, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Kepala Biro Perencanaan agar mengkoordinasikan satker-satker untuk menyusun profil risiko berbasis proses bisnis sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Subproses, dan Peta Relasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Kepala Biro Perencanaan agar mengkoordinasikan penetapan konteks dan identifikasi risiko secara lebih komprehensif, terutama terkait risiko *fraud*/kecurangan dan risiko kemitraan.
3. Inspektur Jenderal agar mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian atas kinerja satker sehingga temuan BPK atas ketidakpatuhan dapat diminimalisir.
4. Inspektur Jenderal agar mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang memungkinkan terjadinya korupsi.

Uraian secara rinci disajikan pada Bab II.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Kementerian Perhubungan untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan/rekomendasi dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Direktur,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Kisyadi



BAB II

URAIAN EVALUASI

A. Informasi Umum

1. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- d. Surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan Nomor PE.11.02/S-202/D103/2/2024 tanggal 23 Juli 2024;
- e. Surat Tugas Nomor PE.09.02/ST-211/D103/2/2024 tanggal 23 Juli 2024.

2. Waktu Penugasan

Evaluasi dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 20 Agustus 2024.

3. Tujuan Penugasan

Evaluasi bertujuan untuk:

- a. Memastikan bahwa pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga;
- b. Menetapkan nilai akhir Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
- c. Mengidentifikasi *Area of Improvement* (Aoi) dan rekomendasi atas Aoi;
- d. Memberikan simpulan mengenai keterhubungan antara penyelenggaraan SPIP pada K/L dengan pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi adalah Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan

SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024, meliputi:

- a. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang meliputi aspek:
 - 1) Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi beserta pemaparannya;
 - 2) Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
 - 3) Tahap pelaporan meliputi penentuan *Area of Improvement*, pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat asesor.
- b. Evaluasi dilakukan atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP-T pada Kementerian Perhubungan diarahkan pada isu strategis nasional.

Uji petik yang dilakukan pada saat evaluasi yaitu pada Program Infrastruktur Konektivitas yang mengambil 3 (tiga) dari 8 (delapan) sasaran strategis dengan cakupan 5 (lima) unit kerja tingkat eselon I. Rincian uji petik pada saat evaluasi diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Unit Kerja Sampel Evaluasi
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	• Ditjen Perhubungan Darat • Ditjen Perhubungan Laut • Ditjen Perhubungan Udara • Ditjen Perkeretaapian • Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	• Ditjen Perhubungan Darat • Ditjen Perhubungan Laut • Ditjen Perhubungan Udara • Ditjen Perkeretaapian
3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	• Ditjen Perhubungan Darat • Ditjen Perhubungan Laut • Ditjen Perhubungan Udara • Ditjen Perkeretaapian

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Kementerian Perhubungan. Tanggung jawab BPKP terbatas pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan data dan informasi yang telah disampaikan.

6. Metodologi

Pelaksanaan evaluasi mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Standar Kerja Pengawasan Intern (SKPI) BPKP dengan metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi melalui wawancara, observasi dan reviu dokumen.

7. Kesimpulan atas Penyelenggaraan SPIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan belum memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan.

Hal ini terlihat dari level SPIP pada Kementerian Perhubungan yang mencapai level 3. Karakteristik level 3 yaitu organisasi telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, namun pengendalian yang dibangun dan dikembangkan **belum efektif**.

B. Hasil Evaluasi

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan

Nomor dan Tanggal SK Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas	:	a. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 206 Tahun 2021 tentang Tim Penilai Mandiri Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan tanggal 20 September 2021. b. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan RI Nomor KP-ITJEN 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan TA 2024
Nomor dan Tanggal Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM)	:	PR.201/1/8/SKJ 2024 tanggal 18 Juli 2024

2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan

Tahun 2024 telah **sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang mencakup persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas *Area of Improvement* (Aol) pada Penilaian SPIP-T Tahun Sebelumnya

Sebagaimana hasil dari penilaian SPIP-T Tahun 2023, telah diberikan sebanyak 5 (lima) Aol sebagai bagian dari peningkatan tata kelola Kementerian Perhubungan. Dari lima Aol tersebut, tiga Aol telah ditindaklanjuti secara tuntas dan dua Aol lainnya masih dalam proses tindak lanjut. Rincian Aol dan tindak lanjut disajikan pada Lampiran 3.

4. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk **Maturitas Penyelenggaraan SPIP** adalah **3,382** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada **Level 3**, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Pengendalian yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah atau mendeteksi adanya penyimpangan.
- b. Nilai untuk **Manajemen Risiko Indeks (MRI)** adalah **3,034** atau telah memenuhi karakteristik MRI pada **Level 3**, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dan memiliki kerangka penerapan manajemen risiko yang berkualitas serta penyelenggaraan manajemen risiko yang konsisten namun belum menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional.
- c. Nilai untuk **Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)** adalah **2,000** atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada **Level 2**, menunjukkan bahwa risiko korupsi telah mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur,

tetapi kegiatan-kegiatan cegah-deteksi-respons masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.

Rincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,835	3,382	-0,453
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,847	3,034	-0,813
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,000	2,000	-1,000

Uraian capaian skor dan perubahan skor Penilaian Maturitas SPIP-T diuraikan pada Lampiran 1 dan 2.

5. Potret Pengendalian Umum

Dalam pelaksanaan tugas fungsi dan program/kegiatan, Kementerian Perhubungan telah menerapkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam kebijakan/prosedur yang ditetapkan, antara lain pada SK KPA, SK PPK, SK Bendahara, dan SK PPSPM.

Berkaitan dengan Manajemen Risiko, Kementerian Perhubungan telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023. Sosialisasi Manajemen Risiko telah dilakukan kepada seluruh unit kerja. Selain itu juga terdapat penggunaan teknologi informasi dengan adanya aplikasi SIMARKO sebagai dasar penyusunan laporan manajemen risiko secara berkala.

Berkaitan dengan penegakan integritas dan nilai etika, Kementerian Perhubungan telah memiliki kebijakan berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementrian Perhubungan. Penandatanganan pakta integritas juga dilakukan setiap tahun oleh seluruh pegawai.

6. Potret Pengelolaan Pengendalian pada Sektor Konektivitas dan Transportasi

Kementerian Perhubungan memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi. Untuk meningkatkan potensi tersebut, Kementerian Perhubungan telah menetapkan

indikator sasaran strategis sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	0,772
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	88,50
		<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	73,03
3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	17,268

Capaian indikator strategis dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian		
			2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	108,43%	100,87%	100,00%
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	104,47%	110,49%	106,40%
		<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	105,12%	96,22%	98,32%
3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	104,51%	114,64%	115,76%

Intervensi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis tersebut antara lain berupa pemeliharaan dan perluasan jaringan transportasi serta peningkatan aksesibilitas transportasi publik. Dari intervensi tersebut, terdapat beberapa proses bisnis yang menjadi uji petik sehubungan proses bisnis tersebut menjadi titik kritis kesuksesan sasaran yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan. Proses bisnis tersebut diantaranya:

- Penyelenggaraan transportasi laut oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- Penyelenggaraan transportasi darat oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

- c. Penyelenggaraan transportasi udara oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- d. Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sebagaimana hasil evaluasi, pengendalian yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan diuraikan sebagai berikut:

a. Proses Perencanaan

Pada proses perencanaan **masih** terdapat kelemahan perencanaan.

Berdasarkan evaluasi BPKP, indikator sasaran strategis “Rasio Konektivitas Nasional” belum mempertimbangkan *ultimate outcome*. Formulasi indikator Rasio Konektivitas Nasional diperoleh dari jumlah layanan yang diberikan atas infrastruktur yang terbangun pada transportasi laut, darat, udara dan perkeretaapian sehingga indikator ini masih bersifat *output*. Indikator yang dapat memberikan gambaran atas dampak infrastruktur yang terbangun pada suatu wilayah belum ditentukan.

b. Proses Pengendalian atas Proses Bisnis

Sebagaimana asersi penilaian mandiri SPIP yang telah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, masih terdapat kondisi yang belum secara riil menggambarkan capaian yang ada. Hal tersebut terlihat dari potret pengendalian yang telah dibangun oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan sektor konektivitas dan transportasi. Terdapat beberapa kelemahan dalam proses pengendalian yang diterapkan pada proses bisnis utama guna mendukung pencapaian tujuan dari sektor konektivitas dan transportasi.

Berdasarkan hasil pengawasan BPKP, terdapat permasalahan pada pembangunan infrastruktur konektivitas yang berkaitan dengan kemitraan dan lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, antara lain :

- 1) Penyelesaian permasalahan *double counting* pencatatan aset tetap tanah khususnya Ruang Milik Jalan antara PT KAI (Persero) dengan DJKA Kementerian Perhubungan berlarut larut dan tidak kunjung selesai sejak tahun 2010 sampai saat ini. Salah satu penyebab utama adalah DJKA selaku pengguna barang tidak melaksanakan inventarisasi secara tepat dan sengketa BMN tidak diselesaikan sejak awal.
- 2) Penugasan kepada PT KAI (Persero) untuk menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum melalui penerbitan KP Nomor 219 Tahun 2010 belum

dilakukan evaluasi oleh Kementerian Perhubungan. Akibatnya terdapat potensi ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan perkeretaapian, seperti pelaksanaan pengoperasian dan perawatan prasarana, pembangunan jalur, pengusahaan jalur, pengusahaan stasiun.

- 3) Penyelenggaraan jasa kebandarudaraan oleh PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak didasarkan pada perjanjian konsesi sehingga bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- 4) Adanya *dispute* atau ketidaksepahaman dalam kontrak kerjasama angkutan penyeberangan perintis antara Kementerian Perhubungan dengan penyedia jasa, yaitu PT ASDP. *Dispute* ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi BUMN karena perbedaan jumlah tagihan dengan jumlah yang dibayarkan.

Selain itu terdapat kelemahan pengendalian pada proses perencanaan pembangunan infrastruktur. Terdapat pembangunan infrastruktur konektivitas yang mangkrak dan pemanfaatannya tidak optimal. Sebagai contoh pembangunan infrastruktur, khususnya pelabuhan, tidak didukung dengan ketersediaan jalan akses. Jalan akses merupakan kewajiban pihak lain sesuai kewenangannya, yaitu Kementerian PUPR (jalan nasional), Pemerintah Provinsi (jalan provinsi), Pemerintah Kab/Kota (jalan kab/kota), pihak terkait lainnya (jalan kawasan). Berdasarkan analisa BPKP, pembangunan infrastruktur tidak didasari dengan kesiapan *readiness criteria* yang cukup terutama ketersediaan lahan dan ketersediaan jalan akses.

Meskipun demikian terdapat upaya yang baik untuk meningkatkan proses pengendalian, yaitu diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Subproses, dan Peta Relasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat melakukan identifikasi risiko sesuai dengan proses bisnis unit kerja masing-masing dan menentukan pengendalian yang tepat.

c. Gambaran Pemeriksaan Eksternal

Hasil dari analisis terkait dengan pengawasan oleh Auditor Eksternal dan lembaga eksternal lain menunjukkan masih terdapat kelemahan pengendalian.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Terdapat realisasi belanja barang dan belanja modal yang belum sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.
- b. Terdapat keterlambatan penyelesaian atas beberapa pekerjaan belanja barang dan modal sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan.
- c. Terdapat pengelolaan persediaan yang belum tertib, sehingga terdapat perbedaan pencatatan persediaan antara Laporan Persediaan per 31 Desember 2023 dengan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Hal ini mengakibatkan nilai persediaan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Selain dari hasil pemeriksaan BPK, gambaran pemeriksaan eksternal lainnya dapat dilihat pada penetapan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada rentang waktu penilaian SPIP (1 Juli 2023 – 30 Juni 2024), tidak terdapat kasus korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Namun di luar rentang waktu tersebut, yaitu pada 28 November 2024, berdasarkan *press release* KPK, KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang di lingkungan Direktorat Prasarana, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Adanya keterjadian kasus korupsi ini nantinya akan menjadi faktor pengurang nilai atau penalti pada evaluasi SPIP di tahun 2025.

Meskipun demikian, terdapat praktik-praktik baik yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Sepanjang tahun 2023, Kementerian Perhubungan telah menerima berbagai penghargaan sebagai apresiasi pihak eksternal yang menilai kinerja Kementerian Perhubungan, diantaranya:

- 1) Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perhubungan oleh Kemenpan RB meraih nilai 78,89 dengan predikat “BB” atau “Sangat

Baik”;

- 2) Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI (10 kali berturut-turut);
- 3) Penyelenggaraan Angkuran Lebaran dan Natal Tahun Baru yang relatif berjalan lancar;
- 4) Peringkat Terbaik Pertama Anugerah Layanan Investasi 2023 dari Kementerian Investasi/ BKPM;
- 5) Realisasi belanja produk dalam negeri dan sektor UMKM Tahun 2023 yang melampaui target;
- 6) Menerima penghargaan sebagai Pembina teknis Badan Layanan Umum Terbaik 2023 dari Kementerian Keuangan;
- 7) Berhasil melancarkan transportasi pada kegiatan pertemuan pemimpin internasional pada kegiatan G20 dan KTT ke-24 ASEAN di Labuan Bajo;
- 8) Meraih predikat Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat;
- 9) Meraih penghargaan berupa *Special Recognition (Infinity) Innovative Financing In Unity 2023* oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero untuk Penggandaan Infrastruktur Transportasi;
- 10) Meraih Penghargaan BKN Award 2023 Kementerian Tipe Besar Peringkat 5 Kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN: Pengembangan Kompetensi.

7. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Sebagaimana telah diuraikan pada hasil evaluasi di atas, meskipun Kementerian Perhubungan telah mencapai SPIP level 3, namun masih terdapat pegawai di Kementerian Perhubungan yang terlibat kasus korupsi. Selain itu, hasil pengawasan BPKP menunjukkan masih terdapat kelemahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kementerian Perhubungan perlu memperkuat pengendalian di semua lini kegiatan untuk memastikan empat tujuan SPIP (efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) dapat tercapai.

Terkait proses Penilaian Mandiri, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Kepala Biro Perencanaan dalam menyusun laporan penilaian mandiri SPIP tingkat kementerian agar diungkapkan potret pengendalian yang telah

dilakukan secara umum dan kelemahan-kelemahan pengendalian yang masih perlu untuk ditingkatkan, serta hasil pelaksanaan tindak lanjut atas Aol yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya.

- b. Inspektur Jenderal agar mengkoordinasikan monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas Aol yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya.

Terkait substansi hasil Penilaian Mandiri, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Kepala Biro Perencanaan agar mengkoordinasikan satker-satker untuk menyusun profil risiko berbasis proses bisnis sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Subproses, dan Peta Relasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. Kepala Biro Perencanaan agar mengkoordinasikan penetapan konteks dan identifikasi risiko secara lebih komprehensif, terutama terkait risiko *fraud*/kecurangan dan risiko kemitraan.
- c. Inspektur Jenderal agar mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian atas kinerja satker sehingga temuan BPK atas ketidakpatuhan dapat diminimalisir.
- d. Inspektur Jenderal agar mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang memungkinkan terjadinya korupsi.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Kementerian Perhubungan untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Lampiran 1
Laporan Direktur Pengawasan
Bidang Infrastruktur, Tata Ruang
dan Perhubungan
Nomor PE.09.03/LHP-
194/D103/2/2024
Tanggal 23 Desember 2024

1. Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Periode penilaian sampai dengan 30 Juni 2024						
PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI						
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	4,000	50,00%		2,000		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5,000	50,00%		2,500		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		4,500		
BOBOT PENETAPAN TUJUAN			40,00%		1,800	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,781	3,75%		0,104		0,784
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	2,750	3,75%		0,103		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,446	3,75%		0,092		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,417	3,75%		0,091		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,056		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,500	10,00%		0,150		0,280
Analisis Risiko (2.2)	1,300	10,00%		0,130		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,250	2,27%		0,074		0,727

Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,250	2,27%		0,074		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,250	2,27%		0,074		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,750	2,27%		0,063		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,250	2,27%		0,074		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,750	2,27%		0,063		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,500	2,27%		0,057		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,500	2,27%		0,057		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,500	2,27%		0,057		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,425	5,00%		0,121		0,271
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5,00%		0,150		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,667	7,50%		0,125		0,313
Evaluasi Terpisah (5.2)	2,500	7,50%		0,188		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,375		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,712	2,375
PENCAPAIAN TUJUAN						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	4,000	20,00%		0,800		
Capaian Output	4,000	10,00%		0,400		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3,000	25,00%		0,750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3,000	25,00%		0,750		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1,000	20,00%		0,200		
IEPK	3					
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		2,900		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		0,870	
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI						3,382

2. Capaian Nilai Manajemen Risiko Indeks

MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)				3,034
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI	
PERENCANAAN	40,00%		1,800	
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	4,500	1,800	
KAPABILITAS	30,00%		0,550	
KEPEMIMPINAN	5,00%	2,375	0,119	
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	2,000	0,100	
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,250	0,113	
KEMITRAAN	2,50%	1,000	0,025	
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	1,550	0,194	
HASIL	30,00%		0,684	
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	1,250	0,234	
OUTCOMES	11,25%	4,000	0,450	
TOTAL	100,00%		3,034	

3. Capaian Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK)				2,000
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI	
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		0,960	
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	2,000	0,192	
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	2,000	0,144	
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	2,000	0,144	
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	2,000	0,288	
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	2,000	0,192	
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		0,720	
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	2,000	0,180	
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF	3,60%	2,000	0,072	
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	2,000	0,180	
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	2,000	0,144	
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	2,000	0,144	
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,320	
INVESTIGASI	8,00%	2,000	0,160	
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	2,000	0,160	
TOTAL	100%		2,000	

Lampiran 2
Laporan Direktur Pengawasan
Bidang Infrastruktur, Tata Ruang
dan Perhubungan
Nomor PE.09.03/LHP-
194/D103/2/2024
Tanggal 23 Desember 2024

1. Komponen Penetapan Tujuan

Penetapan Tujuan	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ Turun
Kualitas Sasaran Strategis	2,500	2,000	-0,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	2,500	2,500	0,000
RATA-RATA SUBJUMLAH PERENCANAAN	2,500	2,250	-0,250

Perubahan nilai komponen penetapan tujuan disebabkan:

Indikator sasaran strategis “Rasio Konektivitas Nasional” dan indikator sasaran program “rasio konektivitas transportasi darat, laut, udara, antarwilayah dan konektivitas transportasi perkotaan” belum mempertimbangkan *ultimate outcome*. Formulasi indikator Rasio Konektivitas Nasional diperoleh dari jumlah layanan yang diberikan atas infrastruktur yang terbangun pada transportasi laut, darat, udara dan perkeretaapian sehingga indikator ini masih bersifat *output*. Indikator yang dapat memberikan gambaran atas dampak infrastruktur yang terbangun pada suatu wilayah belum ditentukan.

2. Komponen Struktur dan Proses

Struktur dan Proses	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
Lingkungan Pengendalian			
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	0,115	0,104	-0,011
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	0,113	0,103	-0,010
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	0,102	0,092	-0,010
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	0,122	0,113	-0,009
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	0,113	0,113	0,000
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	0,097	0,091	-0,006
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	0,113	0,113	0,000

Struktur dan Proses	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	0,117	0,056	-0,061
Penilaian Risiko			
Identifikasi Risiko (2.1)	0,300	0,150	-0,150
Analisis Risiko (2.2)	0,295	0,130	-0,165
Kegiatan Pengendalian			
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	0,085	0,074	-0,011
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	0,074	0,074	0,000
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	0,085	0,074	-0,011
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	0,074	0,063	-0,011
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	0,074	0,074	0,000
Pemisahan Fungsi (3.6)	0,068	0,068	0,000
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	0,063	0,063	0,000
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	0,074	0,057	-0,017
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	0,068	0,068	0,000
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	0,068	0,057	-0,011
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	0,057	0,057	0,000
Informasi dan Komunikasi			
Informasi yang Relevan (4.1)	0,150	0,121	-0,029
Komunikasi yang Efektif (4.2)	0,163	0,150	-0,013
Pemantauan			
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	0,213	0,125	-0,088
Evaluasi Terpisah (5.2)	0,216	0,188	-0,028
SUBJUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	3,016	2,375	-0,641

Perubahan nilai komponen struktur dan proses disebabkan belum optimalnya pelaksanaan pengendalian atas sub unsur-sub unsur berikut ini:

- Penegakan Integritas dan Nilai Etika
- Komitmen terhadap Kompetensi
- Kepemimpinan yang Kondusif
- Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan
- Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

- f. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
- g. Identifikasi Risiko
- h. Analisis Risiko
- i. Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
- j. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi
- k. Pengendalian Fisik atas Aset
- l. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian
- m. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
- n. Informasi yang Relevan
- o. Komunikasi yang Efektif
- p. Pemantauan Berkelanjutan
- q. Evaluasi Terpisah

3. Komponen Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan SPIP	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	0,800	0,800	0,000
Capaian <i>Output</i>	0,400	0,400	0,000
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	0,750	0,750	0,000
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	0,750	0,750	0,000
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Jumlah Temuan BPK	0,400	0,200	-0,200
SUBJUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	3,100	2,900	-0,200

Perubahan nilai pada komponen pencapaian tujuan disebabkan temuan ketidakpatuhan BPK pada tahun 2023 berjumlah lebih dari lima.

4. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Area/Komponen	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
PERENCANAAN	2,000	1,800	-0,200
Kualitas Perencanaan	2,000	1,800	-0,200
KAPABILITAS	0,881	0,550	-0,331
Kepemimpinan	0,144	0,119	-0,025
Kebijakan Manajemen Risiko	0,163	0,100	-0,063
Sumber Daya Manusia	0,125	0,113	-0,012
Kemitraan	0,081	0,025	-0,056
Proses Manajemen Risiko	0,369	0,194	-0,175

Area/Komponen	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
HASIL	0,966	0,684	-0,282
Aktivitas Penanganan Risiko	0,516	0,234	-0,282
<i>Outcomes</i>	0,450	0,450	0,000
TOTAL	3,847	3,034	-0,813

Perubahan nilai MRI disebabkan belum optimalnya pelaksanaan hal-hal berikut, antara lain:

- Kepimpinan yang kondusif
- Kesadaran pegawai terkait manajemen risiko
- Identifikasi dan analisis risiko, terutama terkait risiko *fraud*/kecurangan dan risiko kemitraan
- Pemantauan berkelanjutan atas proses manajemen risiko

5. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Pilar/Indikator	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	1,440	0,960	-0,480
Kebijakan Antikorupsi	0,288	0,192	-0,096
Seperangkat Sistem Antikorupsi	0,216	0,144	-0,072
Dukungan Sumber Daya	0,216	0,144	-0,072
<i>Power</i> (Kuasa dan Wewenang)	0,432	0,288	-0,144
Pembelajaran Antikorupsi	0,288	0,192	-0,096
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	1,080	0,720	-0,360
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	0,270	0,180	-0,090
Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel	0,108	0,072	-0,036
Kepemimpinan Etis	0,270	0,180	-0,090
Integritas Organisasional	0,216	0,144	-0,072
Iklim Etis Prinsip	0,216	0,144	-0,072
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	0,480	0,320	-0,160
Investigasi	0,240	0,160	-0,080
Tindakan Korektif	0,240	0,160	-0,080
TOTAL	3,000	2,000	-1,000

Perubahan nilai IEPK disebabkan hal-hal berikut, antara lain:

- Belum terdapat implementasi yang sesuai terkait kebijakan gratifikasi yang ada di Kementerian Perhubungan;
- Belum terdapat kebijakan yang mengatur tentang pengendalian korupsi secara umum;

- c. Belum terdapat SOP mengenai kebijakan antikorupsi secara umum;
- d. Pembelajaran antikorupsi secara eksternal maupun internal belum menyasar pada etika-etika anti korupsi yang seharusnya;
- e. Belum terdapat tindak lanjut atas kejadian atau indikasi korupsi;
- f. Belum terdapat kebijakan yang mengatur pengelolaan risiko korupsi;
- g. Belum terdapat implementasi bahwa Pimpinan dalam pengambilan keputusan yang menjauhi anti korupsi;
- h. Belum terdapat risiko spesifik yang menyangkut indikasi korupsi pada unit kerja;
- i. Belum terdapat implementasi dari *whistle blowing* yang diterapkan.

Lampiran 3
Laporan Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur,
Tata Ruang dan Perhubungan
Nomor PE.09.03/LHP- 194/D103/2/2024
Tanggal 25 Desember 2024

MONITORING TINDAK LANJUT

	AREAL OF IMPROVEMENT (AOI)	TINDAK LANJUT	Status	Link Data Dukung
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGAR AAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2023 PE.09.03/LHP-170/D103 /2/2023 13 NOVEMBER 2023	a. Memperbaiki indikator dan target kinerja agar berorientasi pada outcome dan memenuhi kriteria SMART	Kemenhub telah memperbaiki indikator dan target kinerja agar berorientasi pada outcome dan menerapkan kriteria SMART. di buktikan bahwa Kemenhub telah menerapkan SMART ASN meliputi : integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Dokumen yang disampaikan : 1. LMCK KEMENHUB TW I 2023 2. LMCK KEMENHUB TW II 2023 3. LMCK KEMENHUB TW III 2023	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1r_NdKzw8ioBH1k51oYPAWXsPtmTwLAq1?usp=sharing

	AREAL OF IMPROVEMENT (AOI)	TINDAK LANJUT	Status	Link Data Dukung
		4. Laporan Capaian Kinerja Tw IV Tahun 2023 Kemenhub		
	b. Mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon	Telah mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon melalui: 1. Pengadaan Pengaduan 2. Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan 3. Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggan (Whistleblower) 4. Monev Sosialisasi dan Uji Coba Inaportnet 5. Stranas PK 6. Melaksanakan Harkodia tahun 2023 7. Membuat Pakta Integritas bagi seluruh pegawai 8. Membuat PKS/MOU Ombudsman, PPATK, LPSK	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1r_NdKzw8ioBH1k51oYPAWXsPtmTwLAg1?usp=sharing

	AREAL OF IMPROVEMENT (AOI)	TINDAK LANJUT	Status	Link Data Dukung
		9. Melaksanakan Apel rutin 10. Memasang Banner 4No's Dokumen yang disampaikan: 1. SOP Pengadaan Pengaduan 2. PM 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNAN 3. SK.99_UM.005_ITJEN-2017_Petunjuk Teknis Penanganan Dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran (Whistleblower) 4. Laporan Monev Sosialisasi dan Uji Coba Inaportnet 2023-2024 5. Laporan Sranas-PK 2023-2024 6. Laporan Harkodia 2023 7. Fakta Integritas 2023 dan 2024 8. PKS/MOU Ombudsman, PPAK, LPSK 9. Risalah Apel 10. Banner 4No's		

	AREAL OF IMPROVEMENT (AOI)	TINDAK LANJUT	Status	Link Data Dukung
	c. Mendorong dilakukannya evaluasi berkala atas desain kebijakan pengendalian dan implementasinya sehingga dapat diukur dan disimpulkan efektivitas dan manfaatnya terhadap pencapaian tujuan organisasi.	Telah dilakukan evaluasi berkala atas desain kebijakan pengendalian dan implementasinya sehingga dapat diukur dan disimpulkan efektivitas dan manfaatnya terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui e-performance dari aplikasi e-kinerja	Proses (Bisa di Tuntaskan setelah dikirimkan data dukung)	https://drive.google.com/drive/folders/1r_NdKzw8ioBH1k51oYPAWXsPtmTwLAq1?usp=sharing
	d. Melaksanakan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi manajemen risiko dan pengukuran tingkat pemahaman manajemen risiko dari pegawai pada masing-masing unit kerja.	Telah dilaksanakan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi manajemen risiko dan pengukuran tingkat pemahaman manajemen risiko dari pegawai pada masing-masing unit kerja. Dokumen yang disampaikan : Laporan Hasil Penilaian Evaluasi Tingkat Kematangan MR di lingkungan Ditjen Hubdat, BPTJ dan BKT tahun 2024.	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1r_NdKzw8ioBH1k51oYPAWXsPtmTwLAq1?usp=sharing



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8

PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG
PERKERETAAPIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN TARGET & REALISASI PNBP PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
TAHUN ANGGARAN 2024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ESELON I : 08 - Ditjen Perkeretaapian
 PERIODE LAPORAN : JANUARI s.d. DESEMBER

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	102.130.000,00	102.130.000,00
	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.200.000.000,00	2.119.400.000,00	2.139.550.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	19.318.440,00	0,00
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	19.069.206.000,00	23.987.155.000,00	0,00
	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	9.267.336.000,00	1.338.247.000,00	0,00
	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0,00	259.752.668,00	0,00
	424923 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0,00	1.102.783.000,00	0,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	3.812.313,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	22.431.170,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	990.611.938,00	190.740.000,00
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20.000.000,00	123.630,00	0,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	479.320.000,00	362.926.000,00	362.926.000,00
	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	2.463.605.007,00	2.463.575.007,00
	425719 - Pendapatan Bunga Lainnya	0,00	0,00	30.000,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	870.710.793,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	106,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	547.669.519,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	16.743.278.239,00	132.187.511,00
	425993 - Pendapatan Jasa Perbendaharaan	0,00	985.000,00	985.000,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	229.667.008,00	229.667.008,00
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	11.347.894.000,00	2.074.221.667,00	2.074.221.667,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	111.237.729,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	8.930.792,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.757.092.637,00	0,00
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	69.762,00	0,00
	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	303.616.000,00	303.616.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	67.979.000,00	67.979.000,00
	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0,00	18.802.560,00	18.802.560,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	7.625.191,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	75.416.973,00	343.000,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	51.552.590,00	51.552.590,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	198.592.000,00	198.592.000,00
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	478.736.565,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.507.100,00	1.507.100,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	848.581.757,00	848.581.757,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	6.666.666,00	6.666.666,00
	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	13.422.575,00	13.230.000,00
	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	282.265.000,00	282.265.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	0,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.768,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.014.117.332,00	6.014.117.332,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.981.905.483,00	1.661.905.483,00
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	124.575,00	0,00
	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	264.821.000,00	264.821.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	774.337.238,00	2.356.678,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.405,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.364.563.849,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	649.564.661,00	649.564.661,00
	425915 - Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	791.068.121,00
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	217.581.000,00	217.581.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	1.232.000,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.590.000,00	0,00
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30.331.460.000,00	78.815.088.000,00	78.815.088.000,00
	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	2.295.390.000,00	28.429.615.470,00	28.429.615.470,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	9.193.100.000,00	757.040.000,00	757.040.000,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	667.622,00	665.000,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	149.101.004,00	149.101.004,00
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	55.007.525.000,00	63.207.273.542,00	0,00
	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	1.924.250.000,00	153.918.100,00	0,00
	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0,00	707.143.788,00	0,00
	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	0,00	285.000,00	275.000,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	45.248.200,00	0,00
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425512 - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.101.061.822.000,00	902.208.197.097,00	902.208.197.097,00
	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	331.750.000,00	1.142.000.000,00	1.142.000.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	425.136.120,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	569.243.390,00	468.684.050,00
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	20.259.000,00	20.259.000,00
	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.422.000.000,00	1.464.600.000,00	1.464.600.000,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	10.360.000,00	10.360.000,00
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	132.500.000,00	113.350.000,00	113.350.000,00
	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.050.000.000,00	2.795.176.000,00	2.795.176.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	321.427.765,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	635.349.955,00	42.000.000,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	664.652.191,00	664.652.191,00
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	877.500.000,00	877.500.000,00
	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.000.000.000,00	7.251.169.784,00	7.251.169.784,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	169.130.958,00	169.130.958,00
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	214.890.890,00	214.890.890,00
	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	2.186.215.273,00	898.986.254,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	370.100,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	5.553.378.925,00	3.145.126.641,00
Total		1.261.333.553.000,00	1.167.640.051.880,00	1.048.738.929.480,00



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 9

PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN



LAPORAN PERINGKAT REALISASI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	KEMENTERIAN AGAMA	79,907,460,420,000	80,371,779,903,235	100.58%
2	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	607,819,406,000	606,410,005,802	99.77%
3	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	267,207,371,000	266,404,815,683	99.7%
4	BADAN GIZI NASIONAL	55,089,578,000	54,831,307,000	99.53%
5	BADAN PANGAN NASIONAL	36,566,072,001,000	36,391,671,109,966	99.52%
6	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,563,971,945,000	4,518,545,319,859	99%
7	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	53,679,480,000	53,130,944,432	98.98%
8	LEMBAGA SANDI NEGARA	894,547,584,000	884,169,631,849	98.84%
9	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	324,073,949,000	319,654,539,949	98.64%
10	BADAN KEAMANAN LAUT	1,213,977,911,000	1,196,090,335,743	98.53%
11	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	19,113,567,046,000	18,802,162,856,769	98.37%
12	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,377,179,459,000	1,353,579,654,064	98.29%
13	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	279,461,666,000	274,426,214,329	98.2%
14	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,385,824,117,000	1,358,476,484,431	98.03%
15	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	236,349,314,000	231,636,430,603	98.01%
16	KEMENTERIAN SOSIAL	80,287,971,882,000	78,659,077,001,013	97.97%
17	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	21,326,052,100,000	20,893,237,610,712	97.97%
18	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9,118,292,894,000	8,908,116,435,924	97.7%
19	KEMENTERIAN PERTAHANAN	192,081,623,721,000	187,623,735,452,642	97.68%
20	MAHKAMAH AGUNG	11,925,492,498,000	11,627,165,977,786	97.5%
21	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	3,240,574,636,000	3,159,110,990,180	97.49%
22	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,229,500,497,000	1,198,160,402,711	97.45%
23	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6,101,766,009,000	5,945,949,224,990	97.45%
24	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,208,445,000	182,132,211,150	97.29%
25	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	332,790,179,000	323,685,462,402	97.26%
26	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7,122,691,356,000	6,913,364,953,373	97.06%
27	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	283,568,272,000	275,165,875,155	97.04%
28	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	136,702,950,582,000	132,653,605,356,964	97.04%
29	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	4,950,792,976,000	4,801,341,341,450	96.98%
30	KOMISI YUDISIAL RI	170,866,562,000	165,694,233,451	96.97%
31	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	241,061,239,000	233,635,303,582	96.92%
32	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3,856,623,804,000	3,733,612,068,212	96.81%
33	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	5,205,771,827,000	5,021,069,637,329	96.45%
34	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	308,016,126,000	297,011,269,745	96.43%
35	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	450,466,107,000	433,338,930,871	96.2%
36	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1,581,064,124,000	1,519,896,084,525	96.13%
37	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	5,274,570,053,000	5,068,207,384,831	96.09%
38	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2,190,446,944,000	2,095,363,388,606	95.66%
39	KEMENTERIAN KEUANGAN	86,634,937,868,000	82,820,358,427,916	95.6%
40	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	104,655,221,945,000	99,832,738,425,001	95.39%
41	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	8,249,571,734,000	7,861,148,300,368	95.29%
42	KEMENTERIAN KESEHATAN	99,866,882,949,000	95,055,476,574,523	95.18%
43	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	134,183,314,000	127,231,403,996	94.82%
44	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	148,044,370,000	139,598,055,919	94.29%
45	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	248,841,107,000	234,516,025,848	94.24%
46	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,826,446,478,000	2,660,963,084,046	94.15%
47	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	286,736,181,000	269,413,778,899	93.96%
48	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	2,111,367,018,000	1,980,676,660,570	93.81%
49	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	725,830,194,000	680,904,552,149	93.81%
50	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	534,813,627,000	500,661,517,003	93.61%
51	KEMENTERIAN PARIWISATA	3,538,787,014,000	3,308,727,914,973	93.5%
52	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	142,294,415,000	133,008,054,945	93.47%
53	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	5,139,600,992,000	4,802,469,210,561	93.44%
54	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,585,468,841,000	2,415,515,614,787	93.43%
55	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	174,137,302,977,000	162,657,722,833,015	93.41%
56	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1,229,295,942,000	1,147,741,378,665	93.37%
57	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,354,321,946,000	2,192,766,996,069	93.14%
58	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	924,541,351,000	858,280,338,723	92.83%

59	BADAN PUSAT STATISTIK	4,776,013,194,000	4,411,441,020,413	92.37%
60	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,047,662,960,000	965,509,367,948	92.16%
61	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	835,766,073,000	769,651,359,203	92.09%
62	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19,785,099,777,000	18,159,931,897,974	91.79%
63	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	8,503,573,468,000	7,793,851,649,045	91.65%
64	KEMENTERIAN PERTANIAN	15,614,583,024,000	14,299,446,173,319	91.58%
65	SEKRETARIAT KABINET	517,105,348,000	472,879,452,171	91.45%
66	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,573,228,177,000	1,435,689,618,124	91.26%
67	BADAN INTELIJEN NEGARA	33,559,340,605,000	30,509,523,292,632	90.91%
68	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	530,730,496,000	478,650,907,543	90.19%
69	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	324,921,688,000	292,322,295,043	89.97%
70	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	3,470,442,800,000	3,114,450,746,322	89.74%
71	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	244,786,416,000	219,405,467,864	89.63%
72	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	6,144,346,237,000	5,499,258,763,028	89.5%
73	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPPI)	351,048,527,000	314,187,569,836	89.5%
74	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	342,941,526,000	304,439,705,935	88.77%
75	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	2,102,360,067,000	1,863,051,348,066	88.62%
76	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1,710,523,612,000	1,500,101,756,801	87.7%
77	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1,527,287,931,000	1,337,334,385,631	87.56%
78	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	62,306,538,000	54,277,119,482	87.11%
79	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,248,311,610,000	6,275,337,103,442	86.58%
80	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	3,063,460,970,000	2,647,409,074,448	86.42%
81	KOMISI PEMILIHAN UMUM	50,123,089,600,000	43,027,547,235,862	85.84%
82	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	45,855,292,831,000	39,034,450,972,554	85.13%
83	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,910,041,619,000	4,991,298,230,173	84.45%
84	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	672,117,450,000	497,490,623,495	74.02%
85	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	18,123,415,698,000	12,882,583,445,880	71.08%
86	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	827,155,989,000	456,235,785,897	55.16%



REALISASI BELANJA ES.1 PER JENIS BELANJA

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	02201 SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU REALISASI	153,147,106,000 152,500,922,290 (99.58%)	450,495,032,000 426,752,485,760 (94.73%)	58,954,280,000 57,734,429,309 (97.93%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	662,596,418,000 636,987,837,360 (96.14%)
		SISA	646,183,710	23,742,546,240	1,219,850,691	0	0	0	0	0	0	25,608,580,640
2	02202 INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU REALISASI	50,227,251,000 50,188,210,976 (99.92%)	61,075,818,000 57,534,690,263 (94.20%)	3,921,753,000 3,879,369,347 (98.92%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	115,224,822,000 111,602,270,586 (96.86%)
		SISA	39,040,024	3,541,127,737	42,383,653	0	0	0	0	0	0	3,622,551,414
3	02203 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU REALISASI	665,206,211,000 661,720,639,858 (99.48%)	3,797,185,479,000 3,545,374,992,202 (93.37%)	2,287,906,931,000 2,132,252,886,190 (93.20%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	6,750,298,621,000 6,339,348,518,250 (93.91%)
		SISA	3,485,571,142	251,810,486,798	155,654,044,810	0	0	0	0	0	0	410,950,102,750
4	02204 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU REALISASI	1,963,838,533,000 1,916,276,036,582 (97.58%)	5,528,147,295,000 5,199,324,293,150 (94.05%)	7,146,494,406,000 6,900,317,568,813 (96.56%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	14,638,480,234,000 14,015,917,898,545 (95.75%)
		SISA	47,562,496,418	328,823,001,850	246,176,837,187	0	0	0	0	0	0	622,562,335,455
5	02205 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU REALISASI	1,065,923,101,000 1,050,693,397,174 (98.57%)	3,297,284,059,000 3,039,344,827,390 (92.18%)	3,878,729,504,000 3,619,907,398,883 (93.33%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	8,241,936,664,000 7,709,945,623,447 (93.55%)
		SISA	15,229,703,826	257,939,231,610	258,822,105,117	0	0	0	0	0	0	531,991,040,553
6	02208 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	189,147,790,000 186,188,948,422 (98.44%)	2,880,697,829,000 2,394,880,557,984 (83.14%)	7,654,023,149,000 3,249,404,192,951 (42.45%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	10,723,868,768,000 5,830,473,699,357 (54.37%)
		SISA	2,958,841,578	485,817,271,016	4,404,618,956,049	0	0	0	0	0	0	4,893,395,068,643
7	02211 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	PAGU REALISASI	41,936,254,000 41,488,904,048 (98.93%)	147,709,606,000 139,746,630,921 (94.61%)	6,811,480,000 6,807,745,011 (99.95%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	196,457,340,000 188,043,279,980 (95.72%)
		SISA	447,349,952	7,962,975,079	3,734,989	0	0	0	0	0	0	8,414,060,020



8	02212 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	PAGU REALISASI	358,576,891,000 352,632,786,597 (98.34%)	3,071,443,402,000 2,858,287,605,905 (93.06%)	766,235,660,000 673,968,964,656 (87.96%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,196,255,953,000 3,884,889,357,158 (92.58%)
		SISA	5,944,104,403	213,155,796,095	92,266,695,344	0	0	0	0	0	0	311,366,595,842
9	02213 BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU REALISASI	37,157,078,000 37,150,877,808 (99.98%)	228,563,153,000 222,481,822,129 (97.34%)	64,453,780,000 57,609,787,934 (89.38%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	330,174,011,000 317,242,487,871 (96.08%)
		SISA	6,200,192	6,081,330,871	6,843,992,066	0	0	0	0	0	0	12,931,523,129
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	4,525,160,215,000 4,448,840,723,755 (98.31%)	19,462,601,673,000 17,883,727,905,704 (91.89%)	21,867,530,943,000 16,701,882,343,094 (76.38%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	45,855,292,831,000 39,034,450,972,554 (85.13%)
		SISA	76,319,491,245	1,578,873,767,296	5,165,648,599,906	0	0	0	0	0	0	6,820,841,858,446



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 10
TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN

**Rekapitulasi Survey Kepuasan Pelayanan
Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Periode Triwulan IV Tahun 2024**

Pertanyaan	Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik	Total
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan SDM/Kepegawaian [Layanan kepangkatan dan gaji pegawai (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan lainnya)]	0	12	34	83	46	175
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan SDM/Kepegawaian [Layanan pengembangan kompetensi pegawai (tugas belajar, keikutsertaan pendidikan dan pelatihan manajerial pegawai, dan lainnya)]	0	13	37	80	45	175
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan SDM/Kepegawaian [Layanan mutasi dan jenjang karir pegawai]	0	16	37	83	39	175
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan SDM/Kepegawaian [Layanan pengaduan dan tindak lanjutnya terkait kepegawaian]	0	15	37	82	41	175
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan SDM/Kepegawaian [Layanan pembinaan/sosialisasi terkait kepegawaian]	0	15	32	87	41	175
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan SDM/Kepegawaian [Layanan kepegawaian lainnya (arsip/data kepegawaian, ijin cuti, penyesuaian ijasah, ujian dinas, dan lainnya)]	0	14	34	80	47	175
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan SDM/Kepegawaian [Kemampuan dan sikap Petugas (Tim SDM) dalam memberikan layanan kepegawaian]	0	9	30	84	52	175
Catatan dan Masukan terhadap Layanan SDM/Kepegawaian	0	0	1	2	2	
2. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Tata Usaha [Layanan surat menyurat di lingkungan Ditjen Perkeretaapian]	0	8	30	86	51	175
2. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Tata Usaha [Layanan pengelolaan kearsipan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian]	0	10	33	83	49	175
2. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Tata Usaha [Layanan keprotokolan pimpinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian]	0	9	25	92	49	175
2. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Tata Usaha [Layanan pengaduan dan tindak lanjutnya terkait tata usaha]	0	10	34	83	48	175
2. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Tata Usaha [Layanan pembinaan/sosialisasi terkait tata usaha]	0	11	28	87	49	175
2. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Tata Usaha [Layanan tata usaha lainnya (ekspedisi, penggandaan, dan lainnya)]	0	10	30	89	46	175
2. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Tata Usaha [Kemampuan dan sikap Petugas (Tim TU) dalam memberikan layanan tata usaha]	0	8	30	88	49	175
Catatan dan Masukan terhadap Layanan Tata Usaha	0	0	1		1	
3. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Kondisi fungsi dan kelengkapan fasilitas Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian (ruang kerja, ruang rapat, dan lainnya)]	0	8	29	85	53	175
3. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Kondisi kebersihan, keindahan/kerapian dan kenyamanan fasilitas Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian (ruang kerja, ruang rapat, dan lainnya)]	0	8	22	88	57	175
3. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian]	0	5	26	92	52	175
3. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan penanggulangan darurat akibat bencana di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian]	0	8	29	91	47	175
3. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan pengadaan barang milik negara untuk fasilitas perkantoran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian]	0	9	32	83	51	175
3. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian]	0	5	26	93	51	175
3. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan pengaduan dan tindak lanjutnya terkait Rumah Tangga/Umum]	0	8	35	84	48	175
3. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan pembinaan/sosialisasi terkait Rumah Tangga/Umum]	0	9	33	86	47	175
3. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan Rumah tangga/Umum lainnya (kesehatan pegawai/MCU, fasilitas transportasi pegawai, pakaian dinas, ATK, dan lainnya)]	0	11	31	84	49	175
3. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Kemampuan dan sikap Petugas (Tim RT/Umum) dalam memberikan layanan umum/rumah tangga]	0	7	30	87	51	175
Catatan dan Masukan terhadap Layanan Rumah Tangga / Umum	0	0	1	3	1	

Uraian	Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik	Total	Skala 4
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan SDM/Kepegawaian	0	94	241	579	211	1.225	3,62
2. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Tata Usaha	0	66	210	608	241	1.225	3,73
3. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum	0	78	293	873	506	1.750	3,78
							3,71

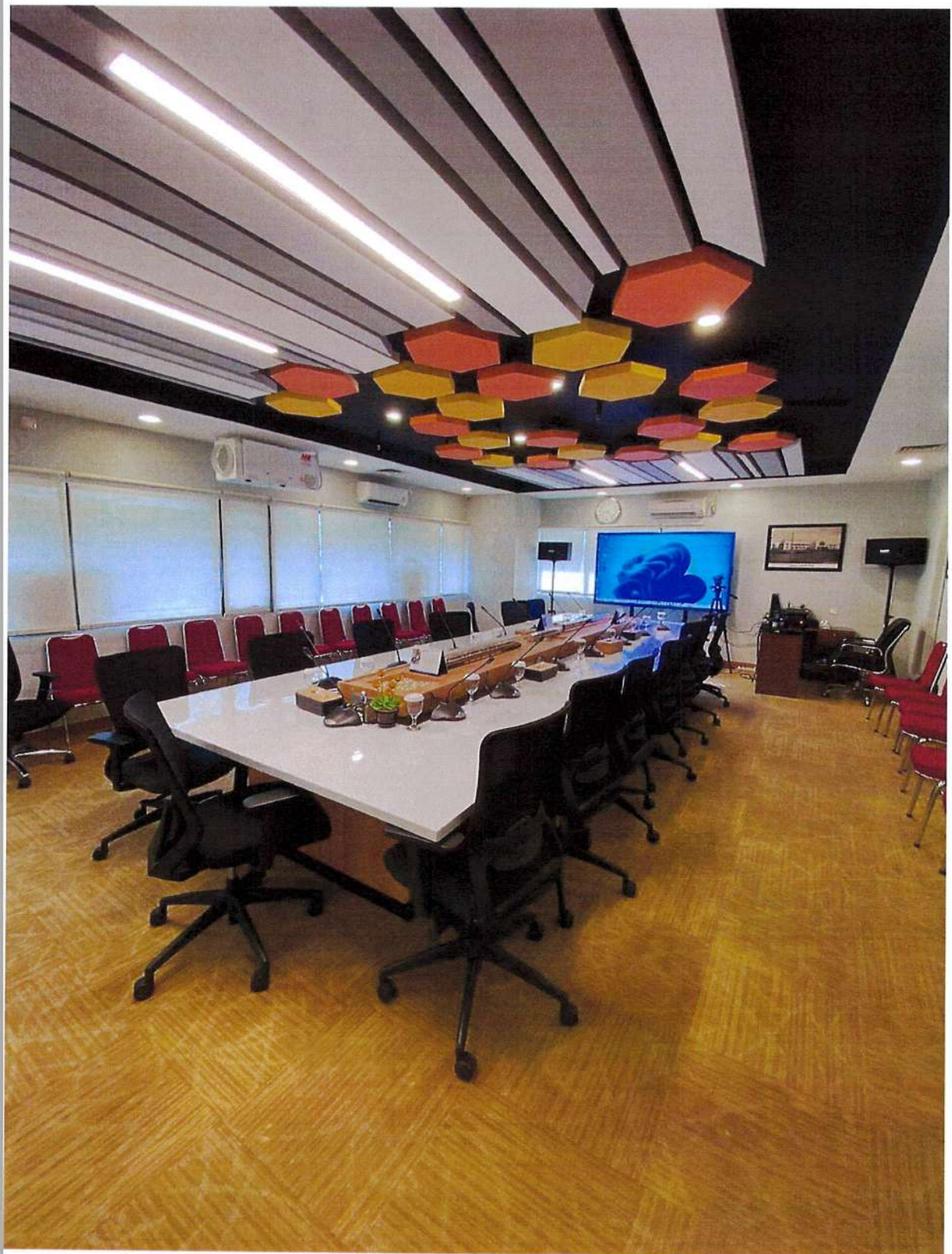
Jakarta,
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum


INDRIATI, S.E. M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 198106072005022001

**Data Dukung Pelayanan Perkantoran
Tahun 2025**











LAMPIRAN VI

**DOKUMENTASI DAN LAPORAN PEMBAHASAN
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**

No. ST	: ST-K1 DJKA 20 Tahun 2025
Lokasi	: Jakarta



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA DAN REVIU PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
SERTA LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JANUARI 2025

**PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA DAN REVIU PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
SERTA LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024**

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/1/1/K1/DJKA/2025 tanggal 3 Januari 2025 perihal undangan rapat.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 20 Tahun 2025 tanggal 7 Januari 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Hotel Luminor, Bogor
2. Tanggal : Rabu-Jumat, 8-10 Januari 2025
3. Peserta Rapat : Perwakilan dari:
 - a. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
 - b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
 - c. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
 - d. Direktorat Sarana Perkeretaapian;
 - e. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
 - f. Bagian Keuangan;
 - g. Bagian Hukum;
 - h. Bagian SDM dan Umum;
 - i. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
 - j. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
 - k. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
 - l. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
 - m. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
 - n. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
 - o. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
 - p. Balai Pengujian Perkeretaapian;
 - q. Balai Perawatan Perkeretaapian;
 - r. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
 - s. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;

4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Registrasi
 - b. Konsep Laporan Kinerja Tahun 2024 unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - c. Pemaparan Materi Peningkatan Kualitas Penulisan Dalam Penyampaian Substansi Pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - d. Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Kinerja;
 - e. Pembahasan Laporan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja serta Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024.
 - f. Penutupan

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian kinerja dan reviu pelaporan kinerja Tahun 2024 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Pembahasan Konsep Laporan Kinerja Tahun 2024 unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:
 - a) Terdapat 10 Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mengacu kepada capaian pada Perjanjian Kinerja (PK), diantaranya:
 - 1) IKK 1 Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas yang telah ditindaklanjuti.
 - 2) IKK2 Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian).
 - 3) IKK3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian.
 - 4) IKK4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian.
 - 5) IKK5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian.
 - 6) IKK6 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian.
 - 7) IKK7 Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 - 8) IKK8 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian.
 - 9) IKK9 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian.
 - 10)IKK10 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian.

- b) Pada Tahun 2024 terdapat 2 kegiatan rekomendasi yaitu Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan Dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogyakarta – Palur (selesai November 2024) dan Rekomendasi Lokasi Kantor Balai Pengujian Perkeretaapian. Terdapat 2 kegiatan yang terkena *Automatic Adjustment (AA)* yaitu studi RPM Trem Otonom dan Rencana Induk Perkeretaapian dan *beanchmarking* (akan diusulkan di Tahun 2025).
- c) Realisasi pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 terdapat 7 peraturan yang telah terbit diantaranya:

No	Nomor	Peraturan Tentang	Keterangan
1.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2024	Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Diundangkan tanggal 22 Februari 2024
2.	PM 8 Tahun 2024	Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif PNBPN di DJKA	Diundangkan tanggal 28 Juni 2024
3.	PM 14 Tahun 2024	Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	Diundangkan tanggal 4 Juli 2024
4.	PM 16 Tahun 2024	Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	Diundangkan tanggal 23 Juli 2024
5.	PM Nomor 27 Tahun 202	Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	Tanggal Penetapan 27 September 2024 Tanggal Pengundangan 14 Oktober 2024
6.	PM 31 Tahun 2024	Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian	Tanggal Penetapan 29 November 2024 Tanggal Pengundangan 12 Desember 2024
7.	PM 32 Tahun 2024	Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik	Diundangkan 9 Desember 2024

		Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi	

Terdapat arahan arahan dari Inspektorat Jenderal bahwa capaian legislasi agar fokus terhadap peraturan yang bersifat eksternal/teknis. Periode 2020 - Triwulan IV Tahun 2024 terdapat 51 peraturan yang telah terpublish dalam JDIH, telah tercapai dari target sebanyak 49 peraturan. Apabila Kepdirjen akan di drop dari list peraturan maka capaian tetap tercapai sebanyak 49 peraturan yang telah terbit/dipublikasikan. Upaya peningkatan yang dilaksanakan adalah salah satunya pembahasan dengan BKT mengenai reviu terhadap UU Nomor 23 Tahun 2007, pembahasan mengenai peraturan BUPP, Perpres KA Cepat dan Pembahasan angkutan barang ROLA dengan Direktorat LLAKA.

- d) ASN Ditjen Perkeretaapian saat ini sebanyak 1.823 pegawai terdiri dari PNS sebanyak 1.414 pegawai, CPNS sebanyak 246 pegawai dan P3K sebanyak 163 pegawai serta Non ASN 624 pegawai. Terdapat selisih 1 pegawai antara data SIK dan DUK. Selain itu jumla pegawai yang mengikuti diklat/memiliki sertifikat kompetensi/keahlian sampai dengan Triwulan IV sebanyak 1.156 pegawai namun sebelumnya terdapat 1.147 pegawai (indikasi penambahan pada diklat *Effective Coaching & Monitoring*). Perlu dilakukan pengecekan dan sonkronisasi data Kembali serta perlu ditambahkan Upaya yang telah dilaksanakan untuk analisis keberhasilan (faktor, kendala, analisis), Upaya peningkatan kinerja kedepanya.
- e) Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 terdapat 17 kegiatan siaran pers, publikasi sebanyak 365 postingan media sosial (Instagram, fb, dan tiktok), serta keterbukaan sektor informatif berdasarkan penilaian dari PPID DJKA memperoleh predikat informatif dengan nilai 90. Untuk itu perlu menyampaikan konsep analisis keberhasilan pada Tahun 2024 (analisis kegiatan yang telah dilakukan, kendala, dll) serta Upaya peningkatan kinerja kedepanya (Bimtek Kehumasan, FGD/Sosiliasi program perkeretaapian pada kegiatan CFD dll) kepada Bagian Perencanaan.
- f) Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian progres sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1,2 T dari target 2024 (92,2%). Belum tercapainya realisasi pendapatan PNBP

terjadi pada akun pendapatan penggunaan sarana dan prasarana. Terdapat kendala diantaranya:

- 1) Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana dikarenakan kurangnya pengajuan sewa untuk sarana.
 - 2) Terdapat perubahan/transisi regulasi perhitungan nilai PNB/TAC .
 - 3) Kurangnya sosialisasi dengan stakeholder, ketersediaan SDM di bidang perkeretaapian, dan
 - 4) Belum optimalnya pemanfaatan BMN DJKA (sewa lahan).
- g) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian Tahun 2024 diperoleh berdasarkan penyerapan anggaran pada Om SPAN sebesar 5,8T dari 10,7 T (54,24%). Akan ada indikasi penambahan/update capaian penyerapan anggaran menjadi 54,36% dan saat ini sedang diusulkan revisi LMAN, sehingga berpengaruh pada capaian. Pada Tahun 2024 terdapat beberapa kendala diantaranya:
- 1) Sumber dana RM tidak terserap karena adanya *Automatic Adjustment (AA)*, blokir perjadi dan selisih pagu/kontrak. Selisih signifikan ada pada pelaksanaan pada pelaksanaan kegiatan IMO BTP Kelas II Padang dikarenakan terdapat jalur yang masuk dalam perjanjian konsesi sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan perawatan (tidak terserap).
 - 2) Sumber dana SBSN tidak terserap dengan maksimal diantaranya pada kegiatan yang direncanakan SYC namun karena dokumen teknis belum selesai sampai dengan TW II Tahun 2024 sehingga KTJ tidak dapat direalisasikan. Untuk kegiatan MYC dikarenakan ada nya gagal tender/tender ulang, pengadaan lahan, reu dokumen teknis,kasus hukum, keterbatasan waktu sehingga fisik terlambat sehingga mempengaruhi terhadap pengoptimalan anggaran.
 - 3) Sumber dana PLN terdapat blokir dan terdapat kegiatan yang tidak terserap karena salah satunya perbedaan/selisih kurs.
 - 4) Sumber dana BLU signifikan pada belanja Listrik BPKAR Sumsel yang mengalami perubahan lebih rendah.
- h) Setiap bagian/satker untuk dapat menyampaikan data dukung berupa uraian data capaian, analisis keberhasilan/kegagalan dan upaya peningkatan kinerja Tahun berikutnya termasuk Nota Dinas kepada Setditjen yang ditembuskan

kepada Bagian Perencanaan sebagai komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja pada setiap triwulanya.

3. Pembahasan Materi Peningkatan Kualitas Penulisan Dalam Penyampaian Substansi Pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a) Menindaklanjuti masukan dari Kementerian PUPR terdapat saran/rekomendasi untuk penulisan laporan kinerja melibatkan *expert* dan Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. Pada penerapannya dari segi teknis/substansi sudah terpenuhi namun perlu diperhatikan dalam tata cara untuk implementasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kaidah.

b) Dalam penulisan/penyampaian pada laporan kinerja diharapkan dapat mengacu kepada kaidah bahasa yang benar. Untuk saat ini kaidah Bahasa Indonesia dapat mengacu kepada beberapa pedoman, diantaranya:

- 1) Ejaan BI yang disempurnakan (EYD) Edisi V
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Edisi VI
- 3) Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUI) Edisi III
- 4) Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TBB) Edisi IV

Saat ini kemudahan untuk mengakses kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar selain diakses melalui web dapat juga diakses melalui aplikasi halo Bahasa dan aplikasi KBBI V (pada play store dan app store).

c) Laporan terdiri dari laporan ilmiah dan laporan teknis, laporan kinerja merupakan salah satu jenis laporan teknis. Ciri – ciri laporan yang baik diantaranya:

- 1) Logis dimana informasi yang disajikan masuk akal
- 2) Sistematis dimana informasi yang disampaikan memperlihatkan urutan dan pertalian satu sama lain.
- 3) Jelas dimana Bahasa yang digunakan tidak ambigu.
- 4) Lugas dimana Bahasa yang digunakan langsung mengungkapkan pokok permasalahan dan tidak berbelit – belit sehingga mudah dipahami.

d) Penggunaan Bahasa dalam penulisan kalimat pada pelaporan kinerja juga perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya:

- 1) Laporan harus menggunakan bahasa Indonesia baku (penulisan ejaan, bentuk kata, pilih kata, kalimat);
- 2) Penulisan ejaan baku: mengikuti EYD;

- 3) Bentuk kata: sesuai dengan kaidah pembentukan kata;
 - 4) Penggunaan kalimat baku: mengikuti struktur bakukalimat bahasa Indonesia;
 - 5) Laporan harus menggunakan kalimat yang efektif;
 - 6) Laporan harus menggunakan paragraf yang baik.
- e) Dalam penulisan kalimat pada pelaporan kinerja juga perlu memperhatikan kelengkapan unsur kalimat, hal – hal yang harus diperhatikan:
- 1) Subjek tidak didahului kata depan;
 - 2) Tidak terdapat subjek ganda;
 - 3) Penggunaan kata hubung yang tepat;
 - 4) Tidak terjadi pengulangan subjek;
 - 5) Penghematan kata dalam kalimat;
 - 6) Tidak ambigu, mubazir dan rancu.
- f) Terdapat penulisan ejaan yang kurang tepat pada pelaporan kinerja DJKA Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

Salah	Benar
Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif; 3. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif.	Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut: 1. meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan; 2. meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif; dan 3. meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif.
Rencana Strategis 2020-2024	Rencana Strategis 2020 – 2024
Handal	Andal
Tolak ukur	Tolok ukur
Rincian	Perincian
Standarisasi	Standardisasi
Perijinan	Perizinan
Antar kota	Antarkota
Monitoring	<i>Monitoring</i>
Gotong-royong	Gotong royong

Salah	Benar
Rp 7.776.454.929.000,-	Rp7.776.454.929.000,00
RIPNAS	Ripnas
Didalam	Di dalam
Diantaranya	Di antaranya

Terkait dengan penulisan yang sudah menjadi ketentuan/aturan dari masing – masing K/L untuk dapat menyesuaikan kepada aturan tersebut, seperti penulisan Grafik Perjalan Kereta Api (GAPEKA), Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) dan lainnya.

- g) Setelah laporan kinerja dan laporan lainnya sudah selesai penulisan/pembahasan/final untuk dapat dilakukan pengecekan kembali kalimat – kalimat sesuai dengan kaidah/pedoman pada web/aplikasi yang telah disediakan seperti pada link <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> dan <https://pasti.kemdikbud.go.id/>

4. Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Kinerja:

- a) Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja berdasarkan LMCK Triwulan III, diidentifikasi beberapa indikator kinerja yang berkinerja rendah (<90%) diantaranya:

- 1) Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis (BTP Medan);
- 2) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (BTP Medan, BTP Padang);
- 3) Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perkeretaapian (BTP Jakarta, BPKAR Sumsel).

Berikut rata – rata capaian kinerja berdasarakan LMCK Triwulan III Tahun 2024:

No	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan LMCK TW III Tahun 2024 (%)
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	104,38
2	Balai Perawatan Perkeretaapian	103,82
3	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	103,19
4	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	102,60
5	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	102,52
6	Balai Pengujian Perkeretaapian	102,50
7	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	102,23
8	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	101,08
9	Direktorat Sarana Perkeretaapian	101,05
10	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	101,05
11	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	100,97
12	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	100,85
13	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	98,08
14	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	97,94
15	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	95,49
16	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	90,46

Disampaikan pula beberapa rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja tersebut di atas:

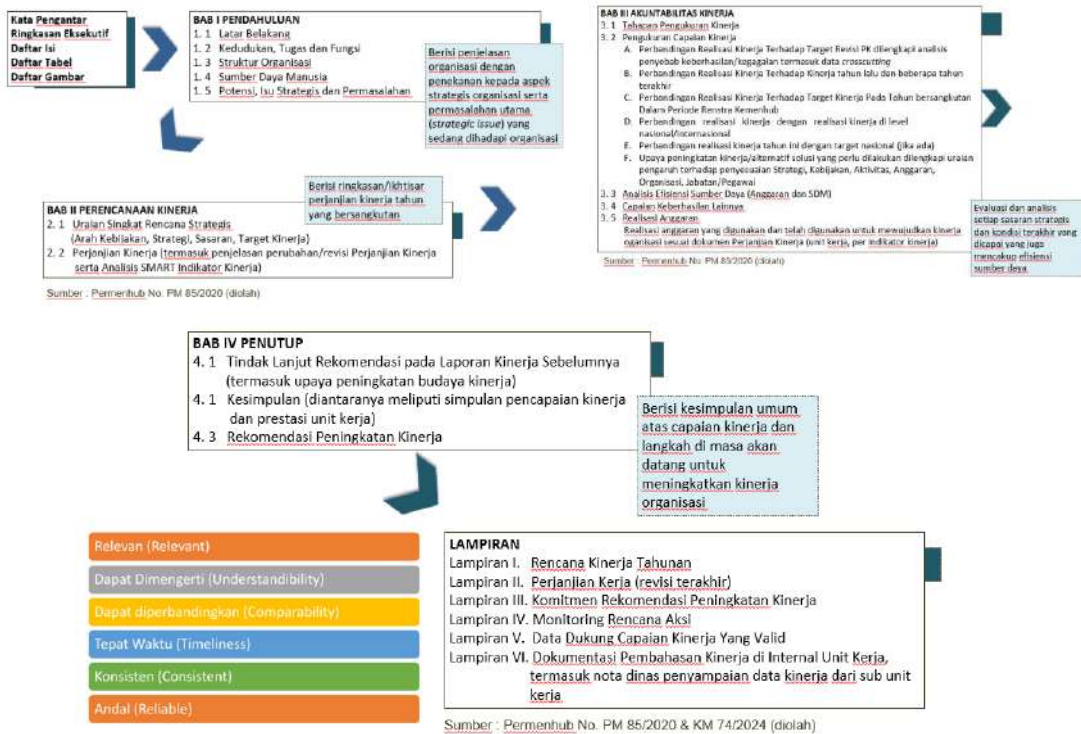
- 1) Koordinasi dengan operator/PT.KAI untuk percepatan perbaikan sarana KA perintis termasuk pemantauan intensif terhadap realisasi perjalanan KA perintis sesuai kontrak dan pemenuhan standar pelayanan yang berlaku;
 - 2) Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) melalui percepatan penyerapan anggaran termasuk proses penyesuaian skema MYC Kegiatan Strategis, peningkatan pencapaian output (CRO) serta pengurangan deviasi RPD guna mendukung nilai konsistensi;
 - 3) Penyelesaian status aset barang milik negara (lahan, bangunan, lainnya) yang dapat dioptimalkan untuk peningkatan perolehan PNBP.
- b) Pelaksanaan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja Triwulan III Tahun 2024 mencakup evaluasi pemenuhan Laporan Monitorng Capaian Kinerja serta kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Kementerian

Perhubungan (e-Performance) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Aplikasi). Rata-Rata TW III 2024 : 88,29%. Rincian nilai masing – masing unit kerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan LMCK TW III Tahun 2024 (%)
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	104,38
2	Balai Perawatan Perkeretaapian	103,82
3	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	103,19
4	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	102,60
5	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	102,52
6	Balai Pengujian Perkeretaapian	102,50
7	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	102,23
8	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	101,08
9	Direktorat Sarana Perkeretaapian	101,05
10	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	101,05
11	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	100,97
12	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	100,85
13	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	98,08
14	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	97,94
15	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	95,49
16	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	90,46

- c) Telah dilakukan pemantauan pelaporan kinerja pada aplikasi E-Sakip Reviu, E-Performance, SILAKI, E-Monev Bappenas dimana masih terdapat beberapa balai/unit kerja yang belum melakukan pengisian/upload data dukung. Diharapkan masing – masing unit kerja untuk dapat mengecek kembali dan melengkapi pengisian pada aplikasi kinerja tersebut.
5. Pembahasan Laporan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja serta Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024:
- a) Laporan Kinerja merupakan Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan VISI, MISI dan STRATEGI Instansi Pemerintah (berdasarkan PK, Renstra).
 - b) Format penulisan laporan kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan system

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimana terdiri dari 4 BAB dan 6 lampiran.



c) Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran dan masing – masing indikator kinerja minimal memuat:

- 1) Perbandingan realisasi kinerja terhadap target revisi PK dilengkapi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan termasuk data crosscutting.
- 2) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target nasional (jika ada).
- 3) Perbandingan realisasi kinerja terhadap kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 4) Perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja pada tahun bersangkutan dalam periode Renstra Kemendagri
- 5) Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional
- 6) Upaya peningkatan kinerja/alternatif Solusi yang perlu dilakukan dilengkapi uraian pengaruh terhadap penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran, organisasi, jabatan/pegawai.

d) Pada laporan kinerja 2024, pengukuran kinerja yang membandingkan capaian kinerja dilakukan dengan range waktu 4 tahun (2020 – 2024) termasuk dengan capaian renstra.

e) Analisis Sumber daya manusia tidak harus membahas mengenai SDM, namun sumber daya lainya yang dapat mempengaruhi capaian kinerja seperti sumber daya keuangan dll. Analisis efisiensi sumber daya (Anggaran,SDM, dan sarana prasarana) dapat menggunakan/mengacu kepada pedoman SAKIP/ yang mendukung sasaran kinerja, selain itu alternatif lainya sebagai berikut:

- 1) Efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit Eselon I dan Efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja.
- 2) membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.
- 3) jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan.
- 4) Efisiensi dapat diperoleh dari blokir AA/sisa perjalanan dinas, sisa kontak yang tidak terserap
- 5) Selain itu Analisa SDM dapat dihitung dengan rumus rasio SDM dimana membandingkan kebutuhan SDM sesuai beban kerja dengan SDM yang tersedia saat ini, kemudian setelah itu disandingkan dengan rasio output. Adapun perhitungan sebagai berikut:

1. Hitung rasio SDM terhadap kebutuhan ABK:
$\text{Rasio SDM} = \frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} = \frac{10}{12} = 0,8333 (83,33\%)$
2. Hitung rasio output aktual terhadap target output:
$\text{Rasio Output} = \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Target Output}} = \frac{80}{100} = 0,8 (80\%)$
3. Hitung efisiensi SDM:
$E_{\text{SDM}} = (0,8333 \times 0,8) \times 100\% = 66,67\%$

f) Waktu penyusunan laporan kinerja berdasarkan Permenhub Nomor 85 tahun 2020, laporan kinerja unit kerja eselon I ditargetkan penyampaianya paling lambat 45 hari, unit kerja eselon II 30 hari, satker/balai 25 hari. Selain itu perlu diperhatikan terdapat target pelaporan kinerja triwulan IV. Adapun secara rinci sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA	DISUSUN	DITANDATANGANI	DISAMPAIKAN KE	KAPAN
Kementerian	Sesjen c.q Kepala Biro Perencanaan	Menteri	•Menteri Keuangan •Kepala Bappenas/ Men PPN •Menteri PAN & RB	2 bulan
Unit Kerja Eselon I	Pimpinan Tinggi Madya	Pejabat JPT Madva	Menteri Perhubungan	45 hari
Unit Kerja Eselon II	Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat JPT Pratama	Pejabat JPT Madva	30 hari
Satuan Kerja	Pimpinan Satuan Kerja	Pimpinan Satuan Kerja	Atasan Langsung	25 hari

g) Penyusunan laporan kinerja selain mengacu kepada pedoman SAKIP/Permenhub Nomor 85 Tahun 2020 juga dilakukan *beanchmarking* terhadap laporan kinerja dari Kemenkeu dan PUPR. Adapun format laporan kinerja dari Kemenkeu terdiri dari:

Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi C. Mandat dan Peran Strategis D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2022 E. Sistematika Laporan Bab II Perencanaan Kinerja A. Rencana Strategis B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2022 dan 2023 C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenkeu Tahun Anggaran 2022 D. Refinement Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu Tahun 2022 dan 2023	Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi • Perbandingan dengan tahun sebelumnya (Tren); • Perbandingan dengan target Renstra atau Standar lainnya • Pengungkapan Faktor Kendala, <i>Extra Effort</i> , dan Upaya Peningkatan Capaian Kinerja Tahun berikutnya A. Realisasi Agenda Prioritas B. Realisasi Anggaran C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya D. Kinerja Lain-lain (<i>Achievement</i> , Penghargaan, Inovasi, Replikasi) E. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Bab IV Penutup Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, upaya perbaikan, inovasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran (Perjanjian Kinerja dan Pernyataan Reviu oleh Itjen)

Selain itu untuk menjadi referensi dapat dilakukan *beanchmarking* pada pelaporan kinerja PUPR, yang terdiri dari:

PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH INSPEKTUR JENDERAL KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI, TABEL, GAMBAR DAFTAR SINGKATAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tugas dan Fungsi 1.3 Struktur Organisasi** 1.4 Isu Strategis (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja)** 1.5 Peran Strategis Kementerian PUPR (khusus laporan kinerja kementerian) 1.6 Sistematika Laporan	BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja) 2.1.1 Visi 2.1.2 Misi 2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi 2.1.4 Program dan Kegiatan Pembangunan 2.2 Perjanjian Kinerja (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja) 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal 2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir 2.2.3 Kronologi Perubahan PK 2.3 Target Kinerja Tahun Yang dilaporkan Menurut Rencana Strategis (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja) 2.3.1 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja) (periode Renstra yang dilaporkan) 2.3.2 Target Keluaran Utama (khusus laporan kinerja kementerian)
BAB III KAPASITAS ORGANISASI 3.1 Sumber Daya Manusia 3.1.1 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan 3.1.2 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia 3.2 Sarana Prasarana 3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 3.4 Analisis Sumber Daya Manusia dan Anggaran	

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA**

- 4.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja*
- 4.2 Capaian Kinerja (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja)**
 - 4.2.1 Analisis Capaian Kinerja (Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan) x (x=nomenklatur SS/SP/SK)
- 4.3 Perbandingan Kinerja (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja)**
 - 4.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**
 - 4.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah
 - 4.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja *Output* terhadap Target Nasional (khusus laporan kinerja kementerian)*
 - 4.3.4 Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)*
- 4.4 Realisasi Anggaran**
 - 4.4.1 Analisis Penyerapan Anggaran TA-n (n=tahun yang dilaporkan)
 - 4.4.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*
- 4.5 Analisis Pemanfaatan Laporan Kinerja*
- 4.6 Penghargaan Atas Kinerja (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja)*
- 4.7 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penggunaan Layanan Publik Kementerian PUPR (khusus laporan kinerja kementerian)*

BAB V PENUTUP**

- 5.1 Simpulan Umum
- 5.2 Faktor Pendukung Keberhasilan
- 5.3 Permasalahan
- 5.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

LAMPIRAN*

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kementerian
- Lampiran 2 Penghargaan
- Lampiran 3 Pengukuran Kinerja
- Lampiran 4 Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja
- Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan

h) Beberapa hal yang dapat ditambahkan pada pelaporan kinerja Ditjen Perkeretaapian adalah:

- 1) Penambahan realisasi agenda prioritas (RPJMN, PSN dll);
- 2) Analisis sumber daya menjelaskan/membahas mengenai sarana dan prasarana perkantoran serta DIPA;
- 3) Berita acara revidi kegiatan laporan kinerja;
- 4) Untuk menjaga kualitas penulisan dan penyampaian substansi didalam laporan kinerja dilakukan sesi bedah laporan kinerja yang melibatkan expert dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

i) Dilakukan pembahasan terhadap indikasi capaian Triwulan IV Tahun 2024 tingkat unit Eselon I Ditjen Perkeretaapian, diantaranya:

- 1) Rasio Konektivitas Antar Wilayah untuk saat ini terdapat penambahan pada pekerjaan muara satu dimana saat ini masih dalam proses TL perbaikan uji rancang bangun. Namun capaian tetap dihitung menjadi capaian;
- 2) Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI sampai dengan triwulan IV 2024 sebesar 95,02%. Telah dilakukan evaluasi antara DJKA, PT KAI serta Balai Teknik Perkeretaapian, secara berkala akan dilaksanakan evaluasi bersama terhadap hasil pengukuran serta pelaporan dari BTP;
- 3) Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident) saat ini menggunakan base 0,07 dimana terdapat 5 kejadian (anjlok) dengan km tempuh 67 juta;
- 4) Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api saat ini sebesar 96,11%;
- 5) Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api (Desember) sebanyak 506.251.459 penumpang;

6) Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api (Desember) sebanyak 69.401.018 ton barang.

6. Reviu Konsep Laporan Kinerja serta Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024.

- a) Berdasarkan timeline pelaksanaan SAKIP 2025, pada tanggal 8 – 10 Januari 2024 akan dilakukan pembahasan terhadap pembahasan dan reviu konsep LKIP 2024 untuk mengantisipasi pelaksanaan reviu oleh ITJEN pada akhir Januari 2025.
- b) Reviu dilaksanakan guna melaksanakan rekomendasi Inspektorat Jenderal untuk secara konsisten melaksanakan Reviu terhadap *draft* Laporan Kinerja.
- c) Telah dilakukan reviu pelaporan kinerja masing – masing unit kerja, diantaranya:

1) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	• <i>Policy Brief</i> SID telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian • Studi Kelayakan Pengembangan Stasiun Tanah Abang telah ditetapkan/disahkan oleh Dirjen Perkeretaapian
2	Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian (%)	100,00	100,00	100,00	• Data dukung terkait hasil rapat pembahasan Kerjasama Pembangunan Infrastruktur bersama Bagian Hukum agar dilampirkan. • Perlu dipastikan dengan Bagian Hukum terkait penetapan Addendum Perjanjian Konsesi yang masih berproses di Bagian Hukum).
3	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA (%)	92,00	95,42	104,00	• Untuk realisasi perjalanan GAPEKA sudah sesuai. • Agar di update s.d Desember 2024.
4	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu (%)	90,50	96,10	106,00	Agar di update s.d Desember 2024.
5	Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (%)	74,46	80,65	108,00	• Untuk angkutan barang posisi masih 30 Desember dan angkutan penumpang

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					sudah 31 Desember 2024 (data sementara/data harian). Analisis terkait KA Perintis dapat ditambahkan.
6	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA (%)	100,00	100,00	100,00	Sudah diuraikan NSPK yang telah mendapatkan penetapan (Menteri/Dirjen).
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	3,70	3,69	99,00	- Responden agar ditingkatkan kembali minimal 30 responden sesuai keputusan bersama (apabila tidak memungkinkan disesuaikan dengan kriteria <i>sampling</i>). - Perlu diuraikan lebih rinci terkait upaya peningkatan kinerja dengan memperhatikan hal-hal yang masih belum optimal.
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA (%)	100,00	82,11	82,00	- Penerimaan PNBPN dari TAC tidak tercapai (pada tahun 2024 pembayaran TAC untuk tahun 2023) - Agar diuraikan analisa kegagalan dan upaya peningkatan kinerja yang implementatif untuk tindak lanjut pada tahun 2025.
9	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA (%)	88,00	85,60	97,00	- Untuk nilai konsistensi masih rendah karena perlu dilakukan pengecekan kembali terkait pengisian target disesuaikan dengan realisasi pada RPD - Agar dicek kembali terkait CRO dan efisiensi
10	Nilai AKIP Direktorat LLAKA (Nilai)	83,40	82,10	98,00	Terkait upaya peningkatan kinerja terhadap poin-poin apa saja yang masih rendah dan memungkinkan untuk diperbaiki atau ditingkatkan pada tahun 2025.
11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA (Nilai)	3,00	3,00	100,00	- Perlu dilakukan identifikasi terhadap poin/komponen yang dibawah level 3,00 agar menjadi perbaikan kedepannya. - Terkait upaya peningkatan kinerja terhadap poin-poin apa saja yang masih rendah agar dirinci lebih detail.

2) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Keterhubungan Prasarana Perkeretaapian Antar Wilayah (Rasio)	0,46	0,46	100,00	• Perlu diuraikan penjelasan terkait penyelesaian Lhoksumawe. • Perlu penjelasan rencana target tahun 2025 memperhitungkan <i>baseline</i> dan penambahan target.
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II (%)	94,00	95,02	101,09	• Penetapan standar pedoman TQI diharapkan dapat diselesaikan secepatnya, termasuk penjelasan kapan pelaksanaan FGD akan dilaksanakan. • Untuk <i>baseline</i> 2025 masih menggunakan data dari KAI.
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal (%)	64,43	64,43	100,00	• Perlu disampaikan/ diuraikan terkait rencana kedepan untuk peningkatan yang akan dilakukan pada tahun 2025.
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	3,80	3,87	102,11	• Terdapat perbaikan perhitungan dengan menggunakan rata-rata capaian setiap bulannya dari aplikasi IKM. • Total responden dalam setahun adalah 121 responden dari pelayanan perizinan. • Masukan dari responden terkait peningkatan pelayanan dapat ditambahkan. • Disarankan untuk target 2025 tetap dapat ditambahkan walaupun realisasi saat ini sudah cukup tinggi.
5	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%)	100,00	100,79	100,79	• Perlu diuraikan rencana target tahun 2025.
6	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian (%)	100,00	105,26	-	• Perlu konfirmasi lanjut terkait Kriteria Desain dan Spesifikasi Teknis Prasarana apakah masuk ke dalam kategori atau tidak. • Perlu dijelaskan uraian terkait NSPK yang tidak sesuai target.
7	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat	91,76	95,41	-	• Perlu dilakukan pengecekan perhitungan terhadap nilai Efisiensi karena tidak mungkin melebihi 100%

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
	Prasarana Perkeretaapian (%)				karena menjadi data Anomali. Penghitungan CRO perlu pengecekan lebih lanjut.
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (%)	100,00	99,02	99,02	Perlu dilakukan pengecekan kembali dengan data Bagian Keuangan dan aplikasi OM SPAN/SIMPONI.
9	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	84,00	82,10	97,74	Perlu menindaklanjuti arahan Itjen dan penjelasan Analisis per komponen.
10	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Level)	3,00	3,00	100,00	Perlu dilakukan mana saja yang dibawah level 3,00 agar menjadi perbaikan kedepannya.

3) Direktorat Sarana Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitas Sarana Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti (%)	66,67	66,67	100,00	- Realisasi masih sama dengan <i>baseline</i> 2023. Perhitungan capaian belum dijelaskan secara detail. - Agar kajian/studi yang dihitung sebagai capaian adalah studi/kajian yang telah dilakukan penetapan/ pengesahan mengacu ke PM 112/2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 271 Tahun 2023. - Saat ini, 4 studi/kajian yang sudah menjadi capaian belum mendapatkan pengesahan/penetapan.
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai)	3,7	3,72	98,92	- Terdapat perbaikan perhitungan dengan menggunakan rata-rata capaian setiap bulannya. - Agar dilakukan upaya lain untuk meningkatkan responden selain dengan sosialisasi. Selain itu, perlu diuraikan secara detail dan spesifik terkait analisa kegagalan dalam pencapaian target dan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					upaya peningkatan kinerja di periode selanjutnya.
3	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara (%)	100	100,49	100,49	- Realisasi periode Tahun 2020 - 2024 telah terlaksana sebanyak 206 kegiatan dari target sebanyak 205 kegiatan pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara. - Realisasi terdiri dari baseline pada Tahun 2023 sebanyak 168 kegiatan (pengoperasian dan pengadaan) dan 38 pengoperasian SMN pada Tahun 2024. - Terdapat beberapa kegiatan pengadaan dan modifikasi yang tidak masuk dalam perhitungan capaian diantaranya: - Pengadaan 1 Unit Railways Crane - Pengadaan 1 Unit Kereta Penolong - Modifikasi 1 unit Gerbong Datar
4	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%)	82,86	119,40	-	- Menunggu <i>final</i> perhitungan di internal Direktorat Sarana Perkeretaapian. - Perlu dicek kembali perhitungan capaian karena apabila perhitungan capaian termasuk yang masih proses approval/validasi maka capaian 144,10% ini menjadi Anomali. - Agar capaian cukup menghitung sertifikat yang sudah terbit (tidak termasuk sertifikat yang masih proses).
5	Persentase Sarana Perkeretaapian yang Dilakukan Rampcheck dengan Hasil Baik/ Temuan Minor (%)	91	96	105,59	- Angka realisasi dan capaian agar menggunakan 2 angka di belakang desimal. - Agar dilakukan pendetailan perhitungan dan analisis terhadap hasil <i>rampcheck</i> nataru dan <i>rampcheck</i> tahun baru.
6	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana	100	100	-	Menunggu <i>final</i> perhitungan di internal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
	Perkeretaapian (%)				Direktorat Sarana Perkeretaapian. Agar dicek kembali terkait <i>output</i> hasil studi yang akan dilakukan penetapan/pengesahan.
7	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian (%)	86,40	87,86	-	- Menunggu <i>final</i> perhitungan di internal Direktorat Sarana Perkeretaapian. - Perlu dilakukan perhitungan kembali terhadap capaian masing-masing parameter penilaian NKA sesuai kondisi <i>real</i> pencapaian di akhir Tahun 2024.
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Sarana Perkeretaapian (%)	100	105,15	105,15	- Rencana tindak lanjut periode/ke depannya tidak normatif namun dapat lebih dispesifikan. - Akan dicek kembali dengan Bagian keuangan dan aplikasi OM SPAN/SIMPONI.
9	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai)	80,60	81,20	100,74	Rencana tindak lanjut periode/ke depannya agar lebih detail dan spesifik menjelaskan rencana upaya ke depan (tidak normatif).
10	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Level)	3	3	100	Rekomendasi dari Surat SPIP agar ditindaklanjuti secara mendetail dan spesifik.

4) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian/SM KP (%)	87,50	87,50	100,00	- Perlu diuraikan lebih detail penjelasan hambatan apa saja yang ditemui pada bagian Analisis. - Upaya Peningkatan kinerja/rencana tindak lanjut agar lebih detail dan dapat dilaksanakan pada Tahun 2025 - Agar dilengkapi analisa terhadap penyesuaian strategi/kebijakan/kegiatan/anggaran - Agar dilengkapi analisa terkait crosscutting/hub kerja dengan unit kerja lain

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
2	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian (%)	84,00	82,32	98,00	• Untuk data dukung penghitungan kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian akan disampaikan melalui Nota Dinas. • Agar dilengkapi analisa terhadap penyesuaian strategi/kebijakan/kegiatan/anggaran
3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian (%)	182,72	182,72	100,00	• Data dukung akan disampaikan dalam bentuk Nota Dinas dan Rekapitulasi. • Agar dilengkapi analisa terhadap penyesuaian strategi/kebijakan/kegiatan/anggaran • Agar dilengkapi analisa terkait crosscutting/hub kerja dengan unit kerja lain
4	Persentase Rekomendasi Keselamatan dan Keamanan yang Menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah Ditindaklanjuti (%)	72,00	73,20	101,66	Data dukung rekomendasi yang telah ditindaklanjuti agar dilengkapi dengan surat tindaklanjut dari Stakeholder dan Nota Dinas dan Data Rekapitulasi dari Subdit.
5	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian (%)	100,00	100,00	100,00	• Perlu dijelaskan upaya yang sudah dilakukan terkait analisis keberhasilan serta penjelasan mengenai rencana tindak lanjut kedepannya. • Agar diuraikan NSPK yang telah disusun dan ditetapkan pada Tahun 2024 (PM, Perdirjen dan SOP).
6	Persentase Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian (%)	66,67	66,67	100,00	• Diuraikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 apa saja dan ditambahkan rencana kedepannya termasuk fitur akreditasi walaupun IKK nya tidak ada karena akan digabung. • Agar dilengkapi analisa terkait crosscutting/hub kerja dengan unit kerja lain
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat	3,85	3,83	99,48	• Perlu dijelaskan lebih detail mengapa IKK IKM ini tidak tercapai, termasuk upaya peningkatan kinerja apa saja yang akan dilakukan.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
	Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)				• Standar Responden yang dapat diacu yaitu minimal 30 Responden namun menyesuaikan dengan lingkupnya. • Agar dilengkapi analisa terkait crosscutting/hub kerja dengan unit kerja lain
8	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (%)	90,00	86,32	95,91	• Penghitungan realisasi anggaran tetap memperhitungkan Pagu termasuk <i>Automatic Adjustment</i>. • Agar dicek kembali terkait perhitungan CRO dan Efisiensi.
9	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (%)	100,00	113,21	113,21	• Terdapat Anomali capaian kinerja yakni 113,21% yang disebabkan karena terdapat usulan dari Dinas Perhubungan untuk permohonan baru/perpanjangan dan telah dilaksanakan pengujian pada Desember 2024 (usulan Dinas Perhubungan tersebut setelah Revisi PK ditandatangani). • Perlu dilakukan pengecekan angka pasti dengan Bagian Keuangan. • Perlu diuraikan justifikasi terhadap data anomali capaian PNBP tersebut.
10	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	83,35	83,65	100,35	Terhadap upaya peningkatan kinerja agar diuraikan berdasarkan komponen pada LKE SAKIP yang mendapatkan poin rendah.
11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Level)	3,00	3,00	100,00	Terhadap upaya peningkatan kinerja agar diuraikan berdasarkan Kertas Kerja Penilaian SPIP yang mendapatkan poin rendah.

5) BTP Kelas I Jakarta

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (Rasio)	0,62	0,62	100,00	• Ditambahkan untuk upaya peningkatan seperti kegiatan penertiban lahan, reviu design, dan lainnya. • Agar dikaji potensi konektivitas ke terminal tipe A belum ada datanya. Saat ini data yang tersedia antara KRL dengan LRT, KRL dengan MRT dan lainnya.
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (%)	90,8	91,51	100,78	• Sementara untuk TQI masih menggunakan data periode III • Kegiatan fasop bukan perpanjangan MYC namun seperti garansi s.d januari. • Terkait kegiatan pendukung IMO masuk ke kegiatan pendukung keselamatan. • Laporan IMO agar dapat di share ke Bagian Perencanaan
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (%)	98,88	98,88	100,00	• Tidak terdapat pekerjaan peningkatan sehingga berimplikasi tidak ada penambahan Fasop andal di Tahun 2024 (menggunakan <i>baseline</i> 2023).
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (%)	82,51	81,7	99,02	• Penumpang masih data sementara per November, indikasi di akhir tahun masih ada selisih 1%. • Untuk angkutan barang masih data sementara per November 2024.
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (%)	100	99,83	99,83	• Terdapat 1 kejadian kecelakaan (anjlokkan di bulan April 2024). • Terkait upaya peningkatan kinerja agar diprioritaskan untuk uraian penanganan kecelakaan seputar sarana, prasarana, dan SDM. Sedangkan terkait perlintasan sebiang diurutan terakhir.
6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (%)	82	122,42	-	• Perlu dilakukan perhitungan kembali terhadap capaian masing-masing parameter penilaian NKA sesuai

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					kondisi <i>real</i> pencapaian di akhir Tahun 2024. Agar capture/update per tanggal 15 Januari 2025.
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (%)	100	34,82	34,82	- Agar dicek kembali dengan Bagian Keuangan dan aplikasi OM SPAN/SIMPONI. - Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target PNBP antara lain bongkaran, lelang mobil, pemanfaatan aset yang batal karena kendala koordinasi.
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (Nilai)	81	78,6	97,04	Analisis dapat mengacu uraian evaluasi internal, sedangkan upaya dapat diacu rekomendasi berdasarkan surat Dirjen Perkeretaapian.
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (Nilai)	3	3	100	Analisis dapat melihat sub unsur yang kurang nilainya, sedangkan upaya dapat diacu dari rekomendasi berdasarkan surat Sesditjen.

6) BTP Kelas I Bandung

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (Rasio)	0,55	0,55	100%	Terkait kegiatan AMDAL agar diuraikan lebih spesifik terkait kendalanya
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (%)	88	88,38	100%	Agar memasukan daftar wilayah pada BTP Bandung yang sesuai dengan TQI kategori I dan II
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (%)	70,65	70,65	100%	Telah dilakukan switch over segmen Haurpugur-Cicalengka pada tanggal 31 Desember 2024, sehingga jalur ganda Kiaracondong - Cicalengka telah beroperasi sepenuhnya
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (%)	53,4	55,55	105%	- Agar dilengkapi data angkutan penumpang dan angkutan barang bulan Oktober 2024 - Agar dicek kembali kepastian nilai jumlah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					angkutan barang dan penumpang
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (%)	100	98,44	98%	Agar diuraikan lebih rinci terkait 2 kecelakaan yang terjadi di Tahun 2024 termasuk hasil investigasinya untuk tindakan lanjut peningkatan keselamatan kedepannya.
6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (%)	82	90,25	110%	Agar dilakukan pengecekan ulang tidak menggunakan berdasarkan aplikasi SMART Kemenkeu, melainkan dengan metode penghitungan Manual sesuai template Excel semula.
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (Nilai)	81,75	80,00	98%	Agar .dapat menindaklanjuti komponen yang masih rendah sesuai arahan Itjen
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (Nilai)	3	3,866	100%	Terhadap upaya peningkatan kinerja agar diuraikan berdasarkan Kertas Kerja Penilaian SPIP yang mendapatkan poin rendah.

7) BTP Kelas I Semarang

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (Rasio)	0,42	0,42	100	- Rasio diperoleh dari capaian <i>baseline</i> Tahun 2023 dimana jalur yang telah terhubung sebanyak 15 dari 36 titik konektivitas yang direncanakan terhubung. Pada Tahun 2024 tidak ada penambahan rasio konektivitas - Reaktivasi Semarang Tawang dan Tanjung Mas masih belum beroperasi (tahap pengujian) dan diusulkan kegiatan pengujian pada Tahun 2025
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (%)	99,52	99,46	99,94	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI menggunakan pengukuran jalur periode jalur III Tahun 2024 dimana jalur yang terukur sepanjang 1.640,300 km dari total panjang jalur sepanjang 1.649,124 km

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					• Perlu adanya pemilahan lokasi yang tidak memenuhi sehingga menjadi prioritas peningkatan pada 2025
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (%)	87,5	87,5	100	• Total persinyalandi yang telah terbangun sebanyak 120 unit dengan rincian (105 sinyal elektrik, 15 sinyal mekanik) • Rekomendasi tindak lanjut bukan menjelaskan tentang progres kegiatan(lelang) namun perlu menjelaskan langkah percepatan
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (%)	164,57	169,79	103,17	• Realisasi Tahun 2020 - 2024 sebanyak 83.894.121 penumpang dan 11.718.192 ton barang. • Capaian berasal dari jumlah prosentase angkutan penumpang dan angkutan barang yang disandingkan dengan target Renstra 2020 - 2024 • Capaian penumpang agar dibuatkan kumulatif bukan per Triwulan IV saja • Rekomendasi tindak lanjut agar menambahkan hasil kajian, KA printis dioptimalkan, tambahkan upaya peningkatan untuk angkutan barang • Realisasi angkutan barang agar dipisah untuk mempermudah analisis
5	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	100	100	100	• Frekuensi perjalanan kereta api perintis telah terealisasi sebanyak 1.464 dari target 1.464 frekuensi perjalanan kereta api • Rekomendasi tindak lanjut agar menambahkan hasil kajian
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (%)	100	100	100	• Tidak ada kejadian kecelakaan kereta api periode Tahun 2024 sehingga analisis capaian agar fokus kelaikan operasi, sarpras dan SDM.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
7	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (%)	81	76,62	76,62	Perlu dilakukan perhitungan kembali terhadap capaian masing-masing parameter penilaian NKA sesuai kondisi <i>real</i> pencapaian di akhir Tahun 2024.
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (%)	100	103	103	Data sudah sesuai realisasi pendapatan PNPB sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp723.653.476,00 dari target sebesar Rp701.994.916,00.
9	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (Nilai)	81	81,7	101	Rencana tindak lanjut periode/kedepannya agar lebih detail dan spesifik menjelaskan rencana upaya ke depan (tidak normatif).
10	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (Nilai)	3	3	100	- Rekomendasi tindak lanjut agar diuraikan dibagian kewenangan balai saja - Rekomendasi dari Surat SPIP agar ditindaklanjuti secara mendetail dan spesifik.

8) BTP Kelas I Surabaya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (Rasio)	0,375	0,375	100,00	Terkait konektivitas dengan Terminal Tipe A akan dimasukan di Tahun 2025.
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (%)	98,4	98,02	99,61	Agar diuraikan kendala dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan secara rinci.
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (%)	37,9	37,9	100,00	Agar dimasukan uraian kegiatan pendukung berupa peningkatan Sistem Telekomunikasi di segmen Kertosono-Talun.
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai	152	157	103,29	Menggunakan data per-akhir November dan untuk bulan Desember masih menggunakan prognosa.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
	Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (%)				Agar untuk LKIP 2024, data bulan Desember dapat dilakukan pemutakhiran terlebih dahulu
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (%)	100	98,71	98,71	- Menggunakan data per-akhir November dan untuk bulan Desember masih menggunakan prognosa. - Agar untuk LKIP 2024, data bulan Desember dapat dilakukan pemutakhiran terlebih dahulu.
6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (%)	88,5	56,28	-	Perlu dilakukan perhitungan kembali terhadap capaian masing-masing parameter penilaian NKA sesuai kondisi <i>real</i> pencapaian di akhir Tahun 2024.
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (%)	100	100	110	Agar dicek kembali dengan data Bagian keuangan dan aplikasi OM SPAN/SIMPONI.
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (Nilai)	82,5	83,35	101,03	Agar dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi tim Inspektorat Jenderal.
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (Nilai)	3	3	100	Rekomendasi dari Surat SPIP agar ditindaklanjuti secara mendetail dan spesifik.

9) BTP Kelas I Medan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (Rasio)	0,50	-	100.00	- Kegiatan Aceh masih menunggu pengujian, agar dimasukan ke dalam capaian dan disampaikan uraian progresnya. - Upaya peningkatan kinerja kedepannya untuk yang belum terhubung bisa berupa koordinasi, perencanaan teknis dan lainnya.
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah	91,5	95,33	104,20	- Sudah menggunakan data periode III. - Analisis data segmen mana saja yang butuh peningkatan dan menjadi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)				rekomendasi di 2025 bisa menjadi perawatan atau peningkatan Hasil analisa pada kegiatan pendukung pada dapat di spesifikasikan/didetallkan sebagai upaya peningkatan kedepanya.
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)	55,35	55,35	100,00	- Kegiatan tahun 2025 agar dicek untuk upaya peningkatan di periode berikutnya. - Analisa keberhasilan atau kegagalan agar dapat dispesifikan.
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)	59,8	60,13	102,00	- Penyajianya agar dapat di sesuaikan/diperingskas agar dapat dipahami - Perlu pemilahan antara angkutan barang dan angkutan penumpang. - Agar data diupdate menggunakan data Desember 2024.
5	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)	100	-	-	- KA Cut Mutia tidak beroperasi dari September s.d November 2024, serta beroperasi kembali pada 24 Desember 2024. - Untuk memperhatikan kembali Kontrak Perintis serta konfirmasi program pada September dan Desember.
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik PerkeretaapianKelas I Medan (%)	100	92,50	92,50	- Terdapat 2 kali anjlokkan KA pada bulan Februari dan bulan Maret 2024. - Agar analisis fokus kepada analisis SDM kemudian analisis terhadap kecelakaan.
7	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik PerkeretaapianKelas I Medan (%)	85,58	72,63	84,86	- Agar koordinasi dengan Bagian Keuangan terkait data yang terupdate. - Agar capture/update per tanggal 15 januari 2025 - Nilai efisiensi masih ditemukenali anomali, perlu dilakukan pengecekan kembali
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)	100	100	100	Agar dilakukan update terkait nilai PNBP per TW IV 2024.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
9	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (Nilai)	81,7	80,35	98,35	- Rencana tindak lanjut periode/ke depannya agar lebih detail dan spesifik menjelaskan rencana upaya ke depan (tidak normatif). - Rekomendasi ITJEN dapat dimasukkan ke dalam upaya peningkatan kinerja.
10	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (Level)	3	3	100	Analisis dapat melihat sub unsur yang kurang nilainya, sedangkan upaya dapat diacu dari rekomendasi berdasarkan surat setditjen

10)BTP Kelas II Padang

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (Rasio)	0,5	0,5	100	Dilakukan revisi PK menjadi 0,5 dari sebelumnya target 0,63 dikarenakan kegiatan Sawahlunto tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan PT KAI tidak mampu memenuhi data dukung yang dibutuhkan.
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (%)	78	84,4	108,20	- Lokasi yang tidak memenuhi segmen mana dan beberapa lokasi sehingga menjadi prioritas ditingkatkan pada 2025 - Usulan perawatan IMO kedepannya agar dianalisis segmen mana saja yang diprioritaskan Tahun 2025.
3	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (%)	114,79	114,18	99,46	- Penyajian data capaian penumpang agar disajikan secara kumulatif dalam 1 tahun. - Pada Analisis dan upaya peningkatan kinerja agar dipisahkan penyajian data angkutan penumpang dan angkutan barang. - Agar diperhatikan kembali penghitungan capaiannya karena Realisasi TW IV 2024 114,18%.
4	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (%)	100	100	100	Uraian pembatalan keberangkatan KA Perintis agar dijelaskan justifikasinya pada analisis keberhasilan/kegagalan dan menjadi bahan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					rekomendasi peningkatan kinerja kedepannya
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (%)	100	100	100	Perlu diuraikan secara rinci daftar kecelakaan yang terjadi selama Tahun 2024.
6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (%)	86	31,37	33,79	• CRO dari tim Satker agar dilakukan pembaharuan/<i>update</i> • Terkait nilai Efisiensi perlu dilakukan pengecekan ulang bersama Tim Satker, karena seharusnya tidak minuse. • Agar capture/update per tanggal 15 januari
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (%)	100	105,65	105,65	• Perlu diuraikan secara rinci pada Analisa Keberhasilan/Kegagalan terkait nilai penerimaan PNBP tersebut. • Agar menggunakan angka PNBP sesuai dengan data dari Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian.
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (Nilai)	82,50	79,60	96,48	Agar dilakukan perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya sesuai rekomendasi Surat Setditjen Perkeretaapian.
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (Nilai)	3,00	3,00	100,00	Analisis keberhasilan atau kegagalan agar memperhatikan sub unsur yang kurang nilainya, sedangkan upaya peningkatan kinerja dapat mengacu pada rekomendasi berdasarkan Surat Setditjen Perkeretaapian.

11)BTP Kelas II Palembang

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (Rasio)	0,71	0,71	100,00	• Tidak ada dukungan anggaran dan tidak ada kegiatan rutin/swakelola yang mendukung indikator kegiatan rasio konektivitas. sebagai contoh minitoring rapat dan lainnya. • Upaya peningkatan berupa kegiatan rutin/swakelola pendukung. Untuk kegiatan kajian/studi yang mendukung pembangunan/

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					pengembangan perkeretaapian di BTP tidak dianggarkan di tahun 2025. Agar dilakukan pendetailan upaya peningkatan kinerja periode berikutnya pada LKIP 2024 termasuk ditambahkan informasi terkait dukungan anggaran.
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (%)	92,1	93,03	101,01	- Menggunakan periode III. - Agar diinventarisasi segmen mana saja yang kualitas jalurnya masih rendah untuk diprioritaskan ditingkatkan di tahun 2025/tahun selanjutnya.
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian (%)	27,71	27,71	100	- Agar diuraikan kendala terkait usulan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada bagian analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja. - Agar diuraikan hasil koordinasi dengan operator beberapa stasiun yang dilakukan konsesi guna mendukung pencapaian indikator.
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (%)	100	103,36	103,36	- Agar dapat dijelaskan secara rinci terkait hal-hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target, seperti: penamabahan moda, penyesuaian tarif dan lainnya - Agar analisa keberhasilan pencapaian target dan upaya peningkatan kinerja untuk angkutan penumpang dan angkutan barang dipisah.
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik	100	100	100,00	Agar diuraikan faktor-faktor pendukung pencapaian target (sarana/prasarana/ lalu lintas/SDM).

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
	PerkeretaapianKelas II Palembang (%)				
6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik PerkeretaapianKelas II Palembang (%)	93,9	76,74	-	- Perlu dilakukan perhitungan kembali terhadap capaian masing-masing parameter penilaian NKA sesuai kondisi <i>real</i> pencapaian di akhir Tahun 2024. - Agar <i>capture/update</i> per tanggal 15 januari 2025.
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (%)	100	100	100,00	Perlu dilakukan pengecekan kembali dengan data Bagian Keuangan dan aplikasi OM SPAN/SIMPONI.
8	Nilai AKIP Balai Teknik PerkeretaapianKelas II Palembang (Nilai)	81,9	81,50	99,51	Analisis dapat mengacu uraian evaluasi internal, sedangkan upaya dapat diacu rekomendasi berdasarkan surat Sesditjen.
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik PerkeretaapianKelas II Palembang (Nilai)	3	3	100,00	Analisis dapat melihat sub unsur yang kurang nilainya, sedangkan upaya dapat diacu dari rekomendasi berdasarkan surat Sesditjen.

12) Balai Pengujian Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%)	100	107,91	109,41	- Realisasi pemenuhan pengujian kelaikan sarana perkeretaapian periode 2020 - 2024 sebanyak 47.047 unit. Capaian diperoleh berdasarkan realisasi periode 2020 - 2024 yang dibandingkan dengan target Renstra sebanyak 43.000 unit. - Terkait upaya peningkatan kinerja masing-masing unit kerja dapat memilah strategi, aktivitas, anggaran, dan atau jabatan/pegawai. - Meminimalisir penggunaan aplikasi, karena tahun depan hanya 1 aplikasi Superapps lebih kepada

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					fitur/modul layanan pengujian karena sudah menjadi kebijakan di Kemenhub.
2	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian (%)	65,66	69,22	108,36	- Terdapat kesalahan perhitungan capaian. Total realisasi Tahun 2020 - 2024 sebanyak 39.134 orang dari target Renstra 2020 - 2024 sebanyak 55.000 orang. - Data dukung SDM selain Nota Dinas bisa berupa rekapan aplikasi - Upaya peningkatan kinerja pada hal yang sifatnya normatif bisa dispesifikkan
3	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%)	98,82	101,06	102,27	- Total realisasi Tahun 2020 - 2024 sebanyak 1.137 unit dan 4.605,58 km dari target Renstra 2020 - 2024 sebanyak 990 unit dan 5.277 km. - Upaya peningkatan kinerja kedepannya agar terkait dengan kebijakan lebih kepada keputusan Dirjen/Kabai yang telah ditetapkan
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai)	3,66	3,86	105,46	Realisasi capaian berdasarkan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat PPTB dengan jumlah responden 3.930 Orang.
5	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian (%)	96,50	85,94	88,42	- Terdapat penyesuaian Perhitungan NKA sehingga capaian menjadi 85,33% dengan rincian sebagai berikut: - Penyerapan: 93,45% - Konsistensi: 99,97% - CRO: 100% - Efisiensi: 50,96%
6	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian (%)	100	102,80	102,80	- Realiasi pendapatan PNBP sampai dengan Desember sebesar Rp64.113.868.630,00 dari target sebesar Rp62.370.326.000,00 - Perlu dilakukan <i>cross check</i> kembali dengan bagian keuangan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
7	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai)	82	80,30	97,93	- Rencana tindak lanjut periode/ke depannya agar lebih detail dan spesifik menjelaskan rencana upaya ke depan (tidak normatif). - Rekomendasi ITJEN dapat dimasukkan ke dalam upaya peningkatan kinerja.
8	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai)	3	3	100	- Rekomendasi dari Surat SPIP agar ditindaklanjuti secara mendetail dan spesifik - Upaya kegiatan Sosialisasi lebih kepada kegiatan

13) Balai Perawatan Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang Siap Operasi (%)	100	97,79	-	- Agar dilakukan pengecekan dan perhitungan ulang - Jika belum selesai butuh justifikasi waktu misal tenaga ahli, waktu agar diuraikan - Angka capaian kinerja agar dicek lanjut
2	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian (%)	91	83,12	-	- Perlu dilakukan perhitungan kembali terhadap capaian masing-masing parameter penilaian NKA sesuai kondisi <i>real</i> pencapaian di akhir Tahun 2024. - Terkait konsistensi seharusnya tidak 100% karena tingkat konsistensi pada bulan juli s.d desember tidak 100%. - CRO ada terdampak AA/belum terealisasi (rambu K3) agar dijelaskan apa yang tidak terealisasi
3	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian (%)	100	100,45	100,45	- Agar dicek kembali dengan data Bagian keuangan dan aplikasi OM SPAN/SIMPONI. - Rekomendasi tindak lanjut agar lebih spesifik untuk kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2025
4	Nilai AKIP Balai Perawatan	82,50	81	98,18	Agar dilakukan perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya sesuai

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
	Perkeretaapian (%)				rekomendasi Surat Setditjen Perkeretaapian.
5	Tingkat Maturitas SPIP Balai Perawatan Perkeretaapian (Level)	3	3	100,00	Analisis keberhasilan atau kegagalan agar memperhatikan sub unsur yang kurang nilainya, sedangkan upaya peningkatn kinerja dapat mengacu pada rekomendasi berdasarkan Surat Setditjen Perkeretaapian.

14)BPKARS Sumsel

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	85,89	86,78	101,04	Jumlah PNP sampai dengan Triwulan IV 2024 sebanyak 4.350.217 penumpang dengan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai)	3,57	3,58	100,28	- Reponden lebih banyak manual, untuk sistem responden sedikit. - Total responden selama TW IV sebanyak 4.596
3	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tepat Waktu (%)	99	99,64	100,64	Data OTP telah menggunakan rata-rata realisasi OTP dalam setahun
4	Persentase Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	Total jumlah gangguan s.d Des 2024 sebanyak 132 dan telah selesai ditindaklanjuti
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	100	100	100	<i>Zero Accident</i>

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	81,7	70,88	86,75	• agar dicek lagi di span dan perhitungannya agar dikoordinasikan • karna ada AA, maka CRO tidak 100% (koordinasi dengan Tim Keuangan)
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	100	97,76	97,76	• Terdapat permasalahan status aset target semester I 2025 sudah bisa berjalan • Nilai PNBP sebesar Rp 27.703.093.098,-
8	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai)	79	80,35	101,7	• rekomendasi mengacu pada surat setditjen dan parameter LKE yang belum maksimal
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai)	3	3	100	• rekomendasi mengacu pada surat setditjen

15) BPKA Sulsel

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan (Rasio)	0,24	0,24	100	• Pada analisis keberhasilan/ hambatan agar dijelaskan wilayah mana saja yang belum terkoneksi di Pulau Sulawesi. • Upaya peningkatan kinerja agar dijelaskan secara rinci progresnya. • Upaya peningkatan kinerja merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 sebagai contoh dapat berupa penyiapan dokumen teknis, rapat koordinasi teknis, pemantauan dimasing-masing wilayah, dan lainnya. • Perlu dipastikan terdapat kegiatan pendukung/swakelola untuk indikator kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
2	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan (%)	100	100	100	- Upaya peningkata kinerja merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 sebagai contoh usulan penyiapan anggaran untuk mendukung penyelesaian/kendala yang ada. - Analisis keberhasilan/hambatan dapat dijelaskan secara rinci kendala dan dampak yang dihasilkan untuk mendukung justifikasi prioritas dianggarkan di tahun 2026. - Perlu dipastikan terdapat kegiatan pendukung/swakelola untuk indikator kegiatan
3	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (%)	100	113	-	- Analisis keberhasilan dapat dijelaskan secara rinci dan melampirkan data dukung yang valid. - Capaian kinerja penumpang agar dibuatkan secara kumulatif. - Agar dicek kembali manual indikator.
4	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu (%)	94,5	96,44	102	- Analisis keberhasilan dapat dijelaskan secara rinci waktu pelaksanaan. - Analisis kendala/hambatan agar dijelaskan secara kumulatif/ditampilkan hambatan di triwulan sebelumnya.
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Nilai)	3,1	3,22	103,22	- Survei IKM masih dilakukan manual. - Upaya peningkatan kinerja selanjutnya dapat diusulkan menggunakan aplikasi, peningkatan ticketing, layanan yang perlu ditingkatkan, dan lainnya.
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (%)	100	100	100	Analisis hambatan dapat dijelaskan secara rinci kendalanya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
7	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (%)	88,93	80,50	-	- CRO perlu dicek kembali dikarenakan gap besar dengan realisasi penyerapan anggaran. Agar melakukan penyesuaian target dan realisasi pada Januari - Desember 2024 pada aplikasi SAKTI (koordinasi dengan Satker) - Penyerapan anggaran merupakan pagu total dan termasuk AA. Cek kembali realisasi pagu pada aplikasi OM SPAN. - Analisis keberhasilan/kegagalan agar diuraikan secara detil masing-masing variabel NKA.
8	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Nilai)	80	80,25	100,31	Agar dilakukan perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya sesuai rekomendasi Surat Setditjen Perkeretaapian.
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Nilai)	3	3	100	Analisis keberhasilan atau kegagalan agar memperhatikan sub unsur yang kurang nilainya, sedangkan upaya peningkatan kinerja dapat mengacu pada rekomendasi berdasarkan Surat Setditjen Perkeretaapian.
10	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (%)	100	100	100	Agar dicek kembali dengan data Bagian keuangan dan aplikasi OM SPAN/SIMPONI.

D. KESIMPULAN

1. Rapat dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian kinerja dan revidi laporan kinerja Tahun 2024 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Setiap unit kerja untuk dapat menyampaikan data dukung berupa uraian data capaian, analisis keberhasilan/kegagalan dan upaya peningkatan kinerja Tahun berikutnya termasuk Nota Dinas kepada Setditjen yang ditembuskan kepada Bagian Perencanaan sebagai komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja pada setiap triwulanya.
3. Setelah laporan kinerja dan laporan lainnya sudah selesai penulisan/pembahasan/final untuk dapat dilakukan pengecekan kembali kalimat – kalimat sesuai dengan kaidah/pedoman pada web/aplikasi yang telah disediakan seperti pada link <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> dan <https://pasti.kemdikbud.go.id/>
4. Diharapkan masing – masing unit kerja untuk dapat mengecek kembali dan melengkapi pengisian pada aplikasi kinerja Kementerian PANRB (e-SAKIP revidi), Kementerian Perhubungan (e-Performance) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Aplikasi).
5. Penyusunan laporan kinerja selain mengacu kepada pedoman SAKIP/Permenhub Nomor 85 Tahun 2020 juga dilakukan *beanchmarking* terhadap laporan kinerja dari Kemenkeu dan PUPR.
6. Masing – masing unit kerja untuk dapat menindaklanjuti catatan sesuai dengan hasil revidi.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

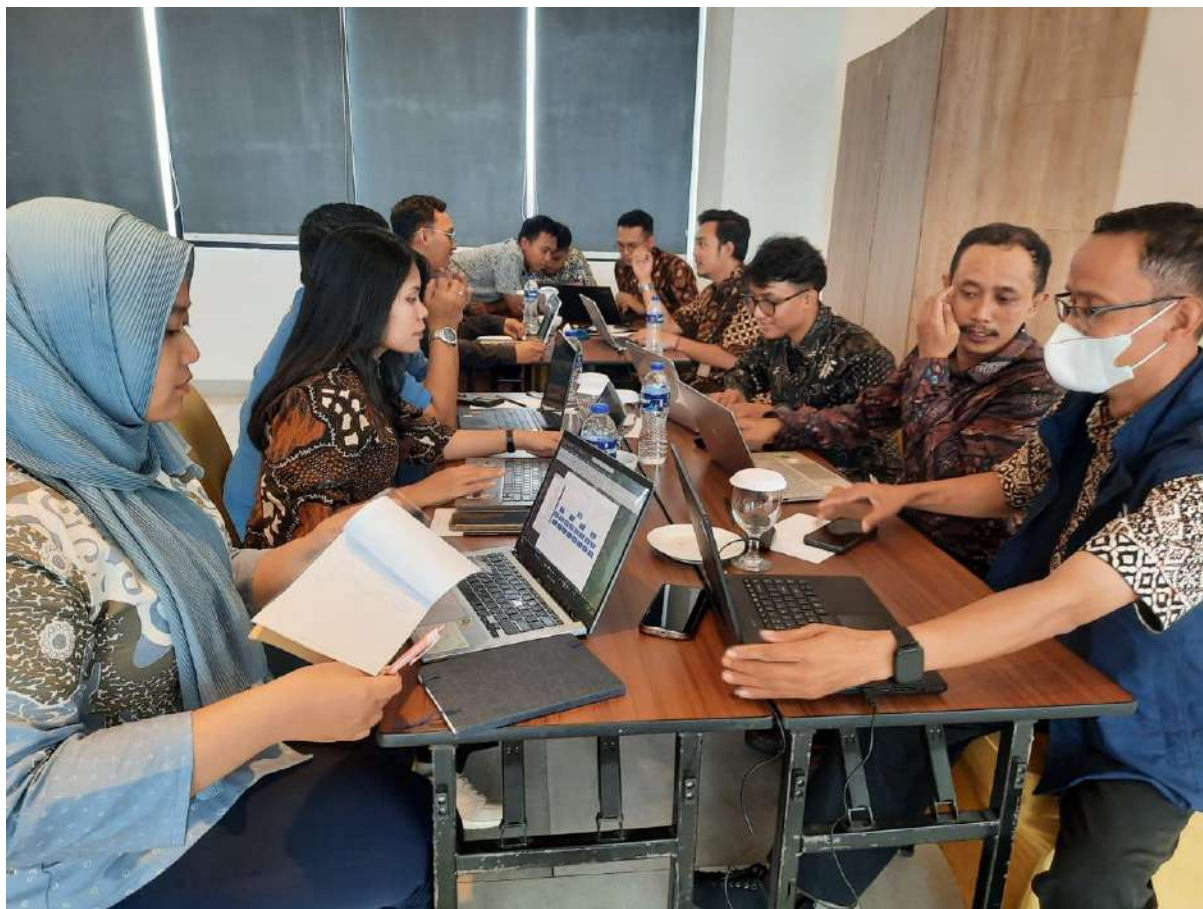
Jakarta, 11 Januari 2025

Notulensi



(Tim Notulensi)

DOKUMENTASI







**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenuh.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenuh.go.id

NOTA DINAS

Nomor 0042/K1.1/I/2025

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari : Kepala Bagian Perencanaan
Hal : Tindak Lanjut Pemenuhan Pelaporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan IV 2024
Tanggal : 17 Januari 2025

Berdasarkan hasil rapat pembahasan capaian kinerja dan reviu penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 8 s.d 10 Januari 2025 bahwa masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diminta untuk menyampaikan uraian dan data dukung capaian kinerja Tahun 2024 sesuai bidang tugas. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir dilaporkan uraian dan data dukung capaian kinerja Triwulan IV 2024 terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perencanaan mencakup indikator kinerja berikut:

1. Presentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti;
2. Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian;
3. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Uraian dan data dukung capaian kinerja tersebut akan diproses lanjut sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV 2024 dan Laporan Kinerja Tahun 2024 mengacu pada PM 85 Tahun 2020.

Atas perhatian dan arahan lanjut Ibu Sesditjen diucapkan terima kasih.

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001



REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemenhub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0054/K1.2/I/2025

Yth. : Kepala Bagian Perencanaan
Dari : Kepala Bagian Keuangan
Hal : Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2024 Bagian Keuangan
Tanggal : 17 Januari 2025

Menunjuk surat Undangan Rapat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/1/1/K1/DJKA/2025 tanggal 3 Januari 2025 perihal Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Penyusunan Laporan Kinerja serta Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja, berdasarkan hasil rapat pembahasan sebagaimana Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian bahwa tiap-tiap unit kerja diminta untuk melengkapi isian pelaporan kinerja dan khusus untuk masing-masing bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar menyampaikan data dukung capaian kinerja periode Triwulan IV Tahun 2024 dilengkapi analisis keberhasilan/kegagalan serta rekomendasi/upaya peningkatan kinerja kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Keuangan khususnya terkait Data Realisasi PNBPN dan Realisasi Belanja bersama ini terlampir dilaporkan dokumen pendukung monitoring dan evaluasi berkala berdasarkan referensi aplikasi terkait sebagai berikut :

1. Laporan Target & Realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2024 berdasarkan aplikasi sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) DJA Kemenkeu, sebagai data atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8 – Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian; dan
2. Laporan Realisasi Belanja berdasarkan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) DJPB Kemenkeu, sebagai data atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 7 – Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Irvan Ariestiana
NIP 197906232005021002

Tembusan :
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemhub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 47/KI-3 / 1 / 2025

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari : Kepala Bagian Hukum
Hal : Data Dukung penyusunan Laporan Kinerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2024
Tanggal : 17 Januari 2025

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.205/1/1/K1/DJKA/2025 tanggal 3 Januari 2025 perihal Undangan Rapat Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja, disampaikan bahwa Bagian Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung capaian indikator kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yaitu presentase capaian publikasi sosial media, capaian publikasi oleh media online, presentase capaian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan yang sedang dalam pembahasan ataupun yang akan dibahas, presentase kegiatan pendampingan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan data dukung capaian kinerja Triwulan III dari Bagian Hukum untuk mendukung indikator kinerja dimaksud.

Atas perkenan arahan dan petunjuk lanjut diucapkan terima kasih.

Zen Hadiano, S. H., M. H.
NIP 197907042005011005

Tembusan :
Kepala Bagian Perencanaan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 077/K4/11/2025

Kepada : Kepala Bagian Perencanaan
Dari : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum
Hal : Penyampaian Data Dukung Penyusunan Laporan Kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024
Tanggal : 16 Januari 2025

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/1/1/K1/DJKA Tanggal 3 Januari 2025 hal Undangan Rapat, disampaikan bahwa Bagian SDM dan Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung penyusunan laporan kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan melampirkan Rekap Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian, Data Dukung IKK Pelayanan Perkantoran serta Data Pegawai Jabatan Fungsional (JF).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan data dukung kelengkapan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Indriati, SE, MM
NIP 198106072005022001

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian